



**EMBRACING MOMENTUM OF GROWTH
THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

EMBRACING MOMENTUM OF GROWTH THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MENYONGSONG MOMENTUM PERTUMBUHAN MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, proyeksi usaha yang ditampilkan dalam bab analisis dan pembahasan manajemen, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis di bidang pengembangan dan pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Ada kalanya kata "IIF" dan "Perusahaan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

Disclaimer

This Annual Report contains statements on financial conditions, operational results, projections on business presented in the management discussion and analysis chapter, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, excluding historical matters.

Such statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events related to the Company and the business environment where the Company conducts its business. The Company offers no guarantee that all information presented herein will bring about specific results as expected.

This Annual Report also contains the word "Company", hereinafter referred to as PT Indonesia Infrastructure Finance, as the company that operates business in the development and financing of commercially viable infrastructure projects. The word "IIF" and "the Company" are occasionally used to simplify and refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.

Bagi IIF, tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah melakukan serangkaian kebijakan strategis, antara lain fokus pada *core business* melalui optimalisasi produk-produk pembiayaan, efisiensi beban usaha, dan pemanfaatan peluang bisnis baru. Berbagai upaya tersebut diterapkan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan bisnis yang positif dan memperkuat posisi sebagai katalis dan *enabler* dalam pembangunan infrastruktur nasional.

IIF juga memiliki keunggulan berupa penerapan aspek Sosial dan Lingkungan dalam skema pembiayaan proyek infrastruktur. Dengan adanya keunggulan ini, IIF optimis mampu merangkul momentum pertumbuhan bisnis sekaligus menjadi perusahaan yang terdepan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

2019 was a challenging year for IIF, in which we have to exert our best efforts to address numerous obstacles through the implementation of strategic policies. Among which, we strengthened our focus on core business by optimizing financing products, streamlining operating expenses, and utilizing new business opportunities. These strategies were carried out in order to drive a positive business growth and strengthen IIF's position as a catalyst and enabler in the National infrastructure development.

IIF has a unique competitive advantage within the infrastructure financing sector, which is the implementation of Social and Environmental Safeguards. With this competitive advantage, IIF is confident to be able to utilize this positive growth momentum to achieve a stronger position as a leading Indonesian infrastructure development based on sustainable development.



Daftar Isi

Table of Contents

- 1 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer
- 1 Penjelasan Tema
Theme Explanation
- 2 Daftar Isi
Table of Content

01 Kilas Kinerja

Performance Highlights

- 6 Ikhtisar Data Keuangan penting
Financial Highlights
- 8 Grafik Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight Charts
- 9 Ikhtisar Saham
Share Highlights
- 10 Peristiwa Penting
Significant Events
- 11 Penghargaan & Sertifikasi
Awards & Certifications

02 Laporan Manajemen

Management Report

- 14 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners's Report
- 22 Laporan Direksi
Board of Directors's Report

03 Profil Perusahaan

Company Profile

- 34 Informasi Perusahaan
Company Information
- 35 Sekilas Perusahaan
Company at a Glance
- 36 Jejak Langkah
Milestones
- 38 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 39 Kegiatan Usaha
Business Activities
- 42 Portofolio IIF di Tahun 2019
IIF Portfolio in 2019
- 44 Lokasi Proyek
Project Locations
- 46 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 47 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 58 Profil Direksi
Board of Directors Profile
- 64 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
- 67 Kronologis Pencatatan Saham
Share-Listing Chronology
- 67 Kronologi Pencatatan Obligasi
Bonds-Listing Chronology
- 68 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
List of Subsidiary and/or Associate Entities
- 69 Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions/ Professionals
- 70 Informasi Terkait Website Perusahaan
Information on Company Website

04 Tinjauan Pendukung Bisnis

Overview on Business Support

- 76 Manajemen Risiko
Risk Management
- 87 Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental
- 98 Sumber Daya Manusia
Human Capital
- 105 Teknologi Informasi
Information Technology

05 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

- 114 Tinjauan Makroekonomi
Macroeconomic Overview
- 115 Tinjauan Industri Pembiayaan Infrastruktur
Infrastructure Financing Industry Overview
- 117 Capaian dan Target Pembangunan Infrastruktur dalam Tiga Tahun Terakhir
Achievement and Target of Infrastructure Development in the Last Three Years
- 117 Strategi Perusahaan
Company Strategy
- 119 Direktorat Investasi
Investment Directorate
- 123 Advisory
Advisory
- 124 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment
- 126 Tinjauan Keuangan
Financial Review
- 126 Laporan Posisi Keuangan
Statements of Financial Position
- 128 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
- 130 Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows
- 132 Kemampuan Membayar Utang
Solvability
- 133 Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability
- 133 Struktur Modal
Capital Structure
- 133 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments on Capital Goods Investment

133	Investasi Barang Modal Capital Investment
134	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan Material Information and Fact Subsequent To Financial Statements Date
134	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Rare and Extraordinary Events
134	Prospek Usaha Business Outlook
135	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2019, dan Proyeksi di Tahun 2020 Comparison Between Target and Realization In 2019, and Projection For 2020
136	Analisis Pencapaian Realisasi Kinerja dengan Target 2019, dan Proyeksi Tahun 2020 Analysis on Performance Realization with Target For 2019 and Projection For 2020
139	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
143	Kebijakan Dividen Dividend Policy
144	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) Management and/or Employee Share Ownership Program (ESOP/ MSOP)
144	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds from Public Offering
144	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/ Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring
145	Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transaction Containing Conflict of Interest
145	Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi/Afiliasi Transaction with Affiliated Parties
145	Transaksi Derivatif dan Lindung Nilai Derivative Transaction and Hedging

145	Perubahan Ketentuan Perundang- Undangan yang Berpengaruh Signifikan Changes In Laws and Regulations With Significant Impact
145	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies
146	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity

06 Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

150	Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis of Good Corporate Governance Implementation
152	Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Principles
154	Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure
155	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (GMS)
158	Dewan Komisaris Board of Commissioners
163	Direksi Board of Directors
172	Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors
173	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors
174	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliations of the Board of Commissioners and Board of Directors
175	Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners
175	Komite Audit Audit Committee
191	Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors
212	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
214	Auditor Internal Internal Auditor
219	Audit Eksternal External Audit
220	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

220	Perkara Penting Material Case
220	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
220	Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Ethics and Corporate Culture
224	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
227	Akses Informasi dan Informasi Perseroan Access to Company Information and Data
228	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Governance Guidelines for Public Companies

07 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

241	Pemenuhan Standar Keberlanjutan Bagi Proyek Infrastruktur Fulfillment of Sustainability Standards in Infrastructure Projects
242	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Related Stakeholders
242	Topik dan Isu Penting yang Berkaitan dengan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Material Topic and Issues Relating to Social, Economic and Environmental Aspects
243	Anggaran Dana CSR CSR Budget
244	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia Social Responsibility on Human Rights
245	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Operasi Yang Adil Social Responsibility on Fair Operations
246	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup dan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Social Responsibility on The Environment and Social Community Development
248	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenaga Kerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility on Employment, Occupational Health and Safety
252	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Layanan Social Responsibilities on Products and Services



“

Pada tahun 2019, Pendapatan dari produk investasi *fund based* dan *non-fund based* berkontribusi sebesar 84% terhadap total pendapatan Perseroan. Sedangkan produk *Treasury* dan *Advisory* memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15% dan 1% terhadap total pendapatan Perseroan.

Income from investment products, fund based and non-fund based in 2019 contributed 84% to the Company's total revenues. Meanwhile, Treasury and Advisory products contributed 15% and 1%, respectively, to the Company's total revenues.

A low-angle photograph of a business team in a modern office. Several people in dark suits are raising their hands to high-five each other. In the foreground, a man in a dark suit and a bright red tie looks upwards with a smile. To his right, a woman in a dark suit is also visible, looking up. The background consists of large glass windows reflecting the sky and other buildings. The overall mood is one of success and teamwork.

KILAS KINERJA

Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2016	2017	2018	2019
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position				
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	3.538.279	3.965.964	582.361	2.429.067
Efek-efek / Securities	2.428.246	2.967.385	3.302.399	2.732.936
Investasi Saham / Equity Investments	114.106	–	364.841	389.636
Pinjaman Diberikan / Loans	4.569.601	5.690.847	5.888.949	6.406.211
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai / Allowance for Impairment Losses	(60.732)	(144.887)	(167.560)	(173.549)
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	22.349	61.313	79.159	86.735
Lain-lain / Others	178.912	431.783	523.086	440.024
Jumlah Aset / Total Assets	10.790.761	12.972.405	10.573.235	12.311.060
Utang Lain-lain dan Beban Masih Harus Dibayar / Other Payables and Accrued Expenses	45.217	30.151	38.725	46.713
Pinjaman Diterima / Fund Borrowing	4.281.483	6.544.571	3.591.557	4.713.745
Pinjaman Subordinasi / Subordinated Loans	2.628.137	2.622.652	3.037.409	3.142.918
Surat Utang yang Diterbitkan / Debt Securities Issued	1.519.933	1.521.722	1.725.765	2.183.064
Lain-lain / Others	25.490	28.218	44.539	72.061
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	8.500.260	10.747.314	8.437.995	10.158.501
Modal Saham / Capital Stock	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	29.800	29.800	29.800	29.800
Pendapatan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	(16.683)	21.283	(27.860)	5.336
Kerugian Kumulatif atas Instrumen Detivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas – Neto / Cumulative Loss on Derivative Instrument for Cash Flow Hedges – Net	-	-	-	(29.752)
Saldo Laba / Retained Earnings	277.384	174.008	133.300	147.175
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.290.501	2.225.091	2.135.240	2.152.559
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	10.790.761	12.972.405	10.573.235	12.311.060





Uraian / Description	2016	2017	2018	2019
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain / Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
Pendapatan / Revenues	543.547	644.639	764.931	837.802
Beban Usaha / Operating Expenses	(406.443)	(739.091)	(811.628)	(805.398)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Profit/(Loss) Before Tax Expenses	137.104	(94.452)	(46.697)	32.404
(Beban) Manfaat Pajak / Tax Benefit (Expenses)	(35.311)	12.830	3.749	(16.428)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan / Profit/(Loss) for the Year	101.793	(81.622)	(42.948)	15.976
Pendapatan Komprehensif Lain / Other comprehensive Income	(19.336)	36.571	(46.903)	1.343
Total Laba/(Rugi) Komprehensif / Total Comprehensive Income/(Loss)	82.427	(45.051)	(89.851)	17.319

Laporan Arus Kas / Statements of Cash Flows

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi / Net Cash Used in Operating Activities	(1.111.919)	(1.113.871)	(390.744)	(454.075)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Provided by/(Used in) Investing Activities	(1.618.922)	(694.365)	(273.264)	436.475
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Provided by/(Used in) Financing Activities	5.153.698	2.156.367	(2.781.949)	1.851.753
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.025.744	3.538.279	3.965.964	582.361
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of the Year	3.538.279	3.965.964	582.361	2.429.067

Rasio Keuangan / Financial Ratios

Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset / Return On Assets	0,94%	(0,63)%	(0,41)%	0,14%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas / Return On Equity	4,44%	(3,67)%	(2,01)%	0,75%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan / Net Income Margin	18,73%	(12,66)%	(5,61)%	1,91%
Rasio Lancar / Current Ratio	39,49x	4,57x	1,28x	1,41x
Rasio Utang terhadap Jumlah Aset / Debt to Asset Ratio	0,79x	0,83x	0,79x	0,82x
Rasio Utang terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio	3,71x	4,83x	3,91x	4,66x

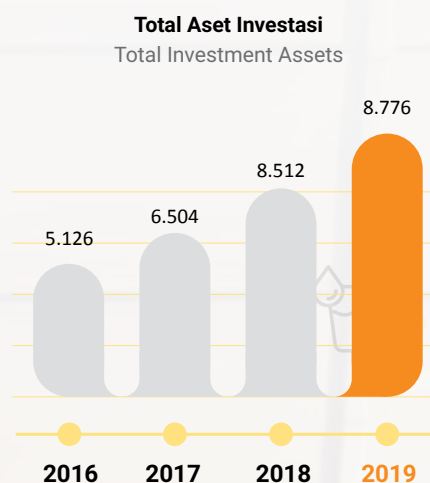
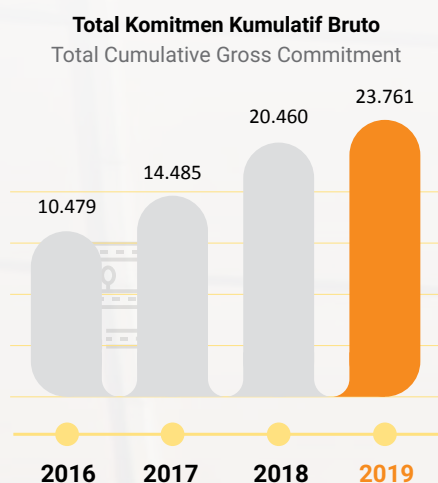
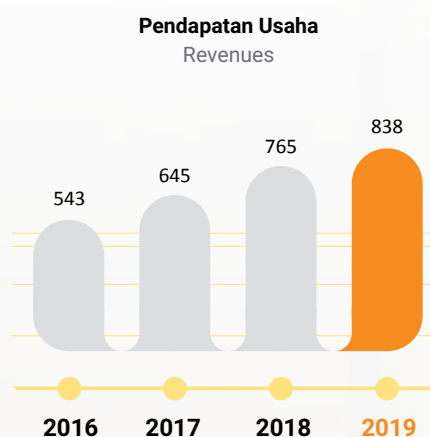
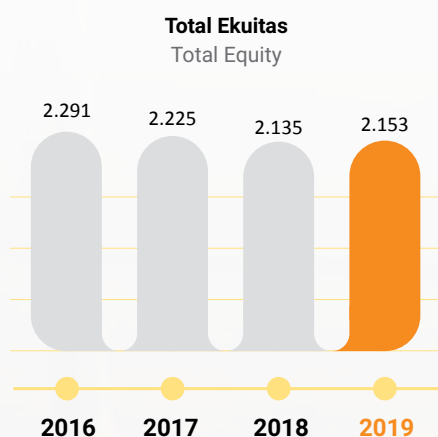
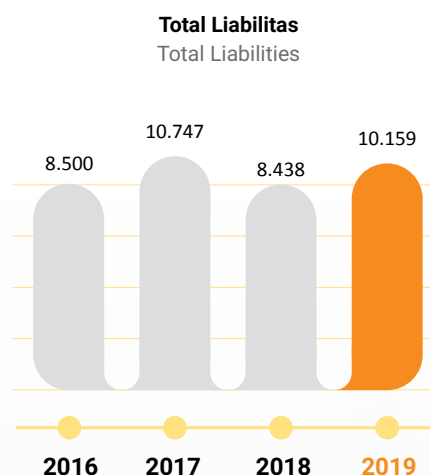
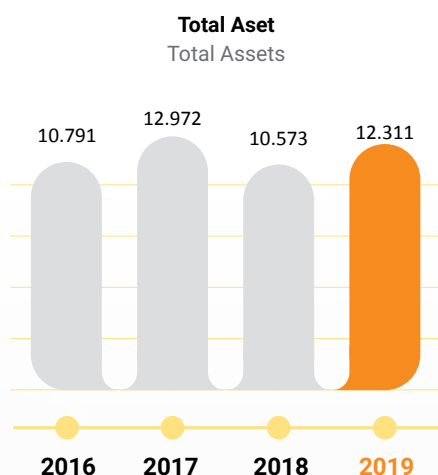


Grafik Ikhtisar

Data Keuangan Penting

Financial Highlight Charts

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Ikhtisar Saham

Share Highlight

Hingga akhir tahun 2019, IIF belum pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Sehingga informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, dan volume perdagangan saham tidak relevan untuk diungkapkan.

As of 2019, IIF has not listed its shares on any stock exchange. Thus, information on total outstanding shares, market capitalization, the highest, lowest, and closing prices, as well as trading volume is not relevant to be disclosed.

INFORMASI OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI

Berikut ini adalah informasi obligasi/sukuk/obligasi konversi maupun Surat Utang Jangka Pendek atau *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan maupun yang jatuh tempo pada tahun 2018 dan tahun 2019:

INFORMATION ON BONDS/SUKUK/ CONVERTIBLE BONDS

The following table describes the information on bonds/sukuk/convertible bonds as well as Medium Term Notes (MTN) issued and matured in 2018 and 2019:

Tabel Obligasi IIF

Table of Bonds of IIF

Nama Obligasi / Bonds Name	Nilai Pokok Obligasi / Bonds Principal Value	Tanggal Penerbitan / Issuance Date	Tenor	Kupon / Coupon	Jatuh Tempo / Maturity Date	Rating		Tempat Pencatatan Obligasi / Listed on
						2018 (Pefindo)	2019 (Pefindo)	
Obligasi yang Diterbitkan / Bonds Issued								
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri A / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I - Series A	Rp965.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	370 hari / days	6,75%	28 Desember 2020 / December 28, 2020	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri B / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I - Series B	Rp372.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	3 tahun / years	7,75%	18 Desember 2022 / December 18, 2022	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I - Series C	Rp163.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	5 tahun / years	7,90%	18 Desember 2024 / December 18, 2024	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi yang Telah Jatuh Tempo / Matured Bonds								
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Seri A / Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series A	Rp825.000.000.000	19 Juli 2016 / July 19, 2016	3 tahun / years	8,25%	19 Juli 2019. / July 19, 2019	AAA	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Tabel MTN IIF

Table of MTN of IIF

Nama MTN / MTN Name	Nilai Pokok / Principal Value	Tanggal Penerbitan / Issuance Date	Tenor	Kupon / Coupon	Jatuh Tempo / Maturity Date	Status Pembayaran / Payment Status
MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 / MTN of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018	Rp200.000.000.000	24 Oktober 2018 / October 24, 2018	370 hari / days	8,35%	10 November 2019 / November 10, 2019	Lunas / Settled

Peristiwa Penting

Significant Events

JANUARI / JANUARY

15 IIF merayakan ulang tahun ke-9 / IIF celebrated its 9th anniversary

23 IIF berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi untuk konstruksi dan pembangunan Proyek Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I: Semanan – Sunter – Kelapa Gading / IIF participated in the syndicated loans for construction and development of Jakarta Inner Toll Road Project Phase I: Semanan – Sunter – Kelapa Gading



MARET / MARCH

21 IIF menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) / IIF convened the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)



APRIL

22 IIF berpartisipasi dalam *World Bank Mission for Sustainable Financing* / IIF participated in the World Bank Mission for Sustainable Financing

JUNI / JUNE

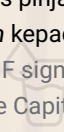
28 IIF telah menandatangani Perjanjian Fasilitas *Senior Term Loan* untuk dukungan ekuitas Proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Lampung dan Umbulan / IIF signed the Senior Term-Loan Facility Agreement to provide equity support for Lampung and Umbulan Water Supply System Project



JULI / JULY

30 Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) / IIF convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

IIF menandatangani amandemen Perjanjian Fasilitas pinjaman untuk *Capital Expansion* kepada perusahaan di region Jawa / IIF signed an amendment to the Capital Expansion Loan Facility Agreement for a company in Java region



**OKTOBER / OCTOBER**

22 IIF menandatangani Fasilitas Sindikasi (Pinjaman Subordinasi) melalui Perjanjian Akses / IIF signed a Syndicated Facility (Subordinated Loans) through an Accession Agreement

23 IIF menandatangani Perjanjian Fasilitas *Cash Deficiency Support* / IIF signed a Cash Deficiency Support Facility Agreement

25 IIF menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dukungan Jalan Tol Berkelanjutan / IIF signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Indonesian Toll Road Authority on support for Sustainable Toll Road

NOVEMBER

20 IIF sebagai co-sponsor dalam "*Indonesia Financing and Investment Forum*" yang diselenggarakan di *Euromoney Conferences* / IIF became a co-sponsor in the "Indonesia Financing and Investment Forum" held at *Euromoney Conferences*

25 IIF menyelenggarakan *Investor Gathering* atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 / IIF held an *Investor Gathering* event for the Public Offering of Shelf-Registration Bonds I Phase I Year 2019

27 IIF memberikan fasilitas pinjaman senior kepada proyek pembangkit listrik tenaga biomassa pertama menggunakan tandan buah kosong dari kelapa sawit di kabupaten Aceh Tamiang / IIF provided a senior loan facility for first biomass power plant using empty fruit bunches of palm oil in Aceh Tamiang regency

DESEMBER / DECEMBER

10 IIF memberikan fasilitas pinjaman senior kepada proyek *Mini Hydro* di Garut dan Tomasa / IIF provided a senior loan facility for *Mini Hydro* project in Garut and Tomasa

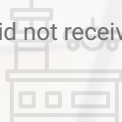
19 IIF resmi mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia / IIF officially listed the Shelf-Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 on the Indonesia Stock Exchange



Penghargaan & Sertifikasi Awards & Certifications

Pada tahun 2019, IIF tidak menerima penghargaan maupun sertifikasi dari pihak manapun.

In 2019, IIF did not receive any awards and certifications from any institutions.





Bagi kami, tahun 2019 merupakan tahun yang menantang. Setelah mengalami kerugian dalam dua tahun terakhir, kami berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui upaya-upaya strategis agar terwujudnya pertumbuhan yang positif (*turning around*).

2019 was a challenging year for us. After experiencing losses in the previous two years, we endeavored to turn this situation around through an array of strategic efforts so as to be able to drive positive growth.



LAPORAN MANAJEMEN

Management Report





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

V. Sonny Loho

Plt. Presiden Komisaris &
Komisaris Independen
Interim President Commissioner &
Independent Commissioner

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

D i s t i n g u i s h e d S h a r e h o l d e r s a n d S t a k e h o l d e r s ,

Dari sisi keuangan, Dewan Komisaris menilai bahwa pengelolaan komponen keuangan telah dilakukan dengan baik, sehingga IIF mampu mencatatkan kinerja laba yang positif dibandingkan realisasi tahun 2018. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami kerugian, pada tahun 2019 IIF mampu membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp15,98 miliar.

On financial front, the Board of Commissioners considers that the management of financial component has been carried out properly, so that IIF was able to record a positive growth compared to the realization of 2018. After two consecutive years experiencing net losses, in 2019 IIF was able to book net profit of Rp15.98 billion.

Rp837,802

MILIAR / BILLION

PENDAPATAN

REVENUES

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga IIF mampu menjalankan kinerjanya di bidang pembiayaan infrastruktur sepanjang tahun 2019 dengan hasil yang memuaskan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Pengawasan Kinerja IIF untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang memaparkan pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan operasional Perseroan agar tetap berada dalam lingkup tujuan, visi dan misi, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Setelah dua tahun terakhir mengalami kerugian, IIF berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan, meski sepanjang tahun 2019 dihadapkan pada

Let us extend our praise and gratitude to God Almighty for his blessings given to us so that IIF managed to demonstrate positive performance in infrastructure project financing throughout 2019 and record satisfying accomplishments.

On this momentous occasion, allow us, the Board of Commissioners of the Company, to deliver our Supervisory Report on IIF's performance for the fiscal year ended on December 31, 2019, which elaborates the implementation of our function and role in monitoring the Company's operations so as to remain within the scope of its vision and mission, as well as the Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

After suffering from a relatively substantial loss in the last two years, IIF managed to deliver encouraging performance and achievement, despite the challenges in the form of

dinamika makroekonomi dan laju inflasi yang cenderung menurun. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dedikasi dan kerja keras seluruh Insan IIF, baik dari level *top management* yang telah menyusun strategi bisnis dengan tepat dan sesuai dengan kondisi eksternal dan kebutuhan pasar, hingga para staf yang telah mengeksekusi strategi bisnis dengan baik sehingga IIF mampu memperoleh hasil kinerja yang positif.

Dalam menyusun strategi bisnis dan menjalankan kinerja sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berfokus pada *core business* IIF sebagai katalis dan *enabler* dalam pembiayaan infrastruktur nasional, yang diwujudkan melalui peluncuran dua produk pembiayaan inovatif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan *fee based income* Perseroan.

Sementara itu, dari sisi keuangan, Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan efisiensi biaya yang dikeluarkan Perseroan sepanjang tahun 2019 sudah tepat. Penilaian tersebut diperkuat oleh kondisi Perseroan selama dua tahun yang mengalami kerugian, salah satunya disebabkan oleh tingginya beban yang dikeluarkan dari pendapatan yang diterima oleh Perseroan, sehingga menimbulkan kerugian atau defisit. Oleh sebab itu, agar kondisi defisit tidak terulang kembali pada tahun buku, kami sepakat dengan upaya Direksi untuk melakukan efisiensi beban usaha Perseroan pada tahun buku.

Kami juga mengapresiasi inisiasi Direksi untuk mengoptimalkan peluang bisnis baru, di samping berfokus pada portofolio proyek infrastruktur utama Perseroan, antara lain jalan tol, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan sebagainya. Pada tahun 2019, IIF berinisiatif untuk mulai menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek infrastruktur di sektor baru, yaitu *social infrastructure* dan infrastruktur agribisnis.

Untuk kinerja *Advisory*, IIF telah berperan besar dalam mendukung proses pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). IIF juga berpartisipasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan beberapa proyek yang dikembangkan melalui skema KPBU.

Dari implementasi strategi bisnis di atas, IIF berhasil mencatatkan pencapaian kinerja yang positif di tahun 2019. Pencapaian tersebut tercermin dari pertumbuhan komitmen pembiayaan, total aset, total pendapatan bersih, dan laba bersih dari tahun sebelumnya. Beberapa

macroeconomic dynamics in 2019 as well as the declining inflation rate. We believe that such achievements were undoubtedly inseparable from the dedication and hard work of all personnel of the Company, starting from the top management level who have prepared business strategies according to market needs and external conditions, to the staff level who have executed those strategies properly so that IIF managed to record positive performance.

We assess that the Board of Directors has put their focus on IIF's core business as a catalyst and enabler in national infrastructure financing, particularly in preparing business strategies and carrying out the Company's management throughout the year. This was realized through the launching of two new innovative and superior financing products, which drove the growth of the Company's fee-based income throughout the year.

On financial front, the Board of Commissioners considers that the efficiency policy on the Company's expenses incurred in 2019 has been carried out accordingly. Our assessment is supported by the condition of the Company which suffered from loss in the last two years due to, among others, the expenses incurred being higher than the income generated by the Company; thus, causing the deficit in our balance sheet. To ensure that this negative condition does not recur in the future, we agree with the efforts undertaken by the Board of Directors to streamline the Company's expenses going forward.

We also appreciate Board of Directors' initiatives to optimize new business opportunities in addition to focusing on the Company's portfolio of main infrastructure projects, including toll roads, electricity, telecommunications, and so on. In 2019, IIF initiated the provision of financing facility for infrastructure projects in several new sectors, namely social and agribusiness infrastructure.

In terms of *Advisory* performance, IIF played a major role in supporting the infrastructure development process through the Public Private Partnership (PPP) funding scheme. IIF also participated in providing financing facilities for several projects developed through the PPP scheme.

Due to the implementation of business strategies above, IIF successfully recorded positive performance achievement in 2019 as reflected in the growth of financing commitments, total assets, total net income, and net profit in comparison to those of the previous year. A number of



komponen keuangan bahkan berhasil melewati batas target yang ditetapkan oleh Perseroan di awal tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat kredit macet, IIF mampu mengelola tingkat *Non Performing Loan* (NPL) neto menjadi level 0,74% atau lebih rendah dari tahun lalu.

PANDANGAN ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP SOCIAL AND ENVIRONMENT

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan proyek infrastruktur nasional, IIF memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pembiayaan lainnya. Keunikan tersebut berupa penerapan prinsip *Social and Environmental* (S&E) dalam skema pembiayaan IIF. Keunggulan tersebut mampu menjadi kekuatan utama bagi IIF untuk memposisikan diri sebagai perusahaan pembiayaan yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Kami memandang bahwa IIF telah melakukan serangkaian upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan baik. Pandangan tersebut diperkuat oleh adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara IIF dengan regulator di bidang pembangunan jalan tol, yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada tahun 2019, dalam rangka mendorong implementasi aspek-aspek keberlanjutan, yaitu aspek lingkungan dan sosial pada proses pembangunan seluruh jalan tol yang berada di bawah lisensi BPJT.

Kami juga berpendapat bahwa saat ini IIF telah berada dalam jalur yang benar (*on the right track*) terkait pelaksanaan penerapan aspek S&E dalam seluruh proyek infrastruktur yang dibiayai. Pendapat tersebut didasarkan pada hasil *assessment* yang dilakukan oleh para Pemegang Saham seperti IFC, ADB, dan DEG yang memiliki *concern* terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, kami berharap agar Direksi dan seluruh Insan IIF dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip S&E di masa depan, sehingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia dapat direalisasikan dengan tepat.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARI TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN SERTA MEKANISME DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Secara struktural, Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memonitor seluruh strategi bisnis yang diimplementasikan oleh Direksi. Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh inisiatif dan integritas

financial components even managed to exceed the target set by the Company at the beginning of 2019. As for the level of non-performing loans, IIF was able to manage net Non-Performing Loan (NPL) at the level of 0.74% or lower than the previous year.

VIEWS ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PRINCIPLES IMPLEMENTATION

As a company engaged in the field of national infrastructure project financing, IIF has certain characteristics that set it apart from other financing companies. The uniqueness is in the form of Social and Environmental (S&E) principles implementation in IIF's financing scheme. This advantage can serve as a major force for the Company to position itself as a leading financing company in implementing sustainable infrastructure development.

We are of the opinion that IIF has carried out a series of efforts to realize sustainable infrastructure development properly. This view is reinforced by the signing of a Memorandum of Understanding between IIF and the Indonesia Toll Road Authority (BPJT) in 2019. This commitment aimed to encourage the implementation of sustainability aspects, namely environmental and social aspects, in the entire development processes of toll road projects under the BPJT license.

We also believe that, at present, IIF is on the right track in regard to the implementation of S&E aspects in all infrastructure projects financed. This opinion is based on the results of assessment conducted by the Company's Shareholders, namely IFC, ADB, and DEG, who have concerns about the implementation of sustainable development. Nevertheless, we hope that the Board of Directors and all personnel of IIF can continue to make improvements in order to enhance the implementation quality of S&E principles in the future, so that sustainable infrastructure development in Indonesia can be realized properly.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION AND ADVISORY MECHANISM AND FREQUENCY TO BOARD OF DIRECTORS

Structurally, the Board of Commissioners plays a role in supervising and monitoring all business strategies implemented by the Board of Directors. In this regard, the Board of Commissioners appreciates all initiatives and

seluruh jajaran Direksi, Manajemen, dan setiap Insan IIF dalam menyusun strategi bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan tujuan, visi dan misi Perseroan, serta peran IIF sebagai katalis dan *enabler* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk mendukung kelancaran pada proses pengelolaan bisnis Perseroan, Dewan Komisaris juga aktif dalam memberikan saran dan nasihat kepada Direksi. Pemberian saran dan nasihat tersebut juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan alternatif bagi para pembuat kebijakan bisnis dalam mengambil berbagai langkah strategis yang tepat bagi Perseroan.

Pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis Perseroan dan penyampaian saran dan nasihat oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 dilaksanakan melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diselenggarakan sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan dan sesi telekonferensi sebanyak 8 (delapan) kali, dengan berbagai agenda pembahasan, seperti pemaparan dan progres kinerja Perseroan hingga penetapan rencana bisnis untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan *site visit* secara langsung dengan Direksi sebanyak 2 (dua) hari ke beberapa proyek portofolio Perseroan yang dijadikan sebagai *obyek visit* dalam rangka memantau bagaimana progres pembangunan dan implementasi prinsip-prinsip S&E pada proyek tersebut.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris senantiasa mengawasi pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka *check and balance* serta transparansi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, *monitoring* GCG oleh Dewan Komisaris juga bertujuan agar pelaksanaan bisnis Perseroan tetap berada pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya segala bentuk dan praktik *bad corporate governance*.

Secara garis besar, implementasi GCG telah dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, setiap Insan IIF telah ditanamkan praktik-praktik GCG yang berlandaskan pada *best practices*. Oleh sebab itu, praktik GCG di IIF bukanlah sekadar bentuk kepatuhan semata, tetapi telah menjadi budaya perusahaan. Dengan dukungan dari Pemegang Saham, penerapan budaya GCG

integrity of all members of the Board of Directors, the Management, and every personnel of IIF in formulating the Company's business strategies while taking into account the objectives, vision, and mission, as well as the role of IIF as a catalyst and enabler in national financing infrastructure development.

To support the flow of the Company's business management process, the Board of Commissioners actively provides recommendations and advice to the Board of Directors. Our advisory can also serve as an alternative consideration for business policy-making in taking the strategic steps appropriate for the Company.

Supervision on the implementation of business strategy and the provision of advice by the Board of Commissioners throughout 2019 was carried out through the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. In 2019, we held 13 (thirteen) joint meetings and 8 (eight) teleconferencing sessions with various discussion agenda, such as the presentation and progress of Company's performance and the determination of business plans for both short-term and long term.

In addition, the Board of Commissioners conducted 2 (two) days site visits directly with the Board of Directors to several projects within the Company's portfolio in order to monitor the progress of S&E principles development and implementation in the project.

VIEWS ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners always oversees the implementation Good Corporate Governance (GCG) principles in the context of check-and-balance process, as well as the transparency of information for all stakeholders. GCG monitoring by the Board of Commissioners also aims to keep the Company's business and operations to remain within the corridor of the prevailing laws and regulations, so as to be able to prevent the occurrence of bad corporate governance practices.

Broadly speaking, the Company has implemented GCG properly in all business processes. Each personnel of IIF has incorporated the best practices of GCG as their work culture in carrying their daily activities. Therefore, we consider that GCG implementation in the Company is not merely a form of compliance but has become a corporate culture within the Company. With the support of the



di IIF diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Penilaian atas Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bentuk implementasi prinsip keterbukaan dan transparansi, IIF memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan internal Perseroan.

Menurut penilaian Dewan Komisaris, implementasi WBS telah dilakukan dengan baik. Penilaian tersebut diperkuat oleh keberadaan aturan WBS Perseroan yang tertuang dalam buku Pedoman Operasional Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang mewakili Pemerintah setempat. Kami juga berkomitmen untuk menjamin keamanan para pelapor dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan balas dendam terhadap pelapor.

Dengan adanya WBS ini, Dewan Komisaris mendorong seluruh karyawan dan pihak eksternal lainnya untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelanggaran dan praktik-praktik *fraud* yang dilakukan oleh Perseroan melalui beberapa sarana yang disediakan, yaitu *e-mail*, *website*, dan telepon.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan bisnis Perseroan, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite pendukung, Komite Audit, Komite Investasi–Dewan Komisaris, (BOC-IC), Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC), dan Komite Pemantau Risiko (ROC).

Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite tersebut telah memenuhi tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga proses pengawasan aktivitas bisnis Perseroan dapat terlaksana dengan baik. Ke depannya, Dewan Komisaris berharap agar keempat komite tersebut dapat terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan membantu Direksi dalam menjalankan kinerja Perseroan di bidang pembiayaan proyek infrastruktur.

Shareholders, the implementation of GCG culture at IIF is expected to be able to create an honest, transparent, and responsible work environment.

Assessment on whistleblowing System Implementation

To realize the openness and transparency principles, IIF has established a Whistleblowing System (WBS) as a forum for stakeholders to report suspected violations that may occur within the Company's internal environment.

We are of the opinion that WBS implementation at the Company has been carried out properly. This assessment is supported with the availability of WBS regulations contained in the Company's Operational Manual and approval from the authorized local government. We are committed to ensuring the safety of whistleblowers and imposing sanction on those who take revenge against them.

Through WBS, the Board of Commissioners encourages all employees and other external parties to report all forms of violations and fraud practices conducted by the Company through several facilities provided, namely e-mail, website and phone number.

Performance Assessment on Committees under the Board of Commissioners

In performing our duties and functions to supervise the implementation of business activities of the Company, we are supported by several committees, namely the Audit Committee, Investment Committee–Board of Commissioners, (BOC-IC), Nomination and Remuneration Committee (NRC), and Risk Oversight Committee (ROC).

The Board of Commissioners assesses that all of these committees have fulfilled their duties and obligations, so that the process of supervising Company's business activities can be carried out properly. Going forward, the Board of Commissioners expects that these four committees can continuously establish good coordination and communication in order to improve the supervision system and assist the Board of Directors in carrying out the Company's business in infrastructure project financing.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris berpandangan bahwa industri pembiayaan infrastruktur masih memiliki prospek yang cerah. Pandangan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional demi mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris berharap agar IIF dapat terus menyediakan produk-produk pembiayaan yang semakin inovatif dan meningkatkan kelayakan proyek, tanpa harus menyaingi produk pembiayaan dari perusahaan perbankan.

Dewan Komisaris juga terus menghimbau agar Direksi tetap berupaya untuk menjaga tren pertumbuhan bisnisnya secara konsisten di masa depan. Kami mengapresiasi upaya Direksi dalam menyusun *5 Years Business Plan* sebagai pedoman bisnis Perseroan untuk lima tahun ke depan, dengan mengacu pada asumsi dan proyeksi kondisi makroekonomi dan tren industri dalam beberapa tahun mendatang. Melalui rancangan bisnis tersebut, Dewan Komisaris berharap agar Direksi dan seluruh Insan IIF dapat mengoptimalkan peluang dan potensi bisnis yang ada, dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan bisnis yang positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus mewujudkan misinya sebagai katalisator dan *enabler* dalam pembiayaan infrastruktur nasional.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan. Terhitung per tanggal 21 Maret 2019, Bapak Hans Jurgen Hertel resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Posisi tersebut selanjutnya dijabat oleh Andreas Zeisler berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019.

Begitu juga dengan Bapak Robert O. Dolk yang efektif menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga tanggal 26 Juli 2019. Posisi tersebut selanjutnya digantikan oleh Lodewijk Govaerts berdasarkan Akta Notaris No.10 tanggal 26 Juli 2019.

Kemudian, per tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri tidak menjabat lagi sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh Bapak V. Sonny Loho yang sebelumnya merupakan Komisaris Independen Perseroan.

VIEWS ON BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners views that the prospect of infrastructure financing industry remains positive. This opinion is in line with the focus of government policy on accelerating national infrastructure development in order to achieve the vision of Indonesia Maju by 2045. Therefore, the Board of Commissioners hopes that IIF can continue to provide increasingly innovative financing products and elevate project viability, without having to compete with financing products from banking sector.

The Board of Commissioners also continues to urge the Board of Directors to exert their best efforts in maintaining a consistent business growth trend in the future. We appreciate the 5-Year Business Plan prepared by the Board of Directors as a guideline for Company's business in next five years in reference to the assumptions and projections of macroeconomic conditions and industry trends in the coming years. Through the business plan, we hope that the Board of Directors and all personnel of IIF can optimize the existing business opportunities and potentials, in order to maintain positive business growth rate so as to be better than the previous year, while realizing IIF's mission as a catalyst and enabler in national infrastructure financing.

CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

There were several changes in the composition of Board of Commissioners of the Company. Effective since March 21, 2019, Mr. Hans Jurgen Hertel resigned from his position as the Company's Commissioner. His position has then been replaced by Mr. Andreas Zeisler based on the Notary Deed No. 31 dated March 21, 2019.

Then, effective since July 26, 2019, Mr. Robert O. Dolk resigned from his position as the Company's Commissioner. His position has then been replaced by Mr. Lodewijk Govaerts based on the Notary Deed No. 10 dated July 26, 2019.

Lastly, as of December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri resigned from his position as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner. The position of President Commissioner of the Company has then been served temporarily by Mr. V. Sonny Loho who previously held the position of Company's Independent Commissioner.



Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut:

V. Sonny Loho	Plt. Presiden Komisaris & Komisaris Independen*) / Interim President Commissioner & Independent Commissioner*)
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen / Independent Commissioners
Bhimantara Widyajala	Komisaris / Commissioners
Muhamad Al-Arif	Komisaris / Commissioners
Andreas Zeisler	Komisaris / Commissioners
Lodewijk Govaerts	Komisaris / Commissioners
Rajeev Veeravalli Kannan	Komisaris / Commissioners
Richard Lyon Ranken	Komisaris / Commissioners

Sehubungan dengan perubahan tersebut, mewakili Dewan Komisaris, Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Hans J. Hertel, Bapak Robert O. Dolk dan Bapak M. Chatib Basri atas tanggung jawab pengawasan bagi pengembangan bisnis Perseroan. Selanjutnya, Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Andreas M. Zeisler dan Bapak Lodewijk Govaerts, sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Semoga perubahan ini dapat semakin memperkuat peran dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan.

PENUTUP

Kami segenap jajaran Dewan Komisaris IIF menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh Insan IIF atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam mendorong optimalisasi kinerja dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus merealisasikan komitmen Perseroan untuk menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur yang terdepan dalam menerapkan aspek-aspek keberlanjutan.

Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan, sehingga IIF mampu mencetak prestasi dan pencapaian kinerja yang memuaskan di tengah tantangan makroekonomi dan industri.

Accordingly, current composition of IIF's Board of Commissioners is as follows:

With regards to the changes, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my utmost gratitude for the dedication and contribution to Mr. Hans J. Hertel, Mr. Robert O. Dolk and Mr. M. Chatib Basri for their supervisory responsibilities in the development of the Company. Furthermore, I wish to welcome Mr. Andreas M. Zeisler and Mr. Lodewijk Govaerts to the Board of Commissioners. We sincerely hope that these new faces can further strengthen the role and function of the Company's Board of Commissioners.

CLOSING

We would like to extend our appreciation to all members of Board of Directors and all personnel of IIF for their hard work and dedication given to drive the optimization of Company's performance in order to maintain the momentum of sustainable business growth as well as to realize the commitment to become leading infrastructure financing company through the implementation of sustainable aspects.

We would also like to extend our gratitude to all shareholders and stakeholders for their support so that IIF is able to record positive accomplishments and satisfying performance amid the macroeconomic and sectoral challenges.

Jakarta, Maret 2020

Jakarta, March 2020

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



V. SONNY LOHO

Plt. Presiden Komisaris & Komisaris Independen *)
Interim President Commissioner & Independent Commissioner *)

*) Bapak V. Sonny Loho diangkat sebagai Plt. Presiden Komisaris efektif tanggal 9 Desember 2019 menggantikan Bapak M. Chatib Basri
*) Mr. V. Sonny Loho was appointed as Interim President Commissioner effective as of 9 December 2019, replacing Mr. M. Chatib Basri

A full-length portrait of a man with dark hair, a mustache, and glasses, wearing a dark blue suit, white shirt, and a blue and yellow striped tie. He is standing against a background of vertical wooden slats.

**Reynaldi
Hermansjah**

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

D i s t i n g u i s h e d S h a r e h o l d e r s a n d S t a k e h o l d e r s ,

Bagi IIF, tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah melakukan serangkaian langkah-langkah taktis dan kebijakan strategis, dimana hasil daripada langkah-langkah strategis tersebut memberikan kinerja positif yang terlihat dari terlampauinya target laba bersih, selesainya restrukturisasi beberapa perusahaan dan turunnya secara signifikan *non performing loan*.

2019 was a challenging year for IIF. The Company has embarked on several strategical efforts, in which these strategical and tactical decision delivered a positive result. The Company has surpassed our net profit after tax target, restructured major loans and has significantly reduced the non performing loan.

Rp15,98

MILIAR / BILLION

LABA BERSIH

NET PROFIT

Setelah mengalami kinerja keuangan yang kurang memuaskan dalam dua tahun terakhir, IIF mampu melewati tantangan tersebut dengan mencapai kinerja yang memuaskan pada tahun 2019. Oleh karena itu, kami senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga IIF mampu mengantarkan hasil capaian kinerja diatas ekspektasi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun buku 2019 yang memuat uraian kinerja, baik kinerja operasional maupun keuangan beserta aspek-aspek pendukung lainnya yang dilakukan Perseroan selama tahun buku.

TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Bagi IIF, tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Hal ini didasarkan pada kinerja keuangan

After enduring an unsatisfactory financial performance in the last two years, IIF has succeeded in overcoming these obstacles and achieving satisfying performance in 2019. Hence, let us first praise God Almighty for all His blessings so that IIF was able to deliver above-expectations business results to the stakeholders and shareholders.

Through this occasion, allow us to present to you the Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance for fiscal year 2019 which covers description of performance in both operational and financial sectors, along with other supporting aspects carried out by the Company during the fiscal year.

CHALLENGES FACED AND STRATEGIES IMPLEMENTED

For IIF, 2019 was a year rife with challenges as we looked back on the Company's record of negative

Perseroan yang membukukan kinerja negatif dalam dua tahun terakhir. Berkaca pada kondisi tersebut, Direksi berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui upaya-upaya strategis agar terwujudnya pertumbuhan yang positif (*turning around*) pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan adalah fokus kepada visi dan misi Perseroan sebagai katalis dan *enabler* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Ada beberapa langkah-langkah strategis yang telah kami terapkan. Strategi pertama adalah berfokus pada *core business* IIF sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dengan memaksimalkan diferensiasi produk-produk pembiayaan selain *senior loan*, yaitu *mezzanine financing* dan *junior loan*. Terbukti, hasil dari optimalisasi tersebut, IIF pada tahun 2019 yang lalu telah meluncurkan dua produk inovatif baru.

Produk pertama yang diluncurkan adalah fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS), yaitu produk pinjaman berupa *junior loan* yang sangat bermanfaat bagi kelancaran pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol. Produk ini berperan sebagai pelengkap struktur pinjaman yang disediakan oleh Perbankan umum. Sedangkan produk kedua adalah fasilitas *Credit Enhancement*, yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat/kualitas kredit pada instrument pasar modal yaitu obligasi, sehingga emiten tersebut mampu memperoleh tingkat pemeringkatan yang lebih baik.

Melalui peluncuran dua produk pembiayaan baru di tahun 2019, IIF berhasil meningkatkan *fee based income* dan menjalankan fungsinya sebagai katalisator dan *enabler* dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya pada industri jalan tol, dan secara tidak langsung meningkatkan aktivitas dalam penerbitan obligasi di pasar modal.

Selanjutnya, penerapan strategi kedua dalam rangka mendorong peningkatan kinerja adalah melakukan optimalisasi dan efisiensi beban usaha. Kami berupaya untuk mengelola komponen-komponen biaya secara efisien, tanpa menghambat upaya Perseroan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan bisnisnya. Hasilnya, IIF mampu membukukan penurunan total beban usaha di tahun 2019 sebesar 0,77% dari tahun sebelumnya.

financial performance in the previous two years. Reflecting on this condition, the Board of Directors endeavors to turn around the Company's business through an array of strategic efforts to drive positive growth in 2019. Our main efforts conducted was focusing on the Company's vision and mission as a catalyst and enabler in the framework of sustainable infrastructure development financing in Indonesia.

We have implemented several strategic measures to boost growth. The first strategy was to focus on our core business as a national infrastructure financing company, by maximizing the differentiation of our financing products other than senior loan, namely the mezzanine financing and junior loan products. Through this product optimization effort, IIF managed to launch two new innovative products in 2019.

The first product launched was the Cash Deficiency Support (CDS), a type of junior loan facility which benefits the development of infrastructure in the toll road sector as it complements the loan structure provided by commercial banks. Meanwhile, the second product was the Credit Enhancement facility which is intended to improve credit rating/quality of capital market instruments, namely bonds, so that the issuer can receive better credit rating.

Through the launch of these new financing products in 2019, IIF succeeded in increasing its fee-based income and realizing its function as a catalyst and enabler in supporting the acceleration of national infrastructure development, specifically toll roads. IIF also indirectly promoted the activity of bonds issuance in the capital market.

The second strategy adopted to encourage Company's performance was to optimize and streamline operating expenses. We strived to manage cost components efficiently without hampering the Company's efforts in developing and boosting its business. As a result, IIF was able to record a decrease in total expenses in 2019 by 0.77% compared to the realization of the previous year.



Selain berfokus pada *core business* dan efisiensi beban usaha, kami juga berupaya untuk mengoptimalkan peluang dari sektor infrastruktur baru yang dimandatkan kepada IIF, yaitu sektor *social infrastructure* seperti rumah sakit dan Pendidikan.

Pada tahun 2019, portofolio proyek IIF masih didominasi oleh sektor jalan tol, kelistrikan berbasis energi terbarukan dan telekomunikasi. Di bidang kelistrikan, kami telah memberikan pembiayaan untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik dari seluruh spektrum energi terbarukan, seperti mini *hydro*, tenaga bayu, tenaga panas bumi, tenaga surya dan tenaga biomassa.

Sementara itu, dari segi layanan Advisory, IIF memiliki peran besar dalam proses pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang dan lain sebagainya. Pada tahun 2019, IIF juga memberikan jasa *advisory* pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

Didukung oleh kapasitas internal yang berkompeten dan memadai, IIF berupaya untuk menyediakan layanan konsultasi transaksi dan konsultasi kebijakan bagi klien swasta maupun di sektor publik terkait transaksi, pendanaan pembangunan proyek infrastruktur, *economic assessment* dan *merger and acquisition* dalam rangka mempercepat pengadaan dan memperlancar pembangunan infrastruktur di Indonesia.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN KINERJA TAHUN 2019

Perseroan mencatatkan pertumbuhan di tahun 2019 dengan membukukan komitmen pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun.

Dari sisi neraca, total aset yang berhasil dibukukan IIF pada tahun buku adalah Rp12,31 triliun, mengalami kenaikan sebesar 16,44% dari tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2019, total aset mampu mencapai 1,03% diatas target.

In addition to focusing on core business and efficiency of operating expenses, we made an effort to optimize the opportunities arising from the new infrastructure sector mandated to IIF, namely the social infrastructure sector such as hospital and education infrastructure.

In 2019, IIF's project portfolio was still dominated by toll road, electricity based on renewable energy, and telecommunication sectors. In the electricity sector, we provided financing facility to support the construction of power plants of various renewable energy resources, such as mini hydro, wind, geothermal, solar power, and biomass power.

In terms of our Advisory services, IIF played a substantial role in the infrastructure development process using the Public Private Partnership (PPP) financing scheme including the Bulk Water Supply System (SPAM) project in Semarang and etc. In 2019, IIF also provided advisory service to the Trans-Sumatera Toll Road Project.

Supported by competent and adequate internal capacities, IIF strives to always provide transaction and policy consulting services for private and public clients in relation to transaction, infrastructure development project funding, economic assessment, and merger and acquisition, in order to accelerate and facilitate the procurement for national infrastructure development.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND PERFORMANCE IN 2019

In 2019, IIF recorded a growth by booking new commitment of Rp3.6 trillion.

On balance sheet front, we managed to book total assets of Rp12.31 trillion in 2019 fiscal year, an increase of 16.44% compared to that of 2018. Compared to the target set at the beginning of the year, total assets booked reached 1.03% above the target.



Sementara itu, dari sisi profitabilitas, IIF berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp15,98 miliar di tahun 2019. Realisasi laba bersih tersebut mencapai 9,3% lebih tinggi dari angka yang ditargetkan.

Perseroan pada tahun 2019 mampu mempertahankan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) neto sebesar 0,74%, lebih rendah dari tahun lalu. Hal ini membuktikan komitmen IIF untuk menerapkan strategi ekspansif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur.

SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEUNGGULAN IIF

IIF sangat memahami bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan aspek-aspek keberlanjutan dalam rangka menciptakan *sustainable value* dan keharmonisan bagi para pemangku kepentingan terkait, atas hal itu IIF memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang dibiayai harus mengimplementasikannya. IIF berupaya untuk selalu menjadi pemimpin dalam aspek ini.

Dalam rangka memperkuat posisi IIF sebagai perusahaan pembiayaan yang terdepan dalam menerapkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pada tahun 2019 IIF telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai bentuk kerja sama pengembangan proyek jalan tol berkelanjutan. Komitmen ini bertujuan untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip *Social and Environmental* (SEP) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol kedepannya. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga merupakan wujud nyata peran IIF dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya di sektor jalan tol.

Komitmen IIF dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga diperkuat oleh hasil *assessment* yang langsung dilakukan oleh Pemegang Saham Perseroan, melalui *site visit* sebanyak 4 (empat) kali ke beberapa proyek yang menjadi obyek *site visit*. Hasil *assessment* tersebut menunjukkan bahwa Perseroan sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dalam mengimplementasikan SEP pada seluruh proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF.

In terms of profitability, IIF managed to book net profit of Rp15.98 billion in 2019, reaching 9.3% above the 2019 target.

Furthermore, in 2019, the Company was able to maintain net Non-Performing Loan (NPL) at the level of 0.74%, lower than last year. This proves IIF's commitment to implement an expansive strategy while still observing the prudent principle in disbursing infrastructure financing.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS OUR COMPETITIVE ADVANTAGE

IIF fully understands that the acceleration of infrastructure development must be balanced with the sustainability aspects in order to create sustainable value and promote harmony for relevant stakeholders. To that end, IIF ensures that all financed projects must comply with and implement the sustainability aspects in line with its efforts to become a leader in Social and Environmental aspects.

In order to strengthen IIF's position as a leading financing company in sustainable infrastructure development, in 2019, IIF signed a Memorandum of Understanding with the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) as a form of sustainable cooperation in the development of toll road projects. This commitment aimed to encouraging the implementation of Social and Environmental principles (SEP) in the development of toll road infrastructure going forward. Through the MoU signing, IIF will be able to manifest its role in generating sustainable infrastructure development, especially in the toll road sector.

The Company's commitment to the sustainable implementation of infrastructure development is also reinforced through the result of assessment conducted directly by the Shareholders through site visits, which took place 4 (four) times in 2019, to several projects. The assessment results show that the Company is on the right track in the framework of SEP implementation in all infrastructure projects financed by IIF.



Untuk memposisikan diri sebagai perusahaan pembiayaan yang terdepan dalam mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, IIF berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan delapan SEP yang dimiliki oleh Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan di masa depan.

To position its business as a leading finance company in promoting sustainability values in national infrastructure project development, IIF is committed to consistently improving the implementation quality of the eight principles of SEP owned by the Company in the future.



PENGUATAN KEUNGGULAN SUMBER DAYA MANUSIA

IIF menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan serta mencapai target bisnis yang telah dicanangkan. Oleh sebab itu, IIF berkomitmen untuk menciptakan SDM yang unggul, berkualitas, dan berkompeten sehingga mampu menghadapi perkembangan bisnis yang semakin menantang. Selain itu, dalam rangka memperkuat *team work*, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan seluruh Insan IIF.

Upaya pengembangan SDM juga dilakukan dalam rangka memperkuat posisi IIF sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang selalu mempromosikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan kepada para debitur dan pelaksana proyek infrastruktur. Oleh sebab itu, IIF kerap menyelenggarakan program *Knowledge Sharing* dengan mendatangkan perwakilan dari pihak *shareholder* Perseroan. IIF juga meluncurkan program baru bertajuk “Bulan S&E Awareness” pada tahun 2019 yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman Insan IIF tentang pelaksanaan konsep S&E dan bagaimana cara mengimplementasikannya.

PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Seiring dengan perkembangan dan modernitas industri, Teknologi Informasi (TI) menjadi elemen penting yang harus diterapkan oleh IIF. Agar tujuan penggunaan TI dapat tercapai sesuai dengan harapan Perseroan, IIF menyusun Rencana Strategi Teknologi Informasi atau *Information Technology Strategy Plan* (ITSP) untuk tahun 2018 – 2021 yang menjadi acuan Perseroan dalam mengembangkan dan implementasi solusi teknologi di masa depan.

Melalui pengembangan beragam sistem TI, pelaksanaan bisnis IIF di bidang pembiayaan infrastruktur diharapkan dapat terus dilakukan secara efektif dan efisien serta mampu menjadi bekal Perseroan dalam menjawab tantangan dan dinamika bisnis seiring dengan perkembangan industri yang semakin masif.

STRENGTHENING HUMAN RESOURCES COMPETITIVENESS

IIF is aware that Human Resources (HR) are the most valuable assets with a strategic role in realizing the Company's vision and mission and achieving the predetermined business targets. Therefore, IIF is committed to creating superior, qualified, and competent human resources so that they can face the increasingly challenging business developments. Furthermore, to strengthen team work, the Company continuously seeks to improve communication with all IIF personnel.

HR development programs are also carried out to strengthen IIF's position as an infrastructure financing company that always promotes sustainable infrastructure development to debtors and infrastructure project executors. Hence, IIF has constantly organized Knowledge Sharing programs where representatives from the Company's shareholders are invited. In 2019, IIF launched a new program entitled “S&E Awareness Month” which aimed to strengthen the understanding of IIF's personnel regarding the implementation of the S&E concept and the implementation procedures.

INFORMATION TECHNOLOGY

Along with the development and modernity of the industry, Information Technology (IT) becomes a key element to be applied by IIF. To ensure the realization of IT objectives according to the expectations, IIF has prepared an Information Technology Strategy Plan (ITSP) for 2018-2021, which serves as the Company's reference in developing and implementing technology solutions in the future.

Through the development of various IT systems, IIF is expected to continuously implement an infrastructure financing business effectively and efficiently, which will ultimately contribute to the Company's capability in responding to challenges and business dynamics in line with the flourishing development of the industry.



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk melaksanakan perannya sebagai katalisator dan *enabler* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, IIF berkomitmen untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap lini bisnisnya. Secara konsisten, Perseroan berusaha untuk menanamkan prinsip dan nilai GCG kepada setiap Insan IIF maupun bagi calon karyawan baru yang akan bergabung dengan Perseroan. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari para Pemegang Saham Perseroan.

Dengan mengimplementasikan praktik-praktik GCG berdasarkan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik, IIF tidak hanya menjadikan GCG sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan semata, tetapi juga sebagai perwujudan dalam menciptakan budaya korporasi yang sehat, kondusif, jujur, dan transparan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan operasional Perseroan, Direksi didukung oleh beberapa komite, yang meliputi Komite Investasi-Direksi (BOD-IC), Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Advisory, Komite Sumber Daya Manusia (HRC), dan Komite Pengarah TI (ITSC).

Secara keseluruhan, Direksi menilai bahwa seluruh komite tersebut telah menunaikan tugasnya dengan baik. Mereka juga aktif dalam memberikan nasihat, saran, dan pendapat kepada Direksi, sehingga memungkinkan Perseroan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan, visi, dan misi Perseroan. Ke depannya, keenam komite tersebut diharapkan dapat terus mendukung fungsi kerja Direksi dan selalu meningkatkan komunikasi antar pihak secara intens.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

To perform its role as a catalyst and enabler in financing infrastructure development, IIF is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) in each of its business lines. The Company also strives to consistently instill GCG principles and values to every IIF Individual as well as employee candidates who will join the Company, which gains much support from the Company's Shareholders.

With the adoption of GCG best practices that refers to the best GCG standards, IIF not only applies GCG as a form of the Company's compliance with laws and regulations, but also as a tangible effort in creating a healthy, conducive, honest and transparent corporate culture.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties as executor and manager of the Company's operational activities, the Board of Directors is supported by several committees, including the Board of Directors-Investment Committee (BOD-IC), Asset and Liability Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC), Advisory Committee, Human Resources Committee (HRC), and IT Steering Committee (ITSC).

Overall, the Board of Directors assesses that all of the committees had carried out their duties properly. They are also active in providing advice, suggestions, and opinions to the Board of Directors, thus enabling the Company to continuously improve the quality of performance in order to realize the goals, vision, and mission of the Company. Going forward, the six committees are expected to continuously support work function of the Board of Directors and always intensify communication between parties.



PROSPEK USAHA IIF

Direksi memandang bahwa potensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terbuka luas. Pandangan tersebut selaras dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju di tahun 2045 mendatang. Oleh sebab itu, industri pembiayaan, khususnya di sektor infrastruktur masih memiliki prospek yang sangat baik.

Dalam menjalankan aktivitas operasional dalam beberapa tahun mendatang, IIF telah menyiapkan *5-Year Business Plan*. Rencana Jangka Panjang ini akan menjadi dasar referensi untuk pengembangan bisnis kedepan.

Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan komitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF optimis mampu memaksimalkan peran IIF sebagai katalisator dan *enabler* dalam pembiayaan infrastruktur nasional sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur yang terdepan dalam menerapkan aspek-aspek keberlanjutan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, komposisi Direksi IIF mengalami perubahan. Bapak Reynaldi Hermansjah resmi menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 20 April 2019. Sementara itu, pada tanggal 31 Januari 2020, Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) Perseroan.

Dengan demikian, komposisi Direksi IIF saat ini adalah sebagai berikut:

Reynaldi Hermansjah	: Presiden Direktur / President Director
I Made Wiracita Tantra	: Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) / Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
Devi Pradnya Paramita	: Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO) / Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
Hilda Savitri	: Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)

Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, integritas dan kontribusi yang diberikan oleh Ibu Indrawati Darmawan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya selama masa bakti di IIF. Selanjutnya, Saya ucapkan selamat bergabung

IIF'S BUSINESS OUTLOOK

The Board of Directors views that infrastructure development potentials in Indonesia remain wide open. This view is in line with the government's commitment to realize Indonesia Maju program by 2045. Therefore, the financing industry, especially companies engaging in infrastructure sector, will continue to have highly promising outlook.

In conducting operational activities going forward, IIF has prepared the 5-Year Business Plan which serves as a reference basis for future business development.

As we hold fast to prudent principle and our commitment to continuously support sustainable infrastructure development, IIF is optimistic that it can optimize its role as a catalyst and enabler in national infrastructure financing while growing as the leading infrastructure financing company in the implementation of sustainability aspect.

CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

There were several changes in the composition of Board of Directors in 2019. Mr. Reynaldi Hermansjah has officially served as the President Director of the Company based on Notarial Deed No. 1 dated April 20, 2019. Meanwhile, on January 31, 2020, Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja resigned from his position as the Managing Director and Chief Investment Officer (CIO) of the Company.

Thus, the current composition of IIF's Board of Directors is as follows:

The Company would like to express the highest gratitude for the dedication, integrity and contributions of Ms. Indrawati Darmawan in carrying out his duties, responsibilities and authorities during her tenure at IIF. Furthermore, I wish to welcome Ms. Devi Pradnya



kepada Ibu Devi Pradnya Paramita sebagai anggota Direksi Perseroan. Dengan penetapan komposisi tersebut, kami selaku jajaran Direksi berkomitmen untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berpegang pada pedoman kerja Perusahaan, Anggaran Dasar dan rencana kerja tahunan yang disepakati. Semoga perubahan ini dapat membawa Perseroan ke arah yang lebih baik.

APRESIASI

Akhir kata, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan, masukan dan saran yang berguna dalam menjaga kelangsungan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha IIF sesuai pada koridor yang ditetapkan.

Kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh insan IIF yang telah menyumbangkan tenaga, waktu dan ide terbaiknya demi kemajuan bisnis Perseroan sehingga di tahun ini berhasil mencetak pencapaian kinerja yang memuaskan.

Tak lupa, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada regulator, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami mampu menjalankan pengelolaan bisnis dengan sangat baik.

Semoga usaha dan kerja keras yang telah dilakukan tidak hanya berdampak pada stabilitas laju pertumbuhan bisnis Perseroan semata, tetapi juga mampu memperkuat posisi IIF sebagai katalisator pembiayaan infrastruktur yang terus berkontribusi dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Paramita to the Board of Directors. With this changes, we as the Board of Directors are committed to the fulfillment of our duties, responsibilities and authorities to the best of our abilities while maintaining adherence to the Company's work guidelines, Articles of Association and the annual work plan. We hope that this change may lead the Company towards a better future.

APPRECIATION

To conclude, all members of the Board of Directors would like to thank the Shareholders and Board of Commissioners who have provided support, comments and advices that are useful in maintaining the continuity and smoothness of the implementation of IIF's business activities in accordance with the set corridor.

We also give our deepest appreciation to all IIF's people who have contributed their best effort, time, and ideas for the advancement of the Company's business so that this year we managed to record impressive performance achievements.

Not to forget, we wish to thank the regulators, business partners, and other stakeholders for the support given to us so that we are able to successfully manage the business.

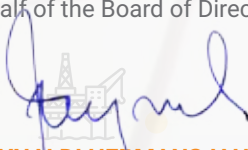
We hope that all the efforts and hard work exerted will not only contribute to the Company's stable business growth rate, but also strengthen IIF's position as an infrastructure financing catalyst that continues to contribute in achieving sustainable infrastructure development.

Jakarta, Maret 2020

Jakarta, March 2020

Atas nama Direksi

On behalf of the Board of Directors



REYNALDI HERMANSJAH

Presiden Direktur & CEO

President Director & CEO





Pada tahun 2019, IIF melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2019 yang mendapatkan peringkat AAA (*stable outlook*) dari PT Pefindo dengan tujuan penggunaan dana untuk keperluan ekspansi pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan untuk keperluan *refinancing*.

In 2019, IIF issued Shelf Registration Bonds I Indonesia Infrastructure Finance Year 2019 which obtained AAA (*stable outlook*) rating from PT Pefindo with the use of proceed for expansion of financing infrastructure projects in accordance with the Company's business activities, as well as for refinancing purposes.



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Informasi Perseroan

Company Information



Nama Perusahaan / Company Name
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (IIF)



Status Perusahaan /
Company Status
Perusahaan Swasta /
Private Company



Tanggal Berdiri / Date of Establishment
15 Januari 2010 / January 15, 2010



Bidang Usaha / Business Lines
Pembiayaan infrastruktur /
Infrastructure financing



Produk / Products
Produk Investasi (*Fund-based dan Non Fund-based*) dan *Advisory* / Investment Products
(Fund-based and Non Fund-based) and Advisory



Alamat Kantor Pusat /
Head Office Address
Prosperity Tower 53rd-55th Floor
District 8, Sudirman Central
Business District, Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190



+62 21 5082 6600



+62 21 5082 6601



info@iif.co.id



www.iif.co.id



Kepemilikan Saham / Share Ownership

- PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero): 30,00%
- Asian Development Bank (ADB): 19,99%
- International Finance Corporation (IFC): 19,99%
- DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH: 15,12%
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation: 14,90%



Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.100/2009 dan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 / Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009, as stipulated in the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/ KM.10/2010 dated August 6, 2010
- Akta No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 / Deed No. 34 dated January 15, 2010, which was drawn up before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated April 28, 2010, with announcement in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplement No. 5123



Sekilas Perseroan

Company at a Glance

Didirikan atas prakarsa dan inisiatif Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lembaga multilateral lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No 100 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pada tanggal 15 Januari 2010, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi institusi keuangan non-bank nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur, yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Selain bertujuan untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, IIF juga berupaya untuk menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk *fund-based* seperti pinjaman jangka panjang, produk *non fund-based* seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam pengelolaan kredit, manajemen risiko dan semua aspek tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar internasional untuk perlindungan sosial dan lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Didukung oleh struktur kapital yang kuat dari para pemegang saham serta pinjaman subordinasi jangka panjang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, IIF memiliki dasar yang kuat untuk memberikan solusi pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIF juga menempatkan fokus yang kuat dalam merekrut bakat-bakat terbaik di semua tingkatan untuk memberikan solusi terbaik untuk klien kami dan pada saat yang sama meningkatkan pengetahuan mengenai *Project Finance* yang mungkin tidak sepenuhnya berkembang di pasar.

Sejak awal didirikan hingga akhir tahun 2019, IIF belum pernah melakukan pergantian nama perusahaan.

The Company was founded on the initiatives of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the World Bank, Asian Development Bank, and other multilateral institutions, pursuant to the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100 of 2009 regarding Infrastructure Financing Companies. Since January 15, 2010, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) has served as a national non-bank financial institution which is engaged in the field of infrastructure finance and managed professionally with investment focus on commercially feasible infrastructure projects.

In addition to increasing private sector's participation in financing infrastructure development in Indonesia, IIF strives to become a catalyst in accelerating national infrastructure development. IIF provides an array of fund-based products, such as long-term loans, non-fund based products, including guarantee, and other infrastructure-related services.

In carrying out its operations, IIF implements the best practice based on international standards in loan management, risk management, and all corporate governance aspects, to deliver excellent social and environmental protection as added values and to ensure the sustainability of infrastructure development in Indonesia.

Supported with robust capital structure from the shareholders as well as long-term subordinated loans from the World Bank and Asian Development Bank, IIF has a strong foundation to provide financing solutions for national infrastructure development.

IIF strongly prioritizes the recruitment of the best talents at all levels to deliver the best solution for all clients while enhancing knowledge and skills regarding Project Financing, which may not be fully developed in the market.

Since its initial establishment up to the end of 2019, IIF has not changed its name.



Jejak Langkah Milestones

2010 PT SMI (Persero), IFC, ADB, dan DEG sebagai pemegang saham pendiri mendirikan IIF pada 15 Januari 2010. IIF was established on January 15, 2010, with PT SMI (Persero), IFC, ADB, and DEG as its founding shareholders

2011 Memperoleh pendanaan (*Subordinated Loan*) sebesar US\$100 juta dari Bank Dunia. Received subordinated loan of US\$100 million from the World Bank

2015

- Meraih peringkat AAAidn dari Fitch Indonesia
- Mengembangkan kemampuan/kapasitas
- Meningkatkan jumlah modal disetor menjadi Rp2 triliun dalam rangka memenuhi peraturan
- Berhasil membentuk tim sindikasi
- Merampungkan instalasi sistem baru
- Melakukan penguatan brand equity IIF melalui partisipasi dalam konferensi Euromoney
- Melaksanakan *stress test* portofolio
- Meningkatkan kepatuhan SEMS IIF dengan IFC PS 2012
- Menetapkan risiko kredit berdasarkan parameter IIF
- Menyesuaikan modal pemeringkatan risiko IIF

- Assigned AAAidn rating from Fitch Indonesia
- Expanded capacities
- Increased paid-up capital to Rp2 trillion in compliance with prevailing regulations
- Established syndication team
- Completed installation of new systems
- Strengthened IIF's brand equity through participation in the Euromoney Conference
- Conducted portfolio stress test
- Augmented IIF's SEMS compliance with IFC PS-2012
- Established credit risk based on IIF's parameters
- Adjusted IIF's risk rating model

2018

- Berpartisipasi sebagai *anchor investor* pada *Corporate Green Bond* pertama di Indonesia yang sesuai prinsip Green Bond dan standar *Green Bond* ASEAN untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan nilai emisi sejumlah US\$660 juta
- Menandatangani perjanjian komitmen pembiayaan sindikasi bersama dengan salah satu bank BUMN untuk pembangunan SPAM di Lampung dengan nilai proyek Rp750 Miliar. Proyek tersebut dilaksanakan melalui skema KPBU
- Memberikan fasilitas jaminan untuk pembangunan PLTB pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi 70MW yang terletak di Sulawesi Selatan
- Berpartisipasi dalam RDPT untuk mendukung pembangunan jalan tol sesuai dengan Proyek Strategis Nasional
- Melakukan penyertaan modal pada perusahaan publik di Indonesia yang bergerak pada sektor jalan, energi terbarukan hingga pengelolaan air.
- Bertindak sebagai transaction financial advisor pada proyek SPAM di Semarang Barat

- Participated as investor in the first Corporate Green Bond to be issued in accordance with the Green Bond principles and the ASEAN Green Bond Standards in Indonesia for the construction of a Geothermal Power Plant (PLTP) with an emission value of US\$660 million
- Signed an agreement for a syndicated financing commitment together with SOE banks for the construction of a Bulk Water Supply System in Lampung in the amount of Rp750 billion. The project was carried out through a PPP scheme
- Provided a guarantee facility for the construction of the first Wind Power Plant in Indonesia with a capacity of 70MW in South Sulawesi
- Participated in a Limited Participation Mutual Fund to support the construction of toll roads in accordance with the National Strategic Project
- Made capital participation in an Indonesian public company engaging in the road, renewable energy, and water management sectors
- Appointed as a transaction financial advisor for a Bulk Water Supply System development project in West Semarang

2019

- IIF berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi untuk konstruksi dan pembangunan Proyek Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I: Semanan – Sunter – Kelapa Gading
- IIF telah menandatangani Perjanjian Fasilitas *Senior Term Loan* untuk dukungan ekuitas di Kota Bandar Lampung dan Proyek Sistem Penyediaan Air Curah Umbulan
- IIF berpartisipasi dalam *World Bank Mission for Sustainable Financing*
- IIF menandatangani amandemen Perjanjian Fasilitas pinjaman untuk *Capital Expansion* kepada perusahaan di region Jawa.
- IIF telah menandatangani Fasilitas Sindikasi (Pinjaman Subordinasi) melalui Perjanjian Akses.
- IIF telah menandatangani Perjanjian Fasilitas *Cash Deficiency Support* kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

- IIF participated in the syndicated loans for construction and development of Jakarta Inner Toll Road Project Phase I: Semanan – Sunter – Kelapa Gading
- IIF signed the Senior Term-Loan Facility Agreement to provide equity support at Bandar Lampung City and for Umbulan Water Supply System Project
- IIF participated in the World Bank Mission for Sustainable Financing
- IIF signed an amendment to the Capital Expansion Loan Facility Agreement for a company in Java region
- IIF signed a Syndicated Facility (Subordinated Loans) through an Accession Agreement
- IIF signed an Agreement of Cash Deficiency Support Facility for Toll Road Operator

2012-2013

- Membangun kapabilitas organisasi
- Membangun kesadaran pasar/potensi pasar dan pengenalan terhadap produk
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation menjadi salah satu pemegang saham IIF
- Pendanaan dari ekuitas mencapai Rp1.777.868.000.000
- Mengembangkan aset
- Menandatangani pinjaman komersial pertama senilai Rp500 miliar untuk proyek Jalan Tol Cipali
- Developed organizational capabilities
- Built market awareness & brand recognition
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation became one of IIF's Shareholders
- Funding from equity reached Rp1,777,868,000,000
- Expanded assets
- Signed the 1st commercial loan with commitment of Rp500 billion for Cipali Toll Road project

- Menyelesaikan pengembangan organisasi dan kelembagaan (*Human Capital*, Manajemen Risiko dan Operasional Teknologi Informasi)
- Meningkatkan kerangka dan *platform* Manajemen Risiko
- Mendapat pendanaan dari pinjaman IFC A/B sebesar US\$250 juta
- Mengembangkan aset dan memperbaiki *yield*
- Menyalurkan dana ekuitas & SLA yang masih tersedia untuk proyek-proyek yang layak
- Mencapai total aset sebesar Rp4,7 triliun dan komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun
- Completed institutional and organizational development (*Human Capital*, Risk Management & Information Technology Operations)
- Improved risk management platform & framework
- Received IFC A/B Funding of US\$250 million
- Expanded assets and improved yields
- Distributed the remaining equity & SLA funds to viable projects
- Reached total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion

- Meraih peringkat idAAA dari Pefindo
- Menjadi *Mandated Lead Arranger* untuk pertama kalinya dalam proyek KPBU IIF yang pertama
- Menerbitkan obligasi Perusahaan pertama senilai Rp1,5 triliun
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai US\$150 juta
- Assigned idAAA rating from Pefindo
- Acted as a Mandated Lead Arranger for the first time for IIF's first PPP project
- Issued the Company's first bond amounting to Rp1.5 trillion
- Received funding from a syndication of foreign banks in the amount of US\$150 million

- Menjadi *financial advisor* untuk proyek *Merger & Acquisition* (M&A) terbesar senilai US\$92,87 juta atau setara dengan Rp1,24 triliun
- Berpartisipasi dalam obligasi global pertama berdenominasi USD yang diterbitkan di Indonesia. *Komodo Bonds* senilai Rp2 triliun tersebut diterbitkan oleh BUMN operator jalan tol
- Menandatangani perjanjian kredit dengan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar JPY8.000.000.000
- Mendapat penghargaan dari IJGlobal untuk akuisisi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Chevron berkapasitas 227 MW di Jawa Barat
- Became a financial advisor for a Merger & Acquisition (M&A) project worth US\$92.87 million or equal to Rp1.24 trillion
- Participated in the first Global Bond issued in USD in Indonesia. The Komodo Bonds worth Rp2 trillion was issued by a toll road operator SOE
- Signed a loan agreement with the Japan International Corporation Agency (JICA) in the amount of JPY8,000,000,000
- Received an award from IJGlobal for the acquisition of the 227 MW Chevron Geothermal Power Plant (PLTP) project in West Java

- IIF menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dukungan Jalan Tol Berkelanjutan.
- IIF memberikan fasilitas pinjaman senior kepada proyek pembangkit listrik tenaga biomassa pertama menggunakan tandan buah kosong dari kelapa sawit.
- IIF memberikan fasilitas modal kerja kepada produsen baja di Indonesia
- IIF partisipasi sebagai co-sponsor dalam "Indonesia Financing and Investment Forum"
- IIF menyelenggarakan *Investor Gathering* atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019.
- IIF memberikan fasilitas pinjaman senior kepada proyek Mini Hydro di Garut dan Tomasa
- IIF mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia
- IIF signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Indonesian Toll Road Authority to support Sustainable Toll Road
- IIF provided a senior loan facility for first biomass power plant using empty fruit bunches of palm oil
- IIF provided working capital facility for an Indonesian steel producer
- IIF became a co-sponsor in the "Indonesia Financing and Investment Forum"
- IIF held an Investor Gathering event for the Public Offering of Shelf-Registration Bonds I Phase I Year 2019
- IIF provided a senior loan facility for Mini Hydro project in Garut and Tomasa
- IIF listed the Shelf-Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 on the Indonesia Stock Exchange

Visi dan Misi

Vision and Mission

VISI

Vision

**Menjadi pelopor katalisator
untuk pembiayaan pengembangan
infrastruktur di Indonesia.**

*To become the leading catalyst for financing
infrastructure development in Indonesia.*

MISI

Mission

- Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;
 - Memelopori ketersediaan beragam instrument pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan
 - Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
- *To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;*
 - *To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and*
 - *To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into long-term development of Indonesia's infrastructure.*



Kegiatan Usaha

Business Activities

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir kali diperbarui melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN TAHUN 2019

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh IIF pada tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan PT Indonesia Infrastructure Finance, yaitu dengan menyediakan produk pembiayaan berupa:

Produk Investasi

1. Fund-based

- Menyediakan pinjaman dalam bentuk antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine finance*, pembiayaan talangan, *take out financing* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan, dan;
- Investasi ekuitas

2. Non Fund-based

Menyediakan jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan kewajiban keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.

Advisory

A. Layanan Untuk Klien Sektor Publik

1. Layanan Konsultan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan transaksi kepada klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, dimana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company engages in financing infrastructure projects in Indonesia as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended through Deed No. 43 dated July 24, 2018.

BUSINESS ACTIVITIES CONDUCTED IN 2019

In 2019, IIF conducted business activities in line with those as stipulated in the Articles of Association of PT Indonesia Infrastructure Finance, namely by providing financing products as follows:

Investment Product

1. Fund-based

- Providing loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/*mezzanine finance*, bridge financing, take out financing, and/or refinancing;
- Financing other activities related to infrastructure projects as permitted by laws and regulations; and
- Providing equity investment.

2. Non Fund-based

Providing guarantees in the form of guarantee, stand-by financing, credit enhancement, and/or performance bonds.

Advisory

A. Services for Public Sector Clients

1. Transaction Advisory Services

Providing specialized transaction advisory services to public sector clients, such as ministries, regional governments, and state-owned/regional-owned enterprises, with regards to infrastructure projects involving contracts between Government institutions and private parties, in which the private party provides a public service and assumes financial, technical, and operational risks in the project.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi dapat mencakup:

- a. Proyek-proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b. Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable*, di samping juga meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

B. Layanan Untuk Klien Sektor Swasta

Layanan Konsultan Keuangan dan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan keuangan dan/atau transaksi kepada klien sektor swasta pada setiap tahapan siklus proyek infrastruktur. Lingkup layanan konsultan keuangan antara lain: pelaksanaan uji tuntas proyek, penyiapan proyek, penyiapan struktur komersial, studi kelayakan, penyiapan penawaran lelang untuk memenangkan tender konsesi, negosiasi perjanjian konsesi, penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman proyek, valuasi, transaksi *joint venture*, dan *merger & acquisition* (M&A).

The types of infrastructure project eligible to receive transaction advisory services include:

- a. Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b. Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM B2B projects in the drinking water sector.

The scope of transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility analysis, Government support analysis, commercial structuring, negotiation, tender/procurement implementation process, and institutionalization process aimed to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as improving the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Providing advisory services to public sector clients, such as ministries and regional governments, in formulating infrastructure-related policies and/or increasing capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure procurement.

B. Services for Private Sector Clients

Financial and Transaction Advisory Services

Providing financial and/or transaction advisory services to private sector clients throughout the entire life cycle of an infrastructure project. The scope of financial advisory services may include project due diligence, project preparation and structuring, feasibility analysis, concession bid preparation, concession negotiation, loan and/or equity fundraising, valuation, joint venture transaction advisory, and merger and acquisition (M&A) transaction advisory.



Sektor Pembiayaan Infrastruktur

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan infrastruktur, Perseroan memiliki sektor-sektor prioritas proyek infrastruktur yang menjadi target pembiayaan Perseroan. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, objek pembiayaan infrastruktur meliputi:

- Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai, atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
- Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
- Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi;
- Infrastruktur sosial, meliputi infrastruktur system pengelolaan persampahan, infrastruktur energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga masyarakat, dan infrastruktur perumahan rakyat;
- Infrastruktur distribusi pangan termasuk pergudangan; dan
- Infrastruktur pengelolaan kawasan industri, meliputi pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan.

Infrastructure Financing Sector

In conducting infrastructure financing activities, the Company has determined the priority sectors of infrastructure project as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 100/PMK.010/2009 regarding Infrastructure Financing Companies and the letter of Financial Services Authority (OJK) No. S-2/D.05/2018 dated January 2, 2018, objects for infrastructure financing include:

- Transportation infrastructure, covering seaports, river or lake ports, airports, railway networks, and railway stations;
- Road infrastructure, covering toll roads and toll bridges;
- Irrigation infrastructure, covering raw water channels;
- Drinking water infrastructure, covering raw water intake facilities, transmission networks, distribution networks, and drinking water refinery installations;
- Waste water infrastructure, covering waste water treatment installations, collection and main sewage system, and waste facilities, such as transportation and disposal facilities;
- Telecommunication infrastructure, covering telecommunication networks;
- Electricity infrastructure, covering electric power generators and power transmissions or distributions;
- Oil and gas infrastructure, covering refineries, storages, and transportation, transmission, and distribution facilities of oil and gas;
- Social infrastructure, covering waste management systems, renewable energy infrastructure, energy conservation infrastructure, urban infrastructure facilities, educational infrastructure facilities, sports and arts infrastructure facilities, regional infrastructure, tourism infrastructure, health infrastructure, penitentiary infrastructure, and public housing infrastructure;
- Food distribution infrastructure, covering warehousing; and
- Industrial area management infrastructure, covering land acquisition and infrastructure construction and operation.



Portofolio IIF

di Tahun 2019

IIF Portfolio in 2019

• Jalan Tol / Toll Road



- *Syndication Subordinated Term Loan* untuk ruas jalan tol Cibitung – Cilincing
- Pembangunan beberapa ruas jalan tol, antara lain Jakarta Outer Ring Road – seksi North W2, Jakarta; Jakarta Cikampek II (Japek II) sepanjang 36,40 km; Cikopo – Palimanan; Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll seksi Semanan – Sunter – Pulo Gebang (fase 1); seksi Cibitung - Cilincing
- Pemesanan Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk Operator Jalan Tol
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- *Infrastructure Investment Fund Product - Toll Road Mandiri (Dinfra-001)* di Jawa Timur
- *Syndication Subordinated Term Loan* for Cibitung – Cilincing toll road section
- Construction of a number of toll road sections, among others, Jakarta Outer Ring Road – North W2 section, Jakarta; Jakarta Cikampek II (Japek II) of 36.40 km, Cikopo – Palimanan; Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll of Semanan – Sunter – Pulo Gebang section (phase 1); Cibitung - Cilincing section
- Global Bonds Order in Rupiah Denomination for Toll Road Operator
- Limited Funds of Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- Infrastructure Investment Fund Product - Toll Road Mandiri (Dinfra-001) in East Java

Utilitas Air dan Limbah Water and Waste Utilities



- Pemberian *bridging financing* untuk META untuk pengembangan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur
- Proyek SPAM Kota Bandar Lampung
- Proyek *Water Treatment Plant* di Tangerang dengan total kapasitas mencapai 5.075 lps
- Proyek Infrastruktur Air Minum di Jakarta dan Tangerang
- Provision of bridging financing for META for the development of Provision Project of Drinking Water System (SPAM) in Umbulan, East Java
- SPAM project in Bandar Lampung
- Water Treatment Plant project in Tangerang with total capacity of 5,075 lps
- Drinking Water Infrastructure project in Jakarta and Tangerang

• Pelabuhan / Sea Port



- Proyek ekspansi Terminal 103-105 Tanjung Priok, Jakarta
- Pengembangan *Belawan International Container Terminal Expansion Phase II*
- Expansion project of Terminal 103-105 of Tanjung Priok, Jakarta
- Development of Belawan International Container Terminal Expansion Phase II

• Minyak dan Gas / Oil and Gas



- Pembiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD di Jawa Timur
- Pengembangan Sistem Automasi Terminal BBM di Jawa Tengah
- Proyek Ekspansi LNG Tangguh di Papua Barat
- Transportasi, Penyimpanan, dan Regasifikasi LNG Sambera, Kalimantan Timur
- Financing for LPG plant with total capacity of 40 MMSCFD in East Java
- Development of Automation System at Fuel Terminal in Central Java
- Expansion project of LNG Tangguh in West Papua
- Transportation, Storage, and Re-gasification at LNG Sambera, East Kalimantan

Telekomunikasi / Telecommunication



- Proyek *Palapa Ring II, Central Package of Indonesia* dan *Telecommunication Provider*
- *Palapa Ring II, Central Package of Indonesia and Telecommunication Provider projects*

Bandara / Airport



- Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Jawa Barat
- Proyek ekspansi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Bandara Internasional Ahmad Yani, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Juanda, dan Konstruksi Bandara *New Kulon Progo* Yogyakarta
- Construction of air transportation infrastructure in West Java
- Expansion projects of Soekarno-Hatta International Airport, Syamsuddin Noor International Airport, Ahmad Yani International Airport, Sultan Hasanuddin International Airport, Juanda International Airport, and Construction of *New Kulon Progo* Yogyakarta Airport

Ketenagalistrikan / Electricity



- Pembangunan beberapa pembangkit listrik, antara lain:
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Asahan, Sumatera Utara: 180 MW;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gorontalo Utara
 - PLTA Mini Sangir Solok, Sumatera Barat: 2x5 MW
 - PLTA Tomata, Sulawesi Tengah: 3x3,7 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang Windu, Jawa Barat: 227 MW
 - PLTA Mini Sion di Sulawesi Utara: 2x6 MW
 - PLTA Mini Tomasa, Sulawesi Tengah: 2x5 MW
 - PLTA Mini Cikopo-2, Jawa Barat: 2x3,7 MW
 - Proyek *Wind Farm* di Sulawesi Selatan: 70 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan: 70 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Aceh dengan kapasitas 1x12 MW, termasuk fasilitas interkoneksi sepanjang 2,2 km
- Pembangunan *Temporary Power Provider*
- Pemesanan Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik di Riau dan Jawa Timur
- Construction of a number of power plants, including:
 - Hydro Power Plant (PLTA) in Asahan, North Sumatera: 180 MW;
 - Solar Power Plant (PLTS) in North Gorontalo
 - PLTA Mini in Solok, West Sumatera: 2x5 MW
 - PLTA in Tomata, Central Sulawesi: 3x3,7 MW
 - Geothermal Power Plant (PLTP) in Wayang Windu, West Java: 227 MW
 - PLTA Mini in Sion, North Sulawesi: 2x6 MW
 - PLTA Mini in Tomasa, Central Sulawesi: 2x5 MW
 - PLTA Mini in Cikopo-2, West Java: 2x3,7 MW
 - Wind Farm Project in South Sulawesi: 70 MW
 - Wind Power Plant (PLTB) in Sidrap, south Sulawesi: 70 MW
 - Biomass Power Plant in Aceh with capacity of 1x12 MW, including the interconnecting facilities of 2.2 km
- Development of Temporary Power Provider
- Global Bond Order in Rupiah Denomination for the power plant construction projects in Riau and East Java

Lainnya / Others

- Proyek *Archipelago* di Sulawesi Selatan
- Fasilitas *Revolving Working Capital* di Sumatera Utara
- Archipelago project in South Sulawesi
- Revolving Working Capital project in North Sumatera



Lokasi Proyek

Project Locations



Bandar Udara / Airport



Jawa / Java

Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta / West Java, Banten, Central Java, East Java, Yogyakarta

Kalimantan

Kalimantan Selatan / South Kalimantan

Sulawesi

Sulawesi Selatan / South Sulawesi

Ketenagalistrikan / Electricity



Sumatera

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau / Aceh, North Sumatera, West Sumatera, Riau

Jawa & Bali / Java & Bali

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali / Jakarta, West Java, East Java, Bali

Sulawesi

Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan / Gorontalo, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi

Pelabuhan Laut / Seaport



Jakarta, Sumatera Utara / Jakarta, North Sumatera

Jalan / Road



Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur / Jakarta, West Java, East Java





Telekomunikasi / Telecommunication



Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku / Jakarta, West Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku

Air / Water



Jawa Timur, Lampung, Banten, Jakarta / East Java, Lampung, Banten, Jakarta

Minyak Bumi dan Gas / Oil and Gas



Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur / East Java, Central Java, West Papua, East Kalimantan

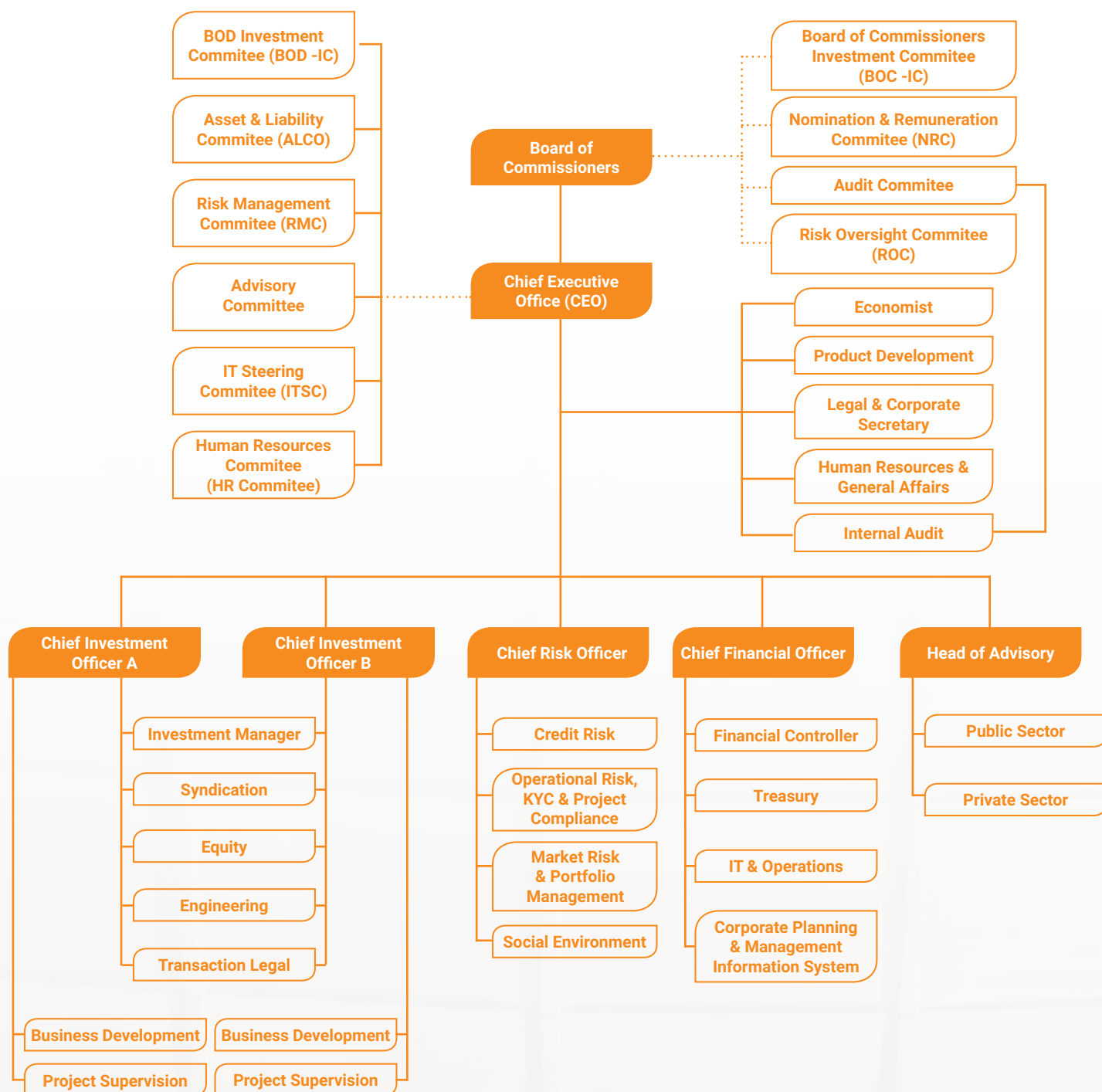
Lainnya / Others



Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan / North Sumatera and South Sulawesi

Struktur Organisasi

Organization Structure



Head of Product Development	: Y. Bayu Wirawan	Head of Credit Risk	: Luciana Budiman
Head of Legal & Corporate Secretary	: Nstantio W. Hadi	Operational, KYC & Project Compliance	: Yulia Trinita
Head of HR & GA	: Suli Indah Lestari	Head of Market Risk & Portfolio Management	: Pongky Afriandita
Head of Internal Audit	: Yudi Adrial	Head of Social & Environmental	: Irdez Azhar
Business Development 1 CIO-A	: Fredia Yuzirwan	Head of Financial Control	: Andi Faizal
Business Development 2 CIO-A	: Luthfi Amara	Head of Treasury	: Faridh Hilmy Muhsinin
Business Development CIO-B	: M. Izmir Fadilah Ifdial	Head of IT & Operations	: Myria Ariandri
Project Supervision CIO-A	: Febrina Kalangie	Head of Corporate Planning & MIS	: Erwin Manurung
Project Supervision CIO-B	: Eduard Rixson Batubara	Head of Advisory	: Irman Boyle

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



V. Sonny Loho

Plt. Presiden Komisaris & Komisaris Independen

Interim President Commissioner & Independent Commissioner

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 62 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak V. Sonny Loho menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018, dan dimandatkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden Komisaris berdasarkan Akta Notaris No. 23 efektif tanggal 9 Desember 2019.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau menjabat sebagai Komisaris untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Beliau juga berkiprah sebagai *Chartered Accountant* (CA) dan berperan sebagai anggota Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah dan Komite Pengarah Sektor Publik Indonesia Chartered Accountant. Berbekal pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan, beliau dipercaya untuk menjabat di beberapa posisi penting di Kementerian Keuangan seperti Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Inspektur Jenderal, serta Direktur Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2013-2015).

Beliau meraih gelar D4 Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di tahun 1987. Kemudian pada tahun 1998, beliau memperoleh gelar Master di Public Management Finance dari Carnegie Mellon University.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak V. Sonny Loho tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Mr. V. Sonny Loho, 62 years old, is an Indonesian citizen and domiciled in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's Independent Commissioner in 2018, and assigned as the Interim President Commissioner based on Notary Deed No. 23 effective since December 9, 2019.

Prior to serving as the Company's Independent Commissioner, he served as a Commissioner at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. He is also a Chartered Accountant (CA) and serves as a member of the Consultative and Steering Committee of the Public Sector Accounting Standard Committee of Indonesia Chartered Accountant. With his knowledge and experience in financial field, he has held several key positions in the Ministry of Finance, such as Director General of State Assets Management, Inspector General, as well as Director of Accounting and Finance Reporting of the Directorate General of Treasury. He also served as the Chairman of Indonesian Internal Auditor Association (2013-2015).

He earned his Diploma IV degree from the Indonesian State College of Accountancy (STAN) in 1987 and Master of Public Management Finance degree from Carnegie Mellon University in 1998.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Independent Commissioner, Mr. Loho concurrently serves as a Commissioner at PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Information on Affiliation

Mr. Loho has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.



Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 59 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak Rinaldi Firmansyah bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Notaris No.07 efektif tanggal 25 Januari 2018.

Mengawali karier sebagai Junior Field Engineer di Schlumberger-Inggris, Project Manager & Commissioning Engineer di Siemens/PT Dian Graha ElektriKA, beliau selanjutnya bekerja di Citibank (1988-1991); Wakil Presiden Keuangan PT Tirtamas Comexindo (1991-1997) dan PT Kwalita Exporindo International; Direktur, Direktur Utama dan Wakil Presiden Komisaris di PT Bahana Securities (1997-2004); Komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Semen Padang (2003-2004); Direktur Keuangan (2004-2007) dan Presiden Direktur (2007-2012) di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; Komisaris PT Blue Bird Tbk dan Komisaris PT Elnusa Tbk.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1985), Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (1988), dan Doktor Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2014). Selain itu, beliau juga telah mengantongi sertifikat Chartered Financial Analyst dari CFA Institute (d/h AIMR), Charlottesville, Amerika Serikat.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bluebird, Tbk.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Rinaldi Firmansyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Mr. Rinaldi Firmansyah, 59 years old, is an Indonesian citizen domiciled in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's Independent Commissioner based on Notary Deed No. 7, effective since January 25, 2018.

Some of his early professional positions include Junior Field Engineer at Schlumberger-England and Project Manager & Commissioning Engineer at Siemens/PT Dian Graha ElektriKA. Followed by tenure at Citibank (1988-1991) prior to becoming the Vice President of Finance of PT Tirtamas Comexindo (1991-1997) and PT Kwalita Exporindo International; Director, President Director, and Vice President Commissioner of PT Bahana Securities (1997-2004); Commissioner and Head of Audit Committee of PT Semen Padang (2003-2004); Director of Finance (2004-2007) and President Director (2007-2012) of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; and Commissioner at PT Blue Bird Tbk and PT Elnusa Tbk.

He earned his Bachelor of Electrical Engineering degree from Bandung Institute of Technology in 1985, Master of Business Administration degree from the Indonesian Institute for Management Development in 1988 and Doctorate degree in Management Science from the Faculty of Economics of Padjadjaran University in 2014. He is certified as a Chartered Financial Analyst by the CFA Institute (formerly AIMR) in Charlottesville, US.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Independent Commissioner, Mr. Firmansyah concurrently serves as an Independent Commissioner at PT Bluebird, Tbk.

Information on Affiliation

Mr. Firmansyah has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.



Bhimantara Widyajala

Komisaris
Commissioner

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak Bhimantara Widyajala bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.07 efektif tanggal 28 Juli 2017.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang kuat serta pengalaman panjang lebih dari 30 tahun di sektor pemerintahan maupun sektor korporasi.

Bapak Bhimantara pernah menjabat sebagai Direktur Surat Utang Negara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Indonesia Power dan Komisaris di PT Perusahaan Pengelola Aset. Lebih lanjut, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asian Development Bank di Manila, Filipina. Bapak Bhimantara Widyajala juga adalah Dean untuk Dewan Direktur ADB dari bulan Januari sampai Juni 2017.

Beliau memiliki sertifikasi profesi dalam bidang audit internal (Certified Internal Auditors/CIA), manajemen risiko (Certification in Risk Management Assurance/CRMA) dan pemeriksaan kecurangan (Certified Fraud Examiners/CFE) Chartered Accountant/CA and CPA (Australia) yang mewakili kompetensi profesional dan kemampuan beliau dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Bapak Bhimantara Widyajala meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) serta Master of Science in Finance dari The George Washington University, di Washington D.C, Amerika Serikat. Salah satu program pelatihan yang pernah diikutinya adalah Executive training: Leading and Managing People yang diselenggarakan oleh Wharton Executive Education, University of Pennsylvania, Philadelphia, AS, 2012.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau adalah Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategis di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Acting Director untuk Pusat Pengawasan Profesi Kementerian Keuangan.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Bhimantara Widyajala tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mr. Bhimantara Widyajala, 52 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 7, effective since July 28, 2017.

He has an extensive educational and professional background, as well as more than 30 years of experience in the Government and the corporate sector.

He previously served as the Director of State Securities Management and Secretary in the Directorate General of Debt Management at the Ministry of Finance of Republic of Indonesia. He also served as a Commissioner at PT Indonesia Power and PT Perusahaan Pengelola Aset, an Executive Director at Asian Development Bank in Manila, the Philippines, and the Dean of the Board of Directors of ADB in January to June 2017.

He holds professional certification in the fields of internal audit (Certified Internal Auditors/CIA), risk management (Certification in Risk Management Assurance/CRMA), and fraud examination (Certified Fraud Examiners/CFE). He is a certified Chartered Accountant/CA and CPA (Australia) which enhances his credentials in good corporate governance aspect.

He earned his Bachelor of Law degree from the University of Indonesia and Accounting degree from the Indonesian State College of Accountancy (STAN), as well as Master of Science degree in Finance from The George Washington University, Washington, DC., US. One of the training programs he attended was Executive training: Leading and Managing People organized by Wharton Executive Education at the University of Pennsylvania, Philadelphia, US, in 2012.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Widyajala concurrently serves as a Strategic Planning Advisor at the Secretariat General of the Ministry of Finance and the Acting Director of the Center for Financial Profession Supervisory of the Ministry of Finance.

Information on Affiliation

Mr. Widyajala has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).



Muhamad Al-Arif

Komisaris

Commissioner

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 47 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak Muhamad Al-Arif bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.08 efektif tanggal 13 Februari 2018.

Bapak Muhamad Al-Arif merupakan seorang pengacara konstitusional, ekonom, dan ahli hubungan internasional. Beliau telah berpengalaman selama hampir 20 tahun sebagai praktisi pembangunan. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan dalam Grup Bank Dunia. Adapun jabatan terakhir yang beliau pegang sebagai Head of External & Corporate Relations untuk Social Protection dan Labor Global Practice. Selama bekerja di Bank Dunia pada Departemen Asia Pasifik Timur, beliau bertanggung jawab atas keterlibatan strategis antarwilayah dan mengoordinasikan sebuah tim beranggotakan 40 profesional pengembangan di 13 kantor negara. Beliau juga mengawasi kerja sama antarbank dengan institusi daerah, terlebih dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Beliau meraih gelar Sarjana dan Pascasarjana dari Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan pascasarjana di The Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University di Massachusetts, AS. Beliau juga berpartisipasi dalam Leadership Program di Walsh School of International Affairs, Georgetown University, Washington D.C.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Muhamad Al-Arif tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mr. Muhamad Al-Arif, 47 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 8, effective since February 13, 2018.

He is a constitutional lawyer, economist, and international relations expert with nearly 20 years of experience as a development practitioner. He has held various leadership positions in the World Bank Group, the latest one being the Head of External & Corporate Relations for Social Protection and Global Labor Practices. During his tenure at the World Bank's East Asia Pacific Department, he was responsible for inter-regional strategic involvement and oversaw a team of 40 development professionals in 13 state offices. He also oversaw interbank cooperation with regional institutions, especially with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

He earned his Bachelor's and Master's degrees from the University of Indonesia and pursued a postgraduate study at The Fletcher School of Law & Diplomacy of Tufts University, Massachusetts, US. He also took part in the Leadership Program at the Walsh School of International Affairs of Georgetown University, Washington, DC.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Al-Arif concurrently serves as a Special Advisor for the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Information on Affiliation

Mr. Al-Arif has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).





Andreas Zeisler

Komisaris
Commissioner

Merupakan Warga Negara Jerman yang berusia 60 tahun dan berdomisili di Köln, Jerman. Bapak Andreas Zeisler bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.31 efektif tanggal 21 Maret 2019.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Senior Investment Manager CEE and CIS, Regional Manager Baltic States dan CEO of DEG Private Equity Fund in Russia di – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (1993 – 2002), Business Consultant di DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH (1990 – 1993) dan Director, Credit Policy of Emerging Market di Ministry of Finance, East Berlin (1983 – 1990).

Beliau meraih gelar Diploma di bidang International Finance dari Finance Institute, Moskow pada tahun 1983, serta Doctoral di bidang Economics dari University of Economy, Berlin pada tahun 1991.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Head of Financial Institutions (Equity) Department di DEG –Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Andreas Zeisler tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari DEG–Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH

Mr. Andreas Zeisler, 60 years old, is a German citizen and currently domiciles in Köln, Germany. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 31, effective since March 21, 2019.

Prior to joining the Company, he served as a Senior Investment Manager CEE and CIS, Regional Manager Baltic States, and CEO of DEG Private Equity Fund in Russia at Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (1993-2002), Business Consultant at DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH (1990- 1993), and Director for Credit Policy of Emerging Market at the Ministry of Finance, East Berlin (1983-1990).

He earned his Diploma degree in International Finance from Monscow Finance Institute in 1983, and Doctorate degree in Economics from the University of Economy, Berlin, in 1991.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Zeisler concurrently serves as the Head of Financial Institutions (Equity) Department at DEG–Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH.

Information on Affiliation

Mr. Zeisler has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of DEG–Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH.





Lodewijk Govaerts

Komisaris

Commissioner

Merupakan Warga Negara Belanda yang berusia 60 tahun dan berdomisili di Amsterdam, Belanda. Bapak Lodewijk Govaerts bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.10 efektif tanggal 26 Juli 2019.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Global Head Financial Institutions Trade & Infrastructure di ABN Amro Netherlands (2017 – 2019), Non Executive Director di PPCS International Ltd, Netherlands (2016 – 2018), Chief Executive Office BNS Berhad and Country MD Scotiabank Malaysia di Scotiabank Malaysia (2012 – 2016), Member of MCB's Group Executive Management Team di Scotiabank Dutch Caribbean (2009 – 2011), Chief Executive Officer, Indonesia di ABN AMRO Indonesia (2007 – 2008), Vice-Chairman and Head of Corporate, Commercial & Investment Banking China di ABN AMRO China (2006- 2007), Executive Director, Head Credit Portfolio Management Asia Pacific (Including Australia) & Middle East di ABN AMRO Asia Pacific (Hong Kong) (2001 – 2006), Group Vice President & Head Structured Finance & Investment Banking di ABN AMRO Pakistan (1999 – 2000), Associate Director Fixed Income & Asset Securitization and Manager Treasury di ABN AMRO Australia (1995 – 1999), ABN AMRO International Graduate Management Trainee Program and Seconded to ABN AMRO Ireland and ABN AMRO Head Office's Global Risk Management Department in Amsterdam (1993 – 1994), Assistant Brand Manager di Protect & Gamble Netherlands (1992).

Beliau meraih gelar Sarjana (1986) dan Pascasarjana (1990) pada jurusan Administrasi Bisnis dari Groningen School of Management, Belanda.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Non-Executive Director di PPCS International Ltd, Belanda.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Lodewijk Govaerts tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari Asian Development Bank.

Mr. Lodewijk Govaerts, 60 years old, is a Dutch citizen and currently domiciles in Amsterdam, the Netherlands. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 10, effective since July 26, 2019.

Prior to joining the Company, he served as the Global Head of Financial Institutions Trade & Infrastructure at ABN Amro Netherlands (2017-2019), Non-Executive Director at PPCS International Ltd, Netherlands (2016-2018), Chief Executive Officer of BNS Berhad and Country MD Scotiabank Malaysia at Scotiabank Malaysia (2012-2016), Member of MCB's Group Executive Management Team at Scotiabank Dutch Caribbean (2009-2011), Chief Executive Officer for Indonesia at ABN AMRO Indonesia (2007-2008), Vice-Chairman and Head of Corporate, Commercial & Investment Banking China at ABN AMRO China (2006-2007), Executive Director, Head of Credit Portfolio Management for Asia Pacific (Including Australia) & Middle East at ABN AMRO Asia Pacific (Hong Kong) (2001-2006), Group Vice President & Head of Structured Finance & Investment Banking at ABN AMRO Pakistan (1999-2000), Associate Director of Fixed Income & Asset Securitization and Manager of Treasury at ABN AMRO Australia (1995-1999), ABN AMRO International Graduate Management Trainee Program and Seconded to ABN AMRO Ireland and ABN AMRO Head Office's Global Risk Management Department in Amsterdam (1993-1994), and Assistant Brand Manager at Protect & Gamble Netherlands (1992).

He earned his Bachelor's and Master's degree in Business Administration from Groningen School of Management, the Netherlands.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Govaerts concurrently serves as a Non-Executive Director at PPCS International Ltd, the Netherlands.

Information on Affiliation

Mr. Govaerts has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of Asian Development Bank.





Rajeev Veeravalli Kannan

Komisaris
Commissioner

Merupakan Warga Negara India yang berusia 47 tahun dan berdomisili di Singapura. Bapak Rajeev Veeravalli Kannan bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.03 efektif tanggal 7 Maret 2012.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Executive Officer di Sumitomo Mitsui Banking Corporation yang bertanggung jawab atas seluruh klien perusahaan dan solusi investor di Asia dan Australia, termasuk infrastruktur & project finance, M&A finance, real estate finance, asset finance, securitization serta syndication & distribution.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur & General Manager di Departemen Structured Finance, Tokyo di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2015-2016), General Manager di Departemen Project & Export Finance, Tokyo di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2012-2015), General Manager di Departemen Structured Finance Asia Pasifik di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2010-2012), Kepala Structured Finance Asia Pasifik di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2008-2010) dan Deputy Manager di ICICI Bank Ltd (1994-1997).

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Direktur & General Manager, Head of Investment Banking, Asia di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Rajeev Veeravalli Kannan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Mr. Rajeev Veeravalli Kannan, 47 years old, is an Indian citizen and currently domiciles in Singapore. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 3, effective since March 7, 2012.

He also serves as the Executive Officer at Sumitomo Mitsui Banking Corporation and is responsible for all corporate clients and investor solutions in Asia and Australia, including infrastructure & project finance, M&A finance, real estate finance, asset finance, securitization, as well as syndication & distribution.

Previously, he served as a Director & General Manager of Tokyo Structured Finance Department at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2015-2016), General Manager of Tokyo Project & Export Finance Department at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2012-2015), General Manager of Asia Pacific Structured Finance Department at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2010-2012), Head of Asia Pacific Structured Finance at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2008-2010) and Deputy Manager at ICICI Bank Ltd (1994-1997).

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Kannan concurrently serves as a Director & General Manager, Head of Investment Banking, Asia at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore.

Information on Affiliation

Mr. Kannan has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of Sumitomo Mitsui Banking Corporation.





Richard Lyon Ranken

Komisaris

Commissioner

Merupakan Warga Negara Australia yang berusia 71 tahun dan berdomisili di Australia. Bapak Richard Lyon Ranken bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.01 efektif tanggal 2 Maret 2016.

Sebelum mengemban tugas sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur pada sebuah perusahaan ternama di Australia yang bergerak dalam penyediaan infrastruktur dan air untuk keperluan irigasi agribisnis, dimana beliau juga menjadi ketua Komite Risiko dan Kepatuhan. Beliau juga pernah menduduki posisi Direktur, Direktur untuk kawasan Sub-Sahara Afrika, dan Direktur kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, di International Finance Corporation of Global Manufacturing.

Beliau meraih gelar Bachelor of Agricultural Economics dari University of New England, Australia pada tahun 1971 dan gelar Master of Administrative Studies dari Australian National University pada tahun 1977.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Anggota di Komite Advisory di Kula 2 Pacific Equity Fund (2016-sekarang).

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Richard Lyon Ranken tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari International Finance Corporation.

Mr. Richard Lyon Ranken, 71 years old, is an Australian citizen and currently domiciles in Australia. He was appointed as the Company's Commissioner based on Notary Deed No. 1, effective since March 2, 2016.

Prior to his appointment as one of the Company's Commissioners, he worked for a prominent company in Australia engaging in the provision of infrastructure and water for agribusiness irrigation as a Director and Head of its Risk and Compliance Committee. He also served at the International Finance Corporation of Global Manufacturing as a Director, then a Director for the Sub-Saharan Africa region, and finally a Director for the East Asia and Pacific region, including Indonesia.

He earned his Bachelor of Agricultural Economics degree from the University of New England, Australia, in 1971, and Master of Administrative Studies from Australian National University in 1977.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Commissioner, Mr. Ranken concurrently serves as a Member of Advisory Committee at Kula 2 Pacific Equity Fund (2016 up to present).

Information on Affiliation

Mr. Ranken has no affiliation with the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. He is a representative of International Finance Corporation.





Hans Juergen Hertel

Komisaris *)
*Commissioner *)*

Merupakan Warga negara Jerman yang berusia 72 tahun. Bapak Hans-Juergen Hertel bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris berdasarkan Akta No. 69 tertanggal 12 Juli 2010.

Memulai kariernya di Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) pada tahun 1990, beliau ditunjuk menjadi Direktur DEG yang beroperasi di Jakarta (2007-2011), sebelum akhirnya pensiun pada awal 2012. Dari tahun 2009-2014, beliau adalah Komisaris dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia PT Avrist Assurance.

Sebelum pindah ke Indonesia, beliau pernah bekerja sebagai Vice President di DEG Cologne, Jerman; Project Team Leader di Friedrich Ebert Foundation, Jakarta; serta Kepala Audit di Treuarbeit, sebuah perusahaan auditor Jerman yang saat ini merupakan mitra dari PricewaterhouseCoopers. Selain itu, beliau juga pernah bekerja sebagai relawan Jerman di Uganda, Afrika Timur. Lebih dari 20 tahun berkarier di Indonesia, Bapak Hans-Juergen Hertel telah membangun jaringan bisnis dan komunitas sosial yang luas di Indonesia.

Beliau merupakan lulusan dari Free University of Berlin dengan gelar Master di bidang Ekonomi Politik dan Administrasi Bisnis.

German citizen, 72 years old. Mr. Hans Juergen Hertel was appointed as the Company's Commissioner based on Deed No. 69 dated July 12, 2010.

His career began at Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) in 1990. He was appointed as a Director for DEG operations in Jakarta (2007-2011), before finally retiring in early 2012. From 2009-2014, he served as a Commissioner at PT Avrist Assurance, an Indonesian life insurance company.

Before moving to Indonesia, he served as a Vice President at DEG Cologne, Germany; Project Team Leader at Friedrich Ebert Foundation, Jakarta; and Head of Audit at Treuarbeit, an audit company based in Germany and a partner of PricewaterhouseCoopers. At one point, he went to Uganda, East Africa, as a volunteer. With more than 20 years of work experience in Indonesia, he has established a vast network within the Indonesian business and social spheres.

He graduated from the Free University of Berlin with a Master's degree in Political Economics and Business Administration.

*Bapak Hans-Juergen Hertel secara efektif digantikan oleh Bapak Andreas Zeisler per tanggal 21 Maret 2019.

*Effective as of March 21, 2019, Mr. Hertel has been replaced by Mr. Andreas Zeisler as the Company's Commissioner.





Robert O. Dolk

Komisaris**
*Commissioner***

Merupakan Warga negara Belanda yang berusia 64 tahun. Bapak Robert O. Dolk diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 15 Agustus 2012 berdasarkan Akta Notaris No.09.

Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang jasa keuangan dan pernah bekerja di Australia, Eropa, dan Asia untuk organisasi seperti BNP Paribas dan Deutsche Bank. Pengalaman kerja beliau di antaranya mencakup: Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited (2008-2017), Direktur Lawcover Insurance Pty Limited (2010-2016), dan Direktur Amber Holdings (2011-2017). Beliau adalah *Chartered Accountant* Australia.

Dutch citizen, 64 years old, Mr. Robert O. Dolk was appointed as the Company's Commissioner on August 15, 2012, based on Notary Deed No. 9.

He has spent more than 30 years in financial services and has worked in Australia, Europe, and Asia for organizations such as BNP Paribas and the Deutsche Bank. His work experience includes: Independent Non-Executive Director at Zurich Financial Services Australia Limited (2008-2017), Director at Lawcover Insurance Pty Limited (2010-2016), and Director at Amber Holdings (2011-2017). He is an Australian Chartered Accountant.



**Bapak Robert O. Dolk secara efektif digantikan oleh Bapak Lodewijk Govaerts per tanggal 26 Juli 2019.

** Effective as of July 26, 2019, Mr. Dolk has been replaced by Mr. Lodewijk Govaerts as the Company's Commissioner.





M. Chatib Basri

Komisaris Independen***

*Independent Commissioner****

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 54 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak M. Chatib Basri bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Notaris No.19 efektif tanggal 29 Desember 2014.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Departemen Keuangan Republik Indonesia (2013-2014), Wakil Ketua di Komite Ekonomi Nasional Presiden Republik Indonesia (2010-2012), Deputy Menteri Keuangan untuk G-20 di Departemen Keuangan Republik Indonesia (2006-2010) dan Penasihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2004-2005).

Di sela-sela kesibukannya, beliau aktif menuangkan pengalaman dan pengetahuannya ke dalam sejumlah karya ilmiah, buku, dan artikel di beberapa media internasional. Saat ini beliau juga merupakan anggota organisasi internasional di antaranya yaitu *High Level Trade Expert Group* dan *Independent Regional Advisory Group* untuk Asia Pasifik, Dana Moneter Internasional (IMF).

Indonesian citizen, 54 years old, domiciles in Jakarta, Indonesia. Mr. M. Chatib Basri was appointed as the Company's Independent Commissioner based on Notary Deed No. 19, effective since December 29, 2014.

Previously, he served as the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2013-2014), Deputy Head of the National Economic Committee of the President of the Republic of Indonesia (2010-2012), Vice Minister of Finance for G-20 of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia (2006-2010), and Advisor for the Coordinating Ministry of Economic Affairs (2004-2005).

In his free time, he shares his thoughts and experience in numerous scientific papers, books, and articles published in the international media. He is also a current member of several international organizations, including the High Level Trade Expert Group and Independent Regional Advisory Group for Asia Pacific, as well as the International Monetary Fund (IMF).

***Bapak M. Chatib Basri menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan efektif sampai dengan 9 Desember 2019.

***Mr. Basri was a member of the Board of Commissioner until December 9, 2019 effectively.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)
President Director & Chief Executive Officer (CEO)

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif tanggal 20 April 2019 sesuai dengan Akta Notaris No.01.

Sebelumnya, beliau adalah Chief Financial Officer dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, BUMN yang bergerak dalam pembangunan jalan tol sejak 2006 hingga 2016, dan sejak 2016 hingga 2019 menjabat sebagai CFO dari PT Pembangunan Jaya Infrastruktur. Dalam masa jabatan selama 10 tahun di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, beliau telah membawa BUMN ini ke International Global Offering (penawaran sekuritas dari berbagai pasar internasional) dan memiliki pengetahuan yang luas dalam industri infrastruktur terutama di sektor jalan tol.

Beliau mengawali karirnya pada tahun 1991 di Nomura Securities dan setelah itu menjabat beberapa posisi senior di berbagai perusahaan nasional hingga internasional, seperti Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, dan Indonesian Bank Restructuring Agency. Sebelum ditugaskan di Jasa Marga, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT PNM Investment Management. Selain menghadiri dan menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, beliau adalah anggota kehormatan dari Asean Federation of Engineers Organization.

Beliau menyelesaikan program Sarjana Teknik Elektro di Universitas Trisakti dan Program Pascasarjana di Universitas Pelita Harapan.

Beliau telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di sektor finansial, terutama di bidang investasi dan pasar modal.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Reynaldi Hermansjah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Mr. Reynaldi Hermansjah, 52 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's President Director based on the Notary Deed No. 1, effective since April 20, 2019.

Previously, he served as the Chief Financial Officer of PT Jasa Marga (Persero) Tbk, a State-Owned Enterprise (SOE) engaging in toll road construction in 2006 to 2016, before serving as a Chief Financial Officer PT Pembangunan Jaya Infrastruktur in 2016 to 2019. During his 10-year service at PT Jasa Marga (Persero) Tbk, he managed to bring this SOE to the International Global Offering (securities offering at various international markets) and gained extensive knowledge in infrastructure industry, especially in toll road sector.

He began his professional career in 1991 at Nomura Securities, and held various senior positions at both national and international companies, such as Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, and Indonesian Bank Restructuring Agency. Before his assignment at Jasa Marga, he served as the President Director of PT PNM Investment Management. He actively attends and becomes a speaker at numerous international conferences, in addition to becoming an honorary member of ASEAN Federation of Engineers Organization.

He earned his Bachelor of Electrical Engineering degree from Trisakti University and graduated from the Pelita Harapan University Postgraduate Program.

He has more than 15 years of experience in the financial sector, especially in the fields of investment and capital market.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's President Director, Mr. Hermansjah has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

Mr. Hermansjah has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.





I Made Wiracita Tantra

Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO)
Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 53 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.15 efektif tanggal 5 Maret 2018.

Seorang profesional perbankan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang manajemen kredit, pengendalian risiko, dan hubungan dalam lingkungan kelembagaan dan korporasi. Bapak Wito memulai karirnya pada tahun 1990 sebagai analis kredit American Express Bank Jakarta sebelum berkembang menjadi berbagai peran pengembangan bisnis di Bank of America dan Standard Chartered Bank di Jakarta di mana Beliau bertanggung jawab untuk mengembangkan/menjalani hubungan dengan perusahaan papan atas lokal dan multinasional di Indonesia.

Menyusul Krisis Asia, Bapak Wito menghabiskan 12 tahun berikutnya bekerja di New York dan Singapura sebagai executive review kredit untuk Standard Chartered Bank dan BNP Paribas. Pada tahun 2013, Beliau kembali ke Indonesia untuk mendapatkan posisi sebagai Senior Credit Officer & Head of Credit di Standard Chartered Bank sebelum beralih ke peran terakhirnya sebagai Chief Risk Officer di PT ANZ Indonesia. Beliau memegang posisi terakhir selama 3 tahun sebelum bergabung dengan IIF.

Bapak Wito memiliki gelar Bachelor of Arts di bidang Ekonomi dari State University of New York di Binghamton dan Master of Science dalam Manajemen Keuangan dari Universitas Johns Hopkins.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak I Made Wiracita Tantra tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Mr. I Made Wiracita Tantra, 53 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. He was appointed as the Company's Managing Director and Chief Risk Officer (CRO) based on the Notary Deed No. 15, effective since March 5, 2018.

He is a banking professional with more than 25 years of experience in the fields of credit management and risk control, with a vast exposure in institutional and corporate banking environment. He started his career in 1990 as a credit analyst at the American Express Bank in Jakarta before taking on various business development roles at Bank of America and Standard Chartered Bank. In both of those companies, he was responsible for establishing and cementing relationships with top domestic and multinational companies in Indonesia.

Following the Asian economic crisis, he spent 12 years working in New York and Singapore as an executive credit reviewer for Standard Chartered Bank and BNP Paribas. In 2013, he returned to Indonesia as a Senior Credit Officer & Head of Credit at Standard Chartered Bank (2013-2015) before moving on to the position of Chief Risk Officer at PT ANZ Indonesia (2015-2018). He held this position for three years before joining IIF.

He earned his Bachelor of Arts degree in Economics from the State University of New York, Binghamton, and Master of Science degree in Financial Management from Johns Hopkins University.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Director, Mr. Tantra has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

Mr. Tantra has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.



Devi Pradnya Paramita
Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO)
Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 42 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Finance Officer (CFO) Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.01 efektif tanggal 1 Desember 2019.

Ibu Devi memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang keuangan perusahaan dan manajemen keuangan. Berasal dari perusahaan konsultan, lembaga multinasional dan latar belakang sektor riil, Beliau telah memimpin serangkaian program M&A, penggalangan dana dan restrukturisasi yang sukses. Beliau memulai karirnya di Financial Advisory Services of PricewaterhouseCoopers dan kemudian bekerja sebagai ekonom untuk Kantor Pemerintah AS. Sebelum menjadi CFO untuk PGN Saka yang merupakan cabang hulu Perusahaan Gas Negara Tbk, Beliau adalah Kepala Departemen Keuangan di Bakrie & Brothers, dan memimpin Corporate Finance di Medco Energi sebelumnya. Selama di PGN, Beliau juga adalah Kepala Hubungan Investor dan Direktur VICO Indonesia.

Lulus dari Universitas Katolik Parahyangan, Beliau memperoleh gelar magister Keuangan dengan jurusan khusus Manajemen Risiko dari ICMA Business School, Inggris pada tahun 2000. Beliau mengambil kursus Ekonomi di FSI, Washington D.C. pada tahun 2006.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Ibu Devi Pradnya Paramita tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Mrs. Devi Pradnya Paramita, 42 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. She was appointed as the Company's Managing Director and Chief Financial Officer (CFO) based on the Notary Deed No. 1, effective since December 1, 2019.

She has more than 18 years of experience in the fields of corporate finance and financial management. With her work background at consulting companies, multinational institution, and real sector, she has successfully led numerous M&A programs, fundraising programs, and restructuring plans. She began her career at the Financial Advisory Services of PricewaterhouseCoopers before working as an economist at the US Government office. She then went on to lead the Corporate Finance Department of Medco Energi before serving as the Head of Finance Department at Bakrie & Brothers and the CFO for PGN Saka, an upstream subsidiary of Perusahaan Gas Negara Tbk. During her tenure at PGN, she also served as the Group Head of Investor Relations and Director at VICO Indonesia.

She earned her degree from Parahyangan Catholic University and Master's degree in Finance, majoring in Risk Management from ICMA Business School, UK, in 2000. She took a course in Economy at FSI, Washington, DC, in 2006.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Director, Ms. Paramita has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

Ms. Paramita has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.





Hilda Savitri

Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO)

Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 49 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.06 efektif tanggal 11 Januari 2016.

Ibu Hilda Savitri telah bekerja di bidang perbankan investasi dan korporat serta di perusahaan swasta di bidang audit dan ekuitas selama 20 tahun.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau merupakan Direktur Investasi di Tael Management (2007-2015) dan manajer pendanaan regional yang telah mengelola dana sebesar lebih dari US\$ 550 juta dari banyak investor badan usaha luar negeri.

Sebelumnya, beliau bekerja di UOB Asia Ltd dari 2004-2007 dengan jabatan terakhir sebagai Associate Director dan bertanggung jawab atas penataan, pelaksanaan, dan pendistribusian berbagai transaksi merger dan akuisisi, kredit sindikasi, pembiayaan proyek, penyertaan saham dan transaksi pembiayaan terstruktur lainnya untuk klien-klien yang berasal dari Indonesia.

Sebelumnya, beliau mengembangkan karir di PT Danareksa (Persero) (1995-1999 dan 2001-2002) dan PT Nusantara Securities (2002-2004) di divisi perbankan investasi. Beliau juga pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Harsono (anggota Coopers & Lybrand International) (1994-1995).

Beliau gelar MBA dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2011) melalui studi Masternya dengan beasiswa penuh dari New Zealand Overseas Development Award dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1994).

Ibu Savitri telah mengikuti beberapa pelatihan di antaranya The Renewable Energy Workshop yang diselenggarakan oleh SEAS di Singapura.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Ibu Hilda Savitri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Ms. Hilda Savitri, 49 years old, is an Indonesian citizen and currently domiciles in Jakarta, Indonesia. She was appointed as the Company's Managing Director and Chief Investment Officer (CIO) based on the Notary Deed No. 6, effective since January 11, 2016.

She has more than 20 years of experience in the fields of investment banking, corporate banking, private equity, and auditing firms.

Prior to joining the Company, she held the position of Director of Investment at Tael Management (2007-2015), a regional fund manager that has managed more than US\$550 million from foreign institutional investors.

She once worked at UOB Asia Ltd (2004-2007) with her last position as an Associate Director responsible for administrating, implementing, and distributing various merger and acquisition transactions, syndicated loans, project financing, stock investment, and other structured funds for domestic clients.

Earlier in her career, she held various positions at PT Danareksa (Persero) (1995-1999 and 2001-2002) and at Investment Banking Division of PT Nusantara Securities (2002-2004). She also worked at Public Accounting Firm Siddharta Siddharta & Harsono (a member of Coopers & Lybrand International) (1994-1995).

She earned her Master of Business Administration degree from the University of Wellington, New Zealand (2011), with full scholarship from the New Zealand Overseas Development Award, and Bachelor's degree in Accounting from the University of Indonesia (1994).

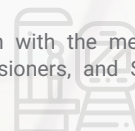
She attended a number of trainings, such as The Renewable Energy Workshop held by the SEAS in Singapore.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Director, Ms. Savitri has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

Ms. Savitri has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.





Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja

Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO)****
*Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)*****

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 48 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.25 efektif tanggal 29 Desember 2011.

Sebelum bergabung dengan IIF, beliau memegang jabatan sebagai Vice President di Earth Investment Group (2010-2011), Corporate Finance Partner di Indoconsult Prima (2009-2011), Vice President di Sinar Mas Group (2007-2008) dan Vice President di Northstar Equity Partners (2006).

Setelah menamatkan studinya di Erasmus University Rotterdam, Belanda pada 1997 dengan gelar Master of Science bidang Ekonomi Keuangan, beliau bekerja selama lebih dari 10 tahun di Belanda, sebelum kembali ke Indonesia pada 2006.

Beliau pernah berpartisipasi dalam pelatihan 10 hari Executive Education on Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, pelatihan 5 hari Executive Education on Global Challenges in Transport yang diselenggarakan oleh Oxford University, Inggris dan sesi pelatihan mengenai High Performance Communication dari IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Indonesian citizen, 48 years old, domiciles in Jakarta, Indonesia. Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja was appointed as the Company's Managing Director and Chief Investment Officer based on the Notary Deed No. 25, effective since December 29, 2011.

Before joining IIF, he held the position of Vice President at Earth Investment Group (2010-2011), Corporate Finance Partner at Indoconsult Prima (2009-2011), Vice President at Sinar Mas Group (2007-2008), and Vice President at Northstar Equity Partners (2006).

After graduating from Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (1997) with a Master of Science degree in Financial Economics, he spent more than 10 years working in the Netherlands before returning to Indonesia in 2006.

He attended a 10-day Executive Education on Infrastructure in a Market Economy training event organized by the Harvard Kennedy School, a 5-day training event of Executive Education on Global Challenges in Transport organized by Oxford University, England, and training sessions on High Performance Communication from IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Director, Mr. Tjiptadjaja has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

Mr. Tjiptadjaja has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.

****Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan efektif sampai dengan 31 Januari 2020.

****Mr. Tjiptadjaja was a member of the Board of Director of the Company until January 31, 2020 effectively.



Indrawati Darmawan

Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO)*****
*Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)******

Warga negara Indonesia, 53 tahun. Ibu Indrawati Darmawan dipercaya sebagai Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer (CFO) sejak 9 Juni 2016 melalui Akta Notaris No. 06. Beliau meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Texas Christian University, AS (1989) serta meraih gelar Master Bisnis Internasional dari West Coast University, AS (1991). Beliau juga telah mengikuti beberapa pelatihan, di antaranya The Capital Market for Infrastructure Investment yang diadakan di Manila dan diselenggarakan oleh Capital Market.

Sebelum bergabung dengan IIF, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Standard Chartered Securities Indonesia selama enam tahun sejak 2010. Sebelumnya, beliau merupakan Wakil Presiden Senior di Barclays Capital Indonesia (2008) dan UBS Indonesia (2007). Beliau juga pernah mengemban posisi penting di beberapa perusahaan di antaranya Direktur Pelaksana di Mandiri Sekuritas (2004-2007), Wakil Presiden Direktur di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2003), dan sebagai Associate Director di Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Pada awal kariernya, beliau menjabat sebagai Project Manager di PT Makindo Securities selama satu tahun sejak 1993 dan juga sebagai Auditor Senior di KPMG Peat Marwick sejak 1991.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di perusahaan maupun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Ibu Indrawati Darmawan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Indonesian citizen, 53 years old. Ms. Indrawati Darmawan was appointed as the Company's Managing Director and Chief Financial Officer (CFO) on June 9, 2016, based on the Notary Deed No. 6. She earned her Bachelor's degree in Business Administration from Texas Christian University, US (1989) and Master's degree in International Business from West Coast University, US (1991). She participated in several training programs, including The Capital Market for Infrastructure Investment in Manila organized by Capital Market.

Prior to joining IIF, she served as the President Director of Standard Chartered Securities Indonesia for six years since 2010. Previously, she was the Senior Vice President at Barclays Capital Indonesia (2008) and UBS Indonesia (2007). She also held important positions at several companies including Managing Director at Mandiri Sekuritas (2004-2007), Vice President at Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) (1999-2003), and Associate Director at Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Earlier in her career, she served as Project Manager at PT Makindo Securities for one year in 1993 and as Senior Auditor at KPMG Peat Marwick since 1991.

Information on Concurrent Position

Aside from serving as the Company's Director, Ms. Darmawan has no concurrent positions at other companies.

Information on Affiliation

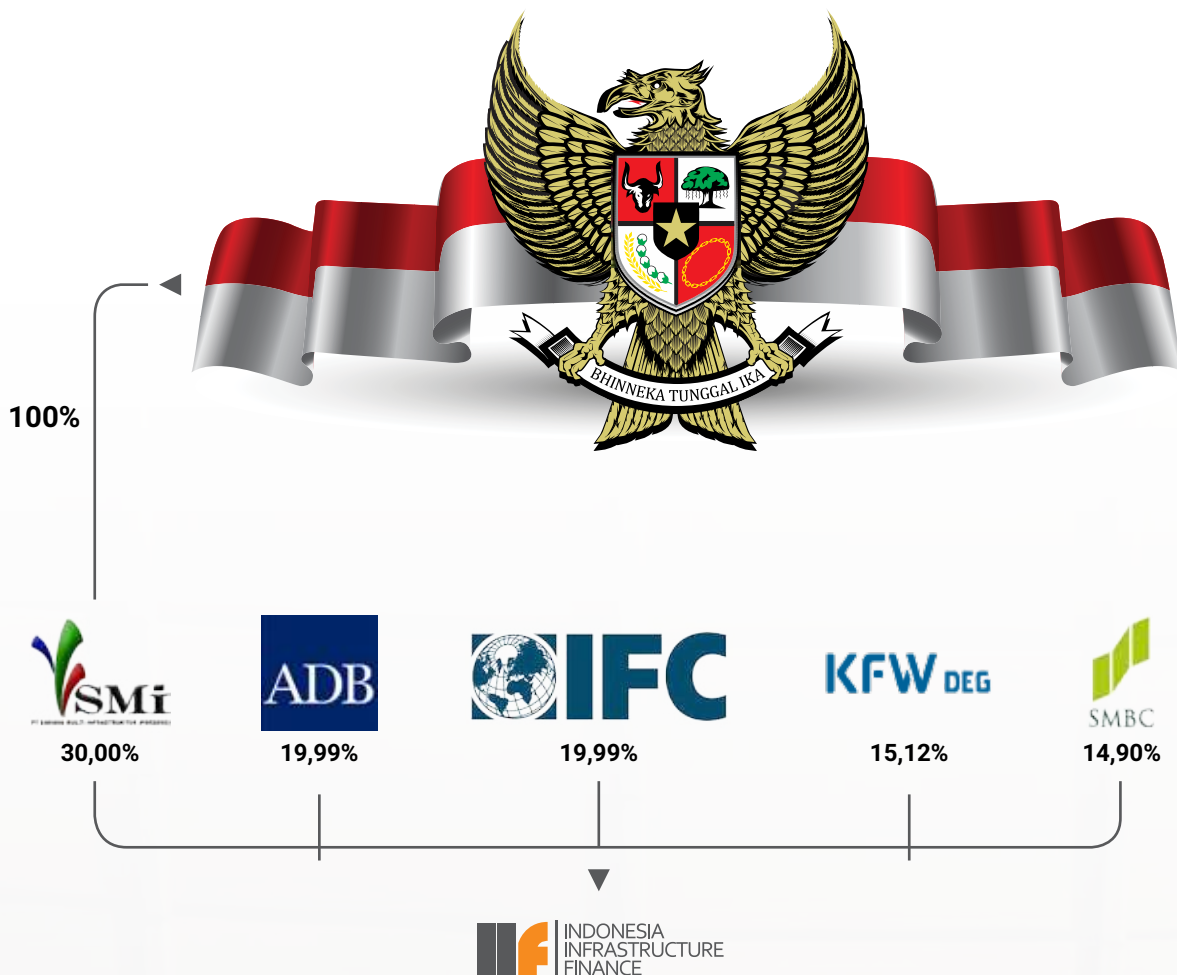
Ms. Darmawan has no affiliation with the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of the Company.

***** Ibu Indrawati Darmawan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan efektif sampai dengan 30 Juli 2019.

*****Ms. Darmawan was a member of the Board of Director of the Company until July 30, 2019 effectively.

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition



Setiap Pemegang Saham IIF memiliki lebih dari 5% modal disetor, dengan Pemegang Saham Utama Perseroan adalah PT SMI (Persero). IIF tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Each Shareholder has more than 5% of paid up capital with the majority of shares owned by PT SMI (Persero). IIF does not have a Controlling Shareholder as stipulated in the Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 9/POJK.04/2018 regarding Acquisition of Public Companies.

Informasi Pemegang Saham Perusahaan

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)**
SMI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di

Information on the Company Shareholders

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)**
SMI is a State-Owned Enterprise (SOE) established based on the Deed of Establishment No. 17 dated February 26, 2009, drawn up before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, which

Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, SMI didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB didirikan berdasarkan *Agreement Establishing the Asian Development Bank* yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Agustus 1966 (Perjanjian Pendirian ADB). Berdasarkan Perjanjian Pendirian, ADB memiliki *By-Laws* yang diperuntukkan untuk melengkapi Perjanjian Pendirian ADB, dan oleh karenanya akan ditafsirkan menurut Perjanjian Pendirian ADB. ADB bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama regional di Asia dan *Far East* (yang melingkupi Asia Timur Laut, Rusia bagian Asia Timur dan Asia Tenggara) (Wilayah) dan berkontribusi dalam akselerasi proses perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dalam Wilayah baik secara keseluruhan maupun masing-masing negara.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC didirikan berdasarkan *Articles of Agreement* yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir kali pada tanggal 27 Juni 2012. IFC bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta yang produktif yang berasal dari negara anggota IFC, khususnya di wilayah yang kurang berkembang, sehingga melengkapi kegiatan *International Bank for Reconstruction and Development*.

has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-09067.AH.01.01 dated March 24, 2009, and registered in the Company's Register under No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 dated March 24, 2009, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 dated May 19, 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 13273/2009. In addition, SMI was founded in order to implement the Government Regulation No. 66 of 2007 dated December 10, 2007, regarding Capital Investment of the Republic of Indonesia for the Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Financing, as amended through the Government Regulation No. 75 of 2008 dated December 16, 2008, regarding infrastructure financing companies, which is 100% owned by the Indonesian Government through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB was established based in the Agreement Establishing the Asian Development Bank which took effect on August 22, 1966. Based on the Establishment Agreement, ADB has bylaws that are intended to complement the ADB Establishment Agreement, and thus shall be interpreted according to the ADB Establishment Agreement. ADB aims to advance economic growth and regional cooperation in Asia and Far East regions (covering Northeast Asia, East Asian Russia, and Southeast Asia) (Regions) and to contribute to accelerating economic development process of the emerging markets in the Regions, both in jointly and each of their own.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC was established based on the Articles of Agreement, which have been amended several times with the last amendment made on June 27, 2012. IFC aims to advance the economic development by providing support to the growth of productive private enterprises originating from IFC member countries, especially the underdeveloped regions, to complement the activities of the International Bank for Reconstruction and Development.



4. DEG – Deutsche Investitions-und

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)

DEG didirikan berdasarkan *Memorandum of Association of DEG* yang telah diperbaharui terakhir kali pada tanggal 20 Februari 2017. DEG bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan sektor swasta di negara-negara berkembang, Eropa Tengah dan Timur, serta *New Independent States*, dan juga negara-negara yang disetujui oleh keputusan pemegang saham.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 dengan Akta Pendirian yang telah diamandemen pada bulan Juni 2019 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Jepang dan beralamat di Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang. SMBC tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyna dan SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang keuangan, seperti diantaranya peminjaman, investasi jaminan, pasar valuta asing, sekuritas, sekuritisasi, kustodian, dan usaha terkait jasa keuangan lainnya.

4. DEG – Deutsche Investitions-und

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)

DEG was established based on the *Memorandum of Association of DEG*, which was amended lastly on February 20, 2017. DEG's purpose is to promote the growth of private sector in emerging markets, Central and Eastern Europe, and New Independent States as well as those approved in the shareholders' resolutions.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC is located in Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, and was established in 2001 through the Deed of Establishment of which the amendment was made lastly in June 2019 pursuant to the prevailing Japanese laws and regulations. SMBC is part of the Sumitomo Mitsui Financial Group, together with the Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyna and SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation and these companies offer diverse financial services centered on banking business to companies engaging in financial industry. Services offered are, among others, loans, guarantee investment, foreign exchange market, securitization, custodian service, and other financial-related services.

Klasifikasi Pemegang Saham Lokal dan Asing

Per 31 Desember 2019, komposisi pemegang saham IIF berasal dari (1) satu institusi lokal dan 4 (empat) institusi asing, dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pemegang Saham / Shareholder's Name	Jumlah Saham (Lembar) / Total Shares (Share)	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Institusi Lokal / Local Institution Ownership		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	30,00%
Kepemilikan Institusi Asing / Foreign Institution Ownership		
Asian Development Bank	399.800	19,99%
International Finance Corporation	399.800	19,99%
DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	302.400	15,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	298.000	14,90%

Classification of Local and Foreign Shareholders

As of December 31, 2019, the shareholders of IIF are composed of 1 (one) local institution and 4 (four) foreign institutions as detailed below:

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi IIF tidak memiliki saham di Perseroan.

Share Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors

All members of Board of Commissioner and Board of Directors of IIF have no shares of the Company as of December 31, 2019.

Kronologi Pencatatan Saham

Share-Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2019, IIF belum pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun, baik di Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek asing. Sehingga informasi mengenai kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten/Perusahaan dicatitkan tidak relevan untuk diungkapkan.

Up to the end of 2019, IIF has not listed its shares on any stock exchange, either Indonesia Stock Exchange or other foreign stock exchange. Thus, information on share-listing chronology, total outstanding shares, nominal value, and offering price from initial listing to the end of the fiscal year, as well as the name of Stock Exchange on which the Company's share is listed, is not relevant to be disclosed.

Kronologi Pencatatan Obligasi

Bonds-Listing Chronology

OBLIGASI I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHUN 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-336/D.04/2016 untuk penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 dan telah dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016.

IIF telah melakukan pelunasan atas Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya, yaitu pada tanggal 19 Juli 2019.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I TAHUN 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-198/D.04/2019 untuk penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 dan telah dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 2019.

BONDS I OF INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE YEAR 2016

On June 29, 2016, IIF received an Effective Statement from the Financial Services Authority (OJK) No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering of Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016, which were listed on Indonesia Stock Exchange on July 19, 2016.

IIF has settled the Series A Loan according to its maturity date, on July 19, 2019.

SHELF REGISTRATION BONDS I OF INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE PHASE I YEAR 2019

On December 13, 2019, IIF received an Effective Statement from the Financial Services Authority (OJK) No. S-198/D.04/2019 to conduct continuous public offering of Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019, which were listed on Indonesia Stock Exchange on December 19, 2019.



Tabel Kronologis Pencatatan Obligasi IIF
Table of Bonds-Listing Chronology of IIF

Nama Obligasi / Bonds Name	Nilai Pokok Obligasi / Bonds Principal Value	Tanggal Penerbitan / Issuance Date	Tenor	Kupon / Coupon	Jatuh Tempo / Maturity Date	Status Pembayaran / Payment Status	Rating (Pefindo)		Tempat Pencatatan Obligasi / Listed on
							2018	2019	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri A / Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series A	Rp825.000.000.000	19 Juli 2016 / July 19, 2016	3 tahun / years	8,25%	19 Juli 2019 / July 19, 2019	Lunas / Settled	AAA	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri B / Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series B	Rp250.000.000.000	19 Juli 2016 / July 19, 2016	5 tahun / years	8,70%	19 Juli 2021 / July 19, 2021	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) / Not Settled (Not yet pass maturity date)	AAA	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri C / Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series C	Rp425.000.000.000	19 Juli 2016 / July 12, 2016	7 tahun / years	9,00%	19 Juli 2023 / July 19, 2023	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) / Not Settled (Not yet pass maturity date)	AAA	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri A / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series A	Rp965.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	370 hari / days	6,75%	28 Desember 2020 / December 28, 2020	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) / Not Settled (Not yet pass maturity date)	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Seri B / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series B	Rp372.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	3 tahun / years	7,75%	18 Desember 2022 / December 18, 2022	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) / Not Settled (Not yet pass maturity date)	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Seri C / Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series C	Rp163.000.000.000	19 Desember 2019 / December 19, 2019	5 tahun / years	7,90%	18 Desember 2024 / December 18, 2024	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) / Not Settled (Not yet pass maturity date)	-	AAA	Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

Pada tanggal 24 Oktober 2018, IIF menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018. Perseroan telah melakukan pelunasan MTN sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu 10 November 2019.

MEDIUM TERM NOTES

On October 24, 2018, IIF issued Medium Term Notes (MTN) of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018. The Company has settled the MTN in accordance with its maturity date, namely on November 10, 2019.

Tabel Kronologis Surat Utang Jangka Menengah
Table of Medium Term Notes Chronology

Nama MTN / MTN Name	Nilai Pokok / Principal Value	Tanggal Penerbitan / Issuance Date	Tenor	Kupon / Coupon	Jatuh Tempo / Maturity Date	Status Pembayaran / Payment Status
MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 / MTN of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018	Rp200.000.000.000	24 Oktober 2018 / October 24, 2018	370 hari / days	8,35%	10 November 2019 / November 10, 2019	Lunas / Settled

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiary and/or Associate Entities

Per 31 Desember 2019, IIF tidak memiliki anak perusahaan maupun entitas asosiasi, sehingga informasi terkait nama dan alamat entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten memiliki pengendalian bersama entitas, beserta kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten tidak relevan untuk diungkapkan.

As of December 31, 2019, IIF has neither subsidiaries nor associate entities. Hence, information on name and address of subsidiaries and associate entities, joint ventures in which the issuer has joint control over the entity, as well as share ownership, business line, total assets, and operating status of the issuer is not relevant to be disclosed.



Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions/ Professionals

Jenis Lembaga/ Profesi / Institutions/ Professionals	Nama Lembaga/ Profesi / Name of Institutions/ Professionals	Jasa yang Diberikan / Services Provided	Fee (di luar PPN)/ Fee (Excluding VAT)	Periode Penugasan / Assignment Period
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young)	Melakukan audit atas laporan keuangan IIF untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 / Perform audit on the Company's financial statement for the period ended 31 December 2019	897,000,000	1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 / 1 January 2019 to 31 December 2019
Pemeringkat Kredit / Rating Agency	PT Pefindo Biro Kredit	Pemeringkat Kredit untuk penerbitan Obligasi IIF Tahun 2019 / Rating Agency for the Company's bonds issuance 2019	562,500,000	30 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 / 30 July 2019 to 31 December 2019
Konsultan Hukum / Legal Consultant	Assegaf Hamzah dan Partner	Konsultan hukum untuk penerbitan Obligasi IIF Tahun 2019 / Law counsel for the Company's Bond issuance 2019	550,000,000	30 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 / 30 July 2019 to 31 December 2019
Wali Amanat/ Trustee	PT Bank Mega Tbk	Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi IIF Tahun 2019 / Trustee for the Company's bonds issuance 2019	85,000,000	30 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 / 30 July 2019 to 31 December 2019



Informasi Terkait Website Perusahaan

Information on Company Website

IIF telah memiliki *website* resmi perusahaan, yaitu www.iif.co.id yang memuat informasi mengenai:

IIF has an official website at www.iif.co.id which contains the following information:



- **Pemegang Saham**

Informasi mengenai Pemegang Saham Perseroan dapat diakses melalui Menu "Tentang IIF", kemudian pilih "Pemegang Saham".

- **Shareholders**

Information on Company's Shareholders is accessible under "About IIF" menu, followed by the "Shareholders" sub-menu.



- **Kode Etik**

Informasi mengenai Kode Etik Perseroan dapat diakses melalui Menu "Hubungan Investor", kemudian Sub-Menu "Tata Kelola Perusahaan", lalu pilih "Dokumen-dokumen Lain". Pada laman "Dokumen-dokumen Lain", terdapat akses untuk mengunduh Kode Etik Perseroan.

- **Code of Conduct**

Information on Company's Code of Conduct is accessible under "Investor Relations" menu, followed by the "Corporate Governance" sub-menu and "Other Documents" section. On the "Other Documents" page, a clickable section is available to download the Company's Code of Conduct



- **RUPS**

Informasi mengenai RUPS Perseroan dapat diakses melalui Menu "Hubungan Investor", kemudian Sub-Menu "Tata Kelola Perusahaan", lalu pilih "Dokumen-dokumen Lain". Pada laman "Dokumen-dokumen Lain", terdapat akses untuk mengunduh informasi mengenai RUPS yang diselenggarakan oleh IIF dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- **GMS**

Information on Company's GMS is accessible under "Investor Relations" menu, followed by the "Corporate Governance" sub-menu and "Other Documents" section. On the "Other Documents" page, a clickable section is available to download information on GMS that has been convened by IIF for the past 2 (two) years



- **Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir**

Informasi mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dapat diakses melalui Menu “Hubungan Investor”, kemudian Sub-Menu “Informasi Keuangan”, lalu pilih “Laporan Tahunan” atau “Laporan Keuangan”.

- **Financial Statements and Annual Reports for the Last 5 (Five) Years**

Information on Company’s Financial Statements and Annual Report is accessible under “Investor Relations” menu, followed by the “Financial Information” sub-menu and “Annual Report” or “Financial Statements” sections.



- **Profil Dewan Komisaris**

Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses melalui Menu “Tentang IIF”, kemudian Sub-Menu “Organisasi”, lalu pilih “Dewan Komisaris”.

- **Profile of Board of Commissioners**

Information on Profiles of Board of Commissioners of the Company is accessible under “About IIF” menu, followed by the “Organization” sub-menu and “Board of Commissioners” section.



- **Profil Direksi**

Informasi mengenai Profil Direksi Perseroan dapat diakses melalui Menu “Tentang IIF”, kemudian Sub-Menu “Organisasi”, lalu pilih “Komite Eksekutif”.

- **Profile of Board of Directors**

Information on Profiles of Board of Directors of the Company is accessible under “About IIF” menu, followed by the “Organization” sub-menu and “Executive Committee” section.





- **Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal**

Informasi mengenai Piagam/*Charter* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat diakses melalui Menu “Hubungan Investor”, kemudian Sub-Menu “Tata Kelola Perusahaan”, lalu pilih “Dokumen-dokumen Lain”. Pada laman “Dokumen-dokumen Lain”, terdapat akses untuk mengunduh Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi.

Sedangkan untuk Piagam Komite-komite, baik Komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi dapat diakses melalui Menu “Hubungan Investor”, kemudian Sub-Menu “Tata Kelola Perusahaan”, lalu pilih “Komite”. Pada bagian bawah laman “Komite”, terdapat akses untuk mengunduh Piagam dari seluruh Komite Perseroan.

Sementara itu, informasi mengenai Piagam Unit Audit Internal Perseroan untuk saat ini belum dapat diakses pada *website* resmi Perseroan. Namun demikian, informasi mengenai Piagam Kerja Audit Internal dapat diperoleh dalam Laporan Tahunan yang dapat diunduh di *website* Perseroan.

- **Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit**

Information on Charters of Board of Commissioners and Board of Directors is accessible under “Investor Relations” menu, followed by the “Corporate Governance” sub-menu and “Other Documents” section. On the “Other Documents” page, a clickable section is available to download the Charters of Board of Commissioners and Board of Directors

For Charter of Committees, either those under the Board of Commissioners or Board of Directors, the information is accessible under “Investor Relations” menu, followed by the “Corporate Governance” sub-menu and “Committees” section. On the “Committees” page, a clickable section is available to download the Charters of all Committees of the Company.

Meanwhile, information on Charter of Internal Audit Unit is currently inaccessible through the Company’s official website. Nonetheless, information on Charter of Internal Audit Unit can be obtained from the Company’s Annual Report which can be downloaded from the website.



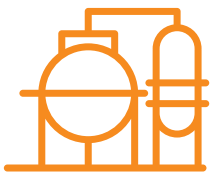
Selain itu, pada *website* IIF juga memuat informasi penting lainnya seperti visi dan misi Perseroan, strategi bisnis IIF, Sumber Daya Manusia, produk dan layanan, portofolio dan proyek, *Policy Brief*, struktur organisasi, hubungan investor, Sosial dan Lingkungan, serta informasi penting lainnya.

In addition, IIF's website contains other key information regarding, among others, vision and mission, business strategies, Human Resources, products and services, portfolio and projects, Policy Brief, organization structure, investor relations, Social and Environment, and so on.





“



Keberhasilan IIF dalam mencatatkan pertumbuhan yang positif tidak terlepas dari dukungan sistem manajemen risiko yang kuat, integrasi prinsip *Social and Environmental* yang menjadi keunggulan IIF, kerja sama dan *teamwork* yang solid, serta pengembangan sistem TI yang *robust*.

IIF's success in recording positive growth is inseparable from the support of a strong risk management system, integration of Social and Environmental principles that are the Company's advantages, solid cooperation and teamwork, and robust IT system development.



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Overview on Business Support



Manajemen Risiko

Risk Management

Untuk membangun kapabilitas manajemen risiko yang efektif dan efisien di Perseroan, IIF mengadopsi pendekatan **Three Lines of Defense** atau Tiga Lini Pertahanan yang terdiri dari unit bisnis, unit manajemen risiko, dan unit audit. Dalam hal proses pengambilan keputusan, unit bisnis menjadi Lini Pertahanan Terdepan, sedangkan unit manajemen risiko menjadi Lini Pertahanan Kedua. Selanjutnya, proses ini diperkuat oleh unit audit sebagai Lini Pertahanan Ketiga.

To build an effective and efficient risk management capabilities in the Company, IIF adopts Three Lines of Defense approach consisting of business units, risk management units, and audit units. In terms of decision-making process, the business unit becomes the Leading Line of Defense, while the risk management unit becomes the Second Line of Defense. Furthermore, this process is strengthened by the audit unit as the Third Line of Defense.

Untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global maupun nasional serta risiko-risiko bisnis yang muncul pada proses aktivitas bisnis Perseroan, diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang kuat dan efisien. Sebagai institusi pembiayaan di sektor infrastruktur, IIF berkomitmen untuk melakukan pengembangan sistem pengelolaan risiko secara berkesinambungan agar mampu mengelola dan memitigasi kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perseroan, pembangunan proyek sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis di sektor pembiayaan infrastruktur yang semakin masif.

TANTANGAN PENGELOLAAN RISIKO DI TAHUN 2019

Tahun 2019 merupakan tahun politik di Indonesia, dimana untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak. Dinamika politik yang meningkat serta kondisi perekonomian global yang terus menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis nasional, tak terkecuali IIF.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah melakukan evaluasi dan pembaruan atas sistem manajemen risiko dan mengoptimalkan organ-organ terkait seperti komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk dapat berkomunikasi secara aktif dalam

To anticipate the dynamics in the global and national economy as well as business risks arising from Company's business activity and processes, a robust and efficient risk management system is necessary. As a financing institution in the infrastructure sector, IIF is committed to developing a risk management system on an ongoing basis to be able to manage and mitigate potential risks posed by the Company's operational activities and project development while keeping up to date with business development in the flourishing infrastructure financing sector.

RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2019

2019 was a political year in Indonesia, where for the first time legislative and presidential elections were held simultaneously. The escalating dynamics in politics and global economic conditions that continued to suppress Indonesia's economic growth in 2019 was among the challenges that must be faced by national business players, including IIF.

To meet these challenges, the Company has evaluated and updated the risk management system and optimized related organs such as committees under the Board of Commissioners and Board of Directors as a forum for active communication in monitoring

memantau potensi risiko. Seluruh masukan yang diberikan telah dimanfaatkan Perseroan untuk memperdalam analisis terkait studi kelayakan proyek maupun aktivitas bisnis lainnya.

Untuk meningkatkan sistem manajemen risiko Perseroan, IIF menerapkan beberapa langkah insiatif, antara lain:

1. Mempertahankan portofolio aset yang baik

Dari segi pengelolaan risiko kredit dan pembiayaan, Perseroan terus melakukan proses pemantauan atas portofolio investasinya melalui pengujian *stress-test* untuk mengukur potensi dampak buruk yang mungkin terjadi selama kondisi ekstrem, seperti perlambatan pertumbuhan bisnis, perubahan ekstrem nilai tukar mata uang asing dan kenaikan suku bunga. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan portofolio IIF masih dinilai berkelanjutan.

Perseroan juga telah memperbaharui alat pemeringkat risiko kredit melalui penerapan scorecard probability of default versi terbaru dari S&P Global Market Intelligence untuk pembiayaan proyek (*project finance*) dan sistem CreditLens baru dari Moody's Analytic untuk pembiayaan korporasi (*corporate finance*).

2. Pembaharuan batas kendali dan *risk appetite*

Perseroan telah memperbaharui batas kendali dan *risk appetite* sesuai dengan perkembangan kondisi bisnis dan tantangan yang dihadapi Perseroan. Batas kendali dan *risk appetite* ini juga digunakan untuk memfasilitasi manajemen dalam memantau risiko inheren Perseroan.

3. Perbaikan internal proses

Secara berkesinambungan, Perseroan memperbaiki kualitas bisnis proses agar lebih efisien namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan beberapa inisiatif terkait pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain:

potential risks. All input provided by the Company has been utilized to deepen the analysis related to project feasibility studies and other business activities.

To improve the Company's risk management system, IIF implemented numerous initiatives, including:

1. Maintaining good quality asset portfolio

In terms of managing credit and financing risk, the Company continues to monitor its investment portfolio through stress-tests to measure potential adverse impacts that may occur during extreme conditions, such as slowing business growth, extreme changes in foreign exchange rates, and rising interest rates. In general, the test results show that the overall portfolio of IIF is still considered sustainable.

The Company has also updated the credit risk rating tool through the utilization of the latest version of the scorecard probability of default from the S&P Global Market Intelligence for project finance and the new CreditLens system from Moody's Analytic for corporate finance.

2. Updating control limits and risk appetite

The Company has updated its control limits and risk appetite in accordance with the development of business conditions and challenges faced by the Company. These control limits and risk appetite are also used to facilitate management in monitoring the inherent risks of the Company.

3. Internal process improvement

The Company consistently improves the quality of business processes to be more efficient while still observing the prudence principle, with several initiatives related to risk management including:

- Meningkatkan kualitas dan efisiensi proses *due diligence* terkait aspek sosial dan lingkungan (*Social Environmental Due Diligence/SEDD*) dengan mengembangkan perangkat evaluasi internal (*internal evaluation tool*). Sampai dengan akhir bulan Oktober 2019, Perseroan telah mampu melakukan proses SEDD secara mandiri terhadap 10 (sepuluh) perusahaan/proyek infrastruktur.
- Perbaiki mekanisme dan kebijakan *Whistleblower* yang telah didiskusikan dan didukung oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dan disetujui oleh pemegang saham.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Capacity Building*)

Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan risiko dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan internal Direktorat Manajemen Risiko yang mengelola secara langsung risiko-risiko Perseroan, maupun terhadap seluruh karyawan Perseroan. Pelatihan untuk internal Direktorat Manajemen Risiko meliputi penanganan kredit bermasalah maupun lokakarya terkait infrastruktur dan perekonomian, serta produk seperti Ekuitas. Terhadap karyawan Perseroan telah dilakukan sesi *sharing* terkait *risk awareness* dan *update* mengenai *control limits*.

Terkait aktivitas pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, divisi S&E (*Social & Environmental*) mengikutsertakan *subject matter experts* yang membantu Perseroan dalam mengelola risiko sosial & lingkungan yang melekat pada masing-masing perusahaan/proyek infrastruktur. Selain itu, divisi S&E telah secara aktif mempromosikan prinsip-prinsip sosial & lingkungan Perseroan melalui *knowledge sharing* secara internal dan dengan klien dan potensial klien.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO IIF

Penerapan sistem manajemen risiko ditujukan untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis Perseroan yang dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara aspek imbal hasil, risiko, dan modal yang dimiliki Perusahaan.

IIF telah menerapkan kerangka manajemen risiko terpadu dan terus berupaya meningkatkan proses manajemen risiko sebagai bagian dari rencana strategis Perseroan dalam mengakomodasi strategi pertumbuhan bisnis. Kerangka manajemen risiko IIF terdiri dari:

- Improving the quality and efficiency of Social Environmental Due Diligence (SEDD) by developing an internal evaluation tool. As of the end of October 2019, the Company has been able to carry out the SEDD process independently on 10 (ten) infrastructure projects/companies.
- Improving the mechanism and policy of the Whistleblower which have been supported by the Board of Directors and Board of Commissioners, and approved by the shareholders.

4. Human Resources Development (*Capacity Building*)

Human Resources development related to risk management is delivered through trainings aimed at both internal development of Directorate of Risk Management that directly manages the Company's risks and all employees of the Company. Training for Directorate of Risk Management personnel covers the handling of non-performing loans and workshops related to infrastructure and economy, as well as to product, such as Equity. The Company has also initiated sharing sessions on risk awareness and the updated control limits to the Company's employees.

With respect to social and environmental risk management activities, the S&E (*Social & Environmental*) division includes subject matter experts who assist the Company in managing the social & environmental risks inherent in each infrastructure project/company. The S&E division has been actively promoting the Company's social & environmental principles through knowledge sharing internally and with clients and potential clients.

IIF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of risk management system is aimed at maintaining Company's business sustainability, which can be achieved through the balancing of Company's returns, risks, and capital.

IIF has implemented an integrated risk management framework and continues to improve the risk management process as part of the Company's strategic plan to accommodate business growth strategies. IIF risk management framework consists of:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk risiko utama yang dihadapi IIF;
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas di berbagai tingkatan;
3. Proses manajemen risiko yang memadai (termasuk metodologi manajemen risiko dan pendekatan mitigasi risiko), pemantauan risiko dan proses pengendalian; dan
4. Infrastruktur pendukung terkait sistem TI dan Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan bersifat menyeluruh atas setiap aktivitas usahanya, melalui Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Chief Risk Officer (CRO) dengan fungsi-fungsi di bawahnya yang selaras dengan risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan.

Untuk membangun kapabilitas manajemen risiko yang efektif dan efisien di dalam Perseroan, IIF mengadopsi pendekatan *Three Lines of Defense* atau Tiga Lini Pertahanan yang terdiri dari unit bisnis, unit manajemen risiko, dan unit audit. Dalam hal proses pengambilan keputusan, unit bisnis menjadi Lini Pertahanan Pertama, sedangkan unit manajemen risiko menjadi Lini Pertahanan Kedua. Proses ini kemudian diperkuat oleh unit audit sebagai Lini Pertahanan Ketiga.

Beberapa komite yang dibentuk pada tingkatan Dewan Komisaris dan Direksi juga ikut terlibat dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pengelolaan risiko, inisiatif bisnis, pengambilan keputusan, hingga pengawasan. Strategi ini merupakan bagian dari konsep *four-eye principle* yang diterapkan secara konsisten oleh Perseroan sebagai bentuk komitmen IIF yang mengutamakan proteksi berlapis pada pengelolaan berbagai macam risiko bisnis dalam rangka mewujudkan pengembangan bisnis yang optimal.

JENIS RISIKO DAN UPAYA MITIGASINYA

Terdapat beberapa jenis risiko yang diidentifikasi oleh Perseroan, diantaranya:

1. Risiko Kredit dan Pembiayaan

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan langsung (penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah.

1. Comprehensive risk management policies for major risks encountered by IIF;
2. Appropriate organizational structure with clear definition of roles and responsibilities at various levels;
3. Adequate risk management process (including risk management methods and risk mitigation approaches), risk monitoring and control processes; and
4. Supporting infrastructure for IT system and human resources.

The Company comprehensively manages risk in each business activities through the Directorate of Risk Management led by the Chief Risk Officer (CRO) with the assistance of subordinates performing various functions that are aligned with the main risks faced by the Company.

To build an effective and efficient risk management capabilities within the Company, IIF adopts Three Lines of Defense approach consisting of business unit, risk management unit, and audit unit. In terms of decision-making process, the business unit becomes the First Line of Defense, while the risk management unit becomes the Second Line of Defense. This process is strengthened by the audit unit as the Third Line of Defense.

Several committees established at the Board of Directors and Board of Commissioners levels are involved in various aspects of business, including risk management, business initiatives and decision making to supervision. This strategy is part of the four-eye principle concept applied consistently by the Company as a form of commitment to prioritizing layered protection in managing various types of business risks to realize optimal business development.

TYPES OF RISKS AND ITS MITIGATION

There are several types of risks identified by the Company, including:

1. Credit and Financing Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations based on financing agreement, including financing risk due to the Company's inability to acquire proper investment return from direct financing (equity participation) in the customer's company.

Peran manajemen risiko adalah untuk menjamin terlaksananya hal-hal berikut:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan berinvestasi dan peran aktif Komite Investasi terkait penilaian atas aktivitas tersebut, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.
- b. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko, diantaranya pengaturan alur kerja proses pengelolaan risiko kredit dan aktivitas pendanaan dan investasi, sehingga tercipta proses inisiasi kredit yang efektif dan efisien.
- c. Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan Perseroan mengukur tingkat risiko dan menganalisis kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten, baik untuk modalitas pembiayaan korporasi (*corporate financing*) maupun modalitas pembiayaan proyek (*project financing*).
- d. Pemantauan secara periodik terhadap portofolio pembiayaan bertujuan untuk memastikan kualitas kredit yang baik, termasuk *early warning indicator* guna mendeteksi perubahan kualitas kredit sejak dini. Jika terjadi penurunan kualitas kredit, maka pemantauan lebih intensif dilakukan oleh unit khusus untuk melakukan tindakan pemulihan yang dianggap perlu.

Perseroan telah membentuk unit kerja yang menangani kredit yang menunjukkan tanda-tanda awal bermasalah atau yang akan atau sudah bermasalah walaupun belum terdapat gagal bayar (Unit SAM atau *Special Asset Management*) di bawah Direktorat Manajemen Risiko yang terpisah dan independen dari penanganan kredit lancar. Tugas utama unit kerja ini difokuskan untuk mengatur strategi dalam mencari solusi yang tepat agar kredit bermasalah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang dapat terjadi dari kegagalan pembayaran. Unit kerja ini bertindak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

- e. Penerapan berbagai jaminan, ketentuan, syarat dan prasyarat serta janji-janji (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh peminjam yang dievaluasi secara berkala oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk mengasuransikan aset-aset (*fixed assets*) yang dijaminan kepada Perseroan.

The risk management role is to ensure the following:

- a. The implementation of prudence principle in the provision of financing and investing and an active role of the Investment Committee in evaluating each application for these activities. This is done to ensure that the Company acquires a balanced, comprehensive, independent, and thorough overview of encountered potential risks.
- b. Improvement of risk management procedures and systems, including workflow arrangements between credit risk management, financing, and investing activities, to create an effective and efficient credit initiation process.
- c. Implementation of risk rating system that allows the Company to measure the level of risk and analyze the feasibility of debtors and/or infrastructure projects using consistent measurement tools, both for corporate financing and project financing.
- d. Periodic monitoring on the financing portfolio to ensure good credit quality, including an early warning indicator to detect changes in credit quality. If a decline in credit quality occurs, more intensive monitoring will be carried out by a special unit to perform recovery actions if deemed necessary.

The Company has established a work unit that handles loans showing early signs of distress or that will or have become non-performing loans even though there has not been a default (SAM Unit or *Special Asset Management*) under the Risk Management Directorate, which is separate and independent from the handling of performing loans (those that are still current). The main duty of this work unit is focused on managing strategies in finding the right solution so that the non-performing loans can be resolved thoroughly and on time to reduce the risk of losses that can occur from default. This work unit acts according to the established procedures.

- e. Implementation of various insurance, provisions, conditions and prerequisites and covenants that must be fulfilled by creditors that are regularly evaluated by the Company, including but not limited to provisions for insuring fixed assets that are pledged to the Company.

- f. Pengembangan *database* dalam rangka pengukuran risiko kredit dan investasi berdasarkan *best practice methodology*.
- g. Melakukan pemantauan terhadap portofolio pembiayaan dengan portofolio *monitoring* dan *stress testing* secara berkala, serta valuasi internal untuk investasi perusahaan yang dilakukan dari waktu ke waktu apabila nilai pasar tidak tersedia.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan faktor-faktor pasar yang dapat merugikan Perseroan, dalam hal ini nilai tukar mata uang atau suku bunga.

Pengelolaan risiko pasar yang dilakukan antara lain:

- a. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko pasar. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan atas strategi pembiayaan dan investasi untuk memastikan sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.
- b. Perseroan, melalui Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), melakukan pemantauan secara berkala atas pergerakan indikator-indikator pasar, baik domestik maupun global. Kajian dilakukan atas dampak yang dapat ditimbulkan dari pergerakan indikator-indikator pasar tersebut terhadap kinerja Perseroan, termasuk kajian akan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang.
- c. Terkait risiko nilai tukar uang, Perseroan sebisa mungkin menyesuaikan antara pembiayaan dan pendanaan dalam valuta yang sama, sehingga tercipta *natural hedge*. Selain itu, Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta asing, diantaranya dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan liabilitas dalam valuta asing pada tingkat posisi devisa neto yang terjaga rendah, serta jika diperlukan, melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas eksposur terhadap nilai tukar tertentu.
- d. Terhadap aset Perseroan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman, Perseroan secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan imbal hasil yang optimal. Perseroan juga melakukan analisa sensitivitas terhadap proyek-proyek yang dibiayai terhadap kenaikan tingkat suku bunga sebagai bagian dari proses evaluasi kredit.

- f. Database development to measure credit and investment risk based on best practice methodology.
- g. Monitoring the financing portfolio with portfolio monitoring and stress testing on a regular basis, including internal valuations carried out from time to time for equity investments if market values are not available.

2. Market Risk

Market risk is the risk arising from changes in market factors that may harm the Company, in this case the exchange rates or interest rates.

Market risk management includes:

- a. Determination of measured and planned investment strategies within acceptable parameters by optimizing the rate of return on market risk. Periodic monitoring and evaluation is executed on financing and investment strategies to ensure compliance with policies, limits, and targets that have been set.
- b. The Company, through the Asset and Liability Committee (ALCO), conducts regular monitoring on market indicators movement, both domestic and global. The study is conducted on the impact resulting from the movement of these market indicators towards Company's performance, including the study of interest rate risk and exchange rate risk.
- c. Regarding exchange rate risk, the Company adjusts as much as possible between financing and funding in the same currency, to create a natural hedge. In addition, the Company applies prudence principle in managing foreign exchange risk, including maintenance of balance between the amount of assets and liabilities in foreign currencies at a low level of net open foreign exchange position, and if necessary, hedging transactions on exposures against certain exchange rates.
- d. With respect to the Company's assets that are sensitive to interest rate movements such as loans, the Company regularly monitors market developments and adjusts the provided interest rates, acknowledging the optimal level of risk and return. The Company also conducts a sensitivity analysis of projects financed for rising interest rates as part of the credit evaluation process.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Pengelolaan risiko aset dan liabilitas antara lain:

- Menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana dalam instrumen keuangan yang likuid.
- Pemantauan atas pengelolaan likuiditas secara berkala oleh Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) minimal satu kali dalam satu bulan, termasuk perencanaan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan investasi.
- Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan kepada Komite Aset dan Liabilitas Dewan Direksi.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha IIF.

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengelolaan risiko operasional, antara lain:

- Penetapan tata cara kerja operasional Perseroan yang memadai seperti kebijakan, prosedur, pedoman, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja tertulis, dan usaha penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkala atau jika diperlukan.
- Peningkatan *risk awareness* seluruh karyawan melalui sosialisasi berkala, serta pengkajian *Business Process Analysis* secara berkesinambungan, termasuk dalam hal melakukan proses *Know-Your-Customer* (KYC).
- Penyusunan dan penerapan rencana usaha yang berkesinambungan (*Business Continuity Plan*) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan tetap berkelanjutan meskipun terjadi peristiwa gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal. Perseroan juga memiliki sistem

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of the inability of the Company in obtaining funds to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets without disrupting the Company's activities and financial condition.

Asset and liability risks management include:

- Maintaining a minimum level of liquidity and allocating funds in liquid financial instruments.
- Regular monitoring of liquidity management by the Asset and Liability Committee (ALCO) at least once a month, including planning for funding needs that are tailored to the needs of financing and investment.
- Formulation and determination of funds management policies and procedures governing the stages from the planning, execution to monitoring and reporting to the Board of Directors' Assets and Liabilities Committee.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk caused by inadequate and/or malfunctioning of internal processes, human error, system failure or external problems that affect the implementation of IIF's business activities.

The Company carries out a series of operational risk management steps, including:

- Determination of adequate operational procedures for the Company such as policies, procedures, guidelines, or written work agreements, and efforts for continuous improvement of policies and procedures on a regular basis or if needed.
- Increased risk awareness of all employees through periodic dissemination, as well as a continuous review on Business Process Analysis, including on Know-Your-Customer (KYC) process.
- Preparation and implementation of Business Continuity Plan to ensure that the Company's operational activities prevail despite the occurrence of earthquakes, fires, and so on, which result in operational activities being unable to be carried out as in normal circumstances. The Company also has an emergency communication system (Call Tree System) in the event of cessation of



komunikasi darurat (*Call Tree System*) dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Perseroan yang dikaji ulang secara berkala untuk memantau efektivitasnya.

- d. Untuk memitigasi risiko kehilangan data dan sistem aplikasi IT yang kritikal jika pusat data internal/utama (*Primary Data Center*) mengalami kerusakan, Perseroan sudah memberlakukan sistem pemulihan bencana (*Disaster Recovery System*) dengan menyewa pusat data eksternal sebagai *back-up* dari pusat data utama untuk menjaga kelangsungan beroperasinya sistem aplikasi IT yang kritikal, dan menyusun prosedur pemulihan bencana.
- e. Melakukan mitigasi dengan cara pengalihan risiko kepada pihak asuransi untuk jenis risiko operasional tertentu seperti risiko terhadap aset yang dimiliki Perseroan, kejahatan keuangan (termasuk *fraud*, penggelapan uang dan pencurian data), risiko tuntutan dari pihak ketiga kepada direksi ataupun karyawan, serta perlindungan terhadap terorisme, kebakaran maupun kejadian alam lainnya.

5. Risiko Sosial dan Lingkungan

Risiko Sosial dan Lingkungan adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia dan/atau standar Internasional mengenai Sosial dan Lingkungan atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan. Peraturan mengenai Sosial dan Lingkungan tersebut menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Sosial dan Lingkungan adalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan memastikan pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta sosial yang berlaku.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan sehingga berpotensi memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan bisnis IIF.

the Company's operational activities which are assessed regularly to monitor its effectiveness.

- d. To mitigate the risk of data loss and critical IT application systems if the internal/primary data center is damaged, the Company implements a Disaster Recovery System by renting an external data center as a back-up from the main data center to maintain the continuity of the operation of the critical IT application system, and develop disaster recovery procedures.
- e. Mitigation implementation by transferring risk to the insurance party for certain types of operational risk such as property and casualty risks to cover for the Company's assets, financial risk to mitigate financial crime (including fraud, embezzlement and data theft), risk of claims from third parties to directors or employees, as well as insurance against terrorism, fire, and natural events.

5. Social and Environmental Risk

Social and Environmental Risk are risks arising from conducts that are against the laws and regulations in Indonesia and/or International Standards on Social and Environmental for projects financed by the Company. The regulation on Social and Environment becomes the foundation for sustainable development that promotes harmony between economic, social, and environmental aspects.

The efforts made by the Company in dealing with Social and Environmental Risks are through the implementation of prudence principles by ensuring that the financing carried out by the Company meets the applicable environmental, safety, health, and occupational safety and social requirements and provisions.

6. Reputation Risk

Reputational risk is a risk caused by, among others, negative publications related to the Company's business activities or negative perceptions of the Company that have the potential to adversely affect business continuity of IIF.

Pengelolaan risiko reputasi yang dilakukan Perseroan antara lain:

- a. Melakukan cek dan monitoring terhadap adanya persepsi negatif atau publikasi negatif terkait dengan Perseroan maupun terhadap proyek-proyek yang dibiayai Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah mengenai sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut.
- b. Melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap persepsi negatif atau publikasi yang bertonasi negatif yang berpotensi merugikan Perseroan.
- c. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan citra Perseroan yang baik termasuk dengan media.
- d. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu proses komunikasi dan keterbukaan informasi, seperti pengelolaan *website* Perseroan.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat dan/atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Pengelolaan risiko strategis yang dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan tim dan portofolio pembiayaan yang memadai sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan regulasi.
- b. Upaya berkesinambungan dalam melakukan diversifikasi usaha baik dalam produk yang ditawarkan maupun diversifikasi sektor-sektor infrastruktur yang ditunjang oleh sumber pendanaan yang tepat dari sisi jangka waktu, jenis mata uang dan tingkat suku bunga.
- c. Kajian berkala secara internal di antara dewan Direksi di mana Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun para pemegang saham dalam menentukan rencana strategis Perseroan.
- d. Penyusunan rencana strategis Perseroan sebagai tahapan mewujudkan fungsi Perseroan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkumkan dalam Penilaian Kinerja Perusahaan sebagai suatu Kontrak Manajemen.

The reputation risk management carried out by the Company includes:

- a. Conducting checks and monitoring of negative perceptions or negative publications related to the Company or to projects financed by the Company, including but not limited to social and environmental issues of the projects.
- b. Supervising and following up on negative perceptions or negative publications that have the potential to harm the Company.
- c. Carrying out communication activities both internally and externally with stakeholders through activities that can create a good corporate image including with media.
- d. Developing information technology infrastructure that may help the process of communication and information disclosure, such as managing the Company's website.

7. Strategic Risk

Strategic risk is a risk caused by the determination and implementation of improper corporate strategy and/ or the Company's lack of responsiveness to external changes that could potentially result in losses. Strategic risk management includes:

- a. Establishment of an adequate funding team and portfolio in accordance with the mandate it receives based on regulations.
- b. Utmost efforts to diversify its business, both in the products offered and in diversification of the infrastructure sectors supported by appropriate funding sources in terms of timeframe, currency, and interest rates.
- c. Periodic internal review among the Board of Directors in which the Company can obtain approval from the Board of Commissioners and shareholders in determining the Company's strategic plan.
- d. The preparation of the Company's strategic plan as a stage of realizing the Company's functions as stipulated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) where the important indicators have been summarized in the Corporate Performance Assessment as a Management Contract.



- e. Mitigasi terhadap risiko persaingan yang disebabkan oleh adanya penawaran produk serupa maupun yang bersifat substitusi dari lembaga keuangan lain kepada tipe konsumen yang berada dalam target pasar Perseroan, dimana dalam hal ini Perseroan menerapkan strategi yang ditujukan untuk bersinergi dengan perbankan, lembaga keuangan ataupun investor lainnya, termasuk menyediakan produk dan jasa yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko terdapatnya ketidakpatuhan Perusahaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Atas risiko ini, Perusahaan melakukan kajian dan pemantauan secara berkala (*compliance checklist*) terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku secara internal dan eksternal, serta memastikan penerapannya di lingkungan Perusahaan. Hasil pemantauan dilaporkan ke Komite Manajemen Risiko Direksi serta Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris secara triwulanan.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perseroan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya bekerjasama dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan mandatnya.

10. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Atas risiko hukum ini, Perseroan telah melakukan pengelolaan antara lain:

- Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perseroan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kajian dan pemantauan secara berkala sehubungan dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan telah dilakukan penerapannya di lingkungan Perusahaan.

- e. Mitigation against competition risk from other financial institutions offering similar or substitute products to the types of consumers who are in the Company's target market, in this case through adoption of strategies aimed at synergizing with banks, financial institutions or other investors, including providing products and services that cannot be provided by other financial institutions.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk for IIF of non-compliance with the laws and regulations and other applicable provisions. For this risk, the Company conducts periodic review and compliance checklist of the Company's compliance with applicable laws and regulations externally and internally to ensure that it is implemented adequately. The monitoring results are reported to the Board of Directors' Risk Management Committee and the Board of Commissioners' Risk Monitoring Committee on a quarterly basis.

9. Government Policy Risk

The inability of the Company to anticipate, fulfill and/or adjust to the provisions that apply to the Company will cause losses that have a negative impact on the Company's performance. Therefore, the Company seeks to collaborate and build communication with stakeholders in carrying out its mandate.

10. Legal Risk

Legal risk is risk caused by negligence or default based on agreements that bind the Company and/or violations of the laws and regulations carried out by the Company that can lead to lawsuits by third parties against the Company. The Company manages this risk among others by:

- Ensuring that all activities and relationships between the Company and third parties are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- Conducting review and monitoring on a regular basis in connection with the Company's compliance with applicable laws and regulations as well as ensuring its implementation has been carried out in the Company.

11. Risiko Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian nasional maupun global turut mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Menyingkapi kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan, IIF menerapkan manajemen aset liabilitas (ALM) ketat guna mengoptimalkan pendanaan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komite Aset Liabilitas (ALCO). Terhadap kemungkinan meningkatnya risiko kredit atas pembiayaan diberikan akibat perubahan kondisi perekonomian, Perseroan melakukan simulasi pasar melalui *stress test* yang dapat memberikan gambaran terkait risiko kredit yang mungkin timbul akibat dinamika kondisi perekonomian, sehingga dapat dilakukan pengawasan dini untuk menekan dampak yang merugikan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2019

IIF memahami pentingnya penerapan manajemen risiko yang tepat, sesuai dengan potensi risiko atas dinamika bisnis yang dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan atas penerapan manajemen risiko sangat penting.

Mekanisme pemantauan dan pengawasan atas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan secara berkala melalui komite-komite terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. 13 kali rapat Komite Aset dan Liabilitas – Direksi (ALCO);
2. 5 kali rapat Komite Manajemen Risiko – Direksi (RMC);
3. 4 kali rapat Komite Pemantau Risiko – Dewan Komisaris (ROC);
4. 40 kali rapat Komite Investasi – Direksi (BoD-IC);
5. 9 kali rapat Komite Investasi – Dewan Komisaris (BoC-IC); dan
6. 5 kali rapat Komite Kredit.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan atau *Enterprise Risk Management (ERM)* dievaluasi secara berkala berdasarkan penilaian atas parameter yang telah ditetapkan untuk aspek kuantitatif dan kualitatif. Meskipun pelaporan dilakukan triwulanan, parameter risiko dipantau secara teratur setiap bulannya. Berdasarkan laporan kuartal akhir 2019, keseluruhan sistem manajemen risiko Perseroan dinilai memadai, dengan hasil penilaian parameter risiko yang masih dalam batas risiko yang ditetapkan oleh IIF berada pada level 'Moderat'.

11. Economic Conditions Risk

National and global economic conditions affect the Company's business activities. Responding to unfavorable economic conditions, IIF implements a strict asset liability management (ALM) to optimize funding, with oversight conducted by the Asset and Liability Committee (ALCO). To the possibility of increasing credit risk on financing provided due to changes in economic conditions, the Company conducts market simulations through stress tests that can provide an overview on credit risk that may arise due to the dynamics in economic conditions, so that early supervision can be carried out to reduce adverse impacts.

REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2019

IIF is aware of the importance of implementing appropriate risk management in accordance with the potential risks to the business dynamics faced by the Company. Therefore, ongoing evaluation and improvement of the implementation of risk management is vital.

The monitoring and supervision mechanism for the implementation of risk management is carried out periodically through related committees, with the following details:

1. 13 meetings of the Asset and Liability Committee – Board of Directors (ALCO);
2. 5 meetings of the Risk Management Committee – Board of Directors (RMC);
3. 4 meetings of the Risk Monitoring Committee - Board of Commissioners (ROC);
4. 40 meetings of Investment Committee – Board of Directors (BoD-IC);
5. 9 meetings of the Investment Committee - Board of Commissioners (BoC-IC); and
6. 5 meetings of Credit Committee.

Overall, the effectiveness of Enterprise Risk Management (ERM) implementation is regularly evaluated based on an assessment of parameters that have been set for quantitative and qualitative aspects. Although reporting is carried out quarterly, risk parameters are monitored regularly every month. Based on the final quarterly report in 2019, the overall risk management system of the Company is considered adequate, with the results of the assessment of risk parameters that are still within the risk limits set by IIF at the 'Moderate' level.



Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental

Sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, IIF senantiasa menekankan pemenuhan 8 (delapan) prinsip-prinsip *Social and Environmental* (S&E) pada seluruh proyek infrastruktur yang dibiayai. Hal tersebut dilakukan semata-mata pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak meninggalkan permasalahan laten di kemudian hari dan mampu menciptakan harmonisasi yang baik dengan aspek lingkungan dan sosial.

Delapan prinsip S&E IIF dirancang secara terintegrasi untuk membantu klien dalam mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang berkaitan dengan risiko sosial dan lingkungan, sehingga setiap proyek infrastruktur dapat memperoleh manfaat dari praktik-praktik terbaik secara internasional dari manajemen sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

As a catalyst for infrastructure financing in Indonesia, IIF has a great responsibility in realizing sustainable infrastructure development. Therefore, IIF always emphasizes the fulfillment of 8 (eight) Social and Environmental (S&E) principles in all financed infrastructure projects. This is carried out solely so that infrastructure development in Indonesia does not leave latent problems in the future and able to create good harmonization with environmental and social aspects.

The eight S&E principles of IIF are designed in an integrated manner to assist clients in identifying potential risks and impacts related to social and environmental risks, so that each infrastructure project can benefit from international best practices from sustainable social and environmental management.



DELAPAN PRINSIP S&E IIF

EIGHT S&E PRINCIPLES OF IIF

No.	Prinsip-prinsip S&E / S&E Principles	Catatan	Objective
1.	Sistem Manajemen dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS) / Social and Environmental Assessment and Management System (SEMS)	- Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak S&E proyek. - Untuk mengadopsi hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, maka akan diminimalkan, dan, jika dampak residual tetap ada, kompensasi/ganti rugi untuk risiko dan dampak terhadap pekerja, PAP, dan lingkungan. - Untuk mempromosikan peningkatan kinerja S&E klien melalui penggunaan sistem manajemen yang efektif. - Untuk memastikan bahwa keluhan dari PAP dan komunikasi eksternal dari pemangku kepentingan lainnya ditanggapi dan dikelola dengan tepat. - Untuk mendorong dan menyediakan sarana untuk keterlibatan yang memadai dengan PAP di sepanjang siklus proyek mengenai isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka dan untuk memastikan bahwa informasi S&E yang relevan diungkapkan dan disosialisasikan.	- To identify and evaluate S&E risks and impacts of the project. - To adopt a mitigation hierarchy to anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize, and, where residual impacts remain, compensate/offset for risks and impacts to workers, PAP, and the environment. - To promote improved S&E performance of clients through the effective use of management systems. - To ensure that grievances from PAP and external communications from other stakeholders are responded to and managed appropriately. - To promote and provide means for adequate engagement with PAP throughout the project cycle on issues that could potentially affect them and to ensure that relevant S&E information is disclosed and disseminated.
2.	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja / Labor and Working Conditions	- Untuk mendorong perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang setara bagi pekerja. - Untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan pekerja-manajemen. - Untuk mendukung kepatuhan dengan ketenagakerjaan nasional dan hukum perburuhan. - Untuk melindungi pekerja, termasuk kategori pekerja yang rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien. - Untuk mendukung kondisi kerja yang aman dan sehat, dan kesehatan pekerja. - Untuk menghindari penggunaan kerja paksa.	- To promote fair treatment, non-discrimination, and equal opportunity of workers. - To establish, maintain, and improve the worker-management relationship. - To promote compliance with national employment and labor laws. - To protect workers, including vulnerable categories of workers such as children, migrant workers, workers engaged by third parties, and workers in the client's supply chain. - To promote safe and healthy working conditions, and the health of workers. - To avoid the use of forced labor.
3.	Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim / Pollution Prevention and Abatement and Climate Change	- Untuk menghindari atau meminimalkan dampak berlebih terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. - Untuk mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, termasuk energi dan air. - Untuk mengurangi emisi GRK terkait proyek.	- To avoid or minimize adverse impacts on human health and the environment by avoiding or minimizing pollution from project activities. - To promote more sustainable use of resources, including energy and water. - To reduce project-related GHG emissions.
4.	Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat / Community Health, Safety, and Security	- Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan PAP selama masa proyek baik dari keadaan rutin maupun non-rutin. - Untuk memastikan bahwa perlindungan personel dan properti dilakukan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dan dengan cara yang menghindari atau meminimalkan risiko terhadap PAP.	- To anticipate and avoid adverse impacts on the health and safety of PAP during project period from both routine and non-routine circumstances. - To ensure that the safeguarding of personnel and property is carried out in accordance with relevant human rights principles and in a manner that avoids or minimizes risks to the PAP.



No.	Prinsip-prinsip S&E / S&E Principles	Catatan	Objective
5.	Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali secara Paksa / Land Acquisition and Involuntary Resettlement	• Untuk menghindari, dan ketika menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan perpindahan dengan menjelajahi rancangan proyek alternatif. • Untuk menghindari pengusiran paksa. • Untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas kehilangan aset dengan biaya pengganti dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi yang tepat dari mereka yang terkena dampak. • Untuk meningkatkan, atau memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup para masyarakat terdampak. • Untuk meningkatkan kondisi kehidupan di antara para pengungsi secara fisik melalui penyediaan perumahan yang memadai dengan jaminan kepemilikan di lokasi-lokasi pemukiman kembali.	• To avoid, and when avoidance is not possible, minimize displacement by exploring alternative project designs. • To avoid forced eviction. • To anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize adverse social and economic impacts from land acquisition or restrictions on land use by (i) providing compensation for loss of assets at replacement cost and (ii) ensuring that resettlement activities are implemented with appropriate disclosure of information, consultation, and the informed participation of those affected. • To improve, or restore, the livelihoods and standards of living of displaced persons. • To improve living conditions among physically displaced persons through the provision of adequate housing with security of tenure at resettlement sites.
6.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam / Biodiversity Conservation and Natural Resource Management	• Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. • Untuk mempertahankan manfaat dari jasa ekosistem. • Untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dengan praktik yang mengintegrasikan kebutuhan konservasi dan prioritas pembangunan.	• To protect and conserve biodiversity. • To maintain the benefits from ecosystem services. • To promote the sustainable management of living natural resources through the adoption of practices that integrate conservation needs and development priorities.
7.	Masyarakat Adat / Indigenous People (IP)	• Untuk memastikan bahwa proses pembangunan menumbuhkan rasa hormat yang tinggi terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam Masyarakat Adat. • Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif proyek terhadap komunitas Masyarakat Adat, atau ketika penghindaran tidak memungkinkan, agar meminimalkan dan/atau mengkompensasi dampak tersebut. • Untuk mendukung manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya. • Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi dan partisipasi yang terinformasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek selama siklus proyek. • Untuk memastikan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) dari PAP Masyarakat Adat ketika keadaan yang dijelaskan dalam Standar Kinerja ini terjadi. • Untuk menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik Masyarakat Adat.	• To ensure that the development process fosters full respect for the human rights, dignity, aspirations, culture, and natural resource-based livelihoods of Indigenous Peoples. • To anticipate and avoid adverse impacts of projects on communities of Indigenous Peoples, or when avoidance is not possible, to minimize and/or compensate for such impacts. • To promote sustainable development benefits and opportunities for Indigenous Peoples in a culturally appropriate manner. • To establish and maintain an ongoing relationship based on informed consultation and participation with the Indigenous Peoples affected by a project throughout the project's life-cycle. • To ensure the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) of the PAP of Indigenous Peoples when the circumstances described in this Performance Standard are present. • To respect and preserve the culture, knowledge, and practices of Indigenous Peoples.

No.	Prinsip-prinsip S&E / S&E Principles	Catatan	Objective
8.	Properti dan Warisan Budaya / Cultural Property and Heritage	• Untuk melindungi warisan budaya dari dampak negatif dari kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya. • Untuk mendukung pembagian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya.	• To protect cultural heritage from the adverse impacts of project activities and support its preservation. • To promote the equitable sharing of benefits from the use of cultural heritage.

SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN IIF

Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) IIF dirancang untuk mengelola dua bidang utama paparan risiko yang berasal dari transaksi dan pembangunan proyek yakni risiko S&E dan risiko reputasi. Risiko S&E didefinisikan sebagai risiko terhadap keberlanjutan keuangan IIF yang dihasilkan dari pengurangan nilai aset efek yang mendasari karena kewajiban S&E, atau peningkatan kemungkinan tidak dilunasnya pinjaman karena masalah S&E, di mana risiko reputasi dapat mencakup potensi kerusakan pada reputasi IIF akibat asosiasi dengan proyek-proyek yang memiliki pertentangan atau masalah publik yang signifikan, atau proyek-proyek dengan ketidakpatuhan S&E yang tidak diselesaikan dengan baik. IIF selalu mengembangkan sistem manajemen risiko yang sepadan dengan jenis risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan pengembangan proyek, serta kondisi saat ini. Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan dinamika yang terjadi dalam pengembangan sektor infrastruktur masing-masing.

Manajemen risiko dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh CRO. Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, IIF terus mengembangkan sistem manajemen risiko berdasarkan risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan pengembangan proyek. Sistem Manajemen Risiko terdiri dari tiga lini pertahanan: unit bisnis, unit manajemen risiko, dan audit. Dalam hal proses pengambilan keputusan bisnis, unit bisnis menjadi *First Line of Defense*, sedangkan unit manajemen risiko menjadi *Second Line*. Proses ini diperkuat oleh audit yang berfungsi sebagai *Third Line of Defense*. Selain tiga lini pertahanan ini, beberapa komite di tingkat Direksi dan Komisaris juga terlibat dalam memantau proses dari awal hingga pengambilan keputusan. Strategi keseluruhan ini adalah bagian dari prinsip empat mata yang secara konsisten telah diterapkan oleh Perseroan.

Social and Environmental Division (SED) di bawah Direktorat Manajemen Risiko meneruskan komitmennya untuk mencakup lebih banyak peminjam proyek dengan memberikan bantuan terkait dengan penerapan SEP.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF IIF

The Social and Environmental Management System (SEMS) of IIF is designed to manage two main areas of risk exposure from transactions and its related projects: S&E risk and reputation risk. S&E risk is defined as the risk to IIF financial sustainability as a result of decrease in securities assets value due to S&E obligations or the increase in probability of default due to S&E issues, whereas reputation risk covers potential damage to IIF reputation due to association with projects which involve significant conflicts or public issues or material S&E incompliance that is not resolved properly. IIF continuously develops risk management system in accordance with the types of risks arising from operational and project development activities as well as the current condition. It is particularly important in relation to the actual dynamics in the development of each infrastructure sector.

Risk management is performed by the Directorate of Risk Management led by CRO. As an infrastructure financing company, IIF continuously develops risk management system in accordance with the risks arising from operational and project development activities. Risk Management System consists of three lines of defense: business unit, risk management unit, and audit. In making business decisions, business units serve as the First Line of Defense and the risk management unit as the Second Line. This process is strengthened by audit that acts as the Third Line. In addition to these three lines of defense, several committees at Board of Directors and Board of Commissioners also monitor the process from the beginning to the decision-making. This overall strategy is part of the four-eye principle consistently implemented by the Company.

Social and Environmental Division (SED) under the Directorate of Risk Management continues its commitment to embrace more project borrowers by providing assistance related to SEP implementation. This

Hal ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola risiko S&E secara efektif dan mematuhi persyaratan terkait S&E melalui pemantauan Rencana Tindak Perbaikan (CAPs). SED juga terus mendorong dampak positif dan peran SEP melalui berbagi pengetahuan dan sosialisasi yang bermanfaat bagi IIF dan klien.

SED sebagai divisi manajemen perlindungan S&E yang berdedikasi penuh didirikan pada 2012. Perlindungan S&E merupakan tanggung jawab CRO sebagai bagian dari Komite Manajemen Risiko (RMC) Direksi dan Komite Pemantau Risiko (ROC) Dewan Komisaris. Dalam kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan, RMC bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola profil risiko Perseroan secara keseluruhan, sementara ROC menjalankan fungsi pengawasan. Per 31 Desember 2019, pertumbuhan staf selaras dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, masing-masing sebesar 12,5% dan 9%, dibandingkan dengan tahun 2018. Penambahan dalam jumlah staf versus pengembangan portofolio proyek disajikan pada gambar berikut. Tingkat retensi karyawan SED adalah 25% yang tercatat pada bulan November 2019, namun posisi kosong ini terisi penuh pada bulan Januari 2020.

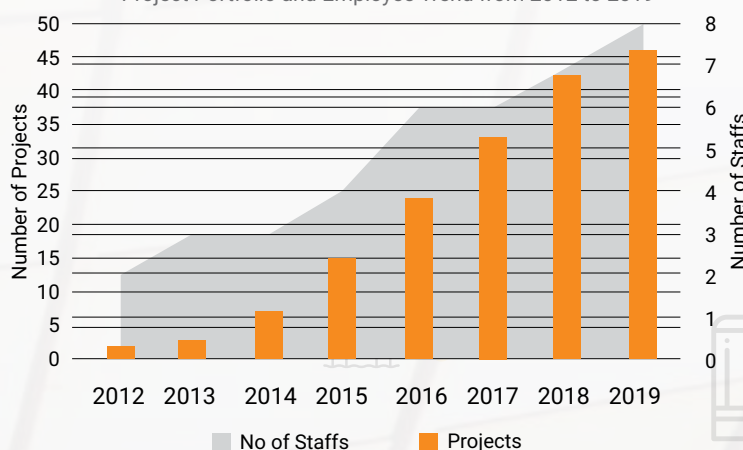
SED memiliki keahlian beragam yang terdiri dari delapan staf, 62,5% pria dan 37,5% wanita dengan klasifikasi: 1 Analis, 2 *Senior Associate*, 2 Manajer, 1 *Assistant Vice President* dan 2 *Vice Presidents*, melaksanakan kegiatan di semua proyek di Indonesia dengan lokasi kantor di Jakarta. Dalam hal pendidikan formal, semua kepegawaian saat ini memiliki gelar Magister Ilmu Lingkungan dan/atau Sosial. Pajanan dan risiko di SED dikelola melalui Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Chief Risk Officer (CRO).

is carried out to support their ability in managing S&E risk effectively and compliance with S&E requirements through Correction Action Plans (CAPs) monitoring. SED also supports positive impacts and SEP role through knowledge sharing and disseminations that benefit IIF and clients.

SED as a fully dedicated S&E protection management division was established in 2012. S&E protection is ultimately the responsibility of CRO as part of Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors and Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners. In the Company Risk Management framework, the RMC is responsible for monitoring and managing the overall risk profiles of the Company, while the ROC performs supervisory function. As of December 31, 2019, the increase in the number of staffs was in line with the Company's business growth at 12.5% and 9% respectively compared to those of 2018. This increase versus project portfolio development is presented in figure below. The current SED retention rate for employees was 25% in November 2019, although this vacancy was filled in January 2020.

The SED is diverse in terms of the expertise of its eight staffs, which consist of 62.5% male and 37.5% female, classified as 1 Analyst, 2 Senior Associates, 2 Managers, 1 Assistant Vice President, and 2 Vice Presidents who conduct activities in all projects in Indonesia and based in Jakarta. In terms of formal education, all employees hold Master's degree in Environmental and/or Social Sciences. Exposure and risks at the SED are managed through the Directorate of Risk Management led by Chief Risk Officer (CRO).

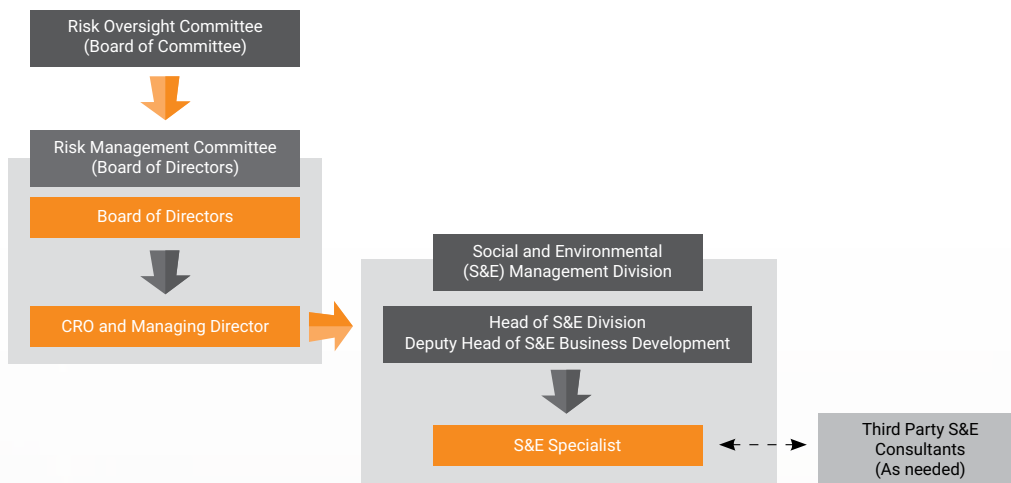
Portofolio Proyek dan Tren Karyawan dari Tahun 2012 hingga 2019
Project Portfolio and Employee Trend from 2012 to 2019



Saat ini SED memiliki staf yang cukup dengan Spesialis Sosial & Lingkungan untuk membantu Manajer Sosial dan Lingkungan dalam meninjau dan menyiapkan memo untuk RMC. Ilustrasi Struktur Organisasi SED dapat dilihat pada gambar berikut.

Currently, the SED has adequate staffs with Social & Environmental Specialists to support the Social & Environmental Manager in reviewing and preparing memo for the RMC. The SED Organization Structure is illustrated in figure below.

Struktur Divisi Sosial and Environmental
Structure of Social and Environmental Management Division



Konsultan independen S&E membantu SED dalam memahami dampak, risiko dan peluang S&E yang dihadapi oleh Perseroan, pendekatan terhadap masalah-masalah spesifik yang menjadi perhatian, dan bagaimana masalah-masalah ini dapat diatasi. Keahlian mereka diperlukan untuk risiko yang lebih tinggi atau kesepakatan yang rumit atau yang di mana uji kelayakan telah menemukan masalah tentang transaksi perusahaan sebelumnya atau mengangkat isu-isu tentang integritas dan manajemen S&E. Pakar eksternal juga mungkin diperlukan untuk melihat peluang khusus yang berkaitan dengan bisnis berisiko tinggi atau satu aspek tertentu dari bisnis yang menjadi perhatian, contohnya polusi, keanekaragaman hayati, pembebasan lahan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pengetahuan dan kepakaran konsultan harus konstruktif dan saling melengkapi dengan staf yang ada, daripada menirunya. Konsultan juga dilibatkan dalam berbagai pekerjaan, seperti Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), penilaian S&E yang lebih terbatas dan terfokus, dan Audit/Pemantauan/Pengawasan S&E atau Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan (SEDD).

Independent S&E consultant assists the SED in understanding S&E impacts, risks and opportunities faced by the Company, their approach to specific issues of concern, and the possible solution to these issues. Their expertise is required to address more significant risks or complicated agreement, or conditions where there are issues in the previous company's transaction identified through due diligence, or issues related to integrity and management of S&E. External experts may also be required to observe specific opportunities related to high-risk businesses or certain aspects of the concerned business, for example, pollution, biodiversity, land acquisition, and/or occupational health and safety issues. The knowledge and expertise of the consultant shall be constructive and complementary to the existing staffs instead of similar. The consultant shall also be involved in various works, such as Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), limited and focused S&E assessments, and S&E Audit/Monitoring/Supervision or Social and Environmental Due Diligence (SEDD).

Pengembangan Kapasitas

Sejak Perseroan didirikan pada tahun 2010, SED berupaya untuk mengikuti evolusi perusahaan dalam hal aktivitas dan persyaratan S&E pemegang saham. IIF Perlindungan S&E melalui penerapan SEP adalah salah satu referensi utama untuk persyaratan sosial dan lingkungan nasional yang mengadopsi standar internasional.

Staf SED berpartisipasi dalam kursus manajemen S&E yang dirancang khusus untuk lembaga keuangan, atau pelatihan yang setara, untuk melatih dan memperluas pengetahuan tentang relevansi dan kebutuhan akan prosedur untuk mengelola masalah S&E dalam penilaian proyek dan proses pengawasan. Pada tahun 2019, para staf diberi sembilan pelatihan yang mencakup peluang pengembangan profesional dengan lembaga keuangan internasional lainnya, otoritas keuangan atau pembangunan nasional dan jaringan pembelajaran di Indonesia.

Sebanyak 638 jam pelatihan SED dilaksanakan, dengan rata-rata 10 hari kerja atau 80 jam pelatihan per orang, di mana 31% terkait dengan pelatihan internal tentang manajemen dan presentasi proyek. Jam pelatihan ini lebih tinggi dari jam rata-rata pada tahun 2018 dan KPI Sumber Daya Manusia sebesar 8 hari kerja per orang.

Untuk meningkatkan konsistensi implementasi SEMS dan efektivitas praktik manajemen S&E dalam semua produk dan aktivitasnya, SED telah berbagi SEP dan pengalaman dengan masyarakat luas, calon dan klien yang ada, serta memperkuat kapasitas kelembagaan internal. Selama tahun 2019 otomatisasi data telah dilakukan dan materi S&E yang relevan telah diungkapkan di situs laman IIF:

1. Ringkasan dan pengungkapan dokumen pengamanan 8 proyek baru di IIF atau situs laman klien.
2. Dimulainya Sistem Manajemen Dokumen (DMS) dan Digitalisasi sebagai alat pendukung sistem pengarsipan informasi terkait S&E di IIF.
3. Penilaian kematangan SEMS interaktif klien melalui intranet.

Penjangkauan berkelanjutan dan bantuan langsung IIF tentang SEP ke internal IIF, para pemangku kepentingan dan calon klien telah memperkuat kapasitas SED dalam mengelola risiko dalam memenuhi persyaratan SEMS. IIF, dalam beberapa kegiatan, bersama-sama dengan PTSMI dan Kementerian Sosial, telah secara aktif mempromosikan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dengan berbagi SEP dan pengalaman dengan agen perdagangan internasional, universitas, lembaga pemerintah, bank atau

Capacity Development

Since the Company's establishment in 2010, the SED strives to follow the Company's evolution in terms of the shareholders' S&E requirements and activities. IIF S&E Protection through SEP implementation is one of the main references for national social and environmental requirements which adopt international standards.

SED staffs participate in S&E management courses specifically designed for financial institutions or equivalent trainings to sharpen and expand their knowledge on the relevance and requirement of procedures for S&E issues handling in project assessment and supervision process. In 2019, the staffs were provided with nine trainings that include professional development opportunity with other international financial institutions, financial or national development authorities, and learning networks in Indonesia.

The SED training duration amounted to 638 hours, which averaged at 10 working days or 80 training hours per person, of which 31% was internal training on project management and presentation. The training hours were higher than the average hours in 2018 and Human Resources KPI of 8 working days per person.

To improve SEMS implementation consistency and S&E management practice effectiveness in all products and activities, the SED shared the SEP and its experiences with the public, prospective and existing clients, and strengthened internal institution capacity. In 2019, data automation was carried out and relevant S&E materials were disclosed on IIF website:

1. Summary and disclosure of security documents of 8 new projects on IIF or client website.
2. Initial action on Document Management System (DMS) and Digitalization as support for S&E information archive system at IIF.
3. Initial action on assessment of intranet interactive SEMS readiness for clients.

Continuous outreach and direct assistance of IIF related to SEP to the internal parties of IIF, stakeholders, and potential clients also supported SED capacity in managing risks to meet SEMS requirements. In several joint cases with PTSMI and the Ministry of Social Affairs, IIF actively promotes sustainable infrastructure financing by sharing the SEP and experiences with international trading agents, universities, government institutions, banks or other financial institutions as well as national environmental

lembaga keuangan lainnya dan jaringan keberlanjutan lingkungan dan sosial di tanah air. Sesi berbagi SEP, termasuk di dalamnya acara “S&E Awareness”, diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyegarkan pemahaman SEP untuk semua karyawan IIF. Acara ini bersifat wajib karena IIF menerapkan SEP dalam setiap aktivitas bisnis.

Selama tahun 2019, IIF telah mengelola 46 proyek, 34 di antaranya dari portofolio yang ada dan empat proyek akan berakhir pada tahun 2019. Sebagian besar proyek telah memenuhi SEP IIF. Meskipun pendekatan SEMS IIF secara umum telah dipahami dan diadopsi oleh masing-masing proyek, namun beberapa proyek masih membutuhkan perbaikan SEMS pada penerapan sistem manajemen. SED menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses peningkatan berkelanjutan yang diupayakan SED untuk lebih baik. Dalam hal standar kinerja kesehatan dan keselamatan kerja, Tim SED telah mampu menciptakan kesadaran akan pentingnya untuk melanjutkan kepatuhan terhadap 8 SEP IIF serta CAP yang relevan untuk proyek. SED akan terus memberikan bantuan kepada klien untuk meningkatkan aspek S&E untuk proyek infrastruktur masing-masing. SED juga mencatat beberapa proyek perlu meningkatkan kinerja S&E mereka, seperti dengan kasus kematian. IIF telah meminta klien untuk melakukan penyelidikan penuh dan tindakan perbaikan yang diambil dan telah meminta tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk menunjukkan tingkat perhatian pada masalah tersebut.

SED IIF didukung oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC) yang telah memberikan komentar dan ulasan konstruktif pada dua proyek bandara dan air bersih yang sedang berjalan untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan. IFC dan IBRD, bersama-sama juga telah mendukung staf SED dalam meninjau SEDD, ESAP, dan dokumen perlindungan hukum untuk 11 proyek S&E Kategori A dan 6 kunjungan lokasi proyek yang mendalam untuk memastikan bahwa hasil SEDD telah mengatasi risiko S&E utama dan bahwa Kesenjangan S&E utama dimasukkan ke dalam persyaratan proyek; dan CAP selaras dengan waktu terjadinya risiko S&E, COD untuk pembiayaan proyek atau aset yang terdefinisi dengan baik. Tantangan telah diidentifikasi dalam menerapkan SEMS dan memastikan kepatuhan dengan SEP IIF, dan dengan ekstensi Standar Kinerja Bank Dunia dan IFC. Masukan dari Bank Dunia, IFC, ADB dan PTSMI ditanggapi dengan serius untuk memastikan peningkatan

and social sustainability networks. SEP “sharing” also includes “S&E Awareness” event organized to improve and refresh SEP understanding of all IIF employees. This event was obligatory since IIF implements SEP in each business activity.

In 2019, IIF have managed 46 projects, 34 of which were from existing portfolio and four ended in 2019. Most of the projects has complied with the IIF SEP. Although the IIF SEMS approach in general was understood and adopted by each project, several projects still required SEMS improvement in the management system implementation. The SED acknowledges this as part of sustainable improvement process followed through by the SED to achieve excellence. In terms of occupational health and safety performance standards, the SED Team was able to foster awareness of the importance of compliance with 8 IIF SEPs and relevant CAP for project. SED will continue to assist clients in improving S&E aspect of their respective infrastructure projects. SED noted that several projects must improve their S&E performance, such as fatality. IIF has requested clients to conduct thorough investigation and corrective action and asked the higher managements to demonstrate concern to such issues.

The IIF SED is supported by International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Finance Corporation (IFC) which have provided constructive feedback and reviews related to monitoring and supervisory activities on two ongoing airport and waterworks projects. IFC and IBRD jointly supported the SED staffs in reviewing SEDD, ESAP, and legal protection documents for 11 S&E projects of A Category and 6 in-depth project site visits to ensure that: the SEDD results have mitigated major S&E risks; major S&E gaps were included in project requirements; CAP was in line with the time of S&E risk occurrence; and COD for project or asset financing was well-defined. Challenges in implementing SEMS were identified, which ensured compliance with IIF SEP and by extension the Performance Standards of the World Bank and IFC. Input from the World Bank, IFC, ADB and PTSMI were responded seriously to ensure continuous improvement and to build the capacity and knowledge of the SED team. SED believes that the improvement of



berkelanjutan dan memperbaiki tim SED dalam kapasitas dan pengetahuan. SED percaya peningkatan koordinasi dan berbagi pengetahuan serta kepercayaan antara IIF dan semua pemangku kepentingan dan pemberi pinjaman, adalah kunci bagi IIF untuk melanjutkan partisipasi aktif untuk fungsi katalitiknya untuk mengembangkan proyek infrastruktur di Indonesia.

Selama tahun 2019, berdasarkan hal di atas, ulasan tentang kinerja SED dari pemegang saham dan pemberi pinjaman telah dilakukan dan mengakui peningkatan dalam manajemen S&E IIF. SED memiliki tim yang berkualitas. Berdasarkan aide memoire Bank Dunia dan Tinjauan Portofolio 2019, SED telah berperan dalam meningkatkan praktik lingkungan dan sosial dari banyak kliennya. Pengungkapan dokumen dan berbagi informasi telah meningkat secara signifikan. IIF juga berupaya untuk menstandarisasi elemen-elemen kunci dari SEMS dan SEP dan sedang mempersiapkan alat penilaian S&E pada isu-isu khusus, seperti pembebasan lahan dan masyarakat adat, untuk meningkatkan penerapan SEMS dan SEP. Sebagai tindak lanjut dari tinjauan ini, dokumen SEMS pada saat ini sedang dalam proses perbaikan dan peningkatan. Revisi baru ini diharapkan akan siap pada akhir Kuartal kedua tahun 2020.

IIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

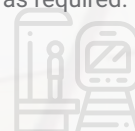
IIF dikenal karena pengalamannya, ladang pengetahuan yang luas, dan keterampilan di bidang pengembangan proyek infrastruktur yang layak secara komersial dan pembiayaan dengan aspek perlindungan sosial dan lingkungan yang kuat. Sesuai persyaratan Pedoman Operasional IIF (IIF OM SEMS 2019 – dalam proses), uji tuntas upaya perlindungan perlu dilakukan untuk menilai potensi dampak sosial dan lingkungan serta risiko yang terkait dengan proyek dan kapasitasnya untuk manajemen sosial dan lingkungan. Untuk mempermudah proses manajemen risiko, SED mengkategorikan risiko proyek menjadi beberapa jenis: Kategori A, B, dan C yang mengacu pada tingkat risiko dan dampak yang dihasilkan dari setiap proyek dan diadopsi dari Kategorisasi S&E berdasarkan praktik terbaik industri untuk Sosial dan Lingkungan. Setelah proses klasifikasi ini, Penilaian Sosial dan Lingkungan diterapkan melalui SEDD, IEE (Pemeriksaan Lingkungan Awal), atau EIA/EMP, baik yang dikelola sendiri ataupun dengan bantuan konsultan S&E terdaftar untuk menyaring semua proyek yang diusulkan dan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan instrumen perlindungan terhadap penerapan 8 (delapan) SEP IIF dalam proyek, sesuai kebutuhan.

coordination, knowledge sharing, and trust between IIF and all stakeholders and lenders is important for IIF to sustain its active participation and catalytic function in developing infrastructure projects in Indonesia.

Based on the abovementioned matters, SED performance in 2019 has been reviewed by the shareholders and lenders, in which they acknowledged improvement in IIF S&E management and the quality of SED team. Based on aide memoire of the World Bank and 2019 Portfolio Review, the SED had a role in improving environmental and social practices of many of its clients. Document disclosure and information sharing also improved significantly. IIF strived to standardize key elements of the SEMS and the SEP is currently preparing S&E assessment tools for certain issues, such as land acquisition and indigenous people, to enhance SEMS and SEP implementation. As a follow-up to this review, SEMS document is currently being revised and amended. The new revision is expected to be available by the end of Q2/2020.

IIF AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

IIF is known for its vast experience, knowledge, and expertise in the development of commercially feasible infrastructure project and in financing with sound social and environmental protection. As required by IIF Operation Manual (IIF OM SEMS 2019 – in progress), a safeguard due diligence is needed to assess the potential social and environmental impacts and risks associated with a project and such project's capacity for social and environmental management. To facilitate the risk management process, SED categorizes projects into Category A, B, and C based on the level of risk and impact in accordance with the S&E Categorization and best practices in the industry. Following this classification process, social and environmental assessment is carried out through SEDD, IEE (Initial Environmental Examination), or EIA/EMP, either self-administered or with the help of its approved list of S&E consultants in screening proposed projects and determining the appropriate mitigation measures and safeguards instruments for the implementation of 8 (eight) IIF SEPs in projects as required.



Berdasarkan hasil SEDD, identifikasi kesenjangan dengan SEP IIF akan dianalisis, yang akan menghasilkan beberapa mitigasi risiko dan rencana aksi di bawah skema pemantauan dengan menerapkan program Rencana Tindak Perbaikan (CAP) untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan selama penilaian uji tuntas proyek. Sistem komunikasi dan pelaporan yang intensif dengan pengembang (proyek) telah dibuat untuk memastikan aplikasi SEMS. CAP tersebut biasanya dimasukkan sebagai bagian dari dokumentasi hukum di mana IIF mewajibkan semua proyek investasinya untuk mematuhi serta memenuhi SEP-nya. Ini memperjelas komitmen proyek untuk mendukung program pembiayaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan sosial.

SED terus memandu dan memfasilitasi peminjam proyek untuk memenuhi prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan melalui pemantauan via CAP. Dalam melaksanakan analysis, IIF bekerja sama dengan klien untuk mencari solusi yang tepat (dapat dicapai dan dapat dilakukan) yang mengurangi masalah risiko S&E utama. Selain itu, IIF juga memiliki tinjauan proyek reguler yang dilakukan oleh Direktorat Investasi. Pertama, Tinjauan Semi-Tahunan, khususnya untuk proyek baru atau proyek dalam tahap konstruksi, yang mencakup kinerja Perseroan dalam hal risiko kredit dan kepatuhan terhadap persyaratan S&E. Kedua, adalah tinjauan tahunan untuk proyek COD yang terdiri dari kinerja Perseroan dalam hal risiko kredit dan juga kepatuhan persyaratan S&E. Dengan melakukan hal itu, baik proyek dan klien dapat mengelola dan memantau risiko serta potensi dan dampaknya sementara pada saat yang sama melakukan perbaikan yang diperlukan seperti yang disyaratkan dalam dokumen CAP.

Based on the result of the SEDD, the gaps in the implementation of IIF SEP are analyzed to formulate a series of risk mitigation and action plans under a monitoring scheme by implementing Corrective Action Plan (CAP) to fill the gaps found during project due diligence. A communication system and intensive reporting to (project) developer are established to ensure SEMS application. Such CAP is usually included as a part of the legal documentation in which IIF obliges all its investment projects to comply with the SEP. It clarifies the commitment of projects to support an environmentally and socially sound infrastructure financing program.

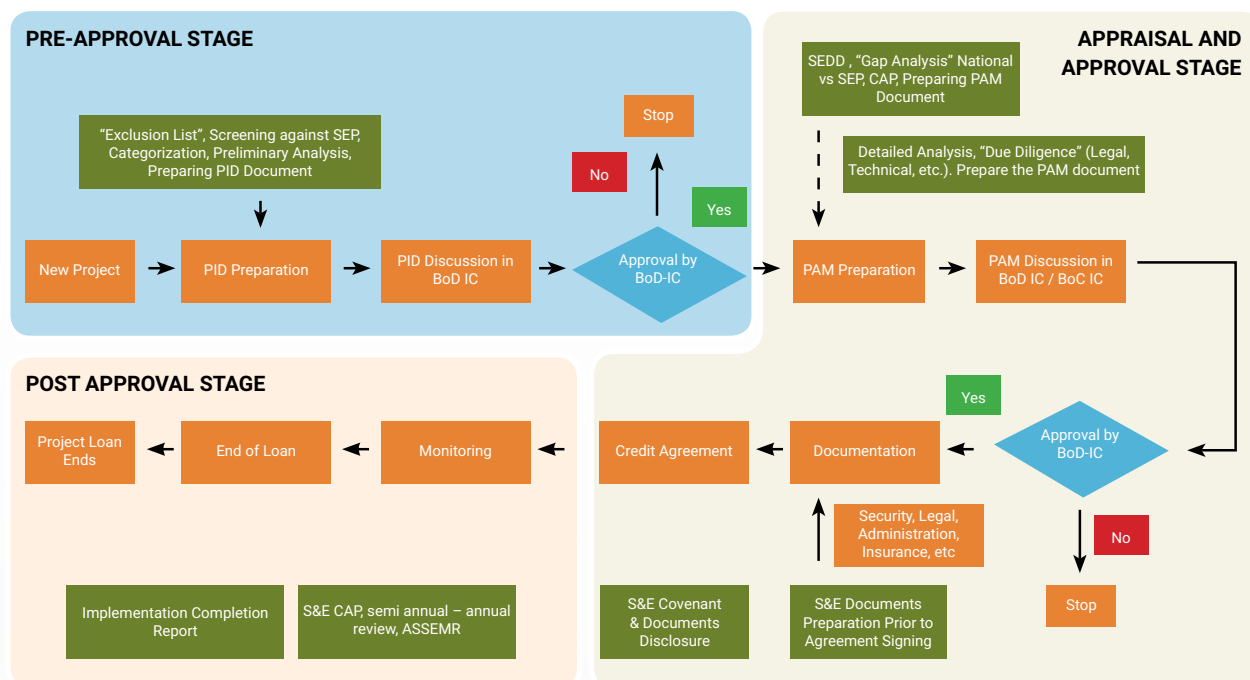
SED continues to guide and facilitate project borrowers in adhering to the Social and Environmental principles through the monitoring via CAP. In conducting the analysis, IIF works closely with clients to seek acceptable, meaning fully achievable and doable solutions. In addition, IIF also conducts regular project reviews through the Directorate for Investment. The first part is the Semiannual Review of the performance of the company in terms of credit risks and compliance with the S&E requirements particularly for green field projects or projects in the construction phase. The second part is the annual review of the Company's performance in COD projects in terms of credit risks and compliance of S&E requirements. The two reviews are expected to allow the projects and the clients to manage and monitor risks as well as the potentials and impacts while at the same time making the necessary improvements as required in the CAP document



Secara keseluruhan, proses bisnis mengikuti alur kerja proyeknya dari awal, pra-penapisan, uji tuntas dan persetujuan serta pasca persetujuan, pemantauan dan pengawasan. Proses yang telah dijelaskan di atas, melibatkan hubungan kerja yang erat antara bisnis atau investasi dan tim S&E sebagai berikut:

In general, the business process follows the project framework from pre-approval, appraisal and approval, as well as post-approval, monitoring, and supervision stages. Such process involves close working relationship between business or investment and S&E team as illustrated below:

Proses Alur Kerja Bisnis dan Sosial & Lingkungan Business and Social & Environment Workflow



Notes:



Abbreviations:

PID : Project Information Document	ASSEMR : Annual Social Safeguard Environmental Monitoring Report
PAM : Project Appraisal Memorandum	BOD-IC : Board of Director - Investment Committee
SEDD : Social Environmental Due Diligence	BOC-IC : Board of Committee - Investment Committee
CAP : Corrective Action Plan	

Sumber Daya Manusia

Human Resources

IIF berkomitmen untuk selalu menunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan yang tercermin dalam komposisi karyawan IIF, dimana Perseroan tidak pernah membatasi partisipasi karyawan wanita dalam membangun dan mengelola Perseroan. Dengan memperkuat implementasi ketiga nilai inti IIF yang selaras dengan prinsip kesetaraan, IIF berharap dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para mitra bisnis maupun pemangku kepentingan.

IIF is committed to uphold the principle of equality in embracing all employees, which is reflected in IIF employee composition where the Company never inhibits the participation of female employees in building and managing the Company. By strengthening the implementation of three core values of IIF that are in line with the principle of equality, IIF strives to build a harmonious relationship with business partners and the stakeholders.

Bagi IIF, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang berperan sebagai penggerak roda operasional bisnis di tengah tantangan dan dinamika bisnis yang semakin masif. Dengan adanya SDM, IIF memiliki kapabilitas untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan serta mewujudkan visi dan misi Perseroan. Oleh karena itu, IIF memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas sehingga mampu menjadi bekal bagi Perseroan dalam menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis dan kompetitif.

IIF regards Human Resources (HR) as an important asset that drives business operations amidst increasingly massive business challenges and dynamics. HR enables IIF to achieve the determined business targets and realize its vision and mission. Therefore, IIF is highly responsible for building excellent and qualified HR that can support the Company in facing a dynamic and competitive industry.

Perumusan kebijakan SDM IIF senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai inti IIF, yaitu:

- **Kolaborasi**

IIF memiliki komitmen terhadap kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

- **Keunggulan**

IIF memiliki komitmen terhadap keunggulan, seperti ketelitian hingga ke hal-hal yang mendetail, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam pekerjaan, dan mampu memecahkan masalah.

The establishment of IIF HR policy is grounded in the main values of IIF, namely:

- **Collaboration**

IIF is committed to trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational objectives and collaboration to achieve them.

- **Excellence**

IIF is committed to excellence with an approach that is detailed-oriented, intolerant of mistakes, accurate, meeting expectations, with an emphasis on professionalism, quality in our work and the ability to solve problems.



- **Komitmen terhadap Bisnis Infrastruktur**

IIF memiliki komitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia.

Ketiga nilai di atas diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata oleh setiap Insan IIF, baik pada saat bekerja dalam tim maupun saat berinteraksi dengan para mitra bisnis. Selain itu, IIF juga berkomitmen untuk selalu menunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan yang tercermin dalam komposisi karyawan IIF, dimana Perseroan tidak pernah membatasi partisipasi karyawan wanita dalam membangun dan mengelola Perseroan. Dengan memperkuat implementasi ketiga nilai inti IIF yang selaras dengan prinsip kesetaraan, IIF berharap dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para mitra bisnis maupun pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019, sebanyak 44% dari total keseluruhan karyawan IIF terdiri dari karyawan wanita. Beberapa di antaranya menempati posisi strategis seperti manajer, manajer senior, dan direktur.

- **Commitment to infrastructure business**

IIF is committed to be an expert in infrastructure business in Indonesia.

IIF continuously instills these three values in all individuals in IIF to be applied in a tangible way, both in internal teamwork and in interactions with business partners. IIF is also committed to uphold the principle of equality in embracing all employees, which is reflected in IIF employee composition where the Company never inhibits the participation of female employees in building and managing the Company. By strengthening the implementation of three core values of IIF that are in line with the principle of equality, IIF strives to build a harmonious relationship with business partners and the stakeholders.

In 2019, 44% of total IIF employees were female employees. Several among them held strategic positions such as manager, senior manager, and directors.



ORGAN PENGELOLA SDM PERUSAHAAN

Agar pengelolaan SDM Perseroan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan dan rencana Perseroan, IIF membentuk Divisi SDM yang memiliki tugas terkait hal kebutuhan rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja SDM di lingkungan kerja IIF.

PROFIL INSAN IIF

Per 31 Desember 2019, IIF memiliki 98 karyawan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan jumlah karyawan di tahun 2018 yang tercatat sebanyak 91 orang. Berikut ini adalah jumlah dan komposisi karyawan IIF selama 2 (dua) tahun terakhir:

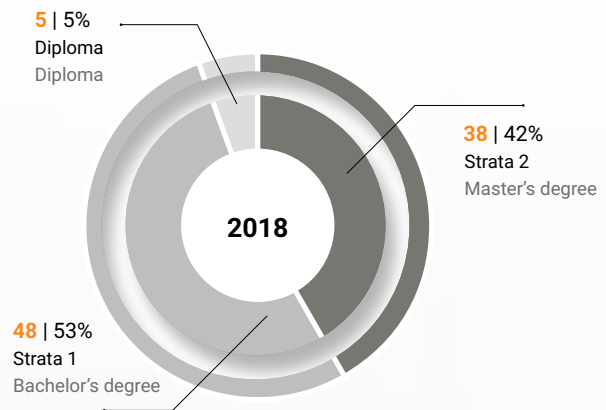
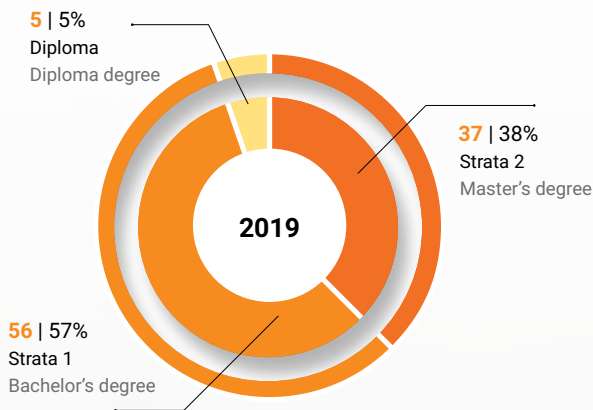
HR MANAGEMENT ORGAN

IIF established HR Division to conduct an integrated HR management that is in accordance with the Company's objectives and plans. Duties of the HR Division include matters relating to recruitment, development, and performance assessment of HR within IIF.

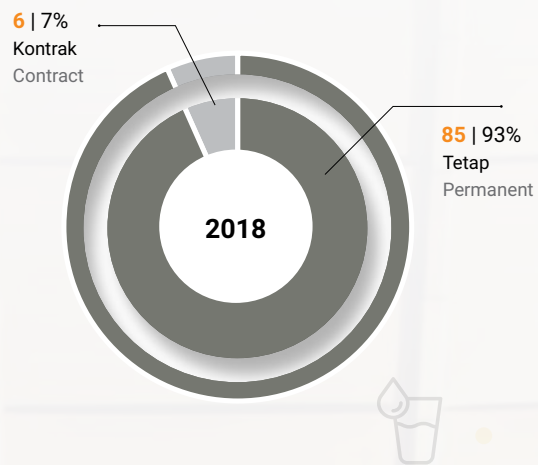
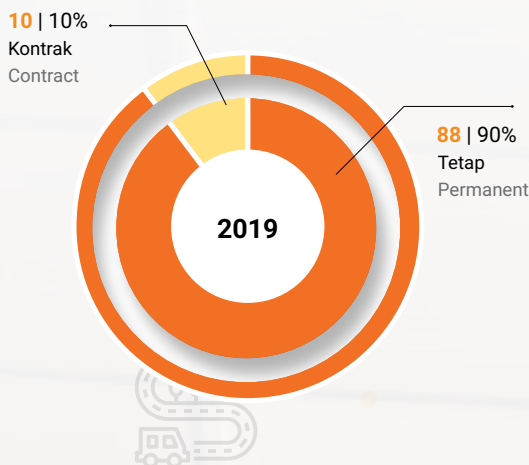
PROFILE OF IIF PERSONNEL

As of December 31, 2019, IIF had 98 employees. Such number increased by 8% compared to that of 2018 at 91 employees. The number and composition of IIF employees in the last 2 (two) years is as follows:

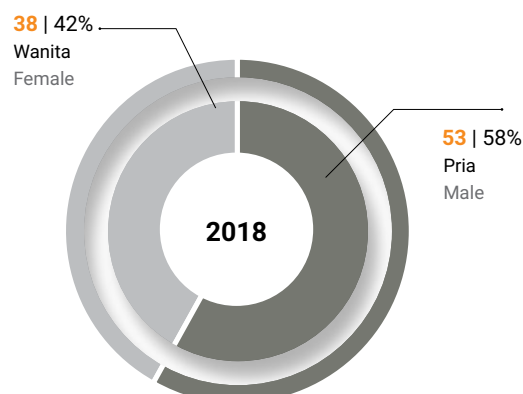
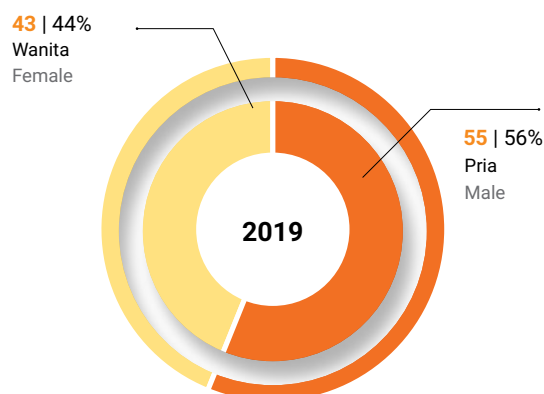
Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Number of Employees by Education



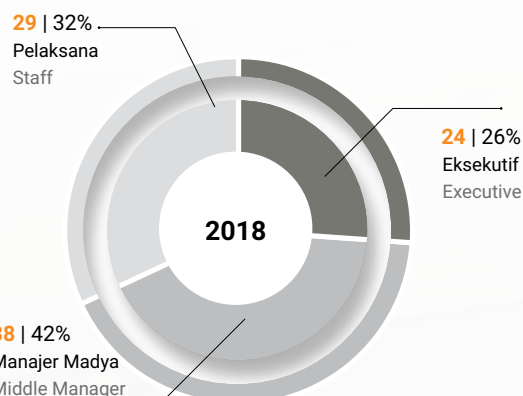
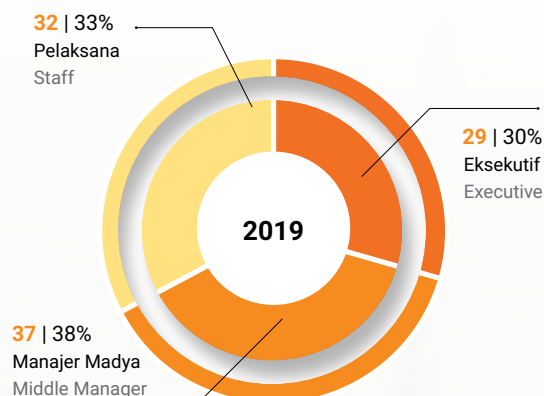
Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Karyawan
Number of Employees by Employee Status



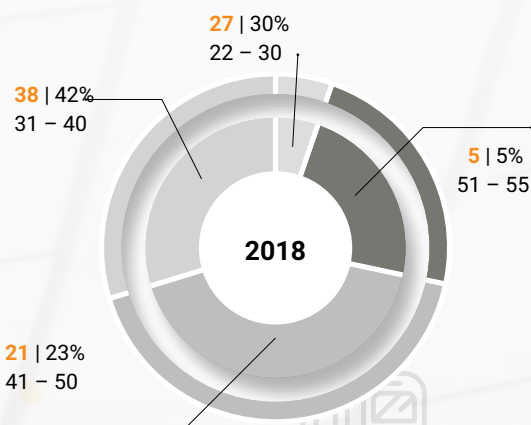
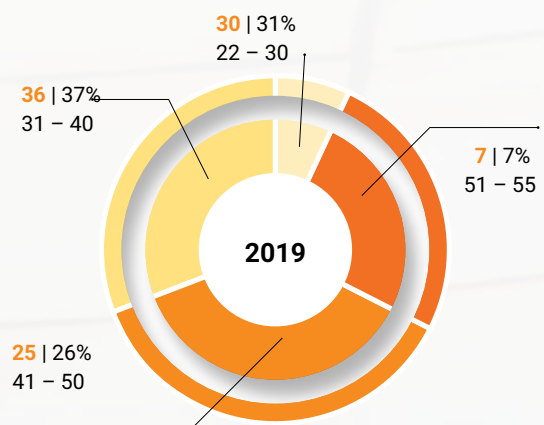
Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Number of Employees by Gender



Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Number of Employees by Position



Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Number of Employees by Age



REKRUTMEN KARYAWAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat telah membuka peluang bisnis bagi perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan infrastruktur, termasuk IIF. Melalui keunggulan pada setiap produk pembiayaan dan *advisory*, IIF telah memiliki nilai lebih dibandingkan dengan institusi keuangan umum seperti perbankan.

Meski demikian, agar potensi bisnis dapat dimanfaatkan secara maksimal, IIF harus mengimbangi keunggulan produk dan layanan pembiayaan IIF dengan keandalan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk merekrut profesional muda yang berkompeten dan memiliki kapabilitas dalam menjawab tantangan bisnis yang semakin masif melalui pendekatan dan karakteristik usaha yang dimiliki IIF. IIF juga terus mengembangkan strategi pengelolaan SDM berbasis program pengembangan profesional.

Pesatnya pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 mendorong Perseroan untuk terus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. IIF juga menyadari pentingnya keberadaan profesional muda yang kompeten dan andal yang mampu menjawab tantangan masa depan dengan pendekatan IIF dan bisnis pembiayaan infrastruktur. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi SDM, IIF terus mengembangkan strategi manajemen SDM yang didasarkan pada program pengembangan profesional yaitu *Open Career Path* yang mencakup Promosi *Grade to Grade* dan *Open Career Path*. Melalui program tersebut, Perseroan dapat segera mengisi posisi-posisi yang kosong. Selain itu, di satu sisi, program ini mampu memenuhi kebutuhan Perseroan, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Perseroan dalam hal sumber daya manusia, sedangkan di sisi lain, program ini juga dapat memenuhi aspirasi karyawan untuk berkembang dan berkarier di Perseroan.

Dengan ketersediaan dan bantuan dari para praktisi dan profesional senior, IIF berharap bahwa proses regenerasi dapat dilakukan dengan baik untuk mengakomodasi semua kebutuhan mengenai pemasaran produk-produk pembiayaan infrastruktur.

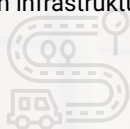
EMPLOYEE RECRUITMENT

Rapid infrastructure development in Indonesia provided business opportunities for companies engaging in infrastructure financing, including IIF. With its excellence in each financing and advisory product, IIF possesses added value compared to general financial institutions such as banks.

Nevertheless, to optimize business potentials, IIF shall balance its financing products and services excellence with HR reliability, both in terms of quantity and quality. Thus, the Company recruits competent young professionals who are capable to address massive business challenges through IIF's business approach and characteristics. IIF also develops HR management strategy based on professional development program.

Intensive infrastructure development in 2019 encouraged the Company to prepare excellent human resources in terms of quality and quantity. IIF also realizes the importance of competent and reliable young professionals who can address future challenges through IIF's approach and infrastructure financing business. Therefore, to optimize HR potential, IIF continues to develop HR management strategy based on professional development program or Open Career Path, which includes Grade to Grade Promotion and Open Career Path. Such program enables the Company to immediately fill vacant positions. This program is able to support the Company's need to improve competitiveness and continuity in terms of human resources while also facilitating the employees' aspiration to develop and build their career at the Company.

With the availability of and assistance from senior practitioners and professionals, IIF seeks to implement regeneration process properly to accommodate every need for the marketing of infrastructure financing products.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Di tengah tantangan dan perkembangan bisnis yang semakin masif, IIF menyadari pentingnya membekali SDM Perseroan dengan kemampuan dan kompetensi, baik secara teknis maupun non-teknis. Dengan mengikutsertakan para karyawan ke berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka, Perseroan optimis mampu menghasilkan SDM yang profesional, berkepribadian unggul, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Sepanjang tahun 2019, IIF telah memberikan kesempatan bagi karyawan, Manajemen Eksekutif, hingga jajaran Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya yang diklasifikasikan ke dalam pelatihan dasar, lanjutan, dan profesional, dengan rata-rata hari pelatihan, per karyawan per tahun, di atas tujuh hari kerja setiap tahunnya.

MANAJEMEN KINERJA

IIF senantiasa melakukan pemantauan kinerja karyawan untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan. Divisi SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM telah melakukan program manajemen kinerja yang dikembangkan menggunakan modul penilaian berbasis *Key Performance Indicators* (KPI).

Program Retensi

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus mempertahankan loyalitas karyawan terhadap Perseroan, IIF menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan proporsional bagi setiap Insan IIF, dengan mempertimbangkan besaran yang berlaku secara umum.

Komunikasi Karyawan

Secara berkala, IIF mengadakan berbagai forum yang dapat dihadiri oleh seluruh karyawan dari berbagai jenjang dan departemen sebagai ruang untuk saling bersilaturahmi dan membangun kerja sama yang baik antar departemen. Forum ini juga dapat digunakan sebagai wadah bagi para karyawan yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu-isu Perseroan.

Pada tahun 2019, IIF telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan seluruh karyawan dengan beragam agenda pembahasan.

EMPLOYEE EDUCATION AND TRAINING

Amidst the increasingly massive business challenges and development, IIF realizes the importance of providing its HR with technical and non-technical capabilities and competency. By involving its employees in various education and training activities according to their needs, the Company is optimistic in building professional HR with superior personalities and leadership skills.

Throughout 2019, IIF has provided the employees, executive management, up to the Board of Directors with opportunities to attend various trainings, seminars, and workshops which are classified into basic, advanced, and professional training. The training days averaged at above seven working days per employee annually.

PERFORMANCE MANAGEMENT

IIF continuously monitors employee performance to ensure the achievement of the Company's vision and mission. The HR Division that is responsible for HR management has developed and implemented performance management program based on *Key Performance Indicators* (KPI).

Retention Program

To support employee welfare and maintain their loyalty to the Company, IIF provides competitive and proportional compensation and benefits package for each IIF personnel by taking account of the generally applicable amount.

Employee Communication

IIF periodically organizes forum that can be attended by all employees from various levels and departments to socialize and foster cooperation between departments. Such forum also serves to facilitate employees who wish to voice their aspiration related to Company issues.

In 2019, IIF has organized 7 (seven) meetings with all employees under various discussion agenda.



Remunerasi Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan yang menjadi elemen penting bagi Perseroan dalam mencapai target bisnis yang lebih baik di masa depan, IIF telah menyediakan program kesejahteraan karyawan, yang terdiri dari:

a. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan, ditambah dengan prestasi yang telah dicapai serta kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.

b. Fasilitas dan Tunjangan

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, IIF juga memberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, berupa:

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

Employee Remuneration

To improve performance, productivity, and loyalty of employees as an important element for the Company in achieving higher business targets in the future, IIF provides employee welfare program which consists of:

a. Salary and Performance Bonus

Structure of salary and performance bonus for employees is based on the grading or position of each employee in addition to their achievements and contributions to the Company.

b. Facilities and Allowances

In addition to basic salary, communication allowance, and transportation allowance, IIF also provides other facilities and allowances, namely:

- Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan);
- Health Security Program (BPJS Kesehatan);
- Religious Holiday Allowance Raya (THR) given annually in accordance with the applicable regulations;
- Reimbursement for outpatient and inpatient treatments for employees and their family; and
- Sports membership allowance.



Teknologi Informasi

Information Technology

IIF senantiasa mengedepankan peran strategis dari teknologi informasi untuk meningkatkan daya saingnya dalam melayani sektor infrastruktur di Indonesia. Teknologi informasi berguna untuk mendukung kegiatan usaha IIF di bidang pembiayaan infrastruktur agar kegiatan operasional Perseroan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian target bisnis yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), IIF telah membuat Rencana Strategi Teknologi Informasi (ITSP) dan rencana kerjanya untuk tahun 2018 – 2021 yang menjadi acuan dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi. Fokus dari ITSP tersebut adalah memiliki platform TI yang *robust*, organisasi TI yang efektif, meningkatkan integrasi sistem-sistem yang ada, serta keamanan TI, dan juga meningkatkan keberadaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh Manajemen dengan menerapkan *cost-efficient* investasi di TI.

ITSP tersebut memberikan arahan pengembangan dan review atas sistem-sistem utama dan sistem-sistem pendukung operasional serta menentukan prioritas dalam pengembangan/perubahan dan implementasi dari sistem-sistem tersebut. Selain itu, ITSP juga memberikan acuan biaya terhadap pengembangan/perubahan maupun pengadaan perangkat keras, dan mengatur juga mengenai

IIF always puts forward the strategic role of information technology to improve its competitiveness in the infrastructure sector in Indonesia. Information technology is useful to support IIF's business activities in the infrastructure financing field so that the Company's operational activities can be carried out effectively and efficiently.

To achieve business targets as set out in the Company's Long Term Plan (RJPP), IIF has developed an Information Technology Strategy Plan (ITSP) and its work plan for 2018-2021 which serve as a reference for the development and implementation of technology solutions. The focus of the ITSP is to have a robust IT platform, effective IT organization, improved integration of the existing system, and IT security. The ITSP will also increase accuracy and accountability of information to facilitate the Company in making decisions through the implementation of cost-efficient investments in IT division.

The ITSP provides direction for the development and review of both key systems and operational support systems and determines priorities in the development/change and implementation of these systems. In addition, ITSP also provides a cost reference for the development/change and procurement of hardware and regulates the development of infrastructure and operational



pengembangan infrastruktur dan tata kelola operasional teknologi dan sistem informasi karena untuk memperoleh sistem dengan kinerja dan tingkat keandalan yang baik diperlukan dukungan infrastruktur dan tata kelola yang baik.

Pengelolaan sumber daya teknologi dan sistem informasi Perseroan dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi (TI) dalam Divisi Operasional yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Unit TI berperan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan melalui pengembangan solusi teknologi dan sistem informasi yang inovatif guna memenuhi kebutuhan bisnis, memberikan layanan yang prima kepada seluruh unit Perseroan untuk dapat melakukan proses bisnis secara lebih efisien dan efektif.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proyek TI ke depannya, Perseroan memiliki *Steering Committee* TI yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Risiko untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi Unit TI dan seluruh aset TI yang dimiliki Perseroan.

Sampai dengan 31 Desember 2019, IIF telah memiliki beberapa sistem teknologi informasi, yaitu:

1. *Loan System*, yang dikembangkan untuk meliputi pencatatan *Financing Servicing/Maintenance* yang terintegrasi dengan aplikasi *Financial Accounting and Reporting*. Pada mulanya *Loan System* juga mencakup *Financing Origination* yang pada tahun 2019 dipindah ke dalam sistem K2 yang akan menjadi dasar sistem untuk *Front Liner (Investment team)*.

Loan System ini digunakan untuk dapat melakukan pencatatan semua nasabah dan perhitungan produk-produk pembiayaan serta jadwal pembayaran dengan tepat untuk mendukung perkembangan bisnis dan dapat dilakukan penerapan manajemen risiko yang tepat. *Loan System* ini juga melakukan pengawasan terhadap keterlambatan pembayaran, serta melakukan perhitungan denda atas keterlambatan tersebut.

2. *Treasury & ALM System*, yang dikembangkan untuk meliputi penempatan dana di pihak ketiga, *funding / borrowing* dan produk treasuri yang lain seperti Obligasi, reksadana dan *Hedging* yang juga terintegrasi dengan aplikasi *Financial Accounting and Reporting*. Sistem ini melakukan pencatatan pokok dan perhitungan bunga setiap harinya, yang

management of technology and information systems. The existence of ITSP is then important because reliable system performance shall be supported with good infrastructure and IT governance.

The Company's technology and information system resources are managed by the Information Technology Unit (IT) in the Operations Division which reports to the Chief Financial Officer. The IT unit supports the Company's business growth by developing innovative technology solutions and information systems to meet business needs and providing excellent service to all units of the Company to enable more efficient and effective implementation of business processes.

As part of the implementation of good corporate governance in carrying out IT projects going forward, the Company has established an IT Steering Committee consisting of the President Director, Chief Financial Officer, and Chief Risk Officer to oversee the organizational performance of IT Unit and all IT assets of the Company.

As of December 31, 2019, IIF had several information technology systems, namely:

1. *Loan System* which was developed to include *Financing Servicing/Maintenance* recording that is integrated with the *Financial Accounting and Reporting* application. In the beginning, the *Loan System* also included *Financing Origination* which in 2019 was moved into the K2 system which would be the basis of the system for the *Front Liner (Investment team)*.

This *Loan System* is used to record all customers and calculate financing products and payment schedules appropriately to support business development and to implement appropriate risk management. This *Loan System* also supervises late payments, and calculates fines for these delays.

2. *Treasury & ALM System* which was developed to include placement of funds in third parties, *funding/ borrowing* and other treasury products such as bonds, mutual funds, and *hedging* which are also integrated with *Financial Accounting and Reporting* application. This system records the principal and the calculation of interest on every day basis, which will be reconciled



akan direkonsiliasi dengan arus kas di dalam akun bank Perseroan pada setiap akhir bulan. Selain itu sistem dapat menampilkan analisa *future value* dari portofolio yang tercatat sesuai dengan *market value* yang berlaku.

Sistem ini juga akan dilengkapi dengan fungsi pemantauan terhadap risiko pasar serta manajemen Aset dan Liabilitas (ALM) Perseroan; diantaranya seperti pemantauan terhadap *limit & control structure* atas investasi treasuri serta rasio-rasio keuangan terkait Perseroan, pengembangan *Value at Risk* (VaR), serta fungsi analisa *gap* antara aset dan liabilitas Perseroan.

3. *BR System*, yang dikembangkan oleh Unit TI sendiri. Sistem ini merupakan *workflow system*, dimana proses persetujuan untuk transaksi *procurement, purchasing, reimbursement, expenses* dan *advances* dapat dilakukan secara *on-line* di dalam sistem termasuk juga persetujuan dan pencatatannya.

Sepanjang tahun 2019, Unit TI melakukan perbaikan terhadap *BR system (BR3 version)* yang mencakup:

- Perubahan *workflow* sesuai dengan SOP Procurement paling akhir.
- Peningkatan performa *budget checking*.
- Penambahan fitur-fitur yang mendukung otomatisasi proses-proses kerja *Procurement*.
- Peningkatan antar-muka Aplikasi, yang mempermudah pengguna dalam mengisi data-data yang dibutuhkan oleh *Accounting*.

4. *Financial Accounting and Reporting System*, yang di kembangkan untuk menjadi *back bone system* pada Perseroan dimana sistem tersebut melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi keuangan yang ada di Perseroan.

Sistem ini juga menerima *data transfer* dari sistem treasuri, pinjaman, *budgeting* and BR. Dengan diterapkannya sistem ini proses akhir bulan menjadi lebih cepat dan akurat, serta laporan-laporan yang diperlukan dapat di hasilkan secara otomatis, lebih detail dan cepat.

5. *Document Management System* dikembangkan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan seperti dalam melakukan tata kelola document secara digital dengan baik. Sistem ini dapat mengelompokkan dokumen dengan spesifikasi

with cash flow in the Company's bank account at the end of each month. In addition the system may display future value analysis of the portfolio recorded in accordance with applicable market values.

This system will also be equipped with a function of monitoring market risks and the Company's Assets and Liabilities Management (ALM); among others are monitoring of the limit & control structure of treasury investments and financial ratios related to the Company, development of Value at Risk (VaR), and the gap analysis function between the Company's assets and liabilities.

3. *BR System* which was developed by the IT Unit itself. This system is a workflow system, where the approval process for procurement, purchasing, reimbursement, expenses, and advances transactions can be carried out online in the system including the approval and recording.

Throughout 2019, the IT Unit made improvements to the BR system (BR3 version) which covered:

- Workflow changes according to the latest Procurement SOP.
- Improved budget checking performance.
- Additional features that support the automation of Procurement work processes.
- Improved Application's interface, which makes it easier for users to fill in the data needed by Accounting Division.

4. *Financial Accounting and Reporting System* which was developed to become a backbone system in the Company where the system records all financial transactions in the Company.

This system also accepts data transfers from the treasury, loan, budgeting, and BR systems. With the implementation of this system, the end of the month process becomes faster and more accurate, and the required reports can be generated automatically, in more detail and quickly.

5. *Document Management System* was developed by the Company to support the Company's operational activities, for example, properly managing document through digital platform. This system can group documents with certain specifications, making

tertentu, sehingga memudahkan pencarian atas suatu dokumen. Selain itu, dengan melakukan *e-filing*, Perseroan mengurangi jumlah pemakaian kertas dan *storage* tempat penyimpanan dokumen. Dari sisi risiko, tata kelola dokumen secara digital lebih aman, karena ada back-up atas data dokumen, dan kelengkapan pemberian akses terhadap *user* untuk dokumen tersebut.

6. *Disaster Recovery Centre (DRC) dan IT Disaster Recovery Policy and Standard Operating Procedure (DRP)* dimiliki oleh Perseroan yang dipakai sebagai acuan bagi Tim Pemulihan Bencana dalam melakukan proses pemulihan sistem dengan cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan manajemen risiko yang tepat. Fasilitas DRC IIF mencakup seluruh aplikasi-aplikasi utama, yaitu *Financial Accounting and Reporting System, Loan System, dan Treasury System*.

IIF secara rutin melaksanakan pengujian fasilitas *Disaster Recovery Center (Drill)* minimal 1 (satu) kali setahun dengan melibatkan seluruh divisi-divisi terkait, seperti Divisi Operational Risk, Divisi IT, Divisi Loan Operation, Divisi Accounting and Finance, Divisi Treasury, dan Divisi Corporate Planning.

7. Sepanjang kuartal III di 2019, *HR Related systems (HR Database, Leave and Attendance System)* dikembangkan secara internal oleh Unit TI untuk dapat membantu SDM dalam melakukan fungsi operasionalnya. *HR Database* merupakan sumber utama data karyawan yang meliputi data pribadi karyawan termasuk di dalamnya data diri dan keluarga, pendidikan, CV, struktur atau fungsi dalam organisasi, dan lainnya. *HR Database* ini akan digunakan oleh sistem lain untuk posisi/fungsi karyawan dalam organisasi. *Leave System* dikembangkan untuk mencatat cuti dari karyawan, yang akan dikembangkan lebih jauh di tahun 2020 untuk dapat mencakup semua jenis cuti dan ijin. *Attendance System* dikembangkan untuk dapat menghasilkan *report* untuk memonitor daftar hadir karyawan, termasuk jam mulai masuk dan pulang, juga ijin paruh hari.

8. *Dropbox* dikembangkan oleh internal Unit TI pada kuartal 2 di 2019 sebagai tempat untuk penerimaan proposal dari Vendor yang mengikuti proses Tender di Perseroan. Dengan *dropbox* kontrol didalam menerima proposal pada waktu yang ditentukan, serta membuka diwaktu yang telah ditentukan dapat terjaga

it easier to search for a document. Moreover, by conducting *e-filing*, the Company reduced the amount of paper usage and document storage. In terms of risk, digital document management is safer since there is a back-up of document data, and the completeness of granting access to the user for the document.

6. Disaster Recovery Center (DRC) and IT Disaster Recovery Policy and Standard Operating Procedure (DRP) which are used as a reference for the Disaster Recovery Team in performing the system recovery process quickly in accordance with the business needs of the Company and appropriate risk management. The IIF DRC facility covers all major applications, namely the Financial Accounting and Reporting System, the Loan System, and the Treasury System.

IIF regularly conducts Disaster Recovery Center (Drill) facilities testing at least once in a year involving all relevant divisions, such as Operational Risk Division, IT Division, Loan Operation Division, Accounting and Finance Division, Treasury Division, and Corporate Division Planning.

7. Throughout the third quarter of 2019, HR Related systems (HR Database, Leave and Attendance System) were developed internally by the IT Unit to be able to assist HR Division in carrying out its operational functions. HR Database is the main source of employee data which covers employee personal data, including personal and family data, education, CV, structure or function in the organization, and others. This HR database will be used by other systems for employee positions/functions in the organization. The Leave System was developed to record employees' leave which will be further developed in 2020 to cover all types of leave and permits. The Attendance System was developed to be able to produce reports to monitor employee attendance lists, including hours of entry and return, as well as part-time permits.

8. Dropbox was developed by an internal IT Unit in the 2nd quarter of 2019 as a platform to receive proposals from Vendors who took part in the Tender Process at the Company. As the receipt and opening of proposal document at a predetermined time can be made under dropbox control, all the incoming



dan termonitor melalui jejak sistem. Di tahun 2020, *Dropbox* akan dikembangkan untuk dapat mencakup lebih banyak data Vendor, yang pada akhirnya dipakai untuk mendukung pelaporan yang di perlukan Manajemen Perseroan dalam melakukan monitoring atas proses *Procurement*.

9. *S&E Questionnaire* adalah *webbased* survey yang di kembangkan oleh internal Unit TI untuk mendukung Tim S&E dalam mengumpulkan data survey dari nasabah Financing terkait dengan Social and Environmental aspek. Dari sistem ini, pelaporan tahunan akan dapat dihasilkan secara otomatis untuk kepentingan Tim S&E maupun Manajemen Perseroan.

10. K2 Investment adalah *Financing Origination* sistem untuk mendukung *work flow* yang dimulai dari proses pencatatan pertemuan awal dengan calon nasabah, permohonan calon nasabah dengan menerapkan konsep *Know Your Customer* (KYC) yang antara lain mencakup *name clearance*, identifikasi prospek nasabah dengan menganalisa sejarah perilaku negatif dari nasabah tersebut seperti praktek-praktek melanggar yang dapat dikenakan sanksi, kriminal, pencucian uang dan lain sebagainya, serta permohonan pembiayaan lengkap dengan strukturnya dan rencana pengembalian pinjaman. *Workflow* dari sistem ini juga mencakup verifikasi informasi yang dilakukan oleh *Risk unit*.

Sistem ini merupakan pengganti atas modul *Origination* yang ada di *Loan System*. Pengembangan ini mulai dilakukan pada pertengahan 2019, dengan tujuan untuk menstabilkan *Loan System*, serta menciptakan *workflow platform* yaitu K2 untuk pengembangan sistem *Front Line* kedepannya.

11. *K2 Covenant and Conditions* adalah sistem untuk mengotomasi monitoring dan reporting dari *Conditions* dan *Covenant* dari suatu nasabah *Financing*. Sistem ini dikembangkan oleh internal Unit TI pada kuartal 4 di tahun 2019. Dengan adanya sistem ini, makan proses monitoring lebih akurat, dan waktu pembuatan report juga jadi lebih cepat. Sistem ini juga termasuk sebagai asal mula pembentukan *Datawarehouse* untuk Perseroan. Pengembangan lebih lanjut akan dilakukan di tahun 2020.

12. *K2 Disbursement* adalah sistem yang dikembangkan untuk mendigitalkan proses pencairan yang dilakukan oleh tim Operasi. Dengan sistem ini, semua proses

proposals can be maintained and monitored by the system track. In 2020, *Dropbox* will be developed to be able to cover much more Vendor data, which will ultimately be used to support reporting activity that the Company's Management needs to do in monitoring the *Procurement* process.

9. *S&E Questionnaire* is a web-based survey developed by the IT Unit to support the S&E Team in collecting survey data from Financing customers related to Social and Environmental aspects. From this system, annual reporting will be generated automatically for the interest of the S&E Team and the Company's Management.

10. K2 Investment is a Financing Origination system to support work flow; starting from recording of initial meetings with prospective customers; proposal from prospective customers by applying the Know Your Customer (KYC) concept, which includes name clearance, identification of customer prospects by analyzing the history of negative behavior from such customers, i.e. violation practices that are subject to sanctions, committed crimes, money laundering, and so forth; as well as application for financing, complete with its structure and loan repayment plan. The workflow of this system also includes information verification carried out by the Risk unit.

This system is a replacement for the Origination module in the Loan System. This development began in mid-2019, with the aim of stabilizing the Loan System, as well as creating a workflow platform, K2, for the development of the Front Line system going forward.

11. *K2 Covenant and Conditions* is a system for automating the monitoring and reporting of Conditions and Covenants of a Financing customer. This system was developed by the IT Unit in the 4th quarter of 2019. This system allows more accurate monitoring processes and faster report preparation. *K2 Covenant and Conditions* is also included as the origin of the formation of *Datawarehouse* for the Company. Further development will be carried out in 2020.

12. *K2 Disbursement* is a system developed to digitize the disbursement process carried out by the Operations team. With this system, all loan disbursement processes

pencairan pinjaman dari nasabah *Financing*, verifikasi dokumen dan persetujuannya akan tercatat secara otomatis. Sistem ini dikembangkan internal oleh Unit TI bersamaan dengan K2 *Covenant* dan *Conditions* pada kuartal 4 di tahun 2019. Seperti halnya sistem K2 *Covenant* dan *Conditions*, sistem ini juga termasuk sebagai asal mula pembentukan *Datawarehouse* untuk Perseroan. Pengembangan lebih lanjut akan dilakukan di tahun 2020.

Selain sistem tersebut diatas, IIF juga melakukan Perubahan pada *Financial Accounting and Reporting System*, *Loan System* dan *Treasury System* untuk dapat mengakomodasi regulasi baru terkait dengan PSAK 71, serta penyesuaian atas *staging* (sistem jembatan) dari *Loan System* dan *Treasury System* ke *Financial Accounting System*.

Keberadaan sistem tersebut diatas ditujukan untuk meningkatkan keakuratan proses, keamanan dalam kerahasiaan data dan kecepatan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, serta kehandalan dalam mendukung sistem pelaporan keuangan. Sistem-sistem ini juga ditujukan agar Perseroan dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan untuk mencapai keunggulan operasional di seluruh jajaran organisasi.

Pada tahun 2019, Unit TI juga melakukan *review* atas Sistem Portfolio TI secara keseluruhan, untuk melihat apakah sistem yang ada sudah digunakan secara optimal, dan apakah pengembangan lebih lanjut diperlukan ataupun di non-aktifkan. Hasil atas *review* tersebut ada 2 sistem yang diputuskan untuk di non-aktifkan yaitu *Budgeting System* dan *Timesheet*, serta penangguhan dari penggunaan *Workflow and Credit Documentation Template* (sistem untuk memfasilitasi karyawan di dalam membuat proposal kredit sampai dengan persetujuan).

IIF juga senantiasa berfokus pada Sistem Keamanan IT untuk melindungi jaringan dan aset Perseroan. Sistem Keamanan yang telah diterapkan adalah sebagai berikut ini:

- *Inventory and Control of Hardware and Software Assets*
- *Controlled Use of Administrative Privileges*
- *Antivirus and Malware Defenses*
- *Limitation and Control of Network Ports, Protocols and Services*
- *Data Protection / Encryption (laptop)*
- *Secure Configuration for Network Devices*

from Financing customers, document verification, and approval will be recorded automatically. This system was developed internally by the IT Unit in conjunction with K2 *Covenant* and *Conditions* in the 4th quarter of 2019. As the K2 *Covenant* and *Conditions* system, this system is also included as the origin of the formation of *Datawarehouse* for the Company. Further development will be carried out in 2020.

In addition to the aforementioned system, IIF also made changes to the *Financial Accounting and Reporting System*, *Loan System*, and *Treasury System* to be able to accommodate new regulations related to PSAK 71, as well as adjustments to the *staging* (bridge system) from the *Loan System* and the *Treasury System* to the *Financial Accounting System*.

The existence of the above system is intended to improve the accuracy of the process, security in the confidentiality of data and the speed of providing information for decision making, as well as reliability in supporting financial reporting systems. These systems are also intended so that the Company can operate with a better level of efficiency. This is in accordance with the Company's strategy to achieve operational excellence in all levels of the organization.

In 2019, the IT Unit also thoroughly reviewed the IT Portfolio System to see whether the existing system has been used optimally, and whether further development is needed or had to be deactivated. Based on the review results, there were 2 systems that had to be deactivated, namely the *Budgeting System* and *Timesheet*. Moreover, the Company also decided to suspend the use of *Workflow and Credit Documentation Templates* (a system to facilitate employees in applying for credit up until the approval process).

IIF also continues to focus on IT Security Systems to protect the Company's network and assets. The Security System that has been implemented is as follows:

- *Inventory and Control of Hardware and Software Assets*
- *Controlled Use of Administrative Privileges*
- *Antivirus and Malware Defenses*
- *Limitation and Control of Network Ports, Protocols and Services*
- *Data Protection/Encryption (laptop)*
- *Secure Configuration for Network Devices*



- Network and Wireless Access Control
- Advance Threat Protection

RENCANA PENGEMBANGAN TI DI MASA DEPAN

Sesuai dengan arahan dari ITSP untuk 3 tahun mendatang, Perseroan akan melakukan:

- Pengembangan aplikasi untuk memastikan transformasi menuju *digitized business process*. Pengembangan ini harus disertai dengan tata kelola yang tepat supaya dapat mencapai *cost-efficient development*.
- Meningkatkan *IT Service Excellence* dengan lebih meningkatkan pemantauan kinerja TI secara tepat dan meningkatkan kemampuan dari organisasi TI.
- Memastikan sistem/aplikasi dari aspek inti (*core*) maupun pendukung (*support*) dapat terintegrasi secara sempurna, dan memastikan keamanan TI yang lebih baik.
- Membangun Sistem Informasi Manajemen yang akurat dan terpercaya untuk dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.
- Meningkatkan Sistem Keamanan dengan mengimplementasikan *Network Monitoring Tool*, *Penetration Test* dan *Security Operation Center*.

Khusus pada tahun 2020 sesuai dengan arahan dari ITSP dan juga dari *IT Steering Committee*, maka fokus perkembangan Unit TI akan meliputi:

- Penambahan dan perbaikan *Policy* untuk TI, termasuk didalamnya *IT Security Policy* dimana IT akan bekerja sama dengan *Risk team* untuk memformulasikan *Policy* yang tepat untuk perusahaan.
- Relokasi *Data Centre* dan *Disaster Recovery Centre* untuk dapat mencapai *Service Level Agreement* yang tepat sebagai *business enabler*.
- Kajian lebih lanjut untuk penerapan *Data warehouse* dan dilanjutkan dengan *Data Analytic and Business Intelligence* dengan tujuan *Data Uniformity*.
- Peningkatan integrasi dari *Core Systems* dan juga sistem/aplikasi lain yang digunakan Perseroan yang diperlukan untuk mendukung *Data Uniformity*.
- Pengembangan sistem/aplikasi secara internal untuk mendukung *business processes*, seperti *monitoring* untuk *S&E team*, serta pengembangan lebih lanjut dari sistem/aplikasi internal yang sudah ada seperti sistem *Leave and Attendance*, *K2 Disbursement*, *Dropbox*, *K2 Investment* (CRM), dll.

- Network and Wireless Access Control
- Advance Threat Protection

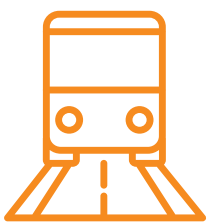
IT DEVELOPMENT PLANS FOR THE FUTURE

Based on ITSP direction for the next 3 years, the Company will conduct the following:

- Develop applications to ensure the transformation towards digitized business process. This task must be accompanied with appropriate governance to achieve cost-efficient development.
- Increase IT Service Excellence through the improvement of appropriate supervision of IT performance and improve the capability of IT organization.
- Ensure the core and supporting system/application can integrate completely and ensure a better IT security.
- Establish an accurate and accountable Management Information System, to assist appropriate and swift decision making.
- Improve the Security System by implementing the Network Monitoring Tool, Penetration Tests and the Security Operation Center.

Specifically, in accordance with the direction of the ITSP and also from the IT Steering Committee, the focus of the development of the IT Unit in 2020 will include:

- Additions and improvements to IT Policy, including IT Security Policy where IT will work closely with the Risk team to formulate the right Policy for the Company.
- Relocation of Data Centre and Disaster Recovery Centre to achieve the right Service Level Agreement as a business enabler.
- Further study for the implementation of Data warehouse and continued with Data Analytic and Business Intelligence with the aim of Data Uniformity.
- Increased integration of Core Systems and also other systems/applications used by the Company that are needed to support Data Uniformity.
- Internal application/system development to support business processes, such as monitoring for the S&E team, and further development of existing internal applications/systems, such as the Leave and Attendance system, K2 Disbursement, Dropbox, K2 Investment (CRM), and so on.



Pada tahun 2019, IIF mencatat laba bersih sebesar Rp15,98 miliar, lebih baik dari tahun 2018 yang mengalami kerugian sebesar Rp42,95 miliar.

In 2019, IIF recorded a net profit of Rp15.98 billion, an improvement from 2018 which suffered a loss of Rp42.95 billion.





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Sepanjang tahun 2019, IIF berhasil memperoleh 12 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3,6 triliun, sehingga total kumulatif komitmen bruto pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp23,8 triliun. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pembiayaan baru di 2019 yaitu jalan tol dan telekomunikasi.

Throughout 2019, IIF acquired 12 new financing deals with total commitments of Rp3.6 trillion, so that the total cumulative gross commitments in 2019 reached Rp23.8 trillion. Sectors with the largest contributions in 2019 new financing deals were toll road and telecommunication.

TINJAUAN MAKROEKONOMI

Tinjauan Makroekonomi Global

Pada tahun 2019, kondisi perekonomian global mengalami perlambatan. Hal ini mengacu pada laporan Bank Dunia yang berjudul *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 diestimasikan hanya mencapai 2,4%, deselerasi pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 3 tahun terakhir.

Ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah berlangsung selama 2 tahun masih menjadi faktor utama yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, karena memberikan dampak negatif pada volume perdagangan dunia. Bank Dunia mencatatkan pertumbuhan volume perdagangan dunia turun signifikan ke level 1,4% di tahun 2019, bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 4,0%. Kontraksi volume perdagangan global di tahun ini menyebabkan pelemahan ekonomi pada 90% negara maju dan 60% negara berkembang.

Dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakstabilan perekonomian global, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengeluarkan normalisasi kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga acuan *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 bps sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mencapai 75 bps. Pelonggaran kebijakan moneter ini juga diterapkan oleh berbagai bank sentral lain, termasuk Bank Indonesia.

MACROECONOMIC OVERVIEW

Global Macroeconomic Overview

Global economy saw a downturn in 2019. According to its report entitled *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*, the World Bank estimated that global economy only managed to grow to the level of 2.4%, the worst deceleration in economic growth in the last 3 years.

Continued tension of trade relations between the US and China since the last 2 years remained the main factor of global economic slowdown due to its negative impact on the growth of international trade volume. The World Bank recorded a significant drop in such growth to 1.4% in 2019 from 4.0% in 2018. Global trade volume contraction contributed to weaker economic condition in 90% of developed countries and 60% of developing countries.

To support economic growth amid global instability, the Central Bank of the United States, The Fed, enforced a monetary normalization policy by reducing its benchmark interest rate (*Federal Funds Rate* – FFR) for three (3) times each 25 bps to 75 bps in total. This kind of monetary easing policy also followed by other central banks, including Bank Indonesia.



Tinjauan Makroekonomi Nasional

Sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,02%, lebih rendah dari angka pertumbuhan di tahun 2018 sebesar 5,17% dan belum mampu mencapai target pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,30%.

Sampai dengan akhir Desember 2019, inflasi di tahun 2019 berada di posisi terendah sejak tahun 1999, sebesar 2,72%. Realisasi inflasi 2019 tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi yang telah ditentukan BI untuk tahun 2019 sebesar $3,5\% \pm 1\%$.

Guna mengendalikan laju inflasi sekaligus mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga acuan BI 7 – Day Reverse Repo Rate sebanyak 4 kali, dengan penurunan sebesar 100 bps hingga berada di level 5,0% di akhir tahun 2019.

Selain itu, ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 juga ditopang dari perbaikan kinerja investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kumulatif realisasi investasi periode Januari-Desember tahun 2019 mencapai Rp809,6 triliun (dari target realisasi investasi Tahun 2019 sebesar Rp792,0 triliun). Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi tersebut didominasi oleh sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang tercatat sebesar Rp139,0 triliun atau 17,2% dari total realisasi investasi.

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang menggiatkan pembangunan proyek infrastruktur secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut difokuskan pada perluasan konektivitas antardaerah dan sumber-sumber ekonomi dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan produktivitas dan keadilan ekonomi.

Agar manfaat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat luas, pemerintah menyusun daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk

National Macroeconomic Overview

As a result of the global economic uncertainty, the national domestic growth in 2019 recorded a decline compared to the previous year. Based on data by the Central Bureau of Statistics (BPS), domestic economic growth in 2019 was at 5.02%, lower than the growth in 2018 at 5.17% and fell short of the 2019 State Budget target at 5.30%.

Until the end of December 2019, Indonesia's inflation rate was at the level of 2.72%, the lowest since 1999, albeit remained within the targeted inflation range set by BI for 2019 at $3.5\% \pm 1\%$.

In order to control the inflation rate and maintain the stability of domestic economic growth amid a global economic slowdown, Bank Indonesia (BI) issued a monetary policy of reducing its benchmark interest rate, the 7-Day Reverse Repo Rate, 4 times with a total reduction of 100 bps, resulting in a rate of 5.0% by the end of 2019.

Moreover, the resilience of domestic economic growth achieved in 2019 was due to support from the improving investment performance. According to the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM), the cumulative investment realization in January-December 2019 reached Rp809.6 trillion (from the target for investment in 2019 at Rp792.0 trillion). Based on the business sector, such investment realization was dominated by Transportation, Warehousing, and Telecommunications sectors, which contribute Rp139.0 trillion or 17.2% of the total realization.

INFRASTRUCTURE FINANCING INDUSTRY OVERVIEW

During the last few years, the government invigorated the development of infrastructure projects massively and evenly in all regions of Indonesia. Such development focused on connectivity expansion between regions and economic centers in order to alleviate social gaps and improve productivity and economic quality.

To deliver the benefits of infrastructure development to the wider public, the government developed a list of strategic projects with high urgency to be realized immediately. The selected infrastructure projects are

dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Hasil seleksi proyek infrastruktur tersebut tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, terdapat 223 proyek infrastruktur yang termasuk dalam PSN, ditambah 3 program, yaitu program kelistrikan, program industri aviasi, dan program pemerataan ekonomi.

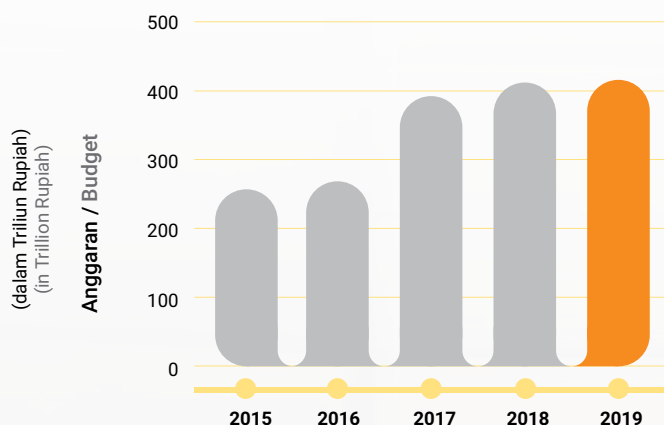
Progresivitas pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur terlihat dari besaran anggaran infrastruktur yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, jumlah anggaran infrastruktur menempati peringkat kedua setelah anggaran untuk pendidikan. Pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp415,0 triliun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

included in the National Strategic Projects (PSN). Pursuant to Presidential Regulation No. 56 of 2018 regarding Amendment to Presidential Regulation No. 58 of 2017, the PSN comprises 223 infrastructure projects and 3 additional programs, namely electricity, aviation, and economic equality programs.

Progressiveness of the government in accelerating infrastructure development is evident in the increasing amount of infrastructure budget over the last five years. In the 2019 State Budget, infrastructure constituted the second largest budget after education. The government provided a budget of Rp415.0 trillion in 2019 to support the execution of infrastructure development.

Grafik Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur dalam Lima Tahun Terakhir

Chart of Infrastructure Budget Growth in the Last Five Years



Sumber : Kementerian Keuangan / Source: Ministry of Finance

Dalam rangka mengurangi tekanan APBN sekaligus mengurangi *gap* pembiayaan infrastruktur, pemerintah melakukan eksplorasi skema-skema pendanaan alternatif. Terdapat tiga skema yang dikembangkan, yaitu:

1. **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**
Merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur dari hasil kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (swasta). Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terdapat 10 sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dikerjakan pada tahun 2019, antara lain 4 proyek Kementerian Perhubungan, 4 proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 2 proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

In order to reduce pressure to the State Budget and to reduce gap in the infrastructure financing, the government explored alternative financing schemes. Three schemes are being developed:

1. **Public Private Partnership (PPP)**
An infrastructure provision and financing scheme through cooperation between the Government and Private Enterprises. As stated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, 10 infrastructure projects under this PPP scheme were carried out in 2019, namely 4 projects of the Ministry of Transportation, 4 projects of the Ministry of Public Works and Public Housing, and 2 projects of the Ministry of Environment and Forestry.



2. Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)

Merupakan skema pembiayaan infrastruktur dari non-APBN yang berfokus pada proyek-proyek *visible* dan *bankable* yang memiliki *Internal Rate of Return* (IRR) di atas 13%. Selama dua tahun terakhir, PINA Center telah mencatat pembiayaan investasi sekitar Rp122 triliun atau US\$8,7 miliar. Jumlah pembiayaan tersebut didistribusikan untuk menangani sekitar 15 proyek di bidang infrastruktur dan industri.

3. *Blended Finance*

Merupakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun dari masyarakat untuk memobilisasi modal swasta.

2. Non-Government Budget Equity Financing (PINA)

A non-State Budget infrastructure financing scheme which focuses on visible and bankable projects with Internal Rate of Return (IRR) above 13%. During the last two years, PINA Center recorded investment financing amounting to Rp122 trillion or US\$8.7 billion, distributed to manage 15 projects in the field of infrastructure and industry.

3. Blended Finance

A financing scheme supported by philanthropic funds collected from the public in order to mobilize private capital.

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR

ACHIEVEMENT AND TARGET OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE LAST THREE YEARS

Sektor Infrastruktur / Infrastructure Sector	2017	2018	2019
Jalan (km) / Road (km)	2.754,2	2.271,3	1.834,7
Jembatan (m) / Bridge (m)	19.875	52.449	37.177
Jalan Tol melalui LMAN (proyek) / LMAN Toll Road (project)	43	12	16
Jalan Tol Trans Sumatera melalui PT Hutama Karya (Persero) (km) / Trans-Sumatra Toll Road through PT Hutama Karya (Persero) (km)	199	405	229
Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR): / Housing for Low-Income Communities:			
KPR Sejahtera/FLLP (ribu unit) / Welfare Housing Loan/FLLP (thousands of unit)	23,7	50,0	68,9
Rusun (unit) / Low-Cost Apartment (unit)	13.251	13.405	6.873
Bendungan (unit) / Dam (unit)	36	48	48
Pembangunan Jalur Kereta Api (tahap awal dan penyelesaian) (km'sp) / Railroad Construction (initial and completion stages) (km'sp)	269,98	615,05	394,8
Penyelesaian Bandara Baru (lokasi) / Completion of New Airport (location)	3	4	4
Jaringan Irigasi (pembangunan dan rehab) (ribu ha) / Irrigation Network (construction and rehabilitation) (thousands of ha)	329,4	194,7	170,4

Sumber : APBN 2019 / Source: 2019 State Budget

STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Perusahaan dalam mengembangkan usahanya bertumpu kepada berbagai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan.

Keunggulan kompetitif tersebut meliputi:

- Fleksibilitas dan kemampuan inovasi dalam menyediakan struktur-struktur pembiayaan yang khusus yang tidak dapat dilaksanakan oleh *Conventional Banking System* termasuk diantaranya memberikan pembiayaan jangka panjang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing lainnya;

COMPANY STRATEGY

The Company's strategy in developing its business is supported by its various competitive advantages.

These competitive advantages include:

- Flexibility and innovation capability in providing specific financing structures that cannot be given by the Conventional Banking System, including providing long-term financing both in Rupiah and other foreign currencies;

Hal ini dilaksanakan dengan berbagai macam pembiayaan seperti pembiayaan yang bersifat *junior*, seperti pinjaman subordinasi, *mezzanine* maupun melakukan penyertaan modal, dalam batas-batas yang diizinkan oleh panduan operasional Perseroan, dengan maksud untuk memberikan margin yang lebih tinggi secara terukur;

- Kemampuan Perseroan untuk berkerja sama dengan berbagai institusi keuangan lainnya untuk secara bersama-sama melaksanakan *Project Financing* seutuhnya. Hal ini dilaksanakan dengan membangun kerjasama dengan lembaga keuangan domestik maupun internasional, untuk mengambil bagian pembiayaan dalam sindikasi atau *club deal*. Hal ini merupakan pelaksanaan dari salah satu misi Perseroan yaitu bertindak selaku *catalyst* untuk pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur;
- Hubungan yang kuat dengan pemerintah sehingga Perseroan selalu terdepan terkait berbagai peraturan industri infrastruktur;
- Adanya unit *advisory* yang mampu mendukung berbagai proyek- proyek swasta maupun pemerintah;
- Pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dengan standar internasional.

Pada tahun 2019, strategi Perseroan adalah fokus pada peningkatan margin melalui maksimalisasi diferensiasi jenis produk, baik dari *senior loan*, *mezzanine loan* hingga *junior loan* yang seiring dengan peran IIF sebagai *catalyst* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya, penerapan strategi kedua adalah melakukan optimalisasi dan pengelolaan komponen biaya-biaya yang salah satunya memperdalam penetrasi di industri pasar modal melalui penerbitan berbagai macam surat hutang untuk mendiversifikasikan struktur *funding* Perseroan.

Strategi bisnis ini akan selalu diiringi oleh penguatan sumber daya manusia dan peningkatan secara berkelanjutan kemampuan Perseroan dalam memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan instrumen-instrumen pembiayaan yang dimiliki. Peningkatan efisiensi dari sisi operasi juga dilaksanakan secara berkelanjutan termasuk didalamnya optimalisasi peran IT selaku *backbone* operasional.

Dengan menerapkan strategi ini, IIF menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan sebagai katalis dan *enabler* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di

This is carried out through various types of financing facilities, such as junior financing, including subordinated and mezzanine loans or capital investment, within the limits permitted by the Company's operational guidelines, with an aim to provide measurable higher margins;

- The Company's ability to collaborate with various other financial institutions to jointly carry out Project Financing. This is conducted by building partnerships with domestic and international financial institutions to enable to take part in financing in syndication or club deal. This is also a manifestation of one of the Company's missions, namely to served as a catalyst for financing infrastructure development;
- Strong relationship with the government, therefore, the Company is always at the forefront of various infrastructure industry regulations;
- The presence of an advisory unit that can support various private and government projects;
- Management of social and environmental impacts which adopts international standards.

In 2019, the Company's strategy was to focus on increasing margins by maximizing product type differentiation, covering senior loans, mezzanine loans, and junior loans, in line with IIF's role as a catalyst in financing infrastructure development in Indonesia. The second strategy implemented was to optimize and manage the cost components; one of which was to encourage penetration in the capital market industry through the issuance of various types of debt securities to diversify the Company's funding structure.

These business strategies will be consistently accompanied with the efforts to strengthen human resources and enhance Company's ability to mitigate various potential risks in relation to its financing instruments. Improvement of efficiency in operations is also carried out on an ongoing basis, including optimizing the role of IT as the operational backbone.

By implementing these strategies, IIF realizes its commitment to achieve its vision and mission as a catalyst and enabler for financing the infrastructure development in Indonesia in a sustainable manner. At the same time,



Indonesia. Disaat yang sama, strategi ini juga mampu mengembalikan laju pertumbuhan yang positif untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

DIREKTORAT INVESTASI

Mengacu pada peran IIF sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, Perseroan telah membentuk Direktorat Investasi yang secara khusus bertugas untuk melakukan pengembangan bisnis dengan cara mendapatkan kesepakatan pembiayaan maupun investasi dari penambahan jumlah klien, volume komitmen pembiayaan hingga pemantauan jalannya proses bisnis.

Saat ini, struktur organisasi Direktorat Investasi terdiri dari 3 (tiga) departemen yang dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Departemen Pengembangan Bisnis

Departemen Pengembangan Bisnis memiliki peran untuk mendapatkan kesepakatan pembiayaan dan investasi mulai dari perolehan klien sampai kesepakatan finansial serta memantau jalannya proyek-proyek hingga mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD).

2. Departemen Pengawasan Proyek

Departemen Pengawasan Proyek memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh IIF memenuhi persyaratan yang telah disepakati, termasuk juga memantau tahap pelaksanaan dari proyek pasca COD.

3. Departemen Transaksi Hukum

Departemen Transaksi Hukum berperan dalam memberikan dukungan dalam hal legalitas dan hukum terhadap proyek-proyek yang didanai oleh IIF yang diawasi baik oleh Departemen Pengembangan Bisnis maupun Departemen Pengawasan Proyek.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, hingga akhir tahun 2019 Direktorat Investasi didukung oleh 31 tenaga profesional dengan latar belakang profesi yang relevan dan terqualifikasi menangani bidang-bidang perbankan, korporasi, investasi ekuitas, legal, dan konsultan.

Target Tahun 2019

Terkait kegiatan investasi dan sindikasi, Perseroan telah menetapkan target pencapaian selama tahun 2019. Strategi untuk mencapai target tersebut mencakup:

1. Meningkatkan margin;
2. Fokus pada aset yang memberikan yield tinggi;
3. Ekspansi pada sektor infrastruktur sosial;

these strategies is also able to restore positive growth rate to achieve sustainable business growth.

INVESTMENT DIRECTORATE

In accordance with IIF's role as an infrastructure financing catalyst in Indonesia, the Company established the Investment Directorate specifically tasked to conduct business development by obtaining financing deals or investment by increasing number of clients, volume of financing commitments, as well as monitoring of business process.

Currently, the organization structure of the Investment Directorate consists of 3 (three) departments classified by function:

1. Business Development Department

The Business Development Department's role is to obtain financing deals and investment, from client acquisition to financial agreements, as well as to monitor the progress of projects up to the Commercial Operation Date (COD).

2. Project Monitoring Department

The Project Monitoring Department's duties and responsibilities are to ensure that projects financed by IIF comply with the agreed requirements, including monitoring the implementation stage of projects after the COD.

3. Transaction Legal Department

The Legal Transaction Department's role is to provide legal support in projects financed by IIF and supervised by the Business Development Department and Project Monitoring Department.

In performing its responsibilities, as of the end of 2019 the Directorate of Investment is supported by 31 professional staffs with relevant background and qualifications in handling banking, corporate, equity investment, legal, and consulting sectors.

2019 Targets

In terms of investment and syndication, the Company set targets to be achieved throughout 2019. Strategies to deliver these targets include:

1. Improving margin;
2. Focusing on high yielding assets;
3. Expanding to social infrastructure sector;

4. Menjaga kualitas portofolio aset;
5. Mendukung produk investasi/pinjaman yang inovatif;
6. Memperkaya pengalaman dan keahlian sumber daya manusia; dan
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses.

Pencapaian Kinerja di Tahun 2019

Berdasarkan dari target yang ditetapkan, sepanjang tahun 2019, IIF berhasil memperoleh 12 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3,6 triliun, sehingga total kumulatif komitmen bruto pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp23,8 triliun. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembiayaan baru di 2019 yaitu jalan tol dan telekomunikasi.

Dari Rp3,6 triliun komitmen baru yang dibukukan, 53% atau Rp1,9 triliun merupakan komitmen baru pada sektor jalan, 22% atau Rp800 miliar pada sektor telekomunikasi dan 13% atau Rp490 miliar merupakan sektor ketenagalistrikan. Dari komitmen baru tersebut, tiga komitmen merupakan pencapaian penting Perseroan, yakni:

- *Cash Deficiency Support (CDS)*, adalah jenis fasilitas pembiayaan baru yang tidak disediakan oleh bank tradisional. Pada tanggal 23 Oktober 2019, IIF dan PT Pemalang - Batang Tol Road (PBTR) menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas CDS dengan jangka waktu hingga 16 tahun. Fasilitas untuk PBTR disediakan untuk mendukung kekurangan uang tunai yang biasanya dialami jalan tol yang baru beroperasi saat menunggu lalu lintas meningkat. PBTR mulai mengoperasikan jalan tol secara komersial pada Desember 2018 dengan panjang 39,2 km, melintasi tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Pemalang, Pekalongan dan Batang. Sebagai bagian dari proyek jalan tol nasional yang strategis, Jalan Tol Trans Jawa, proyek PBTR diharapkan dapat meringankan beban lalu lintas Pantura, mempercepat rantai pasokan logistik dan mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di Jawa Tengah.

Fasilitas CDS untuk PBTR menegaskan komitmen IIF untuk menjadi *enabler* pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi IIF karena dapat menawarkan solusi inovatif yang umumnya tidak disediakan oleh bank konvensional, dan telah sesuai dengan mandat Perseroan sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia. IIF senang dapat bekerja sama dengan

4. Maintaining assets quality portfolio;
5. Supporting innovative investment/loan products;
6. Enriching the experience and skills of human resources; and
7. Improving process effectiveness and efficiency.

Performance Achievement in 2019

Based on the targets set forth above, throughout 2019, IIF acquired 12 new financing deals with total commitments of Rp3.6 trillion, so that the total cumulative gross commitments in 2019 reached Rp23.8 trillion. Sectors with the largest contributions the new financing deals in 2019 were toll road and telecommunication.

Out of the Rp3.6 trillion of new commitments, 53% or Rp1.9 trillion accounted for new commitment in road sector, 22% or Rp800 billion accounted for new commitment in telecommunication sector, and 13% or Rp490 billion accounted for new commitment in electricity sector. Among the new commitment projects, three projects were notable, namely:

- *Cash Deficiency Support (CDS)*, is a new type of financing facility not commonly provided by traditional banks. On October 23, 2019, IIF and PT Pemalang - Batang Tol Road (PBTR) signed a CDS facility loan agreement with final maturity of up to 16 years. The facility to PBTR was provided as a support for cash deficiency commonly experienced in newly operating toll roads as it waits for traffic to ramp up. PBTR started its toll road operation commercially in December 2018 with total length of 39.2 km crossing three regencies in Central Java, namely Pemalang, Pekalongan, and Batang. As part of strategic national toll road project, the Trans Java Toll Road, PBTR project is expected to ease the traffic burden of Pantura, expedite the logistics supply chain, and support the development of tourism especially in Central Java.

The CDS Facility to PBTR affirmed IIF's commitment to be the enabler of infrastructure financing in Indonesia. The deal marked an important milestone for the Company as it was able to offer an innovative solution not commonly provided by conventional banks, in line with the Company's mandate as the catalyst of infrastructure financing in Indonesia. IIF was pleased to work together with PBTR which showed



PBTR yang telah menunjukkan komitmen penuh untuk patuh terhadap S&E. Dukungan IIF untuk PBTR sejalan dengan inisiatif Pendanaan Berkelanjutan Pemerintah Indonesia baru-baru ini dan IIF bekerja sama dengan PBTR untuk menetapkan *blueprint* proyek pembangunan jalan tol berkelanjutan di Indonesia.

- Komitmen baru di sektor kelistrikan mencakup dua proyek mini hidro dan satu proyek biomassa baru. Pada tanggal 27 November 2019, IIF dan Primanusa Energi Lestari (PEL) menandatangani perjanjian pembiayaan untuk Fasilitas Pinjaman Senior untuk proyek pembangkit listrik biomassa pertama di Indonesia menggunakan Tandan Buah Kosong dari kelapa sawit. Melalui fasilitas pembiayaan tersebut, IIF menjadi katalis dalam infrastruktur dengan mengubah limbah berbahaya kelapa sawit untuk menghasilkan 9,8 MW listrik, menciptakan lapangan kerja dan menghemat emisi. Proyek ini akan menyediakan tenaga listrik untuk 4.454 rumah menengah atau 10.888 rumah di Provinsi Aceh dan menghemat 31.322 ton emisi CO₂ per tahun (setara dengan emisi 17.401 mobil menempuh jarak 20.000 km).

Sedangkan berdasarkan tipe proyek, pada tahun 2019, portofolio *greenfield* berkontribusi sebesar 27,0%, sedangkan *operating assets* sebesar 26,0% dari seluruh komitmen portofolio. Selanjutnya, 20,8% berasal dari *balance sheet projects* dan 26,2% merupakan *balance sheet-non project*.

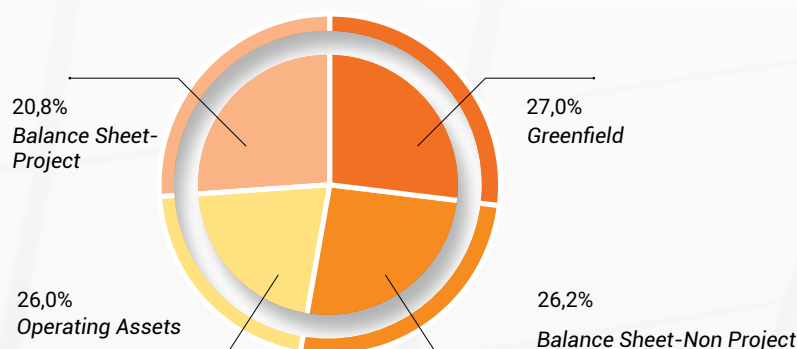
full commitment to S&E compliance. IIF's support to PBTR was in line with the recent Sustainable Financing initiative of the Indonesian Government and IIF worked closely with PBTR to set a blueprint of sustainable toll road development projects in Indonesia.

- New commitments made in electricity sector in 2019 included two mini hydro projects and one new biomass project. On November 27, 2019, IIF and Primanusa Energi Lestari (PEL) signed a financing agreement for Senior Loan Facility for Indonesia's first biomass power plant project using Empty Fruit Bunches of palm oil. Through this financing facility, IIF became a catalyst in infrastructure by turning hazardous waste of palm oil to generate 9.8 MW of electricity, creating jobs and savings emissions. The project will provide electricity to 4,454 medium houses or 10,888 houses in Aceh Province and save 31,322 ton per year of CO₂ emission (equivalent to emission of 17,401 cars commuting 20,000 km).

Based on project type, in 2019, greenfield project portfolio contributed 27.0% while operating assets contributed 26.0% of total project portfolio commitments. Furthermore, 20.8% came from balance-sheet projects and 26.2% from balance sheet-non project.

Komitmen Portofolio Berdasarkan Jenis Proyek Tahun 2019

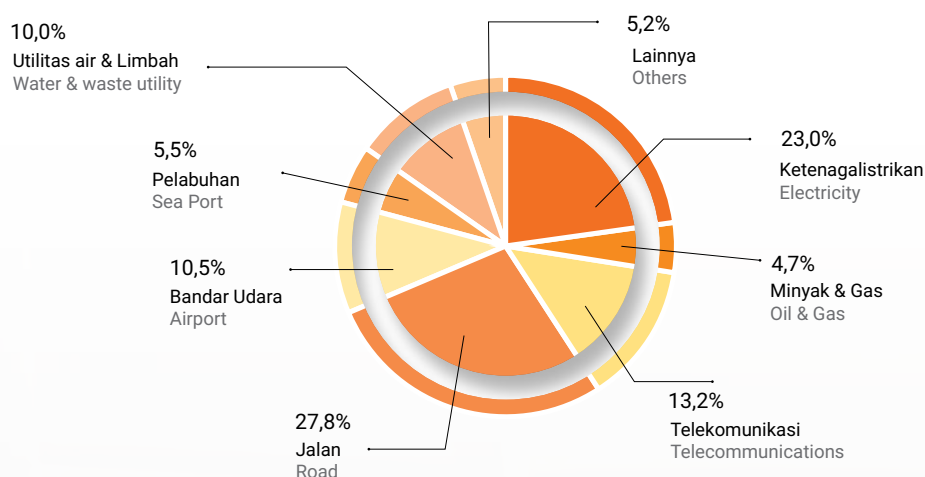
Portfolio Commitment by Project Type in 2019



Sementara itu, berdasarkan sektor, portofolio pembiayaan terhadap proyek infrastruktur didominasi oleh sektor jalan sebesar 27,8%, kemudian diikuti oleh ketenagalistrikan sebesar 23,0%, telekomunikasi sebesar 13,2%, bandar udara sebesar 10,5%, utilitas air dan limbah sebesar 10,0%, pelabuhan sebesar 5,5%, minyak & gas sebesar 4,7% dan sektor lainnya sebesar 5,2%.

On the other hand, financing portfolio for infrastructure projects was dominated by road sector at 27.8%; followed by electricity at 23.0%; telecommunication at 13.2%; airport at 10.5%; water and waste utilities at 10.0%; sea port at 5.5%; oil & gas at 4.7%; and other sectors at 5.2%.

Komitmen Portofolio Berdasarkan Jenis Proyek Tahun 2019
Portfolio Commitments by Project Type in 2019



Untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan sumber daya manusia, serta mengembangkan kapabilitas anggota tim, Perseroan melaksanakan berbagai aktivitas pelatihan dan sesi *sharing knowledge* dengan subjek sebagai berikut:

- Infrastruktur Pipa Gas;
- Industri Jalan Tol
- *Minihydro*;
- Pembiayaan untuk Air Minum;
- UPTL 2019;
- Mekanisme Kredit Bersama;
- Analisis Laporan Keuangan;
- Pengenalan terhadap Industri Kesehatan;
- Perjanjian Pemberian Kredit APLMA;
- Jaminan dan Subordinasi oleh Ginting Reksodiputro (Allen & Overly);
- Singapore's International Arbitration Framework by SIAC.

Enriching the experience and skills of human resources, throughout 2019, the trainings or sharing knowledge sessions with following subjects have been conducted to develop team members capabilities:

- Gas Pipeline Infrastructure;
- Toll Road Industry;
- *Minihydro*;
- Financing for Drinking Water ;
- RUPTL 2019;
- Joint Credit Mechanism;
- Financial Statement Analysis;
- Introduction to Healthcare Industry;
- APLMA Loan Agreements;
- Security and subordination by Ginting Reksodiputro (Allen & Overly);
- Singapore's International Arbitration Framework by SIAC.

Rencana ke Depan

IIF akan melanjutkan target untuk mendukung pembangunan di sektor infrastruktur yang telah dimandatkan dan sektor infrastruktur baru, tepatnya infrastruktur sosial seperti rumah sakit, pendidikan serta

Future Plans

IIF will continuously target to provide financing in mandated infrastructure sectors and new infrastructure sectors, which already started in 2019, specifically in social infrastructure such as hospitals, education, and



infrastruktur agribisnis. Melalui pemberian pembiayaan kepada sektor-sektor infrastruktur tersebut, IIF optimis mampu memposisikan diri sebagai katalisator dan *enabler* dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Nasional.

ADVISORY

Grup Advisory dibentuk sebagai divisi usaha yang bertugas untuk menyediakan asistensi dan konsultasi kepada klien-klien Perseroan, baik dari sektor Pemerintah maupun swasta.

Saat ini, jasa konsultasi dan pendampingan yang ditawarkan Grup Advisory, meliputi:

1. *Transaction Advisory*
2. *Financial Advisory*
3. *Economic Assessment and Project Preparation*
4. *Corporate Finance*

Target Tahun 2019

Terkait kegiatan Grup Advisory, Perseroan telah menetapkan target program sebagai berikut:

1. Mengembangkan layanan *advisory* lebih ke hulu proses penyiapan proyek dan penyusunan kebijakan proyek infrastruktur;
2. Memperbaiki stabilitas pendapatan dengan mengurangi ketergantungan terhadap *success fees*; dan
3. Meningkatkan sumber daya layanan *advisory* melalui layanan bersama dengan pemegang saham/bank/mitra usaha.

Pencapaian Kinerja di Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Grup Advisory berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp8,06 miliar, dengan penyediaan jasa untuk mandat sebagai berikut:

- *Financial Advisor* untuk pembiayaan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera;
- *Transaction Advisor* untuk Proyek KPBU SPAM Semarang Barat;
- Konsultan untuk *Value Capture Study* Proyek Jalan Tol Trans Sumatera;
- *Financial Advisor* untuk pembentukan anak perusahaan sektor air salah satu perusahaan konstruksi;
- Konsultan untuk penyusunan *Framework Asset Recycling* Proyek Jalan Tol Trans Sumatera;
- Konsultan untuk penyusunan rancangan Peraturan Presiden *Value Capture* Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

agribusiness infrastructure. Through these sectors, IIF is optimistic that it can serve its role as a catalyst and enabler in accelerating national infrastructure development.

ADVISORY

The Advisory group was established as a business division that provides assistance and consulting for the company's government and private clients.

Presently, the consulting and supervision services offered by the Advisory Group include:

1. *Transaction Advisory*
2. *Financial Advisory*
3. *Economic Assessment and Project Preparation*
4. *Corporate Finance*

2019 Targets

In regard to the Advisory Group, the Company has targeted the following programs:

1. Expand advisory product/service offering to include early project preparation and policy making;
2. Improve stability of Group revenues by decreasing dependency on success fees; and
3. Leverage advisory resources using co-advisory structure with shareholders/bank/consulting firm partners.

Performance Achievement in 2019

In 2019, the Advisory Group booked revenues amounting to Rp8.06 billion through services under the following mandates:

- *Financial Advisor* for Trans-Sumatera Toll Road Project Financing;
- *Transaction Advisor* for Semarang Barat Water Supply PPP;
- Consultant for *Value Capture Study* on Trans-Sumatera Toll Road Project;
- *Financial Advisor* for the establishment of water supply subsidiary of a construction company;
- Consultant for the preparation of *Asset Recycling Framework* for Trans-Sumatera Toll Road Project;
- Consultant for the preparation of *Value Capture* presidential regulation draft for Trans-Sumatera Toll Road Project.



Rencana Ke Depan

Grup Advisory berusaha untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan dengan menawarkan jasa *advisory* sepanjang mata rantai proses pengembangan dan pelaksanaan proyek, mulai dari penyiapan proyek sampai dengan kegiatan *asset-recycling*. IIF menargetkan untuk terus mengembangkan jasa *advisory* pada:

- *Project Development Facility* (PDF), dalam hal penyiapan proyek-proyek KPBU;
- Proyek penugasan pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD;
- Badan usaha swasta yang mengembangkan proyek infrastruktur secara *solicited* maupun *unsolicited*;
- Proyek kerja sama dan bantuan teknis lembaga internasional multilateral dan bilateral, termasuk pelaksanaan *Green Climate Fund* (GCF).

Selain itu, untuk menambah kapasitas usaha, Grup Advisory akan tumbuh secara organik sembari menerapkan strategi *co-advisory* bersama-sama dengan perusahaan konsultan keuangan/teknis lain.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Pelaksanaan kegiatan operasional IIF terbagi menjadi tiga segmen usaha, yaitu Produk Investasi yang terdiri dari *Fund Based* dan *Non-Fund Based*, produk *Treasury* serta *Advisory*. Pada tahun 2019, Pendapatan dari Produk Investasi berkontribusi sebesar 84% terhadap total pendapatan Perseroan. Sedangkan produk *Treasury* dan *Advisory* memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15% dan 1% terhadap total pendapatan Perseroan.

PRODUK INVESTASI

Fund Based

IIF menyediakan produk investasi dalam dua jenis, yaitu *Fund Based* dan *Non-Fund Based*. Produk yang ditawarkan dalam jenis ini antara lain utang senior, surat berharga, utang subordinasi/*mezzanine financing*, *take-out financing*, dan/atau *refinancing*.

Pada tahun 2019, IIF berhasil membukukan komitmen pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun, sehingga total komitmen bersih pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp12,8 triliun.

Future Plans

Advisory Group is intensifying the effort to enlarge revenue contribution to the Company by offering advisory services along the infrastructure project development process chain, from project preparation up to asset recycling transaction. IIF is expanding advisory service to markets that include:

- *Project Development Facility* (PDF), for PPP project preparation;
- Government direct assignment project to SOE/Regional SOE;
- Private sector entity developing infrastructure project in both solicited and unsolicited scheme;
- Cooperation and technical assistance projects sponsored by international multilateral and bilateral agencies, including the implementation of *Green Climate Fund* (GCF);

To expand its business capacity, Advisory Group is growing organically while also entering co-advisory structure with other financial/technical firms.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

IIF's operations consist of three business segments, namely Investment Products which include Fund Based and Non-Fund Based Investment, Treasury Products, and Advisory Products. In 2019, Income from Investment Products contributed 84% of the Company's revenues, while Treasury and Advisory products contributed 15% and 1%, respectively.

INVESTMENT PRODUCTS

Fund Based

IIF provides two types of investment products, namely Fund Based and Non-Fund Based investment. Products in this category include senior debts, securities, subordinated debts/*mezzanine financing*, *take-out financing*, and/or *refinancing*.

In 2019, IIF recorded financing commitments at Rp3.6 trillion, so that the total net commitments by the end of 2019 was Rp12.8 trillion.

Dari total komitmen tersebut, total aset investasi adalah sebesar Rp8,8 triliun yang terdiri dari pembiayaan dalam bentuk pinjaman senior sebesar Rp6.214,1 miliar, surat berharga sebesar Rp1.389,4 miliar, fasilitas jaminan sebesar Rp269,2 miliar, *mutual fund* sebesar Rp259,5 miliar, dan sisanya dalam bentuk pinjaman subordinasi dan ekuitas. Sehingga jumlah komitmen yang belum disalurkan oleh IIF pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp4,0 triliun.

Pendapatan bunga investasi yang dibukukan IIF pertanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp643,99 miliar, naik sebesar 9,85% dibandingkan pendapatan bunga investasi tahun 2018 sebesar Rp586,22 miliar. Sedangkan dari sisi profitabilitas, produk investasi membukukan laba bersih sebelum pajak di tahun 2019 sebesar Rp142,81 miliar, tumbuh 59,99% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp89,26 miliar.

Non-fund Based

Pendapatan provisi dan komisi IIF pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp37,49 miliar, naik 21,53.% dibandingkan pendapatan provisi dan komisi pada tahun 2018 sebesar Rp30,85 miliar.

TREASURY

Untuk mengelola likuiditas usaha, IIF melakukan fungsi Treasury yang berfungsi untuk memonitor arus kas masuk dan keluar, serta memastikan kas berlebih telah diinvestasikan dengan tepat.

Pada tahun 2019, *Treasury* memperoleh pendapatan sebesar Rp160,97 miliar, turun sebesar 11% dibandingkan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp182,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan direalisasi dari transaksi derivatif di tahun 2019 yakni sebesar Rp5,78 miliar.

ADVISORY

Jenis layanan *Advisory* yang dimiliki IIF antara lain adalah *transaction advisory*, *financial advisory*, *economic assessment and project preparation*, serta *corporate finance*.

Pada tahun 2019, pendapatan *Advisory* mengalami penurunan sebesar 35,06% dari pendapatan di tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp12,41 miliar menjadi Rp8,06 miliar.

From the total commitments, total investment assets amounted to Rp8.8 trillion, consisting of senior debts at Rp6,214.1 billion, securities at Rp1,389.4 billion, guarantee facility at Rp269.2 billion, mutual fund at Rp259.5 billion, and the rest in subordinated loan and equity. Therefore, the total commitments undistributed by IIF at the end of 2019 amounted to Rp4.0 trillion.

Investment interest income booked by IIF as of December 31, 2019 amounted to Rp643.99 billion, up 9.85% compared to the investment income in 2018 at Rp586.22 billion. In terms of profitability, investment products recorded net profit before tax in 2019 at Rp142.81 billion, grew 59.99% from that of 2018 at Rp89,26 billion.

Non-Fund Based

IIF's provision and commission income in 2019 was recorded at Rp37.49 billion, up 21.53% compared to that of 2018 at Rp30.85 billion.

TREASURY

To manage the business liquidity, IIF organized a Treasury function to monitor cash inflows and outflows, as well as to ensure that excess cash is properly invested.

In 2019, Treasury generated an income of Rp160.97 billion, down 11% compared to that of 2018 at Rp182.2 billion. Such decrease was due to the decline on realized gain from derivative transaction in 2019 amounting to Rp5.78 billion.

ADVISORY

IIF's Advisory services include transaction advisory, financial advisory, economic assessment and project preparation and corporate finance.

In 2019, Advisory products recorded a decline in revenue by 35.06% from Rp12.41 billion in 2018 to Rp8.06 billion.



TINJAUAN KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indonesia Infrastructure Finance yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, serta laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young – Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”.

Bahasan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

Pada tahun 2019, jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp12,31 triliun, mengalami kenaikan sebesar 16,44% dibandingkan dengan jumlah aset di tahun 2018 yaitu sebesar Rp10,57 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kas dan setara kas sebesar Rp1,85 triliun atau 317,11% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp2,43 triliun di tahun 2019 yang sebagian berasal dari dana yang diterima dari Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp 1,50 triliun yang diterbitkan pada bulan Desember 2019.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	2.429,07	582,36	1.846,71	317,11%
Efek-efek / Securities	2.732,94	3.302,40	(569,46)	(17,24%)
Investasi saham / Equity investments	389,64	364,84	24,80	6,80%
Pinjaman diberikan (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) / Loans (net of allowance for impairment losses)	6.232,66	5.721,39	511,27	8,94%
Piutang bunga / Accrued interest income	62,91	41,25	21,66	52,51%
Beban dibayar di muka / Prepaid expenses	8,59	6,97	1,62	23,30%
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	0,45	11,37	(10,92)	(96,05%)
Aset tetap (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) / Property and equipment (net of allowance for impairment losses)	293,51	314,11	(20,60)	(6,56%)

FINANCIAL REVIEW

The following financial performance analysis is prepared based on Consolidated Financial Statements of PT Indonesia Infrastructure Finance which were presented in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2019. The Financial Statements consist of statements of financial position, statements of profit and loss and comprehensive income, as well as statements of cash flows per December 31, 2019, which have been audited by Public Accounting Firm Ernst & Young – Purwanto, Sungkoro & Surja, with unqualified opinion in all material respects.

The discussion of the Company's financial performance is delivered by considering the explanation in the notes to the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an integral part of this Annual Report.

Statements of Financial Position

Assets

In 2019, the total assets of the Company were recorded at Rp12.31 trillion, increased by 16.44% compared to that of 2018 which was recorded at Rp10.57 trillion. The increase was mainly due to an increase in the amount of cash and cash equivalents of Rp1.85 trillion or 317.11% from 2018 to Rp2.43 trillion in 2019, contributed by the Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019, amounting to Rp1.50 trillion issued in December 2019.



Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Tagihan derivative / Derivative receivables	44,29	76,35	(32,06)	(41,99%)
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	86,74	79,16	7,58	9,57%
Beban tangguhan / Deferred charges	3,66	39,36	(35,70)	(90,71%)
Aset lain-lain / Other assets	26,62	33,68	(7,06)	(20,97%)
Jumlah Aset / Total Assets	12.311,06	10.573,23	1.737,83	16,44%

Liabilitas

Pada tahun 2019, jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, mengalami kenaikan sebesar 20,39% dibandingkan dengan jumlah liabilitas di tahun 2018 yaitu sebesar Rp8,44 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman diterima sebesar Rp1,12 triliun atau 31,25% dari Rp3,59 triliun di tahun 2018 menjadi Rp4,71 triliun di tahun 2019, kenaikan surat utang yang diterbitkan sebesar Rp457,30 miliar dari Rp1,73 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2,18 triliun di tahun 2019 dan kenaikan pinjaman subordinasi sebesar Rp105,51 miliar atau 3,47% dari Rp3,04 triliun di tahun 2018 menjadi Rp3,14 triliun di tahun 2019.

Liabilities

In 2019, the Company's total liabilities were recorded at Rp10.16 trillion, increased by 20.39% compared to that of in 2018 of Rp8.44 trillion. The increase was mainly due to the growth of fund borrowing amounting to Rp1.12 trillion or 31.25%, from Rp3.59 trillion in 2018 to Rp4.71 trillion in 2019; followed by the growth of debt securities issued amounting to Rp457.30 billion, from Rp1.73 trillion in 2018 to Rp2.18 trillion in 2019; and the growth of subordinated loans amounting to Rp105.51 billion, from Rp3.04 trillion in 2018 to Rp3.14 trillion in 2019.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Utang lain-lain / Other payables	8,73	8,37	0,36	4,24%
Utang pajak / Tax payable	1,68	4,75	(3,07)	(64,72%)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain / Accrued expenses and other liabilities	37,98	30,35	(7,63)	25,15%
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits obligation	26,33	18,73	7,60	40,53%
Liabilitas derivative / Derivative liabilities	39,67	18,15	21,52	118,57%
Surat utang yang diterbitkan / Debt securities issued	2.183,06	1.725,76	457,30	26,50%
Pendapatan diterima di muka / Unearned revenue	4,39	2,90	1,48	51,10%
Pinjaman diterima / Fund borrowing	4.713,75	3.591,56	1.122,19	31,25%
Pinjaman subordinasi / Subordinated Loans	3.142,92	3.037,41	105,51	3,47%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	10.158,50	8.437,99	1.720,51	20,39%

Ekuitas

Pada tahun 2019, jumlah ekuitas IIF tercatat sebesar Rp2,15 triliun, mengalami kenaikan sebesar 0,81% dibandingkan dengan jumlah ekuitas di tahun 2018 yaitu sebesar Rp2,14 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan laba bersih di tahun 2019 sebesar Rp15,98 miliar, pertumbuhan penghasilan komprehensif lain sebesar 119,15% atau Rp33,20 miliar dan kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas sebesar Rp29,75 miliar.

Equity

In 2019, IIF's total equity was recorded at Rp2.15 trillion, an increase of 0.81% compared to that of 2018 recorded at Rp2.14 trillion. The increase was mainly caused by the receipt of net profit in 2019 amounting to Rp15.98 billion, the growth of other comprehensive income amounting to 119.15% or Rp33.20 billion, and the cumulative loss on derivative instruments for cash flow hedges amounting to Rp29.75 billion.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Modal saham / Capital stock	2.000,00	2.000,00	-	-
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	29,80	29,80	-	-
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	5,34	(27,86)	33,20	(119,15%)
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto / Cumulative losses on derivative instruments for hedging cash flows - net	(29,75)	-	(29,75)	100,00%
Saldo laba / Retained earnings	147,18	133,30	13,88	10,41%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.152,56	2.135,24	17,32	0,81%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pendapatan

Pada tahun 2019, IIF mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp837,80 miliar, mengalami kenaikan sebesar 9,53% dibandingkan dengan pendapatan usaha di tahun 2018 yaitu sebesar Rp764,93 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan keuntungan dari penjualan efek-efek sebesar Rp4,95 miliar, keuntungan yang direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif sebesar Rp8,74 miliar, keuntungan yang direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham sebesar Rp24,80 miliar, dan keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham sebesar Rp1,01 miliar. Selain itu, penurunan kerugian selisih kurs sebesar Rp32,32 miliar atau 66,08% dari tahun 2018 akibat penguatan nilai tukar Rupiah di tahun 2019 juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan IIF di tahun 2019.

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Revenue

In 2019, IIF recorded revenue of Rp837.90 billion, increased by 9.53% compared to Rp764.93 billion recorded in 2018. The increase was mainly due to the gain on sale of securities of Rp4.95 billion, realized gain from changes in the fair value of derivative transactions of Rp8.74 billion, realized gain from changes in the fair value of equity investment of Rp24.80 billion, and realized gain from the sales of equity investment of Rp1.01 billion. In addition, the decrease in foreign exchange loss by Rp32.32 billion or 66.08% from 2018 due to the strengthening of Rupiah exchange rate in 2019 also affected IIF's revenue growth in 2019.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Pendapatan bunga / Interest Income	786,37	730,52	55,85	7,65%
Pendapatan provisi dan komisi / Provision and commission income	37,49	30,85	6,64	21,53%
Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek / Gain (Loss) on sale of securities	4,07	(0,88)	4,95	(561,63%)
Pendapatan jasa <i>advisory</i> / Advisory income	8,06	12,41	(4,35)	(35,06%)
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham / Realized gain from sale of equity investment	1,01	-	1,01	100,00%
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif / Realized gain from derivative transactions	5,78	45,53	(39,75)	(87,30%)
Kerugian selisih kurs / Loss from foreign exchange	(16,59)	(48,91)	32,32	(66,08%)
Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham / Realized gain (loss) from changes in fair value of equity investments	24,80	(65,55)	90,35	(137,82%)



Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivative / Realized gain (loss) from changes in fair value of derivative transactions	8,74	(8,74)	17,49	(200,00%)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari nilai wajar opsi saham / Unrealized gain (loss) from the fair value of shares option	(22,65)	66,95	(89,60)	(133,84%)
Pendapatan lainnya / Other income	0,73	2,76	(2,04)	(73,66%)
Jumlah Pendapatan / Total Revenue	837,80	764,93	72,87	9,53%

Biaya Operasional

Pada tahun 2019, biaya operasional tercatat sebesar Rp805,40 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp811,63 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban cadangan kerugian nilai sebesar Rp22,30 miliar atau 81,55% dan penurunan beban bunga sebesar Rp6,69 miliar atau 1,06%, yang dikompensasikan dengan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp22,76 miliar atau 15,03%.

Beban Umum dan Administrasi

Jumlah beban umum dan administrasi yang berhasil dibukukan IIF pada tahun 2019 adalah sebesar Rp174,20 miliar, mengalami kenaikan sebesar 15,03% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp151,44 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban lain-lain sebesar Rp2,05 miliar atau 103,07%, kenaikan biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp9,04 miliar atau 49,61%, kenaikan imbalan kerja sebesar Rp1,60 miliar atau 36,23%, kenaikan jumlah gaji dan tunjangan bagi karyawan sebesar Rp13,58 miliar atau 16,29%, dan kenaikan pembayaran jasa profesional sebesar Rp2,16 miliar atau 13,45% yang dikompensasikan dengan penurunan biaya sewa sebesar Rp4,93 miliar atau 51,31%.

Beban Bunga

Jumlah beban bunga yang berhasil dibukukan IIF pada tahun 2019 adalah sebesar Rp626,15 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,06% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp632,84 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bunga dari surat utang yang diterbitkan dari Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga sebesar Rp15,85 miliar atau 11,92% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp117,10 miliar di tahun 2019 seiring dengan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp825 miliar sesuai jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2019 dan MTN IIF Tahun 2018 sebesar Rp200 miliar sesuai jatuh temponya pada tanggal 10 November 2019.

Operational Costs

In 2019, operational costs were recorded at Rp805.40 billion, decreased by 0.77% compared to Rp811.63 billion recorded in 2018. The decrease was mainly due to a decrease of Rp22.30 billion or 81.55% in provision for impairment, and a decrease of Rp6.69 billion or 1.06% in interest expenses which compensated an increase in general and administrative expense of Rp22.76 billion or 15.03%.

General and Administrative Expenses

IIF's total amount of general and administrative expenses in 2019 was recorded at Rp174.20 billion, an increase of 15.03% compared to that of 2018 recorded at Rp151.44 billion. The upsurge was caused by the increase in other expenses by Rp2.05 billion or 103.07%, the increase in depreciation and amortization by Rp9.04 billion or 49.61%, the increase in employee benefits by Rp1.69 billion or 36.23%, the increase of salaries and benefits by Rp13.58 billion or 16.29%, and the increase in professional services by Rp2.16 billion or 13.45% which compensated a decrease in rent expenses by Rp4.93 billion or 51.31%.

Interest Expenses

IIF's interest expenses in 2019 were recorded at Rp626.15 billion, a decrease of 1.06% compared to that of 2018 recorded at Rp632.84 billion. The decrease was due to a decline in interest from debt securities issued by Related Parties and Third Parties amounting to Rp15.85 billion or 11.92% from 2018 to Rp117.10 billion in 2019, in line with the settlement of Series A Bonds amounting to Rp825 billion on its maturity date (July 19, 2019) and MTN IIF of 2018 amounting to Rp200 billion on its maturity date (November 10, 2019).

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai di tahun 2019 tercatat sebesar Rp5,04 miliar, mengalami penurunan sebesar 81,55% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp27,34 miliar. Hasil tersebut terutama disebabkan oleh pembalikan penyisihan beberapa pelunasan pinjaman yang dipercepat.

Provision for Impairment Losses

Allowance for impairment losses in 2019 was recorded at Rp5.04 billion, a decrease of 81.55% compared to that of 2018 recorded at Rp27.34 billion. This was mainly caused by the reversal of allowance for several loans which was accelerated settlement.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Beban umum dan administrasi / General and administrative expenses	(174,20)	(151,44)	(22,76)	15,03%
Beban bunga / Interest expenses	(626,15)	(632,84)	6,69	(1,06%)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	(5,04)	(27,34)	22,30	(81,55%)
Jumlah Beban / Total Expenses	(805,40)	(811,63)	6,23	(0,77%)

Laba/Rugi Bersih

Pada tahun 2019, IIF mencatat laba bersih sebesar Rp15,98 miliar, lebih baik dari tahun 2018 yang mengalami kerugian sebesar Rp42,95 miliar. Perolehan laba bersih di tahun 2019 sebagian besar berasal dari peningkatan total pendapatan yang diterima oleh Perseroan sebesar 9,53% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp837,80 miliar yang diimbangi dengan penurunan total beban yang dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 0,77% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp805,40 miliar di tahun 2019.

Net Profit

In 2019, IIF recorded a net profit of Rp15.98 billion, an improvement from 2018 which suffered a loss of Rp42.95 billion. Net profit in 2019 was largely originated from an increase in total revenue received by the Company by 9.53% from 2018 to Rp837.80 billion, supported by a decrease in total expenses incurred by the Company by 0.77% from 2018 to Rp805.40 billion in 2019.

Selain itu, Margin Bunga Bersih (*Net Interest Margin*) tahun 2019 tercatat sebesar 1,82% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

In addition, Net Interest Margin in 2019 was recorded at 1.82%, an increase from the previous year.

LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas operasi mencapai negatif Rp453,74 miliar, mengalami kenaikan sebesar 16,12% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar negatif Rp390,74 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh selisih yang lebih besar antara penyaluran pinjaman dibandingkan dengan penerimaan pembayaran pinjaman di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini seiring dengan fungsi IIF sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

STATEMENT OF CASH FLOWS

Cash Flows from Operating Activities

In 2019, cash flows from operating activities was negative Rp453.74 billion, a 16.12% increase compared to negative Rp390.74 billion recorded in 2018. This upsurge was caused by a larger difference between loans distribution and receipt of repayment of loans in 2019 compared to that of 2018. This was in line with IIF's function as a financing institution which distributes funds to the community in the framework infrastructure development in Indonesia.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas investasi mencapai Rp436,14 miliar, mengalami kenaikan sebesar 259,60% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar negatif Rp273,26 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian efek-efek sebesar Rp642,78 miliar atau 52,27% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp586,92 miliar di tahun 2019 dan peningkatan penerimaan dari penjualan efek-efek sebesar Rp20,54 miliar atau 2,05% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp1,02 triliun di tahun 2019 serta penurunan pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp40,36 miliar dari Rp40,53 miliar di tahun 2018 menjadi Rp173 juta di tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai Rp1,85 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,63 triliun atau 166,56% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar negatif Rp2,78 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1,5 triliun. Sedangkan di tahun 2018 terdapat pembayaran pinjaman diterima sebesar Rp5,99 triliun dibandingkan dengan pembayaran surat utang sebesar Rp825 miliar di tahun 2019.

Cash Flows from Investing Activities

In 2019, cash flows from investing activities were Rp436.14 billion, increased by 259.60% compared to the negative Rp273.26 billion recorded in 2018. Such increase was primarily caused by the decrease in purchase of sales amounting to Rp642.78 billion or 52.27% in 2018 to Rp586.92 billion in 2019, and the increase in securities sales of Rp20.54 billion or 2.05% in 2018 to Rp1.02 trillion in 2019, as well as a decline in payment for acquisition of property and equipment amounting to Rp40.36 billion, from Rp40.52 billion recorded in 2018 to Rp173 million in 2019.

Cash Flows from Financing Activities

In 2019, cash flow from financing activities was Rp1.85 trillion, grew by Rp4.63 trillion or 166.56% compared to 2018 of negative Rp2.78 trillion. Such increase was mainly due to receipt of funds from the issuance of Shelf Registration Bonds of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 of Rp1.5 trillion. In 2018, the Company made a payment of funds borrowing amounting to Rp5.99 trillion while in 2019, the Company made a payment of issuance cost of debt securities issued amounting to Rp825 billion.

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	2019	2018	Hasil Perbandingan / Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Arus kas dari aktivitas operasi / Cash flows from Operating Activities	(454,07)	(390,74)	(63,33)	16,12%
Arus kas dari aktivitas investasi / Cash flows from Investing Activities	435,86	(273,26)	709,40	(259,60%)
Arus kas dari aktivitas pendanaan / Cash flows from Funding Activities	1.851,75	(2.781,95)	4.633,70	(166,56%)
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas / (Decrease)/Increase in cash and cash equivalents	1.834,15	(3.445,96)	5.280,11	(153,23%)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas / Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents	12,55	62,35	(49,80)	(79,87%)
Saldo kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at beginning of the year	582,36	3.965,96	(3.383,60)	(85,32%)
Kas dan setara kas akhir tahun / Cash and cash equivalents at the end of year	2.429,07	582,36	(1.846,71)	317,11%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui pemenuhan Perseroan dalam memenuhi utangnya. Pengukuran kemampuan membayar utang untuk jangka pendek dilakukan dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dalam jangka pendek. Tingkat likuiditas Perseroan dapat dilihat dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas.

Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio	2019	2018
Rasio lancar / Current Ratio	1,41x	1,28x

Pada tahun 2019, rasio lancar tercatat sebesar 1,41x, lebih tinggi dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 1,28x.

Dalam rangka memperbaiki performa rasio likuiditas, Manajemen IIF telah menyiapkan upaya strategis, diantaranya penetrasi ke pasar modal melalui penerbitan obligasi dalam meningkatkan manajemen liabilitas.

Rasio Solvabilitas

Selain rasio likuiditas, IIF juga menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah Aset yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio	2019	2018
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) (x) / Debt to Equity Ratio (DER) (x)	4,66	3,91
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR) (x) / Debt to Asset Ratio (DAR) (x)	0,82	0,79

Pada tahun 2019, rasio DER tercatat sebesar 4,66x, lebih tinggi dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,91x. Sedangkan untuk rasio DAR di tahun 2019 tercatat sebesar 0,82x, lebih tinggi dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,79x. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang yang dimiliki oleh Perseroan lebih besar dibandingkan dengan total aset dan modal yang dimiliki.

Dalam rangka memperbaiki kinerja rasio solvabilitas, Manajemen IIF telah menyiapkan upaya strategis, diantaranya strategi pendanaan *just-in-time*, meminimalkan dana surplus, dan diversifikasi sumber pendanaan melalui *capital market*.

SOLVENCY

The Company's solvency translates to its ability to pay debts. Solvency for short-term debt is measured using liquidity ratios and solvability ratios.

Liquidity Ratio

The liquidity ratio reflects the Company's ability to fulfil its obligations, especially short-term obligations. The level of Company's liquidity can be seen from the current ratio, quick ratio, and cash ratio.

In 2019, current ratio was recorded at 1.41x, higher than 1.28x recorded in 2018.

In order to improve the performance of liquidity ratio, IIF Management has prepared strategic efforts, such as entering capital market through bond issuance to improve liability management.

Solvability Ratio

In addition to the liquidity ratio, IIF also uses Solvability Ratio to measure the amount of assets financed by debt. The Solvability Ratio used is Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Asset Ratio (DAR).

In 2019, DER ratio was recorded at 4.66x, higher than 2018 which was recorded at 3.91x. Meanwhile, DAR ratio in 2019 was recorded at 0.82x, higher than 2018 which was recorded at 0.79x. This indicates that the Company has more debts than its total assets and equity.

In order to improve the solvency ratio performance, IIF Management has prepared several strategic efforts, such as just-in-time funding, minimization of surplus fund, and diversification of funding sources through capital market.



TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

IIF menerapkan strategi ekspansif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur. Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan mampu menjaga kualitas aset sehingga mencapai tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) neto pada level 0,74%.

STRUKTUR MODAL

Struktur modal merupakan alokasi modal sendiri (ekuitas) dan utang yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan ekspansi Perseroan. Berikut adalah struktur modal IIF sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Struktur Modal / Capital Structure	2019	2018
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	10.158,50	8.437,99
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.152,56	2.135,24
Debt to Equity Ratio	4,66	3,91

Komposisi struktur modal IIF di tahun 2019 terdiri dari 83% Liabilitas dan 17% Ekuitas. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, komposisi tersebut mengalami perubahan, yang terdiri dari 80% Liabilitas dan 20% Ekuitas. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas yang melebihi nilai ekuitas di tahun 2019.

Manajemen menganalisis bahwa Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut sehat dan sesuai dengan kebijakan Manajemen atas struktur modal.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan risiko modal yang dilakukan IIF bertujuan untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam melanjutkan kelangsungan usaha dan memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi struktur utang dan ekuitas. Manajemen terus melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap struktur permodalan Perseroan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2019, IIF tidak melakukan ikatan material untuk investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2019, IIF tidak melakukan investasi barang modal.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

IIF implements an expansive strategy with due regard to the prudent principles in the distribution of financing for infrastructure. As of December 31, 2019, the Company was able to maintain asset quality so that net Non-Performing Loan (NPL) reached the level of 0.74%

CAPITAL STRUCTURE

Capital structure is the allocation of own capital (equity) and debt used to fund the Company's operational and expansion activities. The following table describes IIF capital structures as of December 31, 2019 and 2018.

IIF's capital structure in 2019 consisted of 83% Liabilities and 17% Equity while in 2018, IIF's capital structure consisted of 80% liabilities and 20% equity. The change was caused by an increase in the amount of liabilities which exceeded the amount of equity in 2019.

The management analyzes that the Debt to Equity Ratio up to December 31, 2019 and 2018 was at a healthy level and was in accordance with the Management policy on capital structure.

Management Policy on Capital Structure

The capital risk management carried out by IIF aims to ensure the Company's ability to maintain business continuity and improve shareholders value through the optimization of debt and equity structure. IIF management closely monitors and reviews the Company's capital structure by considering costs of capital and related risks.

MATERIAL COMMITMENTS ON CAPITAL GOODS INVESTMENT

Throughout 2019, the Company did not enter into any material commitments on capital goods investment.

CAPITAL INVESTMENT

Throughout 2019, the Company did not carry out capital investment.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sepanjang tahun 2019, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2019, IIF tidak mencatatkan informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

PROSPEK USAHA

Bank Dunia dalam laporan yang dirilis berjudul *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,5% untuk tahun 2020 dan 2,6% untuk tahun 2021. Asumsi tersebut disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang mengalami perlambatan di tahun 2019.

Meski demikian, Bank Dunia memprediksi bahwa perbaikan perekonomian global dapat terealisasi pada 2 tahun yang akan datang seiring dengan pemulihan volume perdagangan dan investasi. Prediksi tersebut juga diperkuat dengan adanya perjanjian Fase I yang telah ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada awal tahun 2020, sehingga diperkirakan dapat berdampak pada pertumbuhan volume perdagangan dunia di tahun 2020 yang mencapai level 1,9%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,4%.

Di tingkat nasional, pemerintah telah menyusun proyeksi indikator-indikator makroekonomi untuk tahun 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka 5,3%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,02%. Selain itu, dalam laporan tersebut juga mencantumkan proyeksi tingkat inflasi sebesar 3,1%, nilai tukar Rupiah di kisaran Rp14.400 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4%, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US\$63 per barel, lifting minyak rata-rata 755.000 barel per hari dan lifting gas rata-rata 1,19 juta barel setara minyak per hari.

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO FINANCIAL STATEMENTS DATE

Throughout 2019, there were no material information and facts occurring after the date of the financial statements other than those disclosed in the audited financial statements for the year ended on December 31, 2019.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING RARE AND EXTRAORDINARY EVENTS

Throughout 2019, the Company did not record any financial information containing extraordinary and rare events that may affect its performance.

BUSINESS OUTLOOK

The World Bank in its report entitled *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges* predicts global economic growth of 2.5% for 2020 and 2.6% for 2021. These assumptions are based on economic growth in emerging markets which slowed down in 2019.

However, the World Bank predicts that the improvement of global economy might be achieved in the next 2 years in line with the recovery of trade and investment volumes. This prediction is also supported by the Phase I agreement signed by the United States (US) and China in early 2020, which is expected to have an impact on global trade volume growth in 2020 to reach the level of 1.9%, higher than in 2019 of 1.4%.

Domestically, the government has prepared projections of macroeconomic indicators for 2020 in the 2020 State Budget (APBN). Based on the report, the government targets 5.3% economic growth higher than the 2019 growth realization of 5.02%. In addition, the report also stated the projection of inflation rate of 3.1%, the Rupiah exchange rate in the range of Rp14,400 per US Dollar, 3-month Treasury Bills rate of 5.4%, Indonesian crude oil prices averaging US\$63 per barrel, oil lifting at an average of 755,000 barrels per day and gas lifting at an average of 1.19 million barrels of oil equivalent per day.



Pada tahun 2020 mendatang, negara diperkirakan akan memperoleh pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah sebesar Rp2.233,2 triliun. Sedangkan anggaran untuk belanja negara yang diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan diproyeksikan mencapai Rp2.540,4.

Sementara itu, dalam APBN 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp423,3 triliun atau naik 2% dari realisasi 2019 yaitu sebesar Rp415 triliun. Anggaran tersebut berasal dari anggaran belanja pusat sebesar Rp191,2 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp200,3 triliun, dan melalui skema pembiayaan sebesar Rp31,8 triliun.

Dari sisi indikator pembangunan infrastruktur, pemerintah menargetkan persentase kondisi mantap jalan sebesar 94%, peringkat kemudahan berusaha Indonesia menuju 40, dan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak sebesar 50,0%. Untuk mendukung akselerasi penuntasan pembangunan infrastruktur, pemerintah melakukan terobosan pembiayaan kreatif, salah satunya melalui skema KPBU. Dalam APBN 2020, skema KPBU masih berfokus pada pelibatan peran swasta dan/atau BUMN.

Berkaca dari proyeksi makroekonomi untuk tahun 2020 dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara masif yang masih menjadi salah satu fokus pemerintah untuk beberapa tahun mendatang, IIF optimis dapat terus mengoptimalkan peluang dan potensi bisnis melalui pengembangan inovasi baru dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan bisnis Perseroan sekaligus menjadi katalisator pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

In 2020, the government is expected to obtain revenues from tax revenues, Non-Tax Revenues (PNBP) and grants totaling Rp2,233.2 trillion. Meanwhile, the government has budgeted an amount of Rp2,540.4 for state expenditure to support the realization of development targets.

Meanwhile, in the 2020 State Budget, the government has allocated funds for infrastructure development amounting to Rp423.3 trillion, rose by 2% from Rp415 trillion realized in 2019. This budget is attributable to the budget for central government expenditure, transfer to the regions, and financing scheme amounting to Rp191.2 trillion, Rp200.3 trillion, and Rp31.8 trillion, respectively.

In terms of infrastructure development indicators, the government is targeting 94% of good road conditions, the ease-of-doing-business in Indonesia to the 40th rank, and 50.0% households to occupy decent housing. To support the acceleration of infrastructure development completion, the government has made creative financing breakthroughs, one of which is through the PPP scheme. In the 2020 State Budget, the PPP scheme is still focused on involving the role of the private sector and/or SOE.

Considering the 2020 macroeconomic projections and the massive implementation of infrastructure development which is still one of the focus of the government for the next few years, IIF is optimistic that it can continue to optimize business opportunities and potential through the development of new innovations in order to maintain the stability of the Company's business growth while at the same time becoming a catalyst for infrastructure financing in Indonesia.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019, DAN PROYEKSI DI TAHUN 2020

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Uraian / Description	Target 2019	Realisasi 2019 / Realization in 2019	Pencapaian Target (%) / Target Achievements (%)	Proyeksi 2020 / Projection for 2020	Pertumbuhan / Growth (%)
Laporan Posisi Keuangan / Statement of Financial Position					
Jumlah Aset / Total Assets	12.185,2	12.311,06	101,03%	14.998,8	21,83%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	10.019,2	10.158,50	101,39%	12.839,1	26,39%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.165,8	2.152,56	99,39%	2.159,7	0,33%

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2019, AND PROJECTION FOR 2020

Uraian / Description	Target 2019	Realisasi 2019 / Realization in 2019	Pencapaian Target (%) / Target Achievements (%)	Proyeksi 2020 / Projection for 2020	Pertumbuhan / Growth (%)
Laporan Laba Rugi / Statement of Profit or Loss					
Total pendapatan / Total revenues	877,98	837,80	95,42%	1.170,75	32,58%
Laba bersih setelah pajak / Net profit after tax	14,6	15,98	109,45%	52,3	227,28%
Rasio Keuangan / Financial Ratios					
Return on Equity	0,68%	0,75%	110,29%	2,46%	232,43%
Net Investment Margin (Corporate)	2,06%	1,82%	88,35%	2,66%	46,15%
Cost of Fund	5,82%	5,82%	100,00%	5,41%	7,04%
Cost Efficiency Ratio (CER)	89,1%	83,5%	93,6%	74,3%	11,02%
Debt to Equity Ratio	4,58x	4,66x	98,01%	5,89x	24,81%

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET 2019, DAN PROYEKSI TAHUN 2020

Aset

IIF mencatatkan realisasi jumlah aset di tahun 2019 sebesar Rp12,31 triliun, tercapai 101,03% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar Rp12,19 triliun. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh saldo kas & setara kas yang lebih tinggi akibat penerimaan kas dari penerbitan obligasi.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan perolehan aset sebesar Rp15,00 triliun atau naik 21,83% dari realisasi jumlah aset di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh investasi aset yang diharapkan tumbuh signifikan dalam rangka membangun stabilitas bisnis IIF.

Liabilitas

IIF mencatatkan realisasi jumlah liabilitas di tahun 2019 sebesar Rp10,16 triliun, tercapai 101,39% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar Rp10,02 triliun. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang Perseroan dari penerbitan obligasi sebesar Rp1,5 triliun pada akhir tahun 2019.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan jumlah liabilitas sebesar Rp12,84 triliun atau naik 26,39% dari realisasi jumlah liabilitas di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh penambahan utang Perseroan yang diharapkan naik untuk mendanai pertumbuhan pinjaman diberikan dan investasi saham.

ANALYSIS ON PERFORMANCE REALIZATION WITH TARGET FOR 2019 AND PROJECTION FOR 2020

Assets

IIF recorded total assets in 2019 amounting to Rp12.31 trillion, reaching 101.03% of the target set at the beginning of the year at Rp12.19 trillion. This was due to higher cash & cash equivalents balance resulting from cash proceed from bonds issuance.

For 2020, the Company has targeted to reach total assets amounting to Rp15.00 trillion, an increase of 21.83% from the realization of 2019. This determination is affected by increment of investment assets which are expected to significantly grow to build IIF sustainable business.

Liabilities

IIF recorded total liabilities in 2019 amounting to Rp10.16 trillion, reaching 101.39% of the target set at the beginning of the year at Rp10.02 trillion. This was due to increment of debt from bonds issuance amounting to Rp1.5 trillion at the end of 2019.

For 2020, the Company has targeted to reach total liabilities amounting to Rp12.84 trillion, an increase of 26.39% from the realization of 2019. This determination is affected by increment of debt balance which is expected to rise to fund the grow in investment loan and equity investments.

Ekuitas

IIF mencatatkan realisasi jumlah ekuitas di tahun 2019 sebesar Rp2,17 triliun, tercapai 99,39% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar Rp2,17 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai arus kas yang diakui pada pos Ekuitas, yang dikurangi dengan pembukuan laba bersih sebesar Rp16,0 miliar di tahun 2019.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan jumlah ekuitas sebesar Rp2,16 triliun atau naik 0,33% dari realisasi jumlah ekuitas di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh target pencapaian laba bersih untuk tahun 2020 yang diharapkan mencapai Rp52,3 miliar.

Total Pendapatan

IIF mencatatkan realisasi total pendapatan di tahun 2019 sebesar Rp837,80 miliar, tercapai 98,60% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar Rp849,7 miliar. Ketidaktercapaian tersebut terutama disebabkan oleh pencapaian beberapa pencairan aset yang mundur ke 2020 dan juga pencapaian pendapatan jasa *advisory* dan *fee-based* yang lebih rendah.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan perolehan pendapatan sebesar Rp1,11 triliun atau naik 29,15% dari realisasi pendapatan investasi – bersih di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan berbasis bunga sebesar 44% dan pendapatan jasa *advisory* sebesar 83%.

Laba Bersih Setelah Pajak

IIF mencatatkan realisasi laba bersih setelah pajak di tahun 2019 sebesar Rp15,98 miliar, tercapai 109,45% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar Rp14,6 miliar. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi dalam operasional sehingga biaya operasi di 2019 menjadi 11% lebih rendah dari *budget*. Terlebih lagi adanya perubahan dalam kebijakan tingkat pencadangan kerugian berdampak pada penurunan cadangan kerugian penurunan nilai yang 80% lebih rendah dari *budget*.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan perolehan laba bersih setelah pajak sebesar Rp52,3 miliar atau naik 227,28% dari realisasi laba bersih setelah pajak di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan dari pendapatan bunga investasi dan jasa *advisory* untuk menunjang bisnis yang stabil. Terlebih lagi, IIF secara terus menerus berfokus dalam menurunkan COF, meminimalkan *negative carry*, dan juga menjaga efisiensi operasional.

Equity

IIF recorded total equity in 2019 amounting to Rp2.17 trillion, reaching 99.39% of the target set at the beginning of the year at Rp2.17 trillion. This was mainly due to cumulative loss on cash flow hedge instrument which is recognized in Equity, net off with the net profit amounting to Rp16.0 billion recorded in 2019.

For 2020, the Company has targeted to reach total equity amounting to Rp2.16 trillion, an increase of 0.33% from the realization of 2019. This determination is affected by expected net profit for 2020 to reach Rp52.3 billion.

Total Revenues

IIF recorded total revenues in 2019 amounting to Rp837.80 billion, reaching 98.60% of the target set at the beginning of the year at Rp849.7 billion. This was mainly due to several assets disbursement which to be disbursed in 2020, and lower achievement of advisory and fee-based income.

For 2020, the Company has targeted to reach total revenues amounting to Rp1.11 trillion, an increase of 29.15% from the realization of 2019. This determination is affected by the growth of interest-bearing income by 44% and advisory income by 83%.

Net Profit After Tax

The realization of net profit after tax in 2019 amounting to Rp15.98 billion, reaching 109.45% of the target set at the beginning of the year at Rp14.6 billion. This was due to an effective operational cost efficiency which resulting in 11% operating expenses lower than budget. In addition, changes in provisioning rate policy resulting in 80% decreased in provision for impairment loss as compared to budget.

For 2020, the Company has targeted to reach net profit after tax amounting to Rp52.3 billion, an increase of 227.28% from the realization of 2019. This determination is affected by significant growth in investment income and advisory income to support sustainable business. In addition, IIF is continuously focusing on lowering the COF, minimizing negative carry, as well as maintaining operational efficiency.

Return on Equity (ROE)

IIF mencatatkan realisasi posisi ROE di tahun 2019 berada di level 0,74%, tercapai 110,10% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar 0,68%. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan membukukan laba bersih yang didapatkan dari pengelolaan *negative carry* yang efektif melalui strategi pendanaan *just-in-time*, meminimalkan dana surplus, dan menurunkan *cost of fund* dengan penerbitan obligasi.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan posisi ROE berada di level 2,46% atau naik 232,43% dari realisasi posisi ROE di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh upaya terus-menerus dalam menurunkan COF, meminimalkan *negative carry*, dan juga terus menjaga efisiensi operasional.

Net Investment Margin (NIM)

IIF mencatatkan realisasi posisi NIM di tahun 2019 berada di level 1,82%, tercapai 88,35% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar 2,06%. Ketidaktercapaian tersebut terutama disebabkan oleh pencairan aset yang lebih rendah dan tingkat JIBOR LIBOR aktual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *budget*.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan posisi NIM berada di level 2,66% atau naik 46,15% dari realisasi posisi NIM di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh strategi untuk berfokus pada transaksi yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan penurunan *Cost of Fund*.

Cost of Fund

IIF mencatatkan realisasi rasio *Cost of Fund* di tahun 2019 sebesar 5,82%, tercapai 100% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar 5,82%. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan menjaga *cost of fund* di level minimum dengan pendanaan melalui penerbitan obligasi.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan rasio *Cost of Fund* berada di level 5,41% atau 7,04% membaik dari realisasi di tahun 2019. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh diversifikasi sumber pendanaan melalui *capital market* (misalnya penerbitan obligasi), strategi pendanaan *just-in-time*, dan terus meminimalkan dana surplus.

Return on Equity (ROE)

The Company's ROE position in 2019 was at the level of 0.74% or 110.10% of the targeted 0.68% set at the beginning of the year. This was due to the positive ROE booked as IIF manages to record net profit which resulting from an effective management of negative carry from just-in-time funding strategy, minimizing surplus fund, and reducing cost of fund through bonds issuance.

For 2020, the Company has targeted to reach ROE position at the level of 2.46%, an increase of 232.43% of the ROE position realized in 2019. This determination is affected by strategy focus on continuously lowering the COF, minimizing negative carry, as well as maintaining operational efficiency.

Net Investment Margin (NIM)

The Company's NIM position in 2019 was at the level of 1.82% or 88.35% of the targeted 2.06% set at the beginning of the year. This was due to lower asset disbursement of unrealized pipelines and lower actual JIBOR LIBOR rate compared to budget.

For 2020, the Company has targeted to reach NIM position at the level of 2.66%, an increase of 46.15% of the NIM position realized in 2019. This determination is affected by the strategy to focus on high value-added deals and lowering Cost of Fund.

Cost of Fund

The Company's Cost of Fund ratio in 2019 was at the level of 5.82% or 100% of the targeted 5.82% set at the beginning of the year. It was achieved by effectively minimizing cost of fund through bonds issuance.

For 2020, the Company has targeted to reach Cost of Fund ratio at the level of 5.41%, an improvement of 7.04% of the Cost of Fund position realized in 2019. This determination is affected by diversifying the funding sources through capital market (e.g. bonds issuance), just-in-time funding strategy, and continuously minimizing surplus fund.

Cost Efficiency Ratio (CER)

IIF mencatatkan realisasi posisi CER di tahun 2019 berada di level 83,5%, tercapai 93,6% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar 89,1%. Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh utilisasi biaya operasional yang lebih rendah.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan posisi CER berada di level 74,3% atau penurunan 11,02% dari realisasi posisi CER di tahun 2019. Penetapan tersebut ditargetkan dengan menjaga efisiensi operasional melalui *active cost management*.

Debt to Equity Ratio (DER)

IIF mencatatkan realisasi posisi DER di tahun 2019 adalah sebesar 4,66x, tercapai 101,75% dari target di awal tahun 2019 yaitu sebesar 4,58x. Ketidaktercapaian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo hutang di 2019 dari penerbitan obligasi dan penarikan beberapa dana pinjaman.

Pada tahun 2020 mendatang, Perseroan menargetkan posisi DER mencapai 5,89x atau naik 20,88% dari realisasi posisi DER di tahun 2019. Penetapan target tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan pendanaan yang cukup besar sejalan dengan kenaikan aset investasi.

ASPEK PEMASARAN**Strategi Pemasaran**

Perseroan memiliki misi sebagai katalisator dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan di Indonesia maupun asing dan para investor untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan dan investasi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, strategi pemasaran Perseroan bukanlah untuk bersaing dengan para kreditur atau investor lainnya, melainkan justru menjalin sinergi yang baik. Hal ini juga dikarenakan sektor infrastruktur selalu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga membutuhkan sinergi yang tepat antara lembaga pembiayaan baik domestik maupun internasional.

Perseroan selalu berusaha mengembangkan aset portfolio pembiayaannya dengan memberikan pendanaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Untuk mencari proyek-proyek yang layak dibiayai, Perseroan menggunakan jaringan-jaringan sebagai berikut:

Cost Efficiency Ratio (CER)

The Company's CER in 2019 was at the level of 83.5% or 93.6% of the targeted 89.1% set at the beginning of the year. This was due to lower utilization of operational expenses.

For 2020, the Company has targeted to reach CER at the level of 74.3%, an decrease of 11.02% of the CER position realized in 2019. This determination is affected by maintaining operational efficiency through active cost management.

Debt to Equity Ratio (DER)

The Company's DER in 2019 was realized at 4.66x or 101.75% of the targeted 4.58x set at the beginning of the year. This was due to increased debt in 2019 from bonds issuance and disbursement of several fund borrowings.

For 2020, the Company has targeted to realize DER at 5.89x, an increase of 20.88% of the DER position realized in 2019. This determination is affected by the need of increased funding as in line with the increment of investment assets.

MARKETING ASPECT**Marketing Strategy**

The Company's mission is to become a catalyst in financing infrastructure development in Indonesia by cooperating with domestic and foreign financial institutions and investors, so as to be able to participate in financing and investment activities to develop the nation's infrastructure. Therefore, the Company's marketing strategy is not to compete with other creditors or investors, but to establish positive and beneficial synergy. This is also driven by the fact that the infrastructure sector always requires enormous funding; hence a proper synergy among financial institutions, both domestic and international, is highly needed.

The Company constantly strives to develop its financing portfolio by providing funding to commercially viable infrastructure projects. To seek financially-feasible projects, the Company takes advantage of the following networks:



- Penetrasi kepada pelaku infrastruktur, dimana Perseroan mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang layak untuk didukung dengan cara membangun jaringan dengan para pelaku di industri infrastruktur;
- Jaringan perbankan lokal maupun asing, dimana Perseroan bekerjasama dengan bank-bank komersial maupun kreditur-kreditur non-bank untuk melakukan penjangkauan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak dibiayai; dan
- Agen pembangunan, dimana Perseroan melakukan dialog secara aktif dengan para agen pembangunan (termasuk dengan para pemegang saham Perseroan) untuk mengetahui perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang diperkirakan akan mulai dibangun.
- Penetration to infrastructure players, in which the Company identifies infrastructure projects feasible to be supported by building networks with the infrastructure industry players;
- Local and foreign banking networks, in which the Company cooperates with commercial banks and non-banking creditors to conduct financing assessments on financially-feasible infrastructure projects; and
- Development agents, in which the Company actively engages in dialogue with development agents (including the Company's shareholders) to understand the development of infrastructure projects that are expected to begin construction.

Sejalan dengan peran utama Perseroan sebagai katalisator bagi sektor pembiayaan infrastruktur, Perseroan tidak didesain untuk mendominasi pasar pembiayaan proyek infrastruktur. Perseroan dirancang untuk menjadi pendorong bagi bank-bank komersial atau lembaga pembiayaan lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, dengan memberikan solusi-solusi inovatif yang dapat membuat pembiayaan proyek tersebut menjadi menarik bagi para kreditur / investor lain, untuk bersama dengan Perseroan mendanai proyek tersebut.

Perseroan menyadari bahwa setiap proyek infrastruktur adalah unik, tergantung pada banyak faktor seperti kebijakan Pemerintah, situasi ekonomi dan politik, kondisi lokasi, skala dan teknologi yang digunakan, skema pembayaran dari pengguna dan lain sebagainya. Hal ini berpengaruh terhadap aspek keuangan proyek tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jenis fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan, termasuk skema pembiayaannya.

Selain upaya pemasaran dengan memberikan jasa yang *customized* sebagai fokus upaya pemasaran, Perseroan juga membangun *brand awareness* pengenalan terhadap visi dan misi Perseroan, serta kemampuan Perseroan dalam mendorong pembiayaan proyek infrastruktur. Di antara upaya-upaya tersebut, Perseroan mengikuti pameran atau konferensi infrastruktur berskala internasional, menjadi pembicara di seminar-seminar infrastruktur, baik dalam skala nasional maupun dunia dan memasuki asosiasi-asosiasi industri yang relevan.

In line with its primary role as a catalyst for infrastructure financing sector, the Company sets its objectives not to dominate the market of infrastructure project financing. The Company is designed to be a driving force for commercial banks or other financial institutions to participate in infrastructure project financing, by providing innovative solutions that can attract other creditors/ investors to join the Company to provide financing for infrastructure projects.

The Company realizes that each infrastructure project is unique as they depend on a number of factors, such as government's policies, economic and political situations, location conditions, scale and technology used, payment scheme from users, and so on. These factors certainly affect the financial aspect of the project and will ultimately give impact on the types of financing facility required, including the financing scheme.

The Company carries out marketing activities by, among others, providing customized services as its marketing focus; building brand awareness on the Company and introduction to its vision and mission; and enhancing its capabilities to spur infrastructure project financing. In realizing this, the Company participates in international scale infrastructure exhibitions or conferences, becomes a speaker at infrastructure seminars, both on a national and global scale, and joins relevant industry associations.



Di samping mengembangkan nama dan jaringan di pasar domestik, Perseroan juga mengembangkan dialog dengan pemain-pemain infrastruktur skala internasional dan kreditur-kreditur internasional. Hal ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman dan juga mencari perkembangan terbaru pada industri infrastruktur di negara-negara lain. Selain itu, dialog yang rutin juga diharapkan dapat menarik minat swasta asing dan lembaga pembiayaan asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Selain membina hubungan dengan sektor swasta dan BUMN, Perseroan juga melakukan dialog secara reguler dengan instansi pemerintahan, seperti kementerian terkait, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menjaga hubungan baik, Perseroan dapat melakukan dialog dengan pihak pemerintah apabila memiliki masukan-masukan untuk membangun industri infrastruktur. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemerintah juga memberikan nilai tambah bagi Perseroan untuk mengetahui perkembangan terkini dari sisi regulator, maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Sesuai dengan peran Perseroan sebagai katalisator pembiayaan proyek infrastruktur, Perseroan dapat mengkombinasikan produk *fund-based* dan *non-fund based* kepada nasabah Perseroan, yang dapat meningkatkan minat lembaga-lembaga pembiayaan lainnya untuk dapat berpartisipasi membiayai proyek tersebut.

Pada akhirnya, mengingat pelanggan Perseroan adalah korporat, maka strategi pemasaran Perseroan bertumpu pada kinerja yang baik, solusi yang tepat dan bermanfaat, jaringan kerjasama yang luas, dan pengakuan pasar terhadap kemampuan Perseroan dalam memberikan solusi tersebut.

Pangsa Pasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu visi utama Presiden terpilih, yaitu infrastruktur yang menyambungkan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan. Rancangan Teknokratik (RT) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 lebih jauh menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata

In addition to developing its brand and networks in the domestic market, the Company conducts dialogues with international-scale infrastructure players and creditors. This is intended to share experiences and understand the latest developments in the infrastructure industry in other countries. Through routine dialogue, the Company also expects to attract the interest of foreign private corporations and foreign financial institutions to participate in the development of infrastructure projects in Indonesia.

Aside from fostering relations with the private sector and SOEs, the Company conducts regular dialogues with the government, including the relevant ministries, the Investment Coordinating Board (BKPM), and the Financial Services Authority. By maintaining good relations, the Company can have a discussion with the government to deliver its opinion to develop the infrastructure industry. In addition, good relationships with the government can provide added value for the Company to keep abreast of the latest development in regulations as well as the overall economic conditions.

In accordance with the Company's role as a catalyst for infrastructure project financing, the Company can combine fund-based and non-fund based products for its customers, which may attract the interest of other financing institutions better in order to participate in project financing.

Given the fact that the Company's customers are mainly of the corporate sector, the Company's marketing strategy ultimately rests on positive performance, appropriate and beneficial solutions, extensive cooperation networks, and market recognition of the Company's ability to provide these solutions.

Market Share

Infrastructure development is one of the primary visions of the President-elect, namely infrastructure that connects people's production zones, small industrial zones, Special Economic Zones, tourism zones, agriculture zones (farming areas), plantation zones, and fishponds. The Technocratic Draft of National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 further targets economic growth at an average of 5.4 - 6.0 per cent through the implementation of the 38 Major Projects. These projects

5,4 – 6,0 persen melalui pelaksanaan 38 *Major Project*, yang disusun untuk memperkuat fokus Pemerintah dan pengendalian proyek (*delivery mechanism*). *Major Project* memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, masyarakat, dan swasta. Dari 38 *Major Project* yang tercantum dalam RT RPJMN, 23 diantaranya termasuk didalam sektor infrastruktur ekonomi dan sosial yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha yang merupakan mandat dari Perseroan. Dalam jangka menengah, Perseroan menargetkan bahwa 23 *Major Project* dapat menjadi potensi pasar pembiayaan proyek yang dapat didukung oleh Perseroan.

Terkait dengan rencana pembiayaan *Major Project*, di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah menempuh pendanaan infrastruktur dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN melalui dengan skema KPBU. Sebagai contoh, untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota, Pemerintah mengalokasikan bahwa Rp 89,4 triliun (19,2%) akan didanai oleh APBN, Rp 253,4 triliun (54,4%) didanai oleh skema KPBU, dan Rp 123,2 triliun (26,4%) lainnya akan didanai oleh badan usaha swasta termasuk BUMN. Beberapa *Major Project* tersebut telah dimulai dan sedang berjalan, dan Perseroan telah secara aktif terlibat dalam pembiayaan ataupun penyediaan jasa konsultasi keuangan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dapat terus berpartisipasi dalam proyek-proyek utama yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Dengan rencana pembangunan yang lengkap dan merata, serta banyaknya dan jelasnya alokasi pembiayaan untuk proyek infrastruktur, maka Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha dalam bidang pembiayaan infrastruktur akan lebih baik lagi dalam jangka menengah kedepan.

have been designed to strengthen the government's focus and project control (delivery mechanism). The *Major Projects* contain integrated strategic projects which involve various Ministries/Government Institutions, Regional Governments, SOEs, the public, and the private sector. Of the 38 *Major Projects* listed in the Technocratic Draft of RPJMN, 23 of them are included in the economic and social infrastructure sector which will be carried out in cooperation with numerous business entities, which is the Company's mandate. In the medium-term, the Company targets these 23 *Major Projects* to become a potential market of project financing that can be supported by the Company.

In regard to the *Major Project* financing plan, the Government pursues infrastructure funding by empowering the role of the private sector and SOEs through the PPP scheme due to the limited fiscal space. For example, to finance the relocation of the Capital City, the Indonesian Government has made an allocation of cost in which Rp89.4 trillion (19.2%) shall be funded by the State Budget (APBN), Rp253.4 trillion (54.4%) shall be funded by the PPP scheme, and the remaining Rp123.2 trillion (26.4%) shall be funded by private enterprises and SOEs. Some of the *Major Projects* have begun their development and the Company has been actively involved in financing or providing financial consultancy services for these projects. Therefore, the Company faces a huge potential to continue to participate in the primary projects planned by the government.

With the complete and equitable development plan, as well as the clear amount of allocated funds for infrastructure projects, the Company believes that the business prospects in the field of infrastructure financing will be even better in the medium-term.

No.	Major Project
Pemindahan Ibu Kota Negara dan Pengembangan Wilayah / Relocation of Capital City and Development of the Region	
1	Pemindahan Ibukota Negara / Relocation of Capital City
2	Integrasi Pembangunan Wilayah Batam-Bintan / Integration of Batam-Bintan Region Development
3	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Kota Metropolitan / Development of Mass Public Transportation in 6 Metropolitan Cities
4	Pengembangan Wilayah Metropolitan / Development of Metropolitan Region
5	Pengembangan Kota Baru / Development of New Cities
6	Pengembangan Jalan Trans/Lingkar Pulau Terluar/Tertinggal / Development of Trans Road/Ring Road on Frontier Island



No.	Major Project
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Memperkuat Sumber Pertumbuhan / Continuing Infrastructure Development and Strengthening Growth Source	
7	Penyelesaian Kawasan Pariwisata (antara lain: Danau Toba, Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi) / Completion of Tourism Zone (including Lake Toba, Lombok, Labuan Bajo, and Wakatobi)
8	Layanan Internet Cepat dan Transformasi Digital / Fast Internet Service and Digital Transformation
9	Pembangunan Tol Trans-Sumatera / Construction of Trans-Sumatera Toll Road
10	Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa Terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak / Construction of North Java Sea Dam, Integrated with Semarang-Demak Toll Road
11	Pembangunan KA Cepat (Jakarta-Bandung-Surabaya) / Development of High-Speed Railway (Jakarta-Bandung-Surabaya)
12	Pembangunan KA Angkutan Barang (KA Sulawesi, Makassar-Pare Pare) / Construction of Freight Railway (Sulawesi Train, Makassar-Pare Pare)
13	Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Terpadu / Development of 7 Integrated Seaport Networks
14	Akselerasi Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Nabati Berbasis Komunitas / Acceleration of Renewable Energy and Community-Based Biofuels
15	Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi / Development of Multipurpose Reservoirs and Modernization of Irrigation System
16	Penyelesaian Proyek Listrik 35.000 MW / Completion of 35,000 MW Electricity Project
17	Proyek Revitalisasi Kilang Minyak / Oil Refinery Revitalization Project
Perkuatan Sumber Daya Manusia / Strengthening Human Resources	
18	Perluasan Distribusi Air Bersih di Seluruh Wilayah / Expansion of Clean Water Distribution Across All Regions
19	Pembangunan 10 juta Sambungan Rumah / Construction of 10 million Houses
20	Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman / Improvement of Access to Feasible and Safe Sanitation
21	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu / Construction of Medical B3 Waste Treatment Facilities and Integrated B3 Waste Treatment Facilities
22	Penyediaan 100.000 unit Rumah Layak / Provision of 100,000 Livable Houses
23	Pengembangan Infrastruktur Gas Kota / Development of City Gas Infrastructure

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen Tahun 2019 untuk Tahun Buku 2018

Berdasarkan Keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2019, disepakati bahwa IIF tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen, atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kebijakan Dividen Tahun 2018 untuk Tahun Buku 2017

Berdasarkan Keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2018, disepakati bahwa IIF tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen, atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

DIVIDEND POLICY

Dividend Policy in 2019 for 2018 Fiscal Year

Based on the AGMS Resolution of 2018 Fiscal Year convened on July 30, 2019, it was agreed that IIF did not allocate reserve funds, dividends, or other purposes for the fiscal year ended on December 31, 2018.

Dividend Policy in 2018 for 2017 Fiscal Year

Based on the AGMS Resolution of 2017 Fiscal Year convened on March 22, 2018, it was agreed that IIF did not allocate reserve funds, dividends, or other purposes for the fiscal year ended on December 31, 2017.



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2019, IIF tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise kurang relevan untuk diungkapkan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2019, IIF memperoleh dana hasil penawaran umum melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastruktural Finance Tahap I Tahun 2019. Berikut ini adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per 31 Desember 2019.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Per 31 Desember 2019

(dalam Miliar Rupiah / in Billions of Rupiah)

Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Realization of Proceeds from Public Offering			Realisasi Penggunaan Dana / Use of Proceeds			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Proceeds from Public Offering		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum / Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum / Cost of Public Offering	Hasil Realisasi Bersih / Net Proceeds	Pembayaran Kembali atas Sebagian Hutang / Repayment of Partial Debt	Pembiayaan Proyek Infrastruktur / Financing for Infrastructure Projects	Total Realisasi Penggunaan Dana / Total Use of Proceeds	Pembayaran Kembali atas Sebagian Hutang / Repayment of Partial Debt	Pembiayaan Proyek Infrastruktur / Financing for Infrastructure Projects	Total Realisasi Penggunaan Dana / Total Use of Proceeds
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang / Public Offering of Debt Securities	13 Desember 2019 / December 13, 2019	1.500,00	6,57	1.493,43	-	213,79	213,79	1.000,00	279,63	1.279,63

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2019, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of the end of 2018, IIF has not established any employees and/or management share ownership program (ESOP/MSOP). Thus, any information regarding the number of ESOP/MSOP shares and its realizations, time period, eligible employee and/or management requirements, and exercise prices are not relevant to be disclosed.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2019, IIF obtained proceeds from public offering through the issuance of Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2019. The following table describes the use of proceeds from public offering as of December 31, 2019.

Use of Proceeds from Public Offering as of December 31, 2019

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

There are no material information and facts subsequent to balance sheet date, aside from those disclosed in the audited financial statements for the year ending on December 31, 2019.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tahun 2019, tidak ditemukan adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI/AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha, IIF memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi. Rincian lengkap mengenai sifat dan transaksi berelasi dapat dilihat pada Catatan 33 Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan ini.

Manajemen IIF berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

TRANSAKSI DERIVATIF DAN LINDUNG NILAI

Sepanjang tahun 2019, IIF melakukan transaksi derivatif *swap* suku bunga dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima dari *International Finance Corporation*, serta *swap* mata uang untuk mengatasi ketidaksesuaian sementara di dalam paparan mata uang di luar *risk appetite* Perseroan.

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2019, Perseroan telah menerapkan beberapa standar revisi dan interpretasi yang relevan untuk Perseroan yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019, yaitu:

- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka;
- ISAK No. 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;
- Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program;

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

In 2019, the Company did not have any material transactions containing conflict of interest that have significant impact on its financial statements.

TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In carrying out business activities, IIF enters into significant business transactions with affiliated parties. Full details on the nature and transactions with affiliated parties can be seen in Note 33 of the Financial Statements in this Annual Report.

The management of IIF believes that all transactions with affiliated parties are carried out at the normal price and terms as those with third parties.

DERIVATIVE TRANSACTION AND HEDGING

During 2019, IIF conducted interest rate swap derivative transactions in order to protect the Company from the risk of fluctuations in cash flows arising from interest rates on loans received from the International Finance Corporation as well as currency swap derivative to address temporary mismatches in currency exposure beyond risk appetite.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT

In 2019, there were no changes in laws and regulations with significant impact on the Company.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Company implemented several revised standards and interpretations in 2019 which were relevant to its operations and took effect on January 1, 2019, namely:

- Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) No. 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration
- ISAK No. 34: Uncertainty over Income Tax Treatments;
- Amendments to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 24: Employee Benefits regarding Amendment, Curtailment, or Settlement Plan;

- Penyesuaian 2018 PSAK No. 26: Biaya Pinjaman;
- Amandemen 2018 PSAK No. 46: Pajak Penghasilan.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir

Risiko pembiayaan (termasuk risiko kredit) merupakan risiko utama yang dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan.

Assessment manajemen atas hal-hal tersebut

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Perseroan dengan debiturnya atau risiko yang dihadapi akibat ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan yang dilakukan langsung (dalam hal penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah dalam rangka perluasan usaha nasabah. Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pembiayaan, meliputi:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi dan peran aktif Komite Investasi terkait sesuai konsep *four eyes principles* dalam melakukan evaluasi dan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.
2. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan kredit dan investasi sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.
3. Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan Perseroan mengukur tingkat risiko dan menganalisis kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten baik untuk modalitas pembiayaan korporasi (*corporate financing*) maupun modalitas pembiayaan proyek (*project financing*).

- Annual Improvement 2018 of PSAK No. 26: Loan Costs;
- Amendments of PSAK No.46: Income Tax

There was no significant impact from the adoption of these revised standard and interpretations on the Company's Financial Statements of 2019 fiscal year.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Issues with Potential significant influence to the Company's business continuity in the last fiscal year

Financing risk (including credit risk) is the main risk that can occur in relation to the financing business activities carried out by the Company.

Assessment of the Management

Financing risk is the risk arising from the failure of a counterparty to fulfill their obligations based on a financing agreement between the Company and the debtor, or the risk faced by the Company due to its inability to obtain reasonable investment returns from direct financing (in the case of equity investment) to the customer in order to expand the customer's business. The Company carries out a series of measures to control financing risk, including:

1. The implementation of prudent principle in providing financing and investment and the active role of the Investment Committee in accordance with the four eyes principle in evaluating every financing and investment proposal; hence, a balanced, comprehensive, and independent view of potential risks can be obtained.
2. Improvement of risk management procedures and systems in order to regulate the workflow of credit management and investment processes, so as to create an effective and efficient credit process.
3. Implementation of a risk rating system that allows the Company to measure risk level and analyze the feasibility of debtors and/or infrastructure projects through consistent measurement tools for both corporate financing and project financing modalities.

4. Di samping itu, Perseroan juga memantau secara periodik portofolio pembiayaannya untuk memastikan kualitas kredit yang baik, termasuk di antaranya memantau sejumlah *early warning indicator* untuk mendeteksi perubahan atas portofolio dan *counterparty*. Jika terjadi penurunan kualitas kredit, maka pemantauan lebih intensif dilakukan oleh unit khusus untuk melakukan tindakan *recovery* yang dianggap perlu. Untuk itu, Perseroan telah membentuk unit kerja yang menangani kredit yang menunjukkan tanda-tanda awal bermasalah atau yang akan atau sudah bermasalah walaupun belum terdapat gagal bayar (Unit SAM atau *Special Asset Management*) di bawah Direktorat Kredit yang terpisah dan independen dari penanganan kredit lancar. Tugas utama unit kerja ini difokuskan untuk mengatur strategi dalam mencari solusi yang tepat agar kredit bermasalah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang dapat terjadi dari kegagalan pembayaran. Unit kerja ini bertindak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Penerapan berbagai jaminan, ketentuan, syarat dan pra-syarat serta janji-janji (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh peminjam yang dievaluasi secara berkala oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk mengasuransikan aset-aset (*fixed assets*) yang dijaminakan kepada Perseroan.
6. Pengembangan *database* dalam rangka pengukuran risiko kredit dan investasi berdasarkan *best practice methodology*.
7. Melakukan pemantauan terhadap portofolio pembiayaan dengan *portfolio monitoring* dan *stress testing* secara berkala, serta valuasi internal untuk investasi perusahaan yang dilakukan dari waktu ke waktu apabila nilai pasar tidak tersedia.
4. Regular monitoring of financing portfolio to ensure good credit quality, including observation on a number of early warning indicators to detect changes in the portfolio and counterparties. If a decline in credit quality occurs, the Company will carry out a more intensive monitoring activity through a special unit in order to take recovery actions if deemed necessary. For this reason, the Company has established a work unit named Special Asset Management or SAM Unit under the Credit Directorate and is independent of the current credit management of the Company. This work unit shall handle loans which show initial signs of problems or loans which will be or have been problematic even though default has not taken place. The main focus of this work unit is to manage the strategies to provide proper solutions for the underperforming loans to be settled in a proper and timely manner so that the risk of loss arising from default can be minimized. This work unit acts according to the established procedures.
5. Implementation of a range of guarantees, requirements and pre-conditions, and covenants that must be fulfilled by borrowers. The guarantees, requirements and pre-conditions, and covenants are regularly evaluated by the Company, including but not limited to provisions on insuring of fixed assets served as a collateral to the Company.
6. Development of database in order to measure credit and investment risk based on the best practice methodology.
7. Periodic monitoring of financing portfolio through stress testing, as well as internal valuations for Company's investments carried out from time to time when market values are not available.





Sebagai warga korporasi yang baik, IIF berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sehingga berdampak positif bagi Perseroan dan pemangku kepentingan.

As a good corporate citizen, IIF is committed to consistently implementing GCG principles to have positive impacts on the Company and its stakeholders.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dengan mengimplementasikan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan (GCG) berdasarkan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik, IIF tidak hanya menjadikan GCG sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan semata, tetapi juga sebagai perwujudan dalam menciptakan budaya korporasi yang sehat, kondusif, jujur, dan transparan

By implementing the best practices of Good Corporate Governance (GCG) in reference to the best GCG standards, IIF regards GCG not only as a form of compliance with the laws and regulations but also as an embodiment in creating a healthy, conducive, honest, and transparent corporate culture.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah elemen penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan serta selalu berada dalam mekanisme yang benar dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai katalisator pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, IIF berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG dengan mengacu pada *best-practice* secara konsisten dan menyeluruh di setiap aktivitas pengelolaan bisnis. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kelancaran jalannya kegiatan bisnis di tengah perkembangan industri yang semakin kompetitif. Selain itu, praktik GCG juga mampu membantu Perseroan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis, IIF berlandaskan pada berbagai peraturan, antara lain:

Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Good Corporate Governance (GCG) is a vital element that serves as the guideline for the Company to carry out its business activities in accordance with its goals, vision, and mission of and to always operate under the right and fair mechanism according to the applicable laws and regulations.

As a catalyst for infrastructure financing development in Indonesia, IIF is committed to implementing GCG by referring to best practices on a consistent and comprehensive basis in every business management activity. This policy is carried out to maintain the continuity and smoothness of business activities amid the increasingly competitive industrial development. In addition, GCG practices are also able to assist the Company in creating added value for shareholders and stakeholders.

LEGAL BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

IIF refers to various regulations in implementing GCG in every business line, among others:

Laws of the Republic of Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure;
- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.



Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Peraturan Presiden, Bapepam-LK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-40/PM/2003 Peraturan Bapepam-LK No. VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;

Ministerial Regulation

Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Companies.

Ministerial Decree

Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 on the Provision of Business Licenses for Infrastructure Financing Companies to PT Indonesia Infrastructure Finance.

Presidential Regulations, Bapepam-LK Regulations, and Financial Services Authority (OJK) Regulations

- Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions;
- Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 on the Form, Structure, and Submission of Quarterly Financial Statements and Semiannual Business Activity Reports of Infrastructure Financing Companies;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003 dated September 30, 2003, Regulation No. X.K.2 on the Obligation to Submit Periodical Financial Statements;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-40/PM/2003 Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.11 on Responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 dated November 25, 2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.1 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Certain Transactions;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 dated November 25, 2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 dated December 30, 2010 on the Amendment to Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000 on the Amendment to the Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.7 on Guidelines on the Presentation of Financial Statements;

- Peraturan OJK (POJK) No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang Batas Waktunya Jatuh pada Hari Libur;
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- OJK Regulation (POJK) No. 3/POJK.05/2013 on Monthly Report of Non-Bank Financial Service Institutions;
- POJK No. 29/POJK.05/2014 on Organization of Financing Businesses;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;
- POJK No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers of Public Companies;
- POJK No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 31/POJK.04/2015 on Transparency of Information on Material Facts by Issuers or Public Companies;
- POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Performance of the Works of Audit Committees;
- POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters;
- POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
- SEOJK No. 6/SEOJK.04/2014 on Procedures for the Submission of Electronic Reports by Issuers or Public Companies;
- SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 on the Obligation to Submit Reports to the Financial Services Authority and Public Announcements for Capital Market Participants of which Deadlines Fall on Public Holidays;
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 on Good Corporate Governance Implementation Reporting for Financing Companies;
- SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai warga korporasi yang baik, IIF berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sehingga berdampak positif bagi Perseroan dan pemangku kepentingan. Dalam menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan sikap dan perilaku bisnis yang sejalan dengan budaya Perseroan, yaitu *Collaboration, Excellence and Commitment to Infrastructure Business*

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

As a good corporate citizen, IIF is committed to consistently implementing GCG principles to have positive impacts on the Company and its stakeholders. In creating a good corporate governance as a culture, the Company needs to conduct business behavior that is in line with its values, namely *Collaboration, Excellence, and Commitment to Infrastructure Business*.



Implementasi dan praktik tata kelola di IIF mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Transparansi

IIF memberikan informasi secara transparan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. IIF menerapkan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di Perseroan sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat *job descriptions* yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, pelaporan dan hasil kinerja yang diraih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tanggung Jawab

Kesesuaian rencana, strategi dan hasil yang dicapai IIF berada dalam garis kebijakan manajemen dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaporan terkait kegiatan usaha Perseroan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini senantiasa dilakukan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan memberi dampak positif bagi citra Perseroan.

4. Independensi

Pengelolaan Perseroan dilakukan secara mandiri, pengurus Perseroan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Perseroan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola Perseroan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun peraturan Perseroan.

5. Kewajaran

Kesetaraan dan perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IIF senantiasa membuat sistem yang solid untuk melaksanakan dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas

Governance implementation and practice in IIF refer to the 5 (five) GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, with details as follows:

1. Transparency

IIF transparently provides information related to the Company's business performance and activities to the shareholders and all stakeholders. IIF exercises a transparent information system in its decision-making process and discloses information deemed significant and relevant to the Company's activities.

2. Accountability

The clarity of function, structure, system and responsibility in the Company in order to effectively and efficiently manage its business. The Management sets out clear job descriptions for all employees and affirms the basic functions of each division. Thus, the reporting process and performance result can be made accountable.

3. Responsibility

The conformity of plans, strategies and results attained by IIF is always set within the Management's policy and implement based on the Company's Articles of Association by taking into the prevailing laws and regulations to further ensure the accountability of its report. This principle is constantly upheld in order to provide added value to the shareholders and create a positive image for the Company.

4. Independency

The Company is managed independently in which the management has their own duties and responsibilities and carries them out without any pressure from outside parties that is not in accordance with the Company's operations systems. This principle implicitly states that the Company's management must always acknowledge the rights of stakeholders as declared in the laws and Company regulations.

5. Fairness

Equality and fair treatment to meet the rights and obligations to all stakeholders that arise from agreements and prevailing laws and regulations. IIF always ensures a solid system to conduct and create quality products and services to meet clients' expectations. The Company gives fair treatment and

seperti yang diharapkan. IIF menjalankan kinerja secara *fair* serta menaati seluruh peraturan yang ada guna melindungi pemangku kepentingan dalam keberlangsungan bisnis Perseroan. IIF berkomitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola Perusahaan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUPT dan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal, dan Komite Audit. Penyusunan struktur ini juga memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *check and balance* dapat berjalan dengan efektif.

Berikut ini adalah ketentuan yang mendasari struktur tata kelola IIF:

- RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan menurut Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi saran kepada Direksi.
- Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris sendiri. Komite-Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

complies with all applicable regulations to protect stakeholders within its responsibility to sustain its business. IIF commits to give fair treatment to all employees without prejudice to their ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that are not relevant to their performance.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The Company's corporate governance structure is based on the provisions of Article 1 of the Company Law and consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other supporting organs such as the Corporate Secretary, Internal Control Unit, and Audit Committee. This arrangement also takes into account the mapping of functions or business activities based on business ethics standards and ensures effective check and balance.

The following are the provisions underlying IIF's governance structure:

- The GMS is an organ of the Company with authorities beyond that of the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set by the prevailing Laws and/or the Articles of Association.
- The Board of Commissioners is a Company organ with general and/or specific supervisory duties based on the Articles of Association that is also tasked to advise the Board of Directors.
- The Board of Directors is an organ of the Company that is charged with the management of the Company for the benefit of the Company according to its established aims and purposes. It also represents the Company, including in courts of law, in accordance with the Articles of Association.
- The Company's governance organs implement their functions pursuant to prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and other provisions on the principle that each organ will carry out its duties, functions, and responsibilities independently and for the benefit of the Company. The GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other's duties, responsibilities, and authorities, pursuant to prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
- In conducting its supervisory duty, the Board of Commissioners may establish a Committee of which one or more members are members of the Board of Commissioners. The Committees report directly to the Board of Commissioners.



- Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi GCG dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan RUPS dibagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan sejak berakhirnya tahun buku. Sementara itu, RUPSLB dapat digelar sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan Perseroan.

Kewenangan Pemegang Saham dalam RUPS

Kewenangan RUPS antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan; dan
- Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT, Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan tentang Perseroan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan melalui RUPS. Berdasarkan kewenangan RUPS yang memiliki peran dalam menyetujui laporan tanggung jawab pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait hasil rencana-rencana Perseroan, maka Pemegang Saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan turut serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, IIF telah menyelenggarakan RUPST sebanyak 1 (satu) kali dan RUPSLB sebanyak 1 (satu) kali. Untuk RUPST diselenggarakan di Kantor IIF, Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019 dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham Perseroan. Sedangkan RUPSLB diselenggarakan di Kantor IIF, Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham.

- In conducting its management duty, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit Unit, as well as other units that carry out the management functions of the Company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest GCG organ with authorities beyond that of the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits set by prevailing laws and the Company's Articles of Association.

There are two types of GMS, namely the Annual GMS (AGMS) and the Extraordinary GMS (EGMS). The AGMS must be convened within no later than six months as of the end of a fiscal year. Meanwhile, the EGMS can be convened at any time as needed in the interest of the Company.

Authorities of Shareholders in GMS

The authorities of the GMS include:

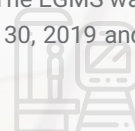
- To appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To approve the Company's Financial Statements;
- To determine the remuneration amount for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rights and Responsibilities of Shareholders in GMS

As stated in Article 75 paragraph (2) of the UUPT, Shareholders have the right to obtain information about the Company from the Board of Commissioners and the Board of Directors at the GMS. Due to its authority to approve the accountability reports of the Company's management as well as to decide on matters related to the Company's plans, the Company's Shareholders are obliged to attend the GMS and participate in voting.

GMS Implementation in 2019

In 2019, IIF convened 1 (one) AGMS and 1 (one) EGMS. The AGMS was convened at the IIF Office, Jakarta, on March 21, 2019 and was attended by 100% of the Company's Shareholders. The EGMS was convened at the IIF Office, Jakarta, on July 30, 2019 and was attended by 100% Shareholders.



Hasil Keputusan RUPS di Tahun 2019
GMS Resolutions in 2019

Agenda	Hasil RUPS	GMS Resolutions
RUPST / AGMS		
Agenda 1	a) Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan b) Menyetujui Laporan Tahunan 2018 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan.	a) Approved the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2018; and b) Approved the 2018 Annual Report prepared by the Board of Directors according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda 2	Menyetujui untuk tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Approved to not allocate any amount for reserved funds, dividend or other purposes for the fiscal year ended on December 31, 2018.
Agenda 3	a) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Dewan Komisaris tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan; b) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial anggota Direksi saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan; dan c) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial kepada Bapak Arisudono Soerono sebagai anggota Direksi Perusahaan dari 1 Januari 2018 hingga 30 Oktober 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan	a) Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from its supervisory responsibilities for the fiscal year ended on December 31, 2018, to the extent that such actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report; b) Approved the release and discharge of the current members of the Board of Directors from its managerial responsibilities for the Fiscal Year ended on December 31, 2018, to the extent that such actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report; and c) Approved the release and discharge of the managerial responsibility from Mr. Arisudono Soerono as a member of the Board of Directors of the Company from January 1, to October 30, 2018, to the extent that all actions of the Board of Directors are fully reflected in the Annual Report.
Agenda 4	a) Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, yaitu: Bapak Mohammad Chatib Basri, Bapak Muhammad Al-Arif, Bapak Bhimantara Widyajala, Bapak Richard Lyon Ranken, Bapak Robert Olivier Dolk, Bapak Rajeev Veeravalli Kannan sebagai Komisaris Perusahaan karena berakhirnya masa kerja, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan; b) Menyetujui pengangkatan Bapak Doktor Andreas Zeisler menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel sebagai Komisaris Perusahaan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan; dan c) Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Indrawati Darmawan dan Ibu Hilda Savitri sebagai anggota Direksi Perusahaan untuk masa jabatan sampai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang akan dilaksanakan pada atau sebelum 31 Juli 2019.	a) Approved the reappointment of a member of the Board of Commissioners, namely: Mr. Mohammad Chatib Basri, Mr. Muhammad Al-Arif, Mr. Bhimantara Widyajala, Mr. Richard Lyon Ranken, Mr. Robert Olivier Dolk, Mr. Rajeev Veeravalli Kannan, as Commissioners of the Company since their tenure ended in accordance with Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association; b) Approved the appointment of Mr. Dr. Andreas Zeisler to replace Mr. Hans Juergen Hertel as Commissioner of the Company in accordance with Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association of the Company; and c) Approved the reappointment of Ms. Indrawati Darmawan and Ms. Hilda Savitri as members of the Board of Directors of the Company for tenure until Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be convened on or before July 31, 2019.
Agenda 5	Tidak menyetujui Agenda Kelima mengenai penyesuaian pendapatan tahunan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;	Did not approve the Fifth Agenda on adjustment to annual income for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
Agenda 6	Tidak menyetujui Agenda Keenam mengenai penunjukan kembali Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Did not approve the Sixth Agenda on the reappointment of Independent Auditor for fiscal year ended on December 31, 2019.
RUPSLB / EGMS		
Agenda 1	Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019	Approved the 2019 Corporate Budget and Work Plan.
Agenda 2	a) Menyetujui penunjukan kembali anggota Direksi Perusahaan; b) Menyetujui tidak melakukan penyesuaian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun 2019	a) Approved the reappointment of members of the Board of Directors of the Company; b) The meeting approved to not adjust the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019.



Agenda	Hasil RUPS	GMS Resolutions
Agenda 3	Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) sebagai auditor independen Perusahaan dalam melakukan audit umum untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Approved to appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) as independent auditor in conducting general audit for financial statements ending on December 31, 2019.
Agenda 4	Agenda keempat merupakan laporan kepada Pemegang Saham, sehingga keputusan Rapat tidak diperlukan.	The fourth agenda is a report to the Shareholders; hence, no resolution was needed.

Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2019 telah direalisasikan pada tahun 2019.

All GMS resolutions in 2019 were realized in 2019.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2018

Pada tahun 2018, IIF hanya menyelenggarakan RUPST sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 di Kantor Pusat IIF. Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 100% saham Perseroan.

GMS Implementation in 2018

IIF convened 1 (one) AGMS in 2018 on March 22, 2018 at IIF Head Office. This meeting was attended by Shareholders representing 100% shares of the Company.

Hasil Keputusan RUPST di Tahun 2018

AGMS Resolutions in 2018

Agenda	Hasil RUPST	AGMS Resolutions
Agenda 1	a. Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. b. Menyetujui Laporan Tahunan 2017 Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 UUPT dan Pasal 17 Anggaran Dasar.	a. Approved the Company's Financial Statements for fiscal year ended on December 31, 2017. b. Approved the Company's 2017 Annual Report prepared by the Board of Directors according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda 2	RUPS menyetujui tidak mengalokasikan dana untuk keperluan dana cadangan, dividen dan kepentingan lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	The GMS approved not to allocate any amount for reserved funds, dividend, and other purposes for the fiscal year ended on December 31, 2017.
Agenda 3	a. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat dari tugas pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan. b. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang saat ini menjabat dari tugas manajerial untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.	a. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from its supervisory responsibilities for the fiscal year ended on December 31, 2017 to the extent that such actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report. b. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Directors from its managerial responsibilities for the fiscal year ended on December 31, 2017 to the extent that such actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report.
Agenda 4	Menyetujui rekomendasi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali Bapak Robert O. Dolk sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mewakili ADB.	Approved the re-appointment of Mr. Robert O. Dolk as a member of the Board of Commissioners representing the ADB.
Agenda 5	Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2018.	Approved the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2018 fiscal year.
Agenda 6	Menyetujui penunjukan auditor independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Approved the appointment of the Company's independent auditor for the fiscal year ending on December 31, 2018.

Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2018 telah direalisasikan pada tahun 2018.

All resolutions of the 2018 AGMS were implemented in 2018.

DEWAN KOMISARIS

Dalam struktur tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan tujuan Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2019, komposisi Dewan Komisaris IIF adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
V. Sonny Loho	Plt. Presiden Komisaris *) & Komisaris Independen/ Interim President Commissioner *) & Independent Commissioner	Akta Notaris No. 16 tanggal 26 Juni 2018 / Notarial Deed No. 16 dated June 26, 2018	Penutupan RUPST tahun 2020 / The closing of AGMS 2020
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Notaris No. 07 tanggal 25 Januari 2018 / Notarial Deed No. 07 dated January 25, 2018	Penutupan RUPST tahun 2020 / The closing of AGMS 2020
Bhimantara Widyajala	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No. 07 tanggal 28 Juli 2017 / Notarial Deed No. 07 dated July 28, 2017	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Muhamad Al-Arif	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No. 08 tanggal 13 Februari 2018 / Notarial Deed No. 08 dated February 13, 2018	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Andreas Zeisler	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 / Notarial Deed No. 31 dated March 21, 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Lodewijk Govaerts	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No.10 tanggal 26 Juli 2019 / Notarial Deed No. 10 dated July 26, 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Rajeev Veeravalli Kannan	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No.03 tanggal 7 Maret 2012 / Notarial Deed No. 03 dated March 7, 2012	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Richard Lyon Ranken	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No.01 tanggal 2 Maret 2016 / Notarial Deed No. 01 dated March 2, 2016	Penutupan RUPST tahun 2022 / The closing of AGMS 2022
Hans Juergen Hertel	Komisaris / Commissioner	Akta No. 69 tanggal 12 Juli 2010 / Deed No. 69 dated July 12, 2010	12 Juli 2010 – 21 Maret 2019 / July 12, 2010 – March 21, 2019
Robert O. Dolk	Komisaris / Commissioner	Akta Notaris No.09 tanggal 15 Agustus 2012 / Notarial Deed No. 09 dated August 15, 2012	15 Agustus 2012 – 26 Juli 2019 / August 15, 2012 – July 26, 2019
M. Chatib Basri	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner	Akta Notaris No.19 tanggal 29 Desember 2014 / Notarial Deed No. 19 dated December 29, 2014	15 Desember 2014 – 9 Desember 2019 / December 15, 2014 – December 9, 2019

*) Mulai Menjabat Sejak 9 Desember 2019

BOARD OF COMMISSIONERS

In corporate governance structure, the Board of Commissioners are responsible for performing supervisory role on the implementation of policy and management by the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners are obliged to provide input and recommendations to the Board of Directors by taking into account the interests and objectives of the Company.

Board of Commissioners Composition

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2019 is as follows:

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners carries out its role and duties in the Company by referring to the Operations Manual and the Company's Articles of Association that cover, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, meeting requirements, and relationships with governance organs within the Company. The Company's Articles of Association are prepared, drawn up, and approved by the Shareholders at the establishment of IIF.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris IIF antara lain meliputi:

- Melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat dalam mengelola organisasi, bisnis, dan operasional untuk kepentingan Pemegang Saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan;
- Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perseroan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perseroan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan hak para pemangku kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional guna menghindari benturan kepentingan atau intervensi dari pihak lain. Selain itu, masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan satu sama lain atau dengan anggota Direksi hingga derajat ketiga kekerabatan, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan.

Kegiatan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. 13 (tiga belas) kali rapat Dewan Komisaris di kantor Perseroan;
- b. 8 (delapan) kali sesi telekonferensi;
- c. 2 (dua) hari kunjungan kerja ke proyek yang telah dibiayai Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Komisaris IIF mengacu pada kebijakan berikut ini:

- a. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat terhadap Perjanjian Pemegang Saham Pasal III tentang Dewan Komisaris;
- b. Akta No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 Pasal 15 tentang Rapat Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The main duties of the Board of Commissioners are as follows:

- Carry out supervisory and advisory functions in managing the organization, business, and operations for the interests of Shareholders, in line with the Company's vision, mission and objectives;
- Supervise the Board of Directors' policies, including the achievement of the Company's targets and compliance with prevailing laws and regulations;
- Periodically evaluate and provide advice on risk management and internal control systems, and provide approval for required changes or corrective actions that must be taken regarding the aforementioned systems;
- Carry out its duties for the interest of the Company and related businesses, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

Independency of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently and professionally to avoid conflicts of interest or intervention from other parties. In addition, each member of the Board of Commissioners has no relationship with each other or with members of the Board of Directors up to the third degree of kinship, either vertically or horizontally or because of marriage.

Board of Commissioners Activities

The Board of Commissioners carried out several activities throughout 2019, among others:

- a. 13 (thirteen) Board of Commissioners meetings in the Company's office;
- b. 8 (eight) teleconferences;
- c. 2 (two) days working site visit to projects funded by the Company.

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners of IIF holds meetings in accordance with these policies:

- a. The Fourth Amendment and Restatement to the Shareholders Agreement Article III on the Board of Commissioners;
- b. Deed No. 34 dated January 15, 2010, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-21503.AH.01.01. of 2010 dated April 28, 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplement No. 5123 Article 15 on Board of Commissioners' Meetings;

c. Pasal 31 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Article 31 of POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

The Board of Commissioners held 13 (thirteen) internal meetings throughout 2019 with attendance rate as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
V. Sonny Loho	Komisaris Independen / Independent Commissioner	13	13	100%
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen / Independent Commissioner	13	12	92%
Bhimantara Widyajala	Komisaris / Commissioner	13	13	100%
Muhamad Al-Arif	Komisaris / Commissioner	13	12	92%
Andreas Zeisler	Komisaris / Commissioner	11	10	91%
Lodewijk Govaerts	Komisaris / Commissioner	7	7	100%
Rajeev Veeravalli Kannan	Komisaris / Commissioner	13	12	92%
Richard Lyon Ranken	Komisaris / Commissioner	13	12	92%
Hans Juergen Hertel*)	Komisaris Independen / Independent Commissioner	2	2	100%
Robert O. Dolk**)	Komisaris / Commissioner	6	5	83%
M. Chatib Basri***)	Presiden Komisaris dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	13	13	100%

*) Bapak Hans Juergen Hertel efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 21 Maret 2019

*) Mr. Hans Juergen Hertel effectively serves as a member of Board of Commissioners up to March 21, 2019

**) Bapak Robert Olivier Dolk efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 26 Juli 2019

**) Mr. Robert Olivier Dolk effectively serves as a member of Board of Commissioners up to July 26, 2019

***) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 9 Desember 2019

***) Mr. M. Chatib Basri effectively serves as a member of Board of Commissioners up to December 9, 2019

Agenda yang dibahas pada rapat internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Agenda discussed in the Board of Commissioners internal meeting is as follows:

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
6 Maret 2019 / March 6, 2019	1. Persiapan RUPS Tahunan 2019 i. Untuk mendiskusikan dan memutuskan untuk menyetujui: a) Laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan b) Laporan Tahunan 2018 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 (2) (a) Anggaran Dasar Perusahaan; ii. Membahas dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada Pemegang Saham mengenai remunerasi bagi Direksi Perusahaan untuk tahun 2019; dan iii. Membahas dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada Pemegang Saham mengenai penunjukan auditor independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	1. Preparation for 2019 AGMS: i. To discuss and decide to approve: a) The Company's annual financial statements for fiscal year ended on December 31, 2018; and b) The 2018 Annual Report prepared by the Board of Directors according to Article 66 of UUPT and Article 17 (2) (a) of the Articles of Association of the Company; ii. To discuss and decide to recommend to Shareholders on remuneration for the Board of Directors of the Company for 2019; and iii. To discuss and decide to recommend to Shareholders on the appointment of independent auditor for fiscal year ended on December 31, 2019;

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
	2. <i>Update</i> terkait Manajemen Sosial dan Lingkungan 3. <i>Update</i> terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran 4. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam Rapat	2. Update on Social and Environmental Management; 3. Update on Whistleblowing System; and 4. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
20 Maret 2019 / March 20, 2019	1. Melaporkan dan <i>update progress</i> seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Investasi); 2. Melakukan tinjauan makroekonomi; 3. <i>Company Update</i>: Kinerja Keuangan per tanggal 28 Februari 2019; dan 4. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Report and update progress of all Committees under the Board of Commissioners (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, and Investment Committee); 2. Review the macro economy aspect; 3. Company Update: Financial Performance as of February 28, 2019; and 4. Other matters that can be proposed and approved by the Board of Commissioners in the Meeting
20 Mei 2019 / May 20, 2019	1. <i>Update</i> Misi Bank Dunia; 2. Diskusi tentang <i>Interest Rate Swap</i>; 3. Resolusi Dewan Komisaris untuk Pinjaman Bank Mandiri; 4. Diskusi tentang Persiapan RUPSLB; dan 5. Untuk membahas dan memutuskan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Update the World Bank's Mission; 2. Discussion on Interest Rate Swap; 3. Board of Commissioners Resolution for Loans from Bank Mandiri; 4. Discussion on EGMS preparation; and 5. To discuss and decide to approve other matters that can be proposed and approved to be discussed by members of the Board of Commissioners in the Meeting.
18 Juni 2019 / June 18, 2019	1. Diskusi tentang revisi anggaran Perseroan 2019; dan 2. Membahas dan memutuskan untuk menyetujui segala hal lain yang diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Discussion on revision to the Company's budget in 2019; and 2. Discuss and decide to approve other matters that have been proposed and approved to be discussed by members of the Board of Commissioners in the Meeting.
11 Juli 2019 / July 11, 2019	1. Melaporkan dan <i>update progress</i> seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Investasi); 2. Melakukan tinjauan makroekonomi; 3. <i>Company Update</i>: Kinerja Keuangan per bulan Mei 2019; 4. Diskusi mengenai Agenda RUPSLB; dan 5. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Report and update progress of all Committees under the Board of Commissioners (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, and Investment Committee); 2. Review the macro economy aspect; 3. Company update: Financial Performance as of May 2019; 4. Discussion on EGMS Agenda; and 5. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
24 Juli 2019 / July 24, 2019	1. Membahas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai penunjukan Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai CEO dan CFO sementara, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penunjukan CFO baru oleh Pemegang Saham Perseroan. 2. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Discuss the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee on appointment of Mr. Reynaldi Hermansjah as interim CEO and CFO, effective since the closing of EGMS until the appointment of new CFO by Shareholders. 2. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
29 Juli 2019 / July 29, 2019	1. Persiapan RUPSLB; 2. <i>Strategic Asset Liability Management</i>; 3. PSAK 71; dan 4. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam Rapat.	1. Preparation of EGMS; 2. Strategic Asset Liability Management; 3. PSAK 71; and 4. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the Meeting.
28 Agustus 2019 / August 28, 2019	1. <i>Treasury Bond Portfolio: Investment Rerating</i>; dan 2. OM tentang <i>Public Advisory</i>	1. Treasury Bond Portfolio; Investment Rerating; and 2. OM tentang Public Advisory / OM on Public Advisory.

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
16 September 2019 / September 16, 2019	1. <i>SOW Consultant</i> untuk Rencana Bisnis Perusahaan untuk 5 Tahun Ke Depan 2. Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris 3. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat	1. SOW Consultant for Company's business Plan for the Next 5 Years; 2. Members of Committees under the Board of Commissioners; and 3. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the meeting.
24 Oktober 2019 / October 24, 2019	1. Laporan dan <i>update</i> progress seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris (AC, NRC, ROC and IC); 2. <i>Review</i> makroekonomi dan <i>update</i> Laporan Keuangan per bulan September 2019; 3. Konsultasi mengenai penyusunan <i>Operations Manual</i> (OM) – Pedoman Anti Korupsi dan Pencegahan Fraud dengan Pemegang Saham; 4. OM - <i>Public Advisory Services</i>; 5. Presentasi Rencana Bisnis Perusahaan untuk 5 Tahun Ke Depan oleh Konsultan; dan 6. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat.	1. Report and update progress of all Committees under the Board of Commissioners (AC, NRC, ROC and IC); 2. Review the macro economy aspect and update of Financial Statements as of September 2019; 3. Consultation on the preparation of Operations Manual (OM) – Anti-Corruption Guidelines and Fraud Prevention, with the Shareholders; 4. OM – Public Advisory Services; 5. Presentation of the Company's Business Plans for the Next 5 Years by the Consultant; and 6. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the meeting.
14 November 2019 / November 14, 2019	1. Penyusunan Rencana dan Anggaran Bisnis Tahun 2020; dan 2. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat.	1. Preparation of Business Plan and Budget of 2020; and 2. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the meeting.
29 November 2019 / November 29, 2019	1. Rencana Bisnis Perusahaan untuk 5 Tahun Ke Depan; dan 2. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat.	1. Company's Business Plans for the Next 5 Years; and 2. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the meeting.
5 Desember 2019 / December 5, 2019	1. Laporan dan <i>update</i> progress seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris (AC, NRC, ROC and IC); 2. <i>Review</i> makroekonomi dan <i>update</i> Laporan Keuangan per 31 Oktober 2019; 3. <i>Update</i> PSAK 711 4. <i>Update</i> Kebijakan Benturan Kepentingan; 5. Diskusi dan Persetujuan SEMS; 6. Rencana Bisnis Perusahaan untuk 5 Tahun Ke Depan; dan 7. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat.	1. Report and update progress of all Committees under the Board of Commissioners (AC, NRC, ROC and IC); 2. Review the macro economy aspect and update of Financial Statements as of October 31, 2019; 3. Update on PSAK 71; 4. Update of Conflict of Interest Policy; 5. Discussion and Approval for SEMS; 6. Company's Business Plans for the Next 5 Years; and 7. Other matters that can be proposed and approved to be discussed by the Board of Commissioners in the meeting.

Program Pengembangan Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti program pelatihan dan pengembangan.

Sosialisasi Komisaris Baru

IIF telah menetapkan kebijakan pemberian sosialisasi bagi setiap anggota baru yang bergabung ke jajaran Dewan Komisaris. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pemaparan ruang lingkup Perseroan secara menyeluruh dan informasi penting lainnya yang berguna mendukung peran anggota baru tersebut.

Board of Commissioners Development Program

The Board of Commissioners did not participate in any training and development programs in 2019.

Induction Session of New Commissioners

IIF has an established policy for the induction of new members of the Board of Commissioners. Such induction includes a comprehensive presentation of the Company's scope and other important information deemed useful in supporting the role of new members.

Pada tahun 2019, IIF telah memberikan sosialisasi kepada Bapak Lodewijk Govaerts dan Bapak Andreas Zeisler pada tanggal 23 Oktober 2019.

An induction session was held for Mr. Lodewijk Govaerts and Mr. Andreas Zeisler on October 23, 2019.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, seluruh komite di bawah Dewan Komisaris, yang meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Investasi telah melakukan tugasnya secara optimal dalam menunjang fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Performance Evaluation of Committees under the Board of Commissioners

In 2019, all committees under the Board of Commissioners, which include the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Investment Committee, have carried out their duties optimally in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners through the implementation of the duties and responsibilities of each committee.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Besaran *Annual Fixed Pay* (Honorarium Dasar dan Honorarium Komite Dewan Komisaris) adalah 13 (tiga belas) kali per tahun, ditetapkan dengan acuan remunerasi Dewan Komisaris yang berlaku dipasar yang didapatkan dari *salary survey* yang diikuti oleh Perseroan, dimana besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.700.364.048,50 miliar.

Remuneration Policy of the Board of Commissioners

Provisions regarding the amount and structure of remuneration for the Board of Commissioners are stipulated at the Annual General Meeting of Shareholders, based on the evaluation and proposal from the Nomination and Remuneration Committee. Amount of *Annual Fixed Pay* (Base Honorarium and Honorarium for Board of Commissioners' Committee) is 13 (thirteen) times per year, determined by referring to the Board of Commissioners remuneration that prevails in market obtained from salary survey participated by the Company, in which the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners in 2019 was Rp9,700,364,048.50

DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan Perseroan, termasuk urusan kepemilikan dan pelepasan properti Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi menjadi organ yang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for the management of the Company, including for matters concerning asset ownership and asset disposal, in accordance with the purpose and objectives of the Company. In addition, the Board of Directors represents the Company in both internal and external affairs.

Komposisi Direksi

Per tanggal 31 Desember 2019, komposisi Direksi IIF adalah sebagai berikut:

Board of Directors Composition

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2019, is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) / President Director and Chief Executive Officer (CEO)	Akta Notaris No. 01 tanggal 20 April 2019 / Notarial Deed No. 01 dated April 20, 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 / The Closing of AGMS in 2022
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) / Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Maret 2018 / Notarial Deed No. 15 dated March 5, 2018	Penutupan RUPST tahun 2021 / The Closing of AGMS in 2021
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO) / Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2019 / Notarial Deed No. 01 dated December 1, 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 / The Closing of AGMS in 2022
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 06 tanggal 11 Januari 2016 / Notarial Deed No. 06 dated January 11, 2016	Penutupan RUPST tahun 2022 / The Closing of AGMS in 2022

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja*)	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 25 tanggal 29 Desember 2011 / Notarial Deed No. 25 dated December 29, 2011	29 Desember 2011 – 31 Januari 2020 / December 29, 2011 – 31 January, 2020
Indrawati Darmawan**)	Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO) / Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	Akta Notaris No. 06 tanggal 9 Juni 2016 / Notarial Deed No. 06 dated June 9, 2016	31 Mei 2016-30 Juli 2019 / May 31, 2016 – July 30, 2019

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

**) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as a member of Board of Directors up to January 31, 2020

**) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as a member of Board of Directors up to July 30, 2019

Piagam Kerja Direksi

Direksi mengacu pada piagam (*charter*) Direksi dalam pelaksanaan fungsinya di IIF. Piagam tersebut memuat ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta aturan pola hubungan manajerial antara organ-organ terkait dalam membantu Direksi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Umum

Direksi IIF secara kolektif maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, memimpin, dan memelihara serta mengelola aset IIF sesuai dengan kepentingan IIF.

Spesifik

Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Para anggota Direksi wajib setia dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap anggota Direksi secara individual bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Terkait hubungan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar;

Board of Directors Charter

In performing its functions within IIF, the Board of Directors is guided by the Board of Directors Charter. The Charter defines the scope of the Board of Director's duties and responsibilities as well as the patterns governing managerial relations between the various organs assisting the Board of Directors in carrying out the Company's operational activities.

Duties and Responsibilities of Board of Directors

General

Collectively or individually, members of the Board of Directors are responsible for coordinating, leading, maintaining and managing the assets of IIF in the Company's best interest.

Specifics

In terms of compliance with prevailing laws and regulations, the responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Members of the Board of Directors must act faithfully and responsibly in performing their duties in accordance with prevailing regulations;
2. Each member of the Board of Directors shall be held responsible for their individual faults and acts of negligence in the performance of their duties; and
3. Members of the Board of Directors are responsible for enforcing compliance procedure and ensuring that all obligations have been fulfilled pursuant to the Articles of Association and the Company's Annual GMS, along with prevailing regulations.

In relation to the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors is responsible for:

1. Ensuring that the resolutions established in the GMS, by the Board of Commissioners and the Articles of Association are carried out;



2. Memberikan informasi kepada Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
 4. Menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
 5. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
 6. Menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham di tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik dalam IIF maupun di perusahaan lainnya;
 7. Melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
 8. Menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan IIF;
 9. Menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan Perseroan;
 10. Membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;
 11. Menentukan remunerasi untuk Manajemen senior dan karyawan kunci, dan menjaga konsistensi remunerasi ini agar sesuai dengan budaya, tujuan, strategi, serta tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF, dan lingkungan usaha; dan
 12. Menyeimbangkan kepentingan semua pemilik kepentingan dari IIF.
2. Presenting information to the Board of Commissioners and Shareholders; managing communication with Shareholders, the Board of Commissioners, and other stakeholders, including on the duties and responsibilities of each Director;
 3. Being accountable for the implementation of its duties to the Shareholders and providing feedback on the advice from the Board of Commissioners and Shareholders;
 4. Preparing periodical reports in a timely manner and in accordance with applicable regulations, as well as other reports as required by the Shareholders;
 5. Convening the Annual General Meeting of Shareholders based on a written request from one or more shareholders with valid voting rights and who collectively represent at least 1/10 (one tenths) of issued shares;
 6. Preparing and maintaining a Shareholders Register and Special List containing share ownership by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their relatives, both in IIF and other companies;
 7. Consulting with the Board of Commissioners regarding approval for loans above the maximum limit;
 8. Determining the vision, mission, values, and corporate culture of IIF;
 9. Maintaining IIF's operational activities within the Company's line of business and objectives;
 10. Preparing work plans, annual budget plans, and other plans pertaining to the business of IIF;
 11. Determining the amount of remuneration paid out to senior management and executive officers, and keeping remuneration packages consistent with the Company's culture, objectives, strategies as well as duties and responsibilities stated in prevailing regulations, IIF's Articles of Association, and prevailing conditions in the business environment; and
 12. Balancing the interests of IIF's various stakeholders.

Tanggung jawab terkait pelaporan keuangan:

1. Menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku;
2. Mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, *monitoring*, serta pengelolaan; dan
3. Mempersiapkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, dan akuntansi kemudian menyiapkan laporan tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Responsibilities related to financial reports:

1. Bookkeeping and keeping IIF administration in line with prevalent best practices;
2. Developing an accounting system that is in accordance with the Indonesian Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding administration, archiving, monitoring and management activities; and
3. Preparing the Annual Report, including Financial Statements and accounting procedures for the reports, for the Annual General Meeting of Shareholders.

Tanggung jawab terkait Manajemen Risiko dan Pengendalian, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa Perseroan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko;
2. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dieksekusi dalam pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan;
3. Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses Manajemen dalam menilai kecukupan sistem Manajemen Risiko dan pengendalian internal, pelaporan Keuangan, serta kepatuhan;
4. Memastikan keberadaan atas sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
 - Keandalan dan integritas dari informasi;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur, dan peraturan;
 - Pemeliharaan aset Perseroan;
 - Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan
 - Pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
5. Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perseroan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan Laporan Tahunan;
6. Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan Manajemen; dan
7. Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan secara efektif hasil audit baik dari Auditor Internal maupun eksternal.

Fungsional

Terkait dengan fungsinya secara umum, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan, dan anggaran IIF dan memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memberikan arah kepada IIF, Direksi, dan Departemen untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Membangun, menetapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan, yang mencakup kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemisahan

Responsibilities related to Risk Management and Control, the Board of Directors is responsible for:

1. Ensuring that the Company has a proper and systematic process to identify, measure, and control risks;
2. Ensuring that the proper systems and processes have been implemented in measures to monitor and report on the main risks faced by the Company;
3. Monitoring and evaluating management processes and assessing the adequacy of Risk Management and internal control systems, financial reporting, and compliance procedures;
4. Ensuring the availability of an effective control system to establish:
 - Reliability and integrity of information;
 - Compliance with prevailing policies, procedures, plans, and regulations;
 - Maintenance of the Company's assets;
 - Economic and efficient use of resources; and
 - Achievement of pre-determined operational objectives.
5. Conducting annual evaluations of the Company's internal controls in order to ensure that all essential aspects of internal control have been considered and assessed. The results of these evaluations will be presented in a public statement and will cover a period of time until the approval of the Company's Annual Report;
6. Establishing clear organizational structure, duties, and responsibilities, including the appointment of the Management; and
7. Utilizing audit results from internal and external auditors in the best interest of the Company.

Functional

In regards to its general function, the Board of Directors is responsible for:

1. Establishing and executing IIF's vision, strategies, annual plans, objectives, and budget, while ensuring alignment with and support from the Board of Commissioners and Shareholders; as well as providing direction to the Company, the Board of Directors and all departments in order to sustain short and long-term profitability;
2. Establishing, determining, implementing, and coordinating the Company's governance structure and framework, covering policies, procedures, and the principle of segregation between authority and



wewenang dan tanggung jawab (*Chinese Wall*) untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku, berjalan secara efektif dan efisien;

3. Mengembangkan dan mengelola bisnis dan hubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya, bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya dan media, dan membangun merek dagang IIF dalam rangka membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan peraturan, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
4. Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasihat proyek strategis, dan pengatur pendanaan atas nama klien, atas dasar produk *fee based* dan *Advisory*, dalam rangka menciptakan dan menumbuhkembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur untuk IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;
5. Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang cocok untuk kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), dan menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial, dengan mempertimbangkan perspektif investor, dalam rangka meningkatkan investasi PPP di infrastruktur Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan;
6. Memastikan kerangka kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis, untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;
7. Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta laporan keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien, dan memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemilik kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
8. Memastikan integritas, efektivitas, dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT, Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;

responsibility (*Chinese Wall*) to ensure effective and efficient implementation of the Company's strategies and annual plans, as well as compliance with policies and prevailing regulations;

3. Developing and managing the Company's business and relationship with other stakeholders and to act as the official representative of IIF to other stakeholders and the media while building IIF's brand and public image in order to establish a beneficial position either politically and regulation-wise, as well as good business and image as precondition to the success of an infrastructure financing company;
4. Ensuring the impact of policies and regulations on the infrastructure landscape, strategic project advisors, and fund arrangers for the client, based on fee-based products and Advisory, in the effort to establish and develop a profitable and sustainable portfolio of infrastructure projects for IIF;
5. Ensuring the development of better product offerings suited for Indonesia's financing market, to ensure access to long-term funds, and to provide fund and non-fund-based products for potential infrastructure projects by considering investors' perspectives in order to enhance participation in Indonesia's PPP market in a profitable and sustainable manner;
6. Ensuring an integrated Risk Management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organization by taking into account risk parameters in making business decisions, in order to maintain a healthy portfolio of infrastructure projects and investment within the aforementioned risk and budget parameters;
7. Ensuring adequate planning and a proper control cycle, maintaining the integrity of administration and accounts, preparing effective and efficient tax operations and planning, as well as preparing interim and statutory financial statements in order to lead the organization in a financially effective and efficient manner that will provide the Board of Directors, Board of Commissioners and stakeholders with insight into IIF's financial position and performance;
8. Ensuring the integrity, effectiveness, and efficiency of supporting units such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications, and Procurement Units, in order to achieve the Company's short and long-term business objectives in an effective and efficient manner;

9. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan *monitoring* dan pelaporan infrastruktur IIF serta pengawasan, melaporkan dan menawarkan nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio, dalam rangka memperoleh informasi yang benar untuk melakukan tindakan yang tepat dan memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perusahaan; dan
10. Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk di dalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara Penasihat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.

9. Developing and implementing the Company's monitoring and reporting infrastructure, reporting and providing advice on IIF's activities and portfolio, collecting the necessary information for the Board of Commissioners to be used as basis in decision making while complying with reporting requirements as established in the Company's regulations; and
10. Developing and leading an effective team, ensuring proper organizational structures, governance and processes within IIF (including strict separation of authority between Advisory and Investment), and developing and promoting the right corporate culture and core values to achieve Company's strategic plans and objectives.

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	17	17	100%
I Made Wiracita Tantra	27	22	81%
Devi Pradnya Paramita	2	2	100%
Hilda Savitri	27	27	100%
Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja*)	27	20	74%
Indrawati Darmawan**)	16	16	100%

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020

**) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juli 2019

Board of Directors Meeting

The Board of Directors held 27 (twenty-seven) internal meetings throughout 2019 with attendance rate as follows:

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as Board of Directors of the Company until January 31, 2020.

**) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors of the Company until July 30, 2019.

Agenda yang dibahas pada rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Agenda discussed in the Board of Directors meeting is as follows:

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
8 Januari 2019 / January 8, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
21 Januari 2019 / January 21, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
6 Februari 2019 / February 6, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
18 Februari 2019 / February 18, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
4 Maret 2019 / March 4, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
11 Maret 2019 / March 11, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
15 Maret 2019 / March 15, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
18 Maret 2019 / March 18, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
1 April 2019 / April 1, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
15 April 2019 / April 15, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
23 April 2019 / April 23, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
29 April 2019 / April 29, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
7 Mei 2019 / May 7, 2019	Regular Excomm Meeting 2019

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
13 Mei 2019 / May 13, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
11 Juni 2019 / June 11, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
24 Juni 2019 / June 24, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
8 Juli 2019 / July 8, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
22 Juli 2019 / July 22, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
6 Agustus 2019 / August 6, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
20 Agustus 2019 / August 20, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
4 September 2019 / September 4, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
16 September 2019 / September 16, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
27 September 2019 / September 27, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
11 Oktober 2019 / October 11, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
4 November 2019 / November 4, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
9 Desember 2019 / December 9, 2019	Regular Excomm Meeting 2019
23 Desember 2019 / December 23, 2019	Regular Excomm Meeting 2019

Program Pengembangan Direksi

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Direksi, IIF menyediakan fasilitas berupa program pelatihan dan pengembangan bagi anggota Direksi. Berikut ini adalah rincian program pengembangan yang diikuti oleh Direksi pada tahun 2019:

Board of Directors Development Program

To optimize the roles and functions of the board, IIF provides facilities in the form of training and development for members of the Board of Directors. The following is details of development program participated by the Board of Directors in 2019:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanggal / Date	Judul Pelatihan / Training	Status Kehadiran / Attendance Status
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) / President Director and Chief Executive Officer (CEO)	16 Juli 2019 / July 16, 2019	Infrastructure Investors Forum	Pembicara / Speaker
		15 – 16 Agustus 2019 / August 15 – 16, 2019	Strengthening Business Collaboration for Regional Connectivity	Panelis / Panelist
		31 Oktober 2019 / October 31, 2019	Finding the Project: Investment Pipelines in ASEAN (Energy and Transport)	Pembicara / Speaker
		6 November 2019 / November 6, 2019	Accelerating Smart and Sustainable Infrastructure	Moderator / Moderator
		20 November 2019 / November 20, 2019	Indonesia Financing and Investment Forum	Pembicara / Speaker
		16 November 2019 / November 16, 2019	FT-AIIB Summit	Peserta / Participant
		2 Desember 2019 / December 2, 2019	The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth	Peserta / Participant
		30 Oktober 2019 / October 30, 2019	Clean Energy Finance and Investment Mobilization in Emerging Markets	Pembicara / Speaker
		19 – 20 September 2019 / September 19 – 20, 2019	Risk Training ALM and Balance Sheet	Peserta / Participant
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) / Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	28 October – 31 October 2019 / October 28-31, 2019	Wrap up Workshop for Development of Environmental and Social Compliance and Accountability Mechanism Framework for Financial Intermediaries	Panelis / Panelist
		20 November 2019 / November 20, 2019	Euromoney Conferences: The Indonesia Financing and Investment Forum 2019	Tamu / Guest

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanggal / Date	Judul Pelatihan / Training	Status Kehadiran / Attendance Status
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	21 Januari 2019 / January 21, 2019	Peluncuran Dan Diskusi Buku B. N. Wahyu Dari Sorowako Jadi Tokoh Pertambangan Nasional / Book Launching and Discussion "B. N. Wahyu: From Sorowako to National Mining Figure"	Tamu / Guest
		29 – 31 Januari 2019 / January 29 – 31, 2019	Gas to Power APAC Congress, 29th	Panelis / Panelist
		28 Maret 2019 / March 28, 2019	IJGlobal Asia 2019 Summit	Pembicara / Speaker
		27 Juni 2019 / June 27, 2019	IFC's Launch Event: Board Gender Diversity in ASEAN	Panelis / Panelist
		26 Juli 2019 / July 26, 2019	Training Workshop: ACRAA (PEFINDO)	Pembicara / Speaker
		6 September 2019 / September 6, 2019	Sharing Session with METI	Pembicara / Speaker
		12 September 2019 / September 12, 2019	Talk Show on Work Life Balance (Diversity Week 2019)	Pembicara / Speaker
Harold Jonathan Dharma Tjiptadja*)	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	15 Januari 2019 / January 15, 2019	Indonesia PPP Day	Tamu / Guest
		17 Januari 2019 / January 17, 2019	International Management Accounting Conference	Panelis / Panelist
		30 Januari 2019 / January 30, 2019	Mandiri Investment Forum	Tamu / Guest
		23 – 29 Maret 2019 / March 23 – 29, 2019	12th Global Infrastructure Leadership Forum	Panelis / Panelist
		10 April 2019 / April 10, 2019	PFI ASEAN Infrastructure Financing Conference	Panelis / Panelist
		29 Juni 2019 / June 29, 2019	Invitation as Guest Lecturer	Tamu / Guest
		17 Juli 2019 / July 17, 2019	HKIAC Belt and Road Conference Effective cross-border partnerships: Infrastructure Investment and Risk Management	Panelis / Panelist
		1 Agustus 2019 / August 1, 2019	Strategi Pendanaan RPJMN 2020-2024 / RPJMN 2020-2024 Financing Strategy	Pembicara / Speaker
		26 Agustus 2019 / August 26, 2019	Panel Discussion	Panelis / Panelist
		27 Agustus 2019 / August 27, 2019	Invitation to Networking Reception	Tamu / Guest
		28 Agustus 2019 / August 28, 2019	Invitation as a Panelist in IPFA session	Panelis / Panelist
		1 Oktober 2019 / October 1, 2019	OMFIF - AHC - Infrastructure Asia Workshop	Panelis / Panelist
		1 Oktober 2019 / October 1, 2019	IPFA Asia: Singapore: Capital Markets Solutions for Infrastructure in Asia	Tamu / Guest
		3 Oktober 2019 / October 3, 2019	Undangan Diskusi mengenai Mekanisme Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Proyek KPBU / Discussion Invitation on Mechanisms for Sustainable Financing for KPBU Projects	Panelis / Panelist
		5 – 9 Oktober 2019 / October 5 – 9, 2019	GCF Private Investment for Climate Conference	Panelis / Panelist
		16 Oktober 2019 / October 16, 2019	Undangan FGD Pembiayaan Ibu Kota Negara dengan Lembaga Keuangan / FGD Invitation for Capital City with Financial Institution	Tamu / Guest
		30 Oktober 2019 / October 30, 2019	Undangan SMI - Ngobrol Pembangunan Indonesia (NGOPI) / SMI Invitation – Indonesia Development Discussion	Tamu / Guest

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanggal / Date	Judul Pelatihan / Training	Status Kehadiran / Attendance Status
		31 Oktober 2019 / October 31, 2019	CEO Dinner Reception - Fitch Rating	Tamu / Guest
		6 – 8 November 2019 / November 6 – 8, 2019	Mega Infrastructure Strategy Summit	Pembicara / Speaker
		20 November 2019 / November 20, 2019	Euromoney Conferences: The Indonesia Financing and Investment Forum 2019	Tamu / Guest

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020.

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as Board of Directors of the Company until January 31, 2020.

Sosialisasi Direktur Baru

IIF telah menetapkan kebijakan pemberian sosialisasi bagi setiap anggota baru yang bergabung ke jajaran Direksi. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pemaparan ruang lingkup Perseroan secara menyeluruh dan informasi penting lainnya yang berguna mendukung peran anggota baru tersebut.

Pada tahun 2019, IIF memberikan sosialisasi kepada Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai anggota Direksi baru Perseroan pada bulan April 2019.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Menurut penilaian Direksi, seluruh komite di bawah Direksi, yang meliputi Komite Investasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Advisory, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pengarah TI telah melakukan tugasnya secara optimal sepanjang tahun 2019, dalam rangka mendukung fungsi pengelolaan usaha Direksi melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Untuk besaran remunerasi Direksi pada tahun buku 2019 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perseroan tahun 2019.

Induction Session of New Director

The company has an established policy for the induction of new members of the Board of Directors. Such induction includes a comprehensive presentation of the Company's scope and other important information deemed useful in supporting the role of new members.

In 2019, an induction was held for Mr. Reynaldi Hermansjah as the new member of the Company's Board of Directors in April 2019.

Performance of Committees under the Board of Directors

The Board of Directors has assessed that all committees under the Board of Directors, namely the Investment committee, the Asset and Liabilities Committee, the Risk Management Committee, the Advisory Committee, the Human Resources Committee, and the IT Steering Committee have optimally supported the management function of the Board of Directors through the performance of their respective duties and responsibilities throughout 2019.

Remuneration Policy for the Board of Directors

The provisions regarding the amount and structure of remuneration of the Board of Directors is stipulated in the Annual General Meeting of Shareholders, based on the evaluation by and proposal of the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the amount of remuneration for the Board of Directors is available in the Company's Audited Financial Statements for 2019.



KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama / Name	Jenis Kelamin / Gender		Usia / Age		Pendidikan Terakhir / Latest Education		Pengalaman Kerja / Experience		Keahlian / Expertise
	Pria / Male	Wanita / Female	> 50 Tahun / > 50 Years Old	< 50 Tahun / < 50 Years Old	S2	S3	> 20 Tahun / > 20 Years Old	< 20 Tahun / < 20 Years Old	
Dewan Komisaris / Board of Commissioners									
V. Sonny Loho	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Akuntansi / Accounting - Manajemen Keuangan / Financial Management
Rinaldi Firmansyah	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	Manajemen Keuangan / Financial Management
Bhimantara Widyajala	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Audit / Audit - Manajemen Risiko / Risk Management - Pemeriksaan Kecurangan / Fraud Audit - Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance
Muhamad Al-Arif	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	- Hukum / Legal - Ekonomi / Economy - Hubungan Internasional / International Relations - Praktisi Pembangunan / Development Practitioner
Andreas Zeisler	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	- Perbankan / Banking - Investasi / Investment - Manajemen Keuangan / Financial Management
Lodewijk Govaerts	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Perbankan / Banking - Investasi / Investment - Manajemen Keuangan / Financial Management
Rajeev Veeravalli Kannan	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	- Perbankan / Banking - Investasi / Investment - Manajemen Keuangan / Financial Management
Richard Lyon Ranken	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Perbankan / Banking - Investasi / Investment - Manajemen Keuangan / Financial Management
Direksi / Board of Directors									
Reynaldi Hermansjah	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Industri infrastruktur (sector jalan tol) / Infrastructure Industry (toll road sector) - Finansial, terutama di bidang Investasi dan Pasar Modal / Finance, mainly in Investment and Capital Market
I Made Wiracita Tantra	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Manajemen Kredit / Credit Management - Pengendalian Risiko / Risk Control - Hubungan dalam lingkungan Kelembagaan dan Korporasi / Relations in Institutional Environment and Corporate
Devi Pradnya Paramita	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	- Kuangan Perusahaan / Corporate Finance - Manajemen Keuangan / Financial Management
Hilda Savitri	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	- Perbankan / Banking - Investasi / Investment
Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja*)	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Industri Infrastruktur / Infrastructure Industry - Kuangan Perusahaan / Corporate Finance - Audit dan Ekuitas / Audit and Equity

Nama / Name	Jenis Kelamin / Gender		Usia / Age		Pendidikan Terakhir / Latest Education		Pengalaman Kerja / Experience		Keahlian / Expertise
	Pria / Male	Wanita / Female	> 50 Tahun / > 50 Years Old	≤ 50 Tahun / ≤ 50 Years Old	S2	S3	> 20 Tahun / > 20 Years Old	≤ 20 Tahun / ≤ 20 Years Old	
Indrawati Darmawan**)	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	- Keuangan Perusahaan / Corporate Finance - Manajemen Keuangan / Financial Management - Pasar Modal / Capital Market

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020.

**) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juli 2019.

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as Board of Directors of the Company until January 31, 2020.

**) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors of the Company until July 30, 2019.

RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 13 (tiga belas) pertemuan, dengan uraian tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

JOINT MEETING BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and Board of Directors held 13 (thirteen) joint meetings throughout 2019 with attendance rate as follows:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
V. Sonny Loho	13	13	100%
Rinaldi Firmansyah	13	12	92%
Bhimantara Widyajala	13	13	100%
Muhamad Al-Arif	13	12	92%
Andreas Zeisler	11	10	91%
Lodewijk Govaerts	7	7	100%
Rajeev Veeravalli Kannan	13	12	92%
Richard Lyon Ranken	13	12	92%
Hans Juergen Hertel*)	2	2	100%
Robert O. Dolk**)	6	5	83%
M. Chatib Basri***)	13	13	100%
Direksi / Board of Directors			
Reynaldi Hermansjah	10	10	100%
I Made Wiracita Tantra	13	13	100%
Devi Pradnya Paramita	1	1	100%
Hilda Savitri	13	13	100%
Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja****)	13	13	100%
Indrawati Darmawan*****)	6	6	100%

*) Bapak Hans Juergen Hertel efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 21 Maret 2019

**) Bapak Robert O. Dolk efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 26 Juli 2019

***) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 9 Desember 2019

****) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020

*****) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juli 2019

*) Mr. Hans Juergen Hertel effectively serves as a member of Board of Commissioners until March 21, 2019

**) Mr. Robert O. Dolk effectively serves as a member of Board of Commissioners until July 26, 2019

***) Mr. M. Chatib Basri effectively serves as a member of Board of Commissioners until December 9, 2019

****) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as Board of Directors until January 31, 2020

*****) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors until July 30, 2019

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AFFILIATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga dengan / Familial Relations with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relations with					
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners													
V. Sonny Loho	Plt. Presiden Komisaris & Komisaris Independen / Interim President Commissioner & Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bhimantara Widyajala	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Muhamad Al- Arif	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Andreas Zeisler	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Lodewijk Govaerts	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Rajeev Veeravalli Kannan	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Richard Lyon Ranken	Komisaris / Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Direksi / Board of Directors													
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) / President Director and Chief Executive Officer (CEO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) / Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO) / Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Harold Jonathan Dharma Tjiptadja*)	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) / Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai
Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as a member
of Board of Directors until January 31, 2020

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Guna mendukung fungsi pengawasan di Perseroan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2014. Bidang yang menjadi ruang lingkup tugas Komite Audit yaitu pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

Komposisi Komite Audit

Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 7 Agustus 2018, Dewan Komisaris memutuskan untuk menunjuk Bapak V. Sonny Loho untuk menjadi Ketua Komite Audit Perseroan.

Susunan Komite Audit periode 1 Januari 2019 – 9 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

Nama / Name	Jabatan dalam Anggota Komite / Position in the Committee	Periode Jabatan / Term of Office	Posisi di Perusahaan / Position in the Company
V. Sonny Loho	Ketua / Chairman	7 Agustus 2018 – sekarang / August 7, 2018 up to present	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri*)	Anggota / Member	16 Juni 2016 – Desember 2019 / June 16, 2017 – December 2019	Presiden Komisaris / President Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	6 Agustus 2018 – sekarang / August 6, 2018 up to present	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Asep Hikmat	Anggota / Member	2 April 2018 – sekarang / April 2, 2018 up to present	Anggota Audit Komite / Member of Audit Committee

*) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 9 Desember 2019

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

To support its supervisory functions in the Company, the Board of Commissioners has established the Audit Committee pursuant to POJK No. 55/POJK.04/2014. The scope of the Audit Committee's duties includes internal control, accounting policies, financial reporting, and internal and external auditors. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and such appointment and dismissal are reported at the GMS. The Company's Audit Committee was established based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 dated April 21, 2016.

Audit Committee Composition

The outcome of the Board of Commissioners' meeting on August 7, 2018 was to appoint Mr. V. Sonny Loho as the Chairman of the Company's Audit Committee.

The composition of the Audit Committee for the period of January 1, 2019 - December 9, 2019 is as follows:

Susunan Komite Audit periode 9 Desember 2019 – 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

The Composition of the Audit Committee for the period of December 9, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan dalam Anggota Komite / Position in the Committee	Periode Jabatan / Term of Office	Posisi di Perusahaan / Position in the Company
V. Sonny Loho	Ketua / Chairman	7 Agustus 2018 – sekarang / August 7, 2018 up to present	Plt. Komisaris Independen*) / Komisaris Independen / President Commissioners Interim*) / Independent Commissioners
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	6 Agustus 2018 – sekarang / August 6, 2018 up to present	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Asep Hikmat	Anggota / Member	2 April 2018 – sekarang / April 2, 2018 up to present	Anggota Audit Komite / Member of Audit Committee



Profil Komite Audit

V. Sonny Loho

Ketua Komite Audit

Profil Bapak V. Sonny Loho dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan.

Rinaldi Firmansyah

Anggota Komite Audit

Profil Bapak Rinaldi Firmansyah dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan.

Asep Hikmat

Anggota Komite Audit

Bapak Asep Hikmat ditunjuk sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 2 April 2018 berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2018. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar Master Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau memulai karier sebagai Senior Supervisor di KPMG Los Angeles, AS, Manager di KPMG (KAP Hanadi Sudjendro & Rekan) Jakarta, Senior Manager di Ernst & Young (KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja) Jakarta, Principal Partner di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan, anggota Komite Audit di PT Cahaya Kalbar Tbk, GM Accounting & Finance di PT Jaya Prima Mandiri, dan Partner di KAP Arief Jauhari.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit sama dengan Dewan Komisaris dan hanya dapat diangkat kembali satu kali untuk periode yang berurutan.

Piagam Komite Audit

Keberadaan Komite Audit IIF telah dilengkapi dengan Piagam (*charter*) Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2016. Piagam yang berperan sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur, dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, serta masa jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Menelaah laporan hasil identifikasi isu-isu pengendalian yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkum tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
2. Menelaah cara dan kerangka kerja Manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan sifat, tingkat, dan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian sistem akuntansi,

Audit Committee Profile

V. Sonny Loho

Chairman of Audit Committee

Profile of Mr. V. Sonny Loho is available in the sub-chapter of Profile of Board of Commissioners.

Rinaldi Firmansyah

Anggota Komite Audit

Profile of Mr. Rinaldi Firmansyah is available in the sub-chapter of Profile of Board of Commissioners.

Asep Hikmat

Member of Audit Committee

Mr. Asep Hikmat was appointed as a member of the Company's Audit Committee on April 2, 2018 based on the circular decision of the Board of Commissioners on March 21, 2018. He earned his Bachelor's degree in Accounting from Padjadjaran University, Bandung, and Master's Degree in Accounting from Diponegoro University, Semarang. He started his career as a Senior Supervisor at KPMG Los Angeles, US, Manager at KPMG (Hanadi Sudjendro & Partner PAF) Jakarta, Senior Manager at Ernst & Young (Presetio, Sarwoko & Sandjaja PAF) Jakarta, Principal Partner at Tasnim Ali Widjanarko & Partner PAF, a member of Audit Committee at PT Cahaya Kalbar Tbk, GM of Accounting & Finance at PT Jaya Prima Mandiri, and Partner at Arief Jauhari PAF.

Term of Office

The term of office for members of the Audit Committee is the same as the Board of Commissioners and may only be reappointed once for consecutive periods.

Audit Committee Charter

The establishment of the Audit Committee has been followed by the Audit Committee Charter published on April 21, 2016. The Charter serves as a guideline for the implementation of the Audit Committee's duties and regulates the authority, structure, and qualifications of responsibilities, meetings, reporting, and terms of office.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. To review reports identifying issues on control that require attention or correction, and to summarize actions taken to solve said problems;
2. To review methods and frameworks of the Company's Management in ensuring and monitoring the adequacy and effectiveness of internal control systems, including accounting system controls, and managing



dan mengelola efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk tinjauan tahunan dari kecukupan pengawasan pengendalian dan proses eskalasi atas suatu permasalahan;

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan dalam Laporan Tahunan terhadap pengawasan internal, maka Komite harus menelaah pernyataan-pernyataan tersebut sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Meminta keterangan dari Presiden Direktur/*Managing Director* dan Direktur Keuangan untuk keberadaan setiap kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal dan setiap potensi penipuan yang teridentifikasi yang dapat memengaruhi Perseroan;
5. Menelaah laporan dari Auditor Internal dan eksternal dan memantau status remediiasi yang diperlukan;
6. Menelaah masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk mengeskalasi masalah kepada Dewan Komisaris atau memberitahukan kepada regulator;
7. Secara khusus, Komite bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas Laporan Keuangan, melalui tugas-tugas berikut:
 - a. Memastikan adanya kajian yang layak pada Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Mendiskusikan dengan auditor setiap aspek penilaian yang signifikan dan/atau kebijakan akuntansi dalam penyediaan informasi dalam akun-akun;
 - c. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
 - d. Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
8. Dalam kaitannya dengan Auditor Internal, Komite akan melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi Piagam Audit Internal sebelum diajukan ke Dewan Komisaris;
 - b. Mengevaluasi rencana audit tahunan Auditor Internal sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan tidak ada pembatasan yang dibuat oleh Manajemen terhadap proses audit yang dilakukan oleh Auditor Internal;
 - d. Mengevaluasi efektivitas fungsi Audit Internal;

an effective internal control system, including annual reviews of the adequacy of control supervision and problem escalation mechanism;

3. If the Company is required by law to disclose information in its Annual Report regarding internal supervision, the Committee must evaluate the statements before submitting it to the Board of Commissioners for approval;
4. To request feedback from the President Director/ Managing Director and Chief Financial Officer on any significant weaknesses in the internal control system and for any indications of potential fraud that may affect the Company;
5. To review reports from internal and external auditors and monitor the status of remedial actions, if any;
6. To review issues being discussed and determine if such issues will be escalated to the Board of Commissioners or brought to the attention of regulators;
7. The Committee is responsible for improving the transparency and quality of financial statements through the following duties:
 - a. To ensure proper reviewing of the financial statements issued by the Company;
 - b. To discuss every significant assessment and/or accounting policy in the provision of information in financial accounts with the auditors;
 - c. To ensure that financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and related regulations;
 - d. To ensure that all reports sent to the regulators and other related institutions have been submitted accurately and punctually.
8. With regards to the Internal Auditor, the Committee will conduct the following duties:
 - a. To evaluate the Internal Audit Charter before it is submitted for approval to the Board of Commissioners;
 - b. To evaluate the annual audit plan prepared by the internal Auditor for consideration by the Board of Commissioners;
 - c. To ensure that the Management do not restrict the audit process conducted by the Internal Auditor;
 - d. To evaluate the effectiveness of the Internal Audit function;



- e. Memastikan bahwa setiap temuan yang signifikan dari proses Audit Internal telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - f. Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal telah ditindaklanjuti oleh Manajemen;
 - g. Menugaskan Auditor Internal untuk melakukan audit khusus apabila terdapat adanya indikasi penipuan atau penyimpangan Manajemen; dan
 - h. Mengevaluasi penunjukan dan penggantian Ketua Auditor Internal dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam kaitannya dengan akuntan publik, Komite akan melakukan tugas sebagai berikut:
- a. Merekomendasikan kandidat akuntan public kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dalam RUPST;
 - b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
 - c. Menelaah cakupan audit untuk memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dipertimbangkan;
 - d. Memastikan bahwa temuan akuntan public telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - e. Memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh akuntan publik;
 - f. Mengamati konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar audit yang berlaku;
 - g. Menelaah kinerja akuntan publik sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan pengangkatan kembali atau penggantian akuntan publik.
10. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, Komite akan melakukan tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. Menelaah informasi dari Manajemen, auditor, dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
 - c. Menelaah temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan dan tindak lanjut Manajemen.
- e. To ensure that every significant finding from the Internal Audit process is immediately reported and discussed;
 - f. To ensure that the recommendations given by the Internal Auditor are followed up by the Management;
 - g. To assign the Internal Auditor to conduct a special audit in the event of indication of fraud or deviation by the Management; and
 - h. To evaluate the appointment and replacement of the Head of Internal Auditor and submit the recommendation to the Board of Commissioners.
9. With regards to public accountants, the Committee will perform the following duties:
- a. To recommend public accountant candidates to the Board of Commissioners to be approved at the AGMS;
 - b. To review the independency and objectivity of the public accountant;
 - c. To review the scope of audit to ensure that all significant risks have been considered;
 - d. To ensure that the findings of the public accountant have been immediately reported and discussed;
 - e. To ensure that Management has followed up on the recommendations provided by the public accountant;
 - f. To observe the consistency of the audit conducted by the Public Accountant Office based on applicable audit standards;
 - g. To review the performance of the public accountant as a basis for recommendation of reappointment/ replacement of said public accountant to the Board of Commissioners.
10. With regards to compliance, the Committee will perform the following duties:
- a. To review the effectiveness of supervisory systems in the preparation of Financial Statements;
 - b. To review information from the Management, auditors and other external consultants in relation to compliance issues;
 - c. To review audit findings from authorized institutions and effectiveness of the feedback and follow up from the Management.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para anggota senantiasa mengedepankan tingkat independensi dan profesionalisme yang tinggi serta menghindari adanya benturan kepentingan.

Independency of the Audit Committee

Members of the Audit Committee are independent parties with no affiliation with any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Shareholders of the Company. In performing its duties, members of the committee consistently uphold independency and professionalism and will avoid any conflict of interest.



Rapat Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit IIF mengacu pada kebijakan berikut ini:

- Komite mengelola rapat regulernya setidaknya sekali dalam satu kuartal, dan rapat tersebut harus diadakan sesingkat waktu sebelum rapat Dewan Komisaris.
- Rapat reguler harus dihadiri setidaknya 51% dari jumlah anggota komite termasuk satu Komisaris independen dan satu Pihak independen.
- Keputusan dalam pertemuan harus dibuat berdasarkan prinsip persetujuan bulat. Dalam hal persetujuan dengan suara bulat tidak dapat dicapai komite keputusan rapat harus dibuat dengan cara suara mayoritas.
- Selain pertemuan reguler, komite dapat mengatur pertemuan apa pun dan kapan pun diminta.

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat internal sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
V Sonny Loho	5	5	100%
Rinaldi Firmansyah	5	5	100%
M. Chatib Basri	5	2	40%
Asep Hikmat	5	5	100%

Agenda yang dibahas pada rapat internal Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
28 Januari 2019 / January 28, 2019	<i>Highlight Laporan Keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2018</i>	Highlights of Audited Financial Statements as of December 31, 2018
19 Maret 2019 / March 19, 2019	<i>Highlight Laporan Keuangan per tanggal 28 Februari 2019</i> - Penunjukan Auditor Independen untuk melakukan audit keuangan pada tahun buku 2019 - Laporan Audit Internal – <i>Credit Investment Management</i>	- Highlights of Financial Statements as of February 28, 2019 - Appointment of Independent Auditor to conduct financial audit for 2019 fiscal year - Internal Audit Report – Credit Investment Management
10 Juli 2019 / July 10, 2019	<i>Highlight Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2019</i> <i>Laporan Audit Internal – Treasury and Treasury Operation Management</i>	- Highlights of Financial Statements as of May 31, 2019 - Internal Audit Report – Treasury and Treasury Operation Management
23 Oktober 2019 / October 23, 2019	<i>Highlight Laporan Keuangan per tanggal 30 September 2019</i> <i>Kick-off Audit Keuangan untuk tahun 2019</i> <i>Quality Assurance Review Fungsi Internal Audit</i> <i>Laporan Audit Internal – Advisory Management</i>	- Highlights of Financial Statements as of September 30, 2019 2019 Financial Audit Kick-off - Quality Assurance Review for Internal Audit Function - Internal Audit Report – Advisory Management
4 Desember 2019 / December 4, 2019	<i>Highlight Laporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 2019</i> <i>Audit Keuangan tahun 2019 – Progress Update</i>	- Highlights of Financial Statements as of October 31, 2019 2019 Financial Audit – Progress Update

Audit Committee Meeting

The implementation of the IIF Audit Committee meetings refers to the following policies:

- The committee manages its regular meetings at least once a quarter, and these meetings must be held as short as possible prior to the Board of Commissioners' meeting.
- Regular meetings must be attended by at least 51% of the committee members including one Independent Commissioner and one Independent Party.
- Decisions at meetings must be made based on the principle of unanimous agreement. In the event that a unanimous agreement cannot be reached by the committee, the decision of the meeting must be made by a majority vote.
- In addition to regular meetings, the committee can arrange any meetings at any time.

During 2019, the Audit Committee held 5 (five) internal meetings, with the attendance of each member as follows:

The Audit Committee internal meeting discussed the following matters:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit di Tahun 2019

Kegiatan Internal

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan Auditor Internal untuk membahas sistem pengendalian internal, hasil temuan dari audit yang telah dilaksanakan dan kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor;
2. Melakukan *review* dan memberikan saran pada Laporan Keuangan Triwulanan sebelum dipresentasikan ke para pemegang saham;
3. Melakukan *review* terhadap kinerja, independensi, dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut;
4. Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan; dan
5. Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan Audit Internal.

Kegiatan Eksternal

Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sebelum dan setelah audit Laporan Keuangan Perseroan.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pada tahun 2019, seluruh anggota Komite Audit tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (NRC)

IIF melalui Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau *Nomination and Remuneration Committee* (NRC) berdasarkan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014. NRC memiliki fungsi utama untuk memberikan usulan individu yang sesuai untuk diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, memberikan saran mengenai remunerasi anggota Direksi dan Komisaris Independen, serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan.

Komposisi NRC

Susunan Komite NRC periode 1 Januari 2019 – 9 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
M. Chatib Basri*)	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard L. Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

*) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan hingga tanggal 9 Desember 2019

Implementation Report of Audit Committee Activities in 2019

Internal Activities

1. Conducted regular meetings with Internal Auditors to discuss internal control systems, audit findings that have been implemented and progress of follow-ups on recommendations provided by the auditor;
2. Reviewed and advised on the Quarterly Financial Statements before being presented to the Shareholders;
3. Reviewed the performance, independency and objectivity of the public accountant to be recommended to the Board of Commissioners for reappointment or replacement;
4. Reviewed and advised on compliance management frameworks; and
5. Reviewed and commented on the results of Internal Audit's engagement.

External Activities

Conducted meetings with External Auditors before and after auditing the Company's Financial Statements.

Audit Committee Competency Development Program

In 2019, no members of the Audit Committee attend any education and/or training program.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

Through the Board of Commissioners, IIF established the Nomination and Remuneration Committee (NRC) pursuant to the provision of POJK No. 34/POJK.04/2014. The NRC serves to provide recommendations of suitable individuals to be appointed as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, provide advice on the remuneration of members of the Board of Directors and Independent Commissioner, and establish general remuneration policies that apply to all employees of the Company.

NRC Composition

The composition of the NRC Committee for the period of January 1, 2019 - December 9, 2019 is as follows:

*) Mr. M. Chatib Basri effectively serves as a member of Board of Commissioners until December 9, 2019

Susunan Komite NRC periode 9 Desember 2019 - 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

The composition of the NRC Committee for the period of December 9, 2019 - December 31, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard L. Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev V. Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Profil NRC

Profil dari masing-masing anggota NRC dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

NRC Profile

Profiles of the members of the NRC are available in the Profile of the Board of Commissioners in the Company Profile section of this Annual Report.

Piagam NRC

Untuk memastikan fungsi dan tanggung jawab NRC, Dewan Komisaris telah menyusun dan mengesahkan Piagam NRC. Uraian yang tercantum di dalam piagam ini mencakup tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, pertemuan, dan lain-lain.

Charter of the NRC

To ensure clarity in the functions and position of the NRC within the Company, the Board of Commissioners has drawn and ratified the NRC Charter. This charter elaborates on several matters, including the duties and responsibilities, authority, terms of office, reporting scheme, meetings, and so forth.

Tugas dan Tanggung Jawab NRC

Terkait fungsi nominasi, tugas NRC meliputi:

- Menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur penentuan, termasuk pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Komite ini memiliki tugas untuk menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Merekomendasikan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam hal pemilihan, penunjukan, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan Pemegang Saham, terutama apabila diperlukan perubahan Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham IIF;
- Memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria serta prosedur pemilihan pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menganalisis data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diserahkan oleh Direksi setiap tiga bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan;
- Merekomendasikan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Merekomendasikan calon yang akan diangkat sebagai anggota independen dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the NRC

Under the nomination function, the duties of the NRC consist of:

- To analyze, formulate, and provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the systems and procedures to determine—including selecting and/or replacing—members of the Board of Commissioners and Board of Directors. This Committee is also responsible for creating performance evaluation systems for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To recommend Commissioner and/or Director candidates to the Board of Commissioners and recommend actions on nomination, appointment, and dismissal of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement, in particular when a change in the Board of Commissioners is required due to a change in the shareholding of IIF;
- To monitor the implementation and analyze the criteria and procedures for the selection of officers one level below the Board of Directors and analyze personal data of said personnel that has been submitted by the Board of Directors every three months or whenever a change occurs;
- To recommend the size of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
- To recommend candidates for independent members of the Audit Committee or the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

Terkait fungsi remunerasi, NRC bertugas untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan IIF yang berlaku saat ini. Selain itu, NRC juga bertugas untuk mengevaluasi KPI untuk Direksi yang bersifat *ex-ante* (dalam rencana bisnis tahunan IIF) dan *ex-post* (setelah tutup tahun IIF).

Hal-hal yang direkomendasikan NRC kepada Dewan Komisaris meliputi:

- Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kebijakan remunerasi yang berlaku untuk pejabat eksekutif dan seluruh karyawan IIF;
- Menyiapkan aturan mengenai remunerasi yang lebih spesifik jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam kebijakan remunerasi yang telah disepakati;
- Merekomendasikan program pensiun bagi seluruh karyawan IIF apabila ditetapkan dan merekomendasikan sistem kompensasi dan manfaat serta mekanisme penyesuaian gaji; dan
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam Manajemen SDM yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap keuangan/risiko hukum IIF.

Kewenangan NRC

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, NRC memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya dari Direksi, pejabat, karyawan, serta pihak eksternal/profesional untuk menghindari keraguan, ketika pihak eksternal/ profesional diperlukan, maka Komite NRC harus berkonsultasi dan meminta persetujuan Dewan Komisaris sebelum menunjuk pihak eksternal/profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Ketua NRC dapat mengundang anggota Direksi, pejabat eksekutif, karyawan, atau auditor independen IIF untuk menghadiri rapat Komite.
3. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Komite ini berkoordinasi dengan Presiden Direktur.

Independensi NRC

Anggota NRC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

In relation to the remuneration function, the NRC has the task of evaluating the applicable remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of IIF. In addition, the NRC also evaluates the KPIs for the Board of Directors, including those that are *ex-ante* (within IIF's annual business plans) and *expost* (after the closing of each financial year at IIF).

To recommend the following to the Board of Commissioners:

- Remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Overall remuneration policies applicable to the executive officers and employees of IIF;
- To prepare specific remuneration policies to accommodate matters that are not specified in the agreed remuneration policies;
- To recommend pension plans, if any, for IIF employees and the system for compensation and other benefits as well as the mechanism for salary adjustment; and
- To evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners on employment policies and other HR management functions that may have a significant impact on IIF's financial/legal risks.

Authority of the NRC

In performing its responsibilities, the NRC has the following authority:

1. To access all required information related to its responsibilities from the Board of Directors, executive officers, employees, and from external/professional parties. For the avoidance of doubt, when the service of external/professional parties is necessary, the NRC must consult with and request approval from IIF's Board of Commissioners prior to appointing the external/professional party to assist in implementing its duties.
2. With the Board of Commissioners being informed, the Head of the NRC may invite the Board of Directors, executive officers, employees, or the independent auditor of IIF to attend the Committee's meetings.
3. In exercising the foregoing authority, the Committee coordinates with the President Director.

Independency of the NRC

Each member of the NRC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any form of conflict of interest.

Rapat NRC

Pelaksanaan kegiatan rapat NRC IIF mengacu pada kebijakan berikut ini:

- Anggota Komite tidak akan bertemu kurang dari dua kali dalam setahun untuk memenuhi tugas-tugasnya; dan
- Kuorum Komite sebanyak tiga anggota, dan salah satunya harus merupakan Ketua Komite.

Sepanjang tahun 2019, NRC telah mengadakan rapat internal sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
M. Chatib Basri	5	5	100%
Bhimantara Widyajala	5	5	100%
Richard L. Ranken	5	5	100%
Rajeev V. Kannan	5	5	100%

NRC Meeting

The implementation of the IIF NRC meetings refers to the following policies:

- Committee members will not meet less than twice a year to perform their duties; and
- The Committee quorum is three members, and one of which must be the Chairman of the Committee.

During 2019, NRC has held 5 (five) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

Agenda yang dibahas pada rapat internal NRC adalah sebagai berikut:

The NRC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
6 Maret 2019 / March 6, 2019	1. Proposal Penyesuaian dan Review Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi 2. <i>Benefit</i> Dewan Komisaris 3. <i>Benefit</i> Karyawan 4. <i>Update</i> Rekrutmen dan <i>Contract Term</i> Dewan Komisaris dan Direksi 5. <i>Update on Human Capital</i>	1. Adjustment and Remuneration Review Proposal for the Board of Commissioners and the Board of Directors 2. Board of Commissioners Benefits 3. Employee Benefits 4. Update on Recruitment and Contract Term for the Board of Commissioners and the Board of Directors 5. Update on Human Capital
24 Juli 2019 / July 24, 2019	1. Pengangkatan Anggota Direksi 2. Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019	1. Appointment of Members of the Board of Directors 2. Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2019
1 Oktober 2019 / October 1, 2019	Rekrutmen CFO	CFO Recruitment
23 Oktober 2019 / October 23, 2019	1. <i>Update on Human Capital</i> 2. <i>Update</i> Rekrutmen CFO 3. <i>One-time Benefit</i> untuk tahun fiskal 2019 4. Pengembangan dan Peningkatan <i>Benefit</i> Karyawan yang Dapat Diakses bagi Seluruh Karyawan	1. Update on Human Capital 2. Update on CFO Recruitment 3. One-Time Benefit for 2019 fiscal year 4. Development and Improvement of Employee Benefits that are Accessible to All Employees
4 Desember 2019 / December 4, 2019	1. <i>Flexible Career Path Project Report</i> 2. <i>Update</i> Rekrutmen CFO 3. <i>Expiry Terms of Service</i> dari Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 4. <i>Employee Value Proposition – Understanding Employee Benefits Preference</i>	1. Flexible Career Path Project Report 2. Update on CFO Recruitment 3. Expiry Terms of Service from Members of the Board of Directors and the Board of Directors 4. Employee Value Proposition – Understanding Employee Benefits Preference

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi Direksi didiskusikan, ditentukan, dan direncanakan pada rapat internal NRC.

Policy Regarding the Board of Directors' Succession

Policies regarding the succession of the Board of Directors are discussed, determined and planned at NRC internal meetings.

Program Pengembangan Kompetensi NRC

Pada tahun 2019, seluruh anggota NRC tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO (ROC)

Komite Pemantau Risiko atau *Risk Oversight Committee* (ROC) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan dan pengawasan program Manajemen Risiko IIF, serta pemberian rekomendasi untuk pengendalian dan mitigasi risiko.

Komposisi ROC

Untuk periode 1 Januari 2019 – 21 Maret 2019, susunan ROC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Rinaldi Firmansyah	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri	Anggota / Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
Mohamad Al-Arief	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans Juergen-Hertel*)	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

*) Bapak Hans Juergen-Hertel efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 21 Maret 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Andreas Zeisler

Untuk periode 21 Maret 2019 – 26 Juli 2019, susunan ROC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Rinaldi Firmansyah	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri	Anggota / Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
Mohamad Al-Arief	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk**)	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

**) Bapak Robert Olivier Dolk efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 26 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Lodewijk Govaerts

Untuk periode 26 Juli 2019 – 9 Desember 2019, susunan ROC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Rinaldi Firmansyah	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
M. Chatib Basri***)	Anggota / Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
Mohamad Al-Arief	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

***) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak V. Sonny Loho sebagai Plt. Presiden Komisaris

NRC Competency Development Program

In 2019, no members of the NRC attend any education and/or training program.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE (ROC)

The Risk Oversight Committee (ROC) of the Board of Commissioners is responsible for supporting the development and oversight of IIF's Risk Management program, introducing adequate risk control measures to cover the Company's assets and liabilities, and providing recommendations for risk mitigation.

ROC Composition

The composition of the ROC for the period of January 1, 2019 - December 9, 2019 is as follows:

The composition of the ROC for the period of March 21, 2019 – July 26, 2019 is as follows:

**) Mr. Robert O. Dolk effectively serves as a member of Board of Commissioners until July 26, 2019, and has been replaced by Mr. Lodewijk Govaerts

The composition of the ROC for the period of July 26, 2019 – December 9, 2019 is as follows:

***) Mr. M. Chatib Basri effectively serves as a member of Board of Commissioners until December 9, 2019 and has been replaced by Mr. V. Sonny Loho as the President Commissioner Interim



Untuk periode 9 Desember 2019 – 31 Desember 2019, susunan ROC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Rinaldi Firmansyah	Ketua / Chairman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Mohamad Al-Arief	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Dr. Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

The composition of the ROC for the period of December 9, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

Profil ROC

Profil dari masing-masing anggota ROC dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

ROC Profile

Profiles of the members of the ROC are available in the Profile of the Board of Commissioners in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Piagam ROC

Untuk memastikan kejelasan fungsi dan keberadaan ROC di Perseroan, Dewan Komisaris telah menyusun Piagam (Charter) ROC yang disahkan pada tanggal 8 April 2014. Uraian yang tercantum di dalam piagam ini mencakup tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, pertemuan, dan lain-lain.

ROC Charter

To ensure the clarity of the functions and purpose of the ROC in the Company, the Board of Commissioners has established the ROC Charter, which was ratified on April 8, 2014. This charter covers duties and responsibilities, authority, term of office, reporting, meetings, and others.

Tugas dan Tanggung Jawab ROC

Tugas dan tanggung jawab ROC terkait pengaturan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko untuk risiko kredit, pasar, operasional, dan sosial & lingkungan yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko secara berkala mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan pendapat dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Mengusulkan modifikasi yang diperlukan atas kebijakan Manajemen yang disebutkan sebelumnya agar sesuai dengan lingkungan bisnis yang berubah;
3. Menetapkan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan dan saran tentang masalah yang diangkat oleh Komite Manajemen Risiko;
5. Meninjau laporan Manajemen Risiko triwulanan yang disiapkan oleh Tim Manajemen Risiko sebelum diserahkan kepada Pemegang Saham;
6. Memberikan saran dan/atau rekomendasi (jika ada) kepada Tim Manajemen Risiko untuk dicantumkan dalam laporan Manajemen Risiko triwulanan berikutnya;
7. Meninjau kerangka kerja parameter atau register Manajemen Risiko dan memberikan persetujuan untuk setiap perubahan yang diusulkan untuk parameter atau register tersebut; dan
8. Menyediakan informasi mengenai hal lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan usaha seperti biasa.

Duties and Responsibilities of ROC

The duties and responsibilities of the ROC in relation to Risk Management include:

1. To evaluate Risk Management policies for credit, market, operational and social & environmental risks to be approved by the Board of Commissioners. The ROC regularly evaluates and analyzes the adequacy of Risk Management policies and will also submit suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners concerning necessary improvements to the Company's Risk Management function;
2. To propose necessary modifications to the aforementioned Risk Management policies to conform to recent changes in the business environment;
3. To define the roles and responsibilities of the Risk Management Committee;
4. To provide feedback and suggestions on the issues raised by the Risk Management Committee;
5. To review the quarterly Risk Management report prepared by IIF's Risk Management Team prior to submission to IIF's Shareholders;
6. To provide suggestions and/or recommendations (if any) to IIF's Risk Management Team to be incorporated in the subsequent quarterly Risk Management report;
7. To review the framework of Risk Management parameters or registers and provide approval for any proposed changes to such parameters or registers; and
8. To provide information on any other matters deemed necessary by the Board of Commissioners in the ordinary course of business.

Independensi ROC

Anggota ROC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Independency of the ROC

Each member of the ROC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Rapat ROC

Sepanjang tahun 2019, ROC telah mengadakan rapat internal sebanyak 4 (empat) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

ROC Meeting

During 2019, the ROC held 4 (four) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Rinaldi Firmansyah	4	4	100%
M. Chatib Basri***)	4	4	100%
Mohamad Al-Arief	4	4	100%
Hans-Juergen Hertel *)	1	1	100%
Robert Olivier Dolk **)	2	2	100%
Dr. Andreas Zeisler *)	3	3	100%
Lodewijk Govaerts **)	2	2	100%

*) Bapak Hans-Juergen Hertel efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 21 Maret 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Andreas Zeisler

**) Bapak Robert Olivier Dolk efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 26 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Lodewijk Govaerts

***) Bapak M. Chatib Basri efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak V. Sonny Loho sebagai Plt. Presiden Komisaris efektif tanggal 7 Januari 2020

**) Mr. Hans-Juergen Hertel effectively serves as a member of Board of Commissioners until March 21, 2019, and has been replaced by Mr. Andreas Zeisler

**) Mr. Robert Olivier Dolk effectively serves as a member of Board of Commissioners until July 26, 2019, and has been replaced by Mr. Lodewijk Govaerts

***) Mr. M. Chatib Basri effectively serves as a member of Board of Commissioners until December 9, 2019 and has been replaced by Mr. V. Sonny Loho as the President Commissioner Interim effectively since January 7, 2020

Agenda yang dibahas pada rapat internal ROC adalah sebagai berikut:

The ROC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
20 Maret 2019 / March 20, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko untuk Triwulan IV 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 3. Stress-test Portofolio Investment 4. Usulan mengenai mekanisme dan kebijakan Whistleblowing 5. Usulan untuk Persetujuan atas Pelampauan Limit Obligasi	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 4th Quarter of 2018 ending on December 31, 2018 3. Investment Portfolio Stress-Test 4. Recommendation regarding Whistleblowing mechanism and policy 5. Recommendation on Approval of Exceeding Bond Limit
30 Juli 2019 / July 30, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko untuk Triwulan I 2019 yang berakhir tanggal 31 Maret 2019	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 1st Quarter of 2019 ending on March 31, 2019
24 Oktober 2019 / October 24, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko Triwulan II dan III 2019 yang berakhir tanggal 30 September 2019 3. Pembaruan terkait mekanisme dan kebijakan Whistleblowing	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 2nd and 3rd Quarter of 2019 ending on September 30, 2019 3. Updates regarding Whistleblowing mechanisms and policies
4 Desember 2019 / December 4, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat ROC sebelumnya 2. Pembaruan terkait akun-akun SAM (Special Asset Management) 3. Usulan peningkatan presentasi untuk RMC & ROC	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous ROC meeting 2. Updates regarding SAM (Special Asset Management) accounts 3. Recommendation on improved presentation for RMC & ROC

Program Pengembangan Kompetensi ROC

Pada tahun 2019, seluruh anggota ROC tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

ROC Competency Development Program

In 2019, no members of the ROC attend any education and/or training program.

KOMITE INVESTASI–DEWAN KOMISARIS (BOC-IC)

Komite Investasi–Dewan Komisaris (BOC-IC) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proposal investasi dan portofolio IIF. Pembentukan Komite BOC-IC disahkan dalam Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

BOARD OF COMMISSIONERS – INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Commissioners–Investment Committee (BOC-IC) was established to carry out supervisory functions, especially in relation to investment proposals and IIF's business portfolio. The establishment of the BOC-IC was ratified through the Circular Resolution of

Komposisi BOC-IC

Untuk periode 1 Januari 2019 – 21 Maret 2019, susunan BoC-IC sebagai berikut:

Composition of the BOC-IC

For the period of January 1, 2019 – March 21, 2019, the Composition of the BOC-IC are as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
V. Sonny Loho	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Muhamad Al-Arif	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel*)	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

*) Bapak Hans-Juergen Hertel efektif digantikan oleh Bapak Andreas Zeisler pada tanggal 21 Maret 2019

*) Mr. Hans-Juergen Hertel was officially replaced by Mr. Andreas Zeisler on March 21, 2019

Untuk periode 21 Maret 2019 – 26 Juli 2019, susunan BoC-IC sebagai berikut:

For the period of March 21, 2019 – July 26, 2019, the Composition of the BOC-IC are as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
M. Chatib Basri	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
V. Sonny Loho	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Muhamad Al-Arif	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk**)	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

**) Bapak Robert Olivier Dolk efektif digantikan oleh Bapak Lodewijk Govaerts pada tanggal 26 Juli 2019

**) Mr. Robert Olivier Dolk was officially replaced by Mr. Lodewijk Govaerts on July 26, 2019

Untuk periode 26 Juli 2019 – 9 Desember 2019, susunan BoC-IC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
M. Chatib Basri***)	Ketua / Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen / President Commissioner & Independent Commissioner
V. Sonny Loho	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Muhamad Al-Arif	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

***) Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak V. Sonny Loho sebagai Plt. Presiden Komisaris efektif pada tanggal 9 Desember 2019

For the period of July 26, 2019 – December 9, 2019, the Composition of the BOC-IC are as follows:

***) Mr. M. Chatib Basri resigned and was officially replaced by Mr. V. Sonny Loho as the President Commissioner Interim on December 9, 2019

Untuk periode 9 Desember 2019 – 31 Desember 2019, susunan BoC-IC sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
V. Sonny Loho****)	Anggota / Member	Plt. Presiden Komisaris & Komisaris Independen / Interim President Commissioner & Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Muhamad Al-Arif	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Andreas Zeisler	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

****) Bapak V. Sonny Loho ditunjuk sebagai Plt. Presiden Komisaris efektif tanggal 9 Desember 2019

For the period of December 9, 2019 – December 31, 2019, the Composition of the BOC-IC are as follows:

****) Mr. V. Sonny Loho was appointed as the Interim President Commissioner effectively since December 9, 2019

Profil BOC-IC

Profil dari masing-masing anggota BOC-IC dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

BOC-IC Profile

The profiles of the BOC-IC members are available in the Profile of the Board of Commissioners in the Company Profile section of this Annual Report.

Piagam BOC-IC

Piagam BOC-IC dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2012. Piagam ini mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

BOC-IC Charter

The BOC-IC Charter was established and signed on June 13, 2012. This charter regulates matters concerning authority, structure, qualification, responsibilities, meetings, reporting, confidentiality, and others.



Tugas dan Tanggung Jawab BOC-IC

Tugas utama BOC-IC IIF antara lain adalah:

1. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari Dewan Komisaris;
2. Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas, dan *treasury*;
3. Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perseroan dan memberikan masukan terhadap perumusan/revisinya;
4. Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perseroan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BOC kepada Komite.

Independensi BOC-IC

Anggota BOC-IC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Rapat BOC-IC

Sepanjang tahun 2019, BOC-IC telah mengadakan rapat internal sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
V. Sonny Loho	9	9	100%
Rinaldi Firmansyah	9	9	100%
Bhimantara Widyajala	9	9	100%
Muhamad Al-Arif	9	9	100%
Andreas Zeisler	8	8	100%
Lodewijk Govaerts	5	5	100%
Rajeev Veeravalli Kannan	9	9	100%
Richard Lyon Ranken	9	9	100%
Hans Juergen Hertel*)	1	1	100%
Robert O. Dolk**)	3	3	100%
M. Chatib Basri***)	9	9	100%

*) Bapak Hans-Juergen Hertel efektif digantikan oleh Bapak Andreas Zeisler pada tanggal 21 Maret 2019

**) Bapak Robert Olivier Dolk efektif digantikan oleh Bapak Lodewijk Govaerts pada tanggal 26 Juli 2019

***) Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak V. Sonny Loho sebagai Plt. Presiden Komisaris efektif pada tanggal 9 Desember 2019

Duties and Responsibilities of the BOC-IC

The main duties of the BOC-IC are as follows:

1. To provide opinion and/or recommendations on credit/ investment provision to be approved by the Board of Commissioners;
2. To evaluate and present evaluation reports pertaining to the performance of the Company's investment portfolio, including but not limited to loans, equity and treasury investments;
3. To review the Company's credit and investment policies and provide feedback for the formulation/ revision of such policies;
4. To take on additional responsibilities relating to the Company's investment activities, policies or other matters mandated from time to time by the BOC.

Independency of the BOC-IC

Each member of the BOC-IC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

BOC-IC Meeting

During 2019, the BOC-IC held 9 (nine) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

*) Mr. Hans-Juergen Hertel was officially replaced by Mr. Andreas Zeisler on March 21, 2019

**) Mr. Robert Olivier Dolk was officially replaced by Mr. Lodewijk Govaerts on July 26, 2019

***) Mr. M. Chatib Basri resigned and was officially replaced by Mr. V. Sonny Loho as the President Commissioner Interim on December 9, 2019

Agenda yang dibahas pada rapat internal BOC-IC adalah sebagai berikut:

The BOC-IC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
19 Maret 2019 / March 19, 2019	1. <i>Update</i> proyek; 2. <i>Update</i> portofolio; dan 3. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Project update; 2. Portfolio update; and 3. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
20 Mei 2019 / May 20, 2019	1. Diskusi mengenai Project Appraisal Memorandum; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Discussion on Project Appraisal Memorandum; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
10 Juli 2019 / July 10, 2019	1. <i>Review</i> Portofolio Investasi; dan 2. <i>Update</i> SAM	1. Review of Investment Portfolio; and 2. SAM update.
28 Agustus 2019 / August 28, 2019	1. Diskusi mengenai Project Appraisal Memorandum; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Discussion on Project Appraisal Memorandum; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
16 September 2019 / September 16, 2019	1. <i>Project Approval</i>; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Project approval; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
11 Oktober 2019 / October 11, 2019	1. Diskusi mengenai <i>Project Appraisal Memorandum</i>; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Discussion on Project Appraisal Memorandum; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
23 Oktober 2019 / October 23, 2019	1. <i>Update</i> proyek; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Project update; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
4 Desember 2019 / December 4, 2019	1. <i>Update</i> portofolio; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Portfolio update; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.
20 Desember 2019 / December 20, 2019	1. Persetujuan <i>Project Appraisal Memorandum</i>; dan 2. Untuk membahas dan menyelesaikan untuk menyetujui hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota BOC-IC dalam rapat.	1. Approval for Project Appraisal Memorandum; and 2. Discussion, settlement, and approval for other matters that can be proposed for discussion in the meeting of BOC-IC.

Program Pengembangan Kompetensi BOC-IC

Pada tahun 2019, seluruh anggota BOC-IC tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

BOC-IC Competency Development Program

In 2019, no members of the BOC-IC attend any education and/or training program.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE INVESTASI-DIREKSI (BOD-IC)

Komite Investasi-Direksi (BOD-IC) memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi Perseroan untuk kemudian direkomendasikan ke Komite Investasi-Dewan Komisaris (BOC-IC).

Komposisi BOD-IC

Susunan anggota BOD-IC periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra *)	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

*) Bapak I Made Wiracita Tantra efektif menjabat sebagai Plt. Presiden Direktur sampai dengan 20 April 2019

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS – INVESTMENT COMMITTEE (BOD-IC)

The Board of Directors–Investment Committee (BOD-IC) is tasked with reviewing, considering, and deciding on all investment proposals of the Company to be recommended to the Board of Commissioners–Investment Committee (BOC-IC).

Composition of the BOD-IC

The composition of the BOD-IC members, from the period of January 1, 2019 – April 20, 2019 is as follows:

*) Mr. I Made Wiracita Tantra effectively serves as the President Director Interim of the Company until 20 April 2020

Sementara itu, susunan anggota BOD-IC periode 20 April 2019 – 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the BOD-IC members, from the period of April 20, 2019 – July 31, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah **)	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan***)	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

**) Bapak Reynaldi Hermansjah efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 20 April 2019

**) Mr. Reynaldi Hermansjah joined the Company effective as of 20 April 2019

***) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan 30 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Plt. Direktur Keuangan

***) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors until July 30, 2019, and has been replaced by Mr. Reynaldi Hermansjah as the Finance Director Interim

Sementara itu, susunan anggota BOD-IC periode 31 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the BOD-IC members, from the period of July 31, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Plt. Direktur Keuangan / President Director & Chief Executive Officer and Interim CFO
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer



Sementara itu, susunan anggota BOD-IC periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Profil BOD-IC

Profil dari masing-masing anggota BOD-IC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Piagam BOD-IC

BOD-IC memiliki piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal terkait peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur serta kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

Tugas dan Tanggung Jawab BOD-IC

Tugas utama BOD-IC Perseroan meliputi:

1. Mengkaji, menyetujui, dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan disetujui oleh BOD-IC;
2. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BOC-IC untuk tujuan pengkajian proyek oleh BOD-IC;
3. Berkoordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) Direksi untuk memastikan kecukupan pendanaan untuk kredit/investasi yang diusulkan dan bahwa dana tersebut sesuai dengan kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit dan investasi Perseroan dari waktu ke waktu jika dianggap perlu;
5. Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi, ekuitas, dan semua pinjaman, setidaknya setahun sekali, serta meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BOC-IC.

Independensi BOD-IC

Anggota BOD-IC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Meanwhile, the composition of the BOD-IC members, from the period of December 1, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

BOD-IC Profile

The profiles of the BOD-IC members are available in the Profile of the Board of Directors in the Company Profile section of this Annual Report.

BOD-IC Charter

The role and responsibilities, authority, structure, qualification, meeting requirements, reporting system, and confidentiality principles of the BOD-IC are regulated in its own charter.

Duties and Responsibilities of the BOD-IC

The main duties of the BOD-IC of the Company includes:

1. Reviewing, approving and recommending investment proposals to be submitted to the BOD-IC for further review and approval;
2. Providing information, assistance, and/or clarification to the BOC-IC for project review by the BOD-IC;
3. Coordinating with the Assets & Liabilities Committee of the Board of Directors (ALCO) to ensure adequate funding for proposed credits/investments based on ALCO's credit limits;
4. Reviewing and adjusting credit and investment policies from time to time when necessary;
5. Reviewing and monitoring the implementation of all investments, equity, and loans at least once per year, and increasing the frequency of such reviews when required, as well as reporting the results of the aforementioned reviewing and monitoring activities to the BOC-IC.

Independency of the BOD-IC

Each member of BOD-IC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.



Rapat BOD-IC

Sepanjang tahun 2019, BOD-IC telah mengadakan rapat internal sebanyak 40 (empat puluh) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah *)	31	31	100%
I Made Wiracita Tantra	40	40	100%
Devi Pradnya Paramita	1	1	100%
Hilda Savitri	40	39	97,5%
Harold Jonathan Tjiptadaja***)	40	38	95%
Indrawati Darmawan**)	25	23	92%

*) Bapak Reynaldi Hermansjah efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 20 April 2019

**) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juli 2019

***) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020

BOD-IC Meeting

During 2019, the BOD-IC held 40 (forty) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

*) Mr. Reynaldi Hermansjah joined the Company effective as of 20 April 2019

**) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as a member of Board of Directors until July 30, 2019

***) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja effectively serves as a member of Board of Directors until January 31, 2019

Agenda yang dibahas pada rapat internal BOD-IC adalah sebagai berikut:

The BOD-IC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
22 Januari 2019 / January 22, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
28 Januari 2019 / January 28, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
7 Februari 2019 / February 7, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
13 Februari 2019 / February 13, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
20 Februari 2019 / February 20, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
26 Februari 2019 / February 26, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
5 Maret 2019 / March 5, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
14 Maret 2019 / March 14, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
29 Maret 2019 / March 29, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
2 April 2019 / April 2, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
9 April 2019 / April 9, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
16 April 2019 / April 16, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
25 April 2019 / April 25, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
2 Mei 2019 / May 2, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
7 Mei 2019 / May 7, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
14 Mei 2019 / May 14, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
16 Mei 2019 / May 16, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
21 Mei 2019 / May 21, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
29 Mei 2019 / May 29, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
11 Juni 2019 / June 11, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
18 Juni 2019 / June 18, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
21 Juni 2019 / June 21, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
3 Juli 2019 / July 3, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
18 Juli 2019 / July 18, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
25 Juli 2019 / July 25, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
6 Agustus 2019 / August 6, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
9 Agustus 2019 / August 9, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
30 Agustus 2019 / August 30, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
3 September 2019 / September 3, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
6 September 2019 / September 6, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
10 September 2019 / September 10, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
11 September 2019 / September 11, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
4 Oktober 2019 / October 4, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
10 Oktober 2019 / October 10, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
15 Oktober 2019 / October 15, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
5 November 2019 / November 5, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
13 November 2019 / November 13, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
19 November 2019 / November 19, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
25 November 2019 / November 25, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting
3 Desember 2019 / December 3, 2019	Rapat BoD-IC	BoD-IC Meeting

Program Pengembangan Kompetensi BOD-IC

Pada tahun 2019, seluruh anggota BOD-IC mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota BOD-IC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

BOD-IC Competency Development Program

In 2019, all BOD-IC members participated in several competency development activities and programs. The Competency Development Programs for BOD-IC members are available in the Board of Directors' Profile section of the Company Profile Chapter of this Annual Report.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Pembentukan Komite Aset dan Liabilitas atau *Asset and Liability Committee* (ALCO) bertujuan untuk membantu Direksi Perseroan memantau pengelolaan sumber dana Perseroan, termasuk pengelolaan risiko-risiko terkait, seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko pasar.

ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALSO)

The Asset and Liabilities Committee (ALCO) is established to assist the Company's Board of Directors in monitoring the Company's fund management, including the management of related risks such as liquidity risk, solvency risk, and market risk.

Komposisi ALCO

Susunan anggota ALCO periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Composition of ALCO

The composition of the ALCO members, from the period of January 1, 2019 – April 20, 2019 is as follows:

Sementara itu, susunan anggota ALCO periode 20 April 2019 – 30 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the ALCO members, from the period of April 20, 2019 – July 30, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan*)	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

*) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan 30 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Plt. Direktur Keuangan

*) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors until July 30, 2019, and has been replaced by Mr. Reynaldi Hermansjah as the Interim CFO



Sementara itu, susunan anggota ALCO periode 30 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Meanwhile, the composition of the ALCO members, from the period of July 30, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Sementara itu, susunan anggota ALCO periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Meanwhile, the composition of the ALCO members, from the period of December 1, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

Profil ALCO

Profil dari masing-masing anggota ALCO dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

ALCO Profile

The profiles of the ALCO members are available in the Profile of the Board of Directors in the Company Profile section of this Annual Report.

Piagam ALCO

ALCO menjalankan fungsinya di Perseroan dengan mengacu pada piagam (*charter*) ALCO yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2013. Piagam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komposisi Komite, serta prosedur terkait, seperti rapat, pelaporan, dan kerahasiaan.

ALCO Charter

In performing its duties, the ALCO refers to ALCO Charter established on December 19, 2013. The Charter regulates the responsibilities and the composition of the Committee, as well as related procedures, such as meeting, reporting, and confidentiality.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tanggung jawab ALCO dalam kerangka desain Manajemen Risiko adalah:

1. Merumuskan strategi dan rencana tindakan yang berkaitan dengan risiko pasar dan likuiditas;
2. Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
3. Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perseroan;
4. Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan, dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk *mismatch* dan posisi devisa neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF;
5. Mengelola investasi untuk dana surplus;

Duties and Responsibilities of the ALCO

Within the Company's Risk Management framework, the responsibilities of the ALCO are as follow:

1. Formulating strategies and action plans related to market and liquidity risks;
2. Providing recommendations on changes of policy, if required, to the Board of Commissioners;
3. Ensuring that the management of assets and liabilities is executed in accordance with the Company's policies;
4. Managing IIF's liquidity, setting interest rates, and deciding, determining, and monitoring the application of the policies for mismatch and net open position, as well as managing and determining IIF's financial and capital balance structures;
5. Managing the investment of surplus funds;

6. Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam *trading book*;
7. Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai *risk appetite* IIF melalui koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko (atau jika limit tersebut harus disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian memberikan rekomendasi dan justifikasi untuk persetujuan lebih lanjut dari Dewan Komisaris), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit;
8. Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas;
9. Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perseroan dan menyediakan input strategis kepada Dewan Komisaris melalui koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko; dan
10. Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada.

Independensi ALCO

Anggota ALCO senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Rapat ALCO

Sepanjang tahun 2019, ALCO telah mengadakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	10	10	100%
I Made Wiracita Tantra	13	13	100%
Devi Pradnya Paramita	1	1	100%
Hilda Savitri	13	10	77%
Harold Jonathan Tjiptadjaja*)	13	11	85%
Indrawati Darmawan**)	9	9	100%

*) Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 31 Januari 2020

**) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juli 2019

6. Managing the market risk carried in the trading book;
7. Designing and revising limit structures in line with IIF's risk appetite in coordination with the Risk Management Committee (or providing further recommendations and justifications if said limit requires approval from the the Board of Commissioners), and monitoring compliance with the limit structure;
8. Approving methodologies for the management of market and liquidity risks, and establishing the framework for periodical validations of market and liquidity risk models;
9. Defining (or estimating) market and liquidity risks inherent in all activities of the Company and to provide strategic input for the Board of Commissioners in coordination with the Risk Management Committee of the Board of Directors; and
10. Reviewing cash projection and determining investible surplus, if any.

Independency of ALCO

All members of the ALCO will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

ALCO Meeting

During 2019, ALCO held 13 (thirteen) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

*) Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja effectively serves as a member of Board of Directors until January 31, 2020

**) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as a member of Board of Directors until July 30, 2019



Agenda yang dibahas pada rapat internal ALCO adalah sebagai berikut:

The ALCO internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
29 Januari 2019 / January 29, 2019	Aset Liabilitas posisi Desember 2018	Assets Liabilities position as of December 2018
28 Februari 2019 / February 28, 2019	Aset Liabilitas posisi Januari 2019	Assets Liabilities position as of January 2019
26 Maret 2019 / March 26, 2019	Aset Liabilitas posisi Februari 2019	Assets Liabilities position as of February 2019
23 April 2019 / April 23, 2019	Aset Liabilitas posisi Maret 2019	Assets Liabilities position as of March 2019
15 Mei 2019 / May 15, 2019	Rapat ALCO Luar Biasa	Extraordinary ALCO Meeting
29 Mei 2019 / May 29, 2019	Aset Liabilitas posisi April 2019	Assets Liabilities position as of April 2019
10 Juni 2019 / June 10, 2019	Rapat ALCO Luar Biasa	Extraordinary ALCO Meeting
28 Juni 2019 / June 28, 2019	Rapat ALCO Luar Biasa	Extraordinary ALCO Meeting
25 Juli 2019 / Juli 25, 2019	Aset Liabilitas posisi Juni 2019	Assets Liabilities position as of June 2019
30 Agustus 2019 / August 30, 2019	Aset Liabilitas posisi Juli 2019	Assets Liabilities position as of July 2019
26 September 2019 / September 26, 2019	Aset Liabilitas posisi Agustus 2019	Assets Liabilities position as of August 2019
29 November 2019 / November 29, 2019	Aset Liabilitas posisi September dan Oktober 2019	Assets Liabilities position as of September and October 2019
20 Desember 2019 / December 20, 2019	Aset Liabilitas posisi November 2019	Assets Liabilities position as of November 2019

Program Pengembangan Kompetensi ALCO

Pada tahun 2019, seluruh anggota ALCO mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota ALCO dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

ALCO Competency Development Program

In 2019, all ALCO members participated in several competency development activities and programs. The Competency Development Programs for ALCO members are available in the Board of Directors' Profile section of the Company Profile Chapter of this Annual Report.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RMC)

Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee* (RMC) Direksi bertanggung jawab secara aktif memantau Manajemen Risiko kegiatan bisnis IIF serta memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan.

Komposisi RMC

Susunan anggota RMC periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Sementara itu, susunan anggota RMC periode 20 April 2019 – 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan*)	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

*) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan 30 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Plt. Direktur Keuangan

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for actively monitoring the Risk Management of IIF's business activities as well as providing recommendations in formulating the Company's Risk Management policies and strategies.

Composition of RMC

The composition of the RMC members, from the period of January 1, 2019, – April 20, 2019 is as follows:

Meanwhile, the composition of the BOD-IC members, from the period of April 20, 2019 – July 31, 2019 is as follows:

*) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors until July 30, 2019, and has been replaced by Mr. Reynaldi Hermansjah as the Interim CFO

Sementara itu, susunan anggota RMC periode 31 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Plt. Direktur Keuangan / President Director & Chief Executive Officer and Finance Director Interim
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Meanwhile, the composition of the BOD-IC members, from the period of July 31, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Sementara itu, susunan anggota RMC periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Profil Anggota RMC

Profil dari masing-masing anggota RMC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Piagam RMC

Piagam RMC dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 April 2014. Piagam ini mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab RMC

Berkenaan dengan pengaturan Manajemen Risiko di Perseroan, tugas RMC adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko, termasuk penetapan batas kerangka kerja dan perumusan rencana darurat untuk kondisi yang merugikan;
2. Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalisir risiko potensial di proyek maupun di tingkat portofolio, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan, dan memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko mampu melakukannya secara mandiri;
3. Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya;
4. Mengevaluasi proposal terkait aktivitas dan produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam melakukan aktivitas dan produk baru melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal untuk perubahan terkait kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perseroan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan untuk kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, dan meninjau laporan *Management Information System* (MIS) secara reguler;
7. Melakukan tinjauan rutin untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;
8. Mengkaji dan menyetujui Laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang dihasilkan oleh Departemen Manajemen Risiko; dan

Profile of RMC Members

The profiles of the RMC members are available in the Profile of the Board of Directors in the Company Profile section of this Annual Report.

RMC Charter

The RMC Charter was established and signed on April 16, 2014. The Charter regulates the authority, structure, qualifications, responsibilities, meetings, reporting, confidentiality, and other aspects of the RMC.

Duties and Responsibilities of RMC

In relation to Risk Management measures in the Company, the duties of the RMC are as follows:

1. To provide strategic formulation of the Company's Risk Management policies and framework, which include the establishment of limits for said framework and the formulation of contingency plans for adverse conditions;
2. To oversee the evaluation and management of the overall risk composition in IIF's portfolio, minimize potential risks at the project or the portfolio level, foster a Risk Management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to perform independently;
3. To investigate, analyze, and take any necessary action with regards to business decisions that deviate from general procedures;
4. To evaluate proposals related to new activities and products, measure the desirability and capacity of IIF to undertake those new activities and products through a risk perspective, and evaluate proposals for associated changes in policies and procedures;
5. To monitor the adequacy of IIF's capital against identified risks in accordance with prevailing regulations and the Company's risk tolerance;
6. To evaluate the effectiveness of Risk Management policies and procedures, formulate the necessary amendments to existing Risk Management policies and procedures, evaluate the adequacy of internal controls, and regularly review Management Information System (MIS) reports;
7. To conduct regular reviews to evaluate the appropriateness of risk assessment methodologies;
8. To review and approve the Quarterly Risk Management report produced by the Risk Management Department; and

9. Meninjau dan mengusulkan perubahan apa pun, jika diperlukan, pada parameter atau indikator risiko apa pun kepada Komite Pemantau Risiko untuk persetujuan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
10. Bertindak sebagai Komite Pencegahan Penipuan dan Korupsi dengan melaksanakan hal berikut:
 - Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan etika karyawan atas penipuan dan korupsi;
 - Melakukan penilaian risiko penipuan dan korupsi setidaknya setiap tiga tahun, atau mengikuti perubahan struktural atau fungsional utama IIF;
 - Menentukan strategi pengendalian penipuan dan korupsi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi oleh pelatihan peningkatan kesadaran atas penipuan dan korupsi serta memahami Kode Etik IIF;
 - Merekomendasikan kebijakan yang sesuai untuk mendeteksi pencegahan penipuan dan korupsi;
 - Meninjau dan memperbarui Panduan Operasi setiap tahunnya;
 - Merumuskan Panduan Pencegahan Penipuan dan Anti-Korupsi untuk memastikan prinsip dan standar praktik terbaik dalam pencegahan penipuan dan korupsi;
 - Mempertimbangkan implikasi dari masalah penipuan dan korupsi yang timbul dari penyelidikan dan memberi nasihat kepada Chief Executive Officer sebagai tindakan yang tepat.

Independensi RMC

Anggota RMC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Rapat RMC

Sepanjang tahun 2019, RMC telah mengadakan rapat internal sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	4	4	100%
I Made Wiracita Tantra	5	5	100%
Indrawati Darmawan	2	2	100%
Devi Pradnya Paramita	-	-	-
Harold Tjiptadaja	5	5	100%
Hilda Savitri	5	5	100%

9. To review and propose any changes, if required, to any risk parameters or indicators to the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners for further approval by the Board of Commissioners.
10. Act as Fraud and Corruption Prevention Committee by conducting the following:
 - Developing strategies to promote fraud and corruption awareness and ethics for employees;
 - Undertaking a fraud and corruption risk assessment at least every three years, or following any major structural or functional changes of the IIF;
 - Determining fraud and corrupting control strategies to address risks identified by the fraud and corruption awareness training and understand the IIF's Code of Conduct;
 - Recommending appropriate policies for the detection and precention of fraud and corruption;
 - Annually reviewing and updating Operation Manual
 - Fraud Prevention and Anti-Corruption Guideline to ensure it reflects best practice principles and standards in fraud and corruption prevention;
 - Considering the implications of fraud and corruption issues arising from investigations and advising the Chief Executive Officer as an appropriate action.

Independency of RMC

Each member of the RMC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

RMC Meeting

During 2019, the RMC has held 5 (five) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:



Agenda yang dibahas pada rapat internal RMC adalah sebagai berikut:

The RMC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
13 Maret 2019 / March 13, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko untuk Triwulan IV 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 3. <i>Stress-test Portofolio Investment</i> 4. Usulan mengenai mekanisme dan kebijakan <i>Whistleblowing</i> 5. Usulan untuk Persetujuan atas Pelampauan <i>Limit</i> Obligasi	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous RMC and ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 4th Quarter of 2018 ending on December 31, 2018 3. Portfolio Investment Stress-Test 4. Recommendation regarding Whistleblowing mechanism and policy 5. Recommendation on Approval of Exceeding Bond Limit
4 Juli 2019 / July 4, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko untuk Triwulan I 2019 yang berakhir tanggal 31 Maret 2019	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous RMC and ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 1st Quarter of 2019 ending on March 31, 2019
6 September 2019 / September 6, 2019	Usulan untuk tinjauan ulang kebijakan pencadangan pinjaman	Recommendation to re-evaluate loan reserve policy
15 Oktober 2019 / October 15, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya 2. Penilaian Parameter Risiko Triwulan II dan III 2019 yang berakhir tanggal 30 September 2019 3. Usulan mekanisme dan kebijakan <i>Whistleblowing</i>	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous RMC and ROC meeting 2. Assessment on Risk Parameters for the 2nd and 3rd Quarter of 2019 ending on September 30, 2019 3. Recommendation on Whistleblowing mechanism and policy
29 November 2019 / November 29, 2019	1. Ringkasan rapat dan tindak lanjut dari kegiatan rapat RMC dan ROC sebelumnya 2. Pembaruan terkait akun-akun SAM (<i>Special Asset Management</i>) 3. Usulan peningkatan presentasi untuk RMC & ROC	1. Minutes of meeting and follow-up from the previous RMC and ROC meeting 2. Updates regarding SAM (<i>Special Asset Management</i>) accounts 3. Recommendation on improved presentation for RMC & ROC

Program Pengembangan Kompetensi RMC

Pada tahun 2019, seluruh anggota RMC mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota RMC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

RMC Competency Development Program

In 2019, all RMC members participated in several competency development activities and programs. The Competency Development Programs for RMC members are available in the Board of Directors' Profile section of the Company Profile Chapter of this Annual Report.

KOMITE ADVISORY

Sebagai unit pendukung fungsi manajerial Direksi, Komite Advisory bertugas khusus meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh proyek Advisory Perseroan, diantaranya memutuskan apakah akan menerima suatu mandat.

ADVISORY COMMITTEE

As a supporting unit for the Board of Directors' managerial functions, the Advisory Committee is tasked specifically with reviewing, considering, and making decisions on the Company's Advisory projects, among them the decision of whether to accept mandate.

Komposisi Komite Advisory

Susunan Komite Advisory periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Composition of the Advisory Committee

The composition of Advisory Committee for the period of January 1, 2019 – April 20, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer
Irman Boyle	Anggota / Member	EVP Head of Advisory

Sementara itu, susunan Komite Advisory periode 20 April 2019 – 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of Advisory Committee for the period of April 20, 2019 – July 31, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer
Irman Boyle	Anggota / Member	EVP Head of Advisory

Sementara itu, susunan Komite Advisory periode 31 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of Advisory Committee for the period of July 31, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Interim Chief Financial Officer / President Director & Interim Chief Financial Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer
Irman Boyle	Anggota / Member	EVP Head of Advisory

Selanjutnya, susunan Komite Advisory periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of Advisory Committee for the period of December 1, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer
Irman Boyle	Anggota / Member	EVP Head of Advisory

Profil Anggota Komite Advisory

Profil dari masing-masing anggota Komite Advisory dapat dilihat di bagian Profil Direksi dan Manajemen Eksekutif dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Profile of Advisory Committee

The profiles of the Advisory Committee members are available in the Profile of the Board of Directors and Executive Management in the Company Profile section of this Annual Report.

Piagam Komite Advisory

Keberadaan Komite Advisory IIF telah dilengkapi dengan Piagam Komite Advisory yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2014.

Advisory Committee Charter

IIF's Advisory Committee at IIF was established through the Charter of the Advisory Committee ratified on December 5, 2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Advisory

Tugas dan tanggung jawab Komite Advisory antara lain adalah:

1. Meninjau, merekomendasikan, dan/atau menyetujui Dokumen Proyek Advisory atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait dengan proyek Advisory Perseroan. Dokumen Proyek Advisory harus dibuat secara detail atau relevan

Duties and Responsibilities of the Advisory Committee

The duties and responsibilities of Advisory Committee are as follows:

1. To review, recommend, and/or approve Advisory Project Documents or similar documents that provide the scope and initial structure related to an Advisory project. The Advisory Project Document must be prepared in detail or made relevant with due consideration to the most

dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada saat tersebut dan harus mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: manfaat pelaksanaan proyek, implikasi terhadap sumber daya Perseroan (waktu pengerjaan, biaya/*budget*, potensi pendapatan, dan lainnya), potensi benturan kepentingan, dan permasalahan KYC;

2. Menerima update secara periodik terkait dengan proyek-proyek *Advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek *pipeline*) dari *Executive Vice President Advisory Group*;
3. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan, untuk meninjau fungsi *Advisory* Perseroan;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan dan/atau prosedur *Advisory* Perseroan dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Komite *Advisory*; dan
5. Meninjau dan memantau implementasi proyek - proyek *Advisory* Perseroan paling sedikit setiap tahun dan meningkatkan frekuensi *review* apabila dianggap perlu, serta menyediakan laporan hasil *review* dan pemantauan kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

Independensi Komite *Advisory*

Anggota Komite *Advisory* senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Rapat Komite *Advisory*

Sepanjang tahun 2019, Komite *Advisory* telah mengadakan rapat internal sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	12	12	100%
I Made Wiracita Tantra	16	16	100%
Indrawati Darmawan*)	10	10	100%
Devi Pradnya Paramita	2	2	100%
Irman Boyle	16	16	100%

*) Masa jabatan Ibu Indrawati Darmawan berakhir pada tanggal 30 Juli 2019

recent information available at that time including but not limited to information on the following matters: benefit of the project's implementation, implication to the Company's resources (time of execution, budget, potential revenue, and others), potential conflict of interests, and KYC issues;

2. To receive periodical updates related to *Advisory* projects (either ongoing projects or those in the pipeline) from the Executive Vice President of the *Advisory Group*;
3. To provide information, assistance, and/or clarification for the Board of Commissioners, whenever necessary, to conduct reviews on the Company's *Advisory* function;
4. To review and adjust *Advisory* policies and/or procedures of the Company from time to time as deemed necessary by the *Advisory Committee*; and
5. To review and monitor the implementation of the Company's *Advisory* projects on a yearly basis and, if necessary, increase the frequency of reviews, and to present related reports to the Board of Commissioners.

Independency of the *Advisory Committee*

Each member of the *Advisory Committee* will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Advisory Committee Meeting

During 2019, the *Advisory Committee* meeting has held 16 (sixteen) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

*) Ms. Indrawati Darmawan terms of office ended on July 30, 2019

Agenda yang dibahas pada rapat internal Komite Advisory adalah sebagai berikut:

The Advisory Committee internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat / Meeting Agenda
16 Januari 2019 / January 16, 2019	Project Advisory Document Shares Acquisition of Water Company Transaction Financial Advisory
22 Februari 2019 / February 22, 2019	Quarterly Advisory Update
1 Maret 2019 / March 1, 2019	Project Advisory Document Establishment of Water Holding Financial Advisory
4 Maret 2019 / March 4, 2019	Project Advisory Document Infrastructure Acceleration and Transaction Management to KPPIP
8 Mei 2019 / May 8, 2019	Project Advisory Document Asset Recycling Framework Preparation for Trans Sumatera Toll Roads Advisory
10 Juni 2019 / June 10, 2019	Project Advisory Document the Establishment of Sustainable Operations of Regional Water Supply Systems
17 Juni 2019 / June 17, 2019	Project Advisory Document United Kingdom Foreign & Commonwealth Office Prosperity Fund Indonesia Renewable Energy Programme
5 Juli 2019 / July 5, 2019	Project Advisory Document National Sanitation Platform
24 Juli 2019 / July 24, 2019	Project Advisory Document Financial Transaction Advisory for Batam Hang Nadim Airport PPP Project
25 Juli 2019 / July 25, 2019	Advisory Memorandum re Scope and Fee Revision for Komodo Airport PPP Transaction Advisory
	Project Advisory Document Financial – Technical Transaction Advisory for Kamijoro Regional Water Supply System PPP
	Project Advisory Document Legok Nangka Waste to Energy (WtE) Financial Advisory PPP Project
	Quarterly Advisory Update
6 Agustus / August 6	Project Advisory Document Presidential Regulation on TTS Mandate Expansion
29 Agustus 2019 / August 29, 2019	Project Advisory Document Preparation of Business Model for the Development of Transit Corridor along Phase-1 MRT Jakarta Stations Financial Advisory
10 Oktober 2019 / October 10, 2019	Project Advisory Document Preparation of Feasibility Study for Djuanda Regional Water Supply System PPP Financial Advisory
8 November 2019 / November 8, 2019	Quarterly Advisory Update
3 Desember 2019 / December 3, 2019	Project Advisory Document Preparation of Feasibility Study for Micro Hydro Power Plant Financial Advisory
6 Desember 2019 / December 6, 2019	Project Advisory Document Financial Advisory for Feasibility Study Unsolicited PPP Project of LRT Cibubur-Bogor

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Advisory di Tahun 2019

Berikut ini merupakan rincian kegiatan yang diikuti Wakil Presiden Eksekutif sebagai pembicara sepanjang tahun 2019:

Implementation Report of Advisory Committee Activities in 2019

The following are details of the activities participated in by Executive Vice President as a speaker throughout 2019:

Nama / Name	Tanggal / Date	Agenda
Irman Boyle	26 April 2019 / April 26, 2019	PII Infrastructure Summit, Universitas Padjadjaran / PII Infrastructure Summit, Padjadjaran University
	8 Agustus 2019 / August 8, 2019	Seminar Transaction Advisory, Kementerian Keuangan / Transaction Advisory Seminar, Ministry of Finance
	4 Oktober 2019 / October 4, 2019	Capacity Building Pemerintah Daerah Banjarnegara dan Wonosobo, Geo Dipa / Capacity Building of Banjarnegara and Wonosobo Regional Governments, Geo Dipa
	27 November 2019 / November 27, 2019	Mandiri Sekuritas Macro Week 2019

Program Pengembangan Kompetensi Komite Advisory

Pada tahun 2019, seluruh anggota Komite Advisory mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota Komite Advisory dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Advisory Committee Competency Development Program

In 2019, all Advisory Committee members participated in several competency development activities and programs. The Competency Development Programs for Advisory Committee members are available in the Board of Directors' Profile section in the Corporate Profile Chapter of this Annual Report.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (HRC)

Sebagai unit pendukung fungsi manajerial Direksi, Komite Sumber Daya Manusia atau Human Resources Committee (HRC) bertugas khusus meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh hal kepegawaian Perseroan.

HUMAN RESOURCES COMMITTEE (HRC)

To support managerial function of the Board of Directors, the Human Resources Committee (HRC) is tasked with reviewing, considering, and making decisions on all matters related to the Company's personnel.

Komposisi HRC

Susunan anggota HRC periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Composition of the HRC

The composition of the HRC for the period of January 1, 2019 – April 20, 2019 is as follows:

Sementara itu, susunan anggota HRC periode 20 April 2019 – 30 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the HRC for the period of April 20, 2019 – July 30, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan*)	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

*) Ibu Indrawati Darmawan mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Plt. Direktur Keuangan efektif pada tanggal 31 Juli 2019

*) Ms. Indrawati Darmawan resigned and was officially replaced by Mr. Reynaldi Hermansjah as the Acting Chief Financial Officer on July 31, 2019

Sementara itu, susunan anggota HRC periode 30 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the HRC for the period of July 30, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Plt. Direktur Keuangan / President Director & Chief Executive Officer and Interim Chief Financial Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer / Director & Chief Investment Officer

Sementara itu, susunan anggota HRC periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur & Chief Risk Officer / Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur & Chief Financial Officer / Director & Chief Financial Officer
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer/ Director & Chief Investment Officer
Hilda Savitri	Anggota / Member	Direktur & Chief Investment Officer/ Director & Chief Investment Officer

Profil HRC

Profil dari masing-masing anggota HRC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dan Manajemen Eksekutif dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Piagam HRC

HRC dibentuk berdasarkan Piagam HRC tanggal 14 Desember 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab HRC

Dengan dirumuskannya struktur organisasi IIF yang baru, Perseroan membentuk HRC yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Dalam hal Kepegawaian dan Pengembangan
Memutuskan dan menyetujui seleksi, penempatan, dan pemberhentian pegawai senior Perseroan (tingkat Assistant Vice President ke atas) sesuai dengan kriteria subjektif dan objektif yang dapat diterima. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pertumbuhan Perseroan, menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa kinerja Perseroan tidak terganggu oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja buruk;
2. Dalam hal Manajemen Kinerja
Membuat tujuan-tujuan Perseroan dan karyawan, terutama untuk karyawan dengan tingkat Executive Vice President dan staf, serta menyesuaikan hasilnya di dalam Perseroan.
3. Dalam hal Kompensasi dan Manfaat
Menetapkan kebijakan remunerasi untuk karyawan dengan tingkat Executive Vice President dan staf, menyetarakan remunerasi dengan kinerja yang diukur dengan tolok ukur industri sejenis, pencapaian indikator-indikator kinerja yang penting, nilai tambah ekonomis, dan faktor-faktor lainnya.

Meanwhile, the composition of the HRC for the period of July December 1, 2019 – December 31, 2019 is as follows:

HRC Profile

The profiles of the HRC members are available in the Board of Directors and Executive Management in the Company Profile section of this Annual Report.

HRC Charter

The HRC was established pursuant to the HRC Charter dated December 14, 2015.

Duties and Responsibilities of the HRC

Following the formulation of the Company's new organization structure, the HRC was established to carry out the following duties and responsibilities:

1. In terms of Employment and Development
To decide and approve the selection, placement, and termination of the Company's senior employees (Assistant Vice President and above) according to subjective and objective criteria deemed to be acceptable. This authority aims to ensure effective human resources planning to support the Company's growth in the face of potential challenges and ensure that the Company's performance is not significantly affected by poor performance of its human resources;
2. In terms of Performance Management
To determine objectives of the Company and employees, particularly for the Executive Vice President and staff, and review the objectives of the office;
3. In terms of Compensation and Benefit
To determine remuneration policies for the employees at the Executive Vice President and staff, adjust the remuneration package to performance measured using industry benchmarks, accomplishment of key performance indicators, economic added value and other factors;





4. Menetapkan kebijakan, strategi, dan keputusan terkait dengan sumber daya manusia yang bersifat umum yang berpotensi memengaruhi Perseroan secara keseluruhan.

Kewenangan HRC

Dalam rangka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, HRC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawabnya dari Direksi, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak eksternal kapan pun diperlukan;
- Memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, mengundang, dan mengikutsertakan karyawan atau konsultan internal atau independen Perseroan untuk menghadiri rapat Komite.

Independensi HRC

Anggota HRC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

4. To determine the general policies, strategies, and decisions related to general human resources that are pivotal to the Company's overall performance.

Authority of the HRC

In order to accomplish the abovementioned duties and responsibilities, the HRC is authorized to:

- Obtain access to information required to carry out said responsibilities from the Company's Board of Directors, executive, staff, employees, and external parties at any time;
- Select, invite, and include employees, internal consultants, or independent consultants of the Company to attend meetings by the Committee.

Independency of the HRC

Each member of the HRC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Rapat HRC

Sepanjang tahun 2019, HRC telah mengadakan rapat internal sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	2	2	100%
I Made Wiracita Tantra	5	5	100%
Devi Pradnya Paramita	1	1	100%
Harold Tjiptadjaja	5	5	100%
Hilda Savitri	5	5	100%
Irman Boyle	3	3	100%
Indrawati Dermawan*)	5	5	100%

*) Ibu Indrawati Darmawan efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan sampai dengan 30 Juli 2019 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Plt. Direktur Keuangan

HRC Meeting

During 2019, the HRC has conducted 5 (five) internal meetings, with the attendance rate of each member detailed below:

*) Ms. Indrawati Darmawan effectively serves as Board of Directors until July 30, 2019, and has been replaced by Mr. Reynaldi Hermansjah as the Finance Director Interim

Agenda yang dibahas pada rapat internal HRC adalah sebagai berikut:

The HRC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Date of Meeting	Agenda Rapat	Meeting Agenda
11 Februari 2019 / February 11, 2019	<i>Cascade down</i> KPI Perusahaan ke KPI Direktorat	Cascade down of the Company's KPI to the KPI Directorate
5 Maret 2019 / March 5, 2019	1. <i>Performance Appraisal</i>, Penetapan Nominasi Karyawan (Promosi, Demosi, Rotasi) dan <i>Calibration Performance Appraisal Result</i> 2. Pembahasan <i>Benefit – Training</i> Dewan Komisaris 3. Pembahasan <i>Benefit</i> Karyawan (DPLK & COP) 4. <i>Leader of Outing Committee Appointment</i>	1. Performance Appraisal, Employee Nomination Establishment (Promotion, Demotion, Rotation) and Calibration Performance Appraisal Result 2. Discussion on Benefit – Training of the Board of Commissioners 3. Discussion on Employee Benefit (DPLK & COP) 4. Leader of Outing Committee Appointment
12 April 2019 / April 12, 2019	1. Keputusan Promosi Karyawan Tahun 2019 2. <i>Salary Adjustment</i> 2019 3. <i>Budget Salary Adjustment vs Budget Usage Planning</i>	1. Employee Promotion Decisions in 2019 2. Salary Adjustment 2019 3. Budget Salary Adjustment vs Budget Usage Planning
14 November 2019 / November 14, 2019	Presentasi Persiapan Implementasi FCP: 1. <i>Establishment Grade 6</i> 2. <i>External Title</i> 3. Kamus Kompetensi	Presentation on the preparation of the FCP implementation: 1. Establishment Grade 6 2. External Title 3. Competency Dictionary
13 Desember 2019 / December 13, 2019	Presentasi Persiapan Implementasi FCP: 1. <i>External Title Front (Investment, Advisory)</i> dan Direktorat Risiko 2. <i>Grade to Grade Promotion</i> (G2GP) 3. <i>Open Career Path</i> (OCP)	Presentation on the preparation of the FCP implementation: 1. External Title Front (Investment, Advisory) and Risk Directorate 2. Grade to Grade Promotion (G2GP) 3. Open Career Path (OCP)

Program Pengembangan Kompetensi HRC

Pada tahun 2019, seluruh anggota HRC mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota HRC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

HRC Competency Development Program

In 2019, all HRC members participated in several competency development activities and programs. The HRC members' Competency Development Programs are available in the Board of Directors' Profile section in the Corporate Profile Chapter of this Annual Report.



KOMITE PENGARAH TI (ITSC)

Teknologi Informasi (TI) yang unggul telah menjadi kebutuhan pokok dalam setiap kegiatan usaha. Untuk itu, Perseroan membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi atau *Technology Steering Committee* (ITSC) yang bertugas mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi Perseroan.

Komposisi ITSC

Susunan ITSC periode 1 Januari 2019 – 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
I Made Wiracita Tantra	Ketua / Chairman	Plt. Presiden Direktur & Chief Risk Officer / President Director Interim & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer

Sementara itu, susunan ITSC periode 20 April 2019 – 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer

Sementara itu, susunan ITSC periode 31 Juli 2019 – 1 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Interim Chief Financial Officer / President Director & Interim Chief Financial Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer

Selanjutnya, susunan ITSC periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan di Perusahaan / Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua / Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer / President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer / Managing Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer / Managing Director & Chief Financial Officer

Profil ITSC

Profil dari masing-masing anggota ITSC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dan Manajemen Eksekutif dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

IT STEERING COMMITTEE (ITSC)

Excellent Information Technology (IT) has become a basic requirement of doing business. Therefore, the Company has established the Information Technology Steering Committee (ITSC) to develop the capacity and capabilities of the Company's information technology system.

Composition of the ITSC

The composition of the ITSC for the period of January 1, 2019 – April 20, 2019 is as follows:

Meanwhile, the composition of the ITSC for the period of April 20, 2019 – July 31, 2019 is as follows:

Meanwhile, the composition of the ITSC for the period of July 31, 2019 – December 1, 2019 is as follows:

Meanwhile, the composition of the ITSC for the period of December 1, 2019 - December 31, 2019 is as follows:

ITSC Profile

The profiles of the ITSC members are available in the Profile of the Board of Directors and Executive Management in the Company Profile section of this Annual Report

Piagam ITSC

Pembentukan ITSC mengacu pada Piagam (*charter*) ITSC.

Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

Rincian tugas ITSC mencakup:

1. Memprioritaskan inisiatif dan menyelaraskan TI dengan strategi bisnis serta mengawasi strategi, proyek, dan keputusan arsitektur teknologi yang terkait dengan teknologi informasi;
2. Memprioritaskan inisiatif investasi di bidang TI dan memberikan persetujuan akhir dan rekomendasi tentang keberlanjutan usulan proyek TI;
3. Menyelaraskan bisnis strategis dengan investasi TI melalui perencanaan TI strategis;
4. Meninjau dan memantau proyek-proyek utama di bidang TI dari perspektif lintas fungsional;
5. Mencapai keseimbangan antara kendala yang dihadapi di bidang TI dengan prioritas bisnis;
6. Mempromosikan Lintas Sinergi Fungsional
7. Memberikan informasi terkait TI kepada Direksi dan Dewan Manajemen (Manajemen Perseroan);
8. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara Departemen TI dan unit fungsional lainnya di Perseroan sebagai upaya mempromosikan perencanaan secara bersama;
9. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya dengan melakukan pengawasan terhadap manfaat yang terealisasi;
10. Memantau apakah inisiatif TI secara efektif mendukung tujuan bisnis dan strategi Perseroan;
11. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko TI;
12. Memberikan kepemimpinan Manajemen Risiko TI dengan:
 - Memahami dan mengidentifikasi risiko TI dan mengupayakan pengelolaan yang efektif atas risiko tersebut;
 - Mengelola eksposur dan ambang batas risiko TI.
13. Menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko; dan
14. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara Departemen TI dengan unit-unit fungsional lain sebagai upaya mempromosikan manajemen risiko secara bersama.

ITSC Charter

The ITSC was established based on the ITSC Charter.

Duties and Responsibilities of ITSC

Duties of the ITSC are as follows:

1. To prioritize initiatives and align the Company's IT systems with its business strategy, and oversee IT-related strategies, projects and decisions on technological architecture;
2. To prioritize IT investment initiatives and deliver final approval and recommendations on the follow-up of proposed IT projects;
3. To align strategic businesses and IT investments through strategic IT planning;
4. To review and monitor major IT projects from a cross-functional perspective;
5. Counteract IT-related constraints according to business priorities;
6. To promote Cross Functional Synergy;
7. To inform the Board of Directors and Management (Management of the Company) on IT related matters;
8. To ensure open communication between the IT Department and other functional units of the Company in order to promote collaborative planning;
9. To resolve conflicts related to resources by overseeing the benefits that have been realized;
10. To monitor the effectiveness of IT initiatives insupporting the Company's business objectives and strategies;
11. To oversee IT risk Management;
12. To provide IT risk management leadership IT by:
 - Understanding and identifying IT risks and endeavor to manage the risks effectively;
 - Managing IT risk exposure and thresholds.
13. To resolve resource allocation issues based on risk prioritization; and
14. To ensure open communication between the IT department and other functional units to promote collaborative risk management.



Independensi ITSC

Anggota ITSC senantiasa bertindak independen dan dengan iktikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Independency of the IT Committee

Each member of the ITSC will always act independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Rapat ITSC

Sepanjang tahun 2019, ITSC telah mengadakan rapat internal bersama Unit *Operation & IT* dan *Operation Risk* sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

ITSC Meeting

During 2019, the ITSC has held 3 (three) internal meetings with the Operation & IT and Opeation Risk Units, with the attendance rate of each member detailed below:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) / Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	3	3	100%
Indrawati Darmawan	2	2	100%
I Made Wiracita Tantra	3	3	100%
Devi Pradnya Paramita	-	-	-

Agenda yang dibahas pada rapat internal ITSC adalah sebagai berikut:

The ITSC internal meeting discussed the following matters:

Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
16 Mei 2019 / May 16, 2019	1. Presentasi dan <i>progress</i> Laporan IT <i>Initiatives</i> 2. Diskusi IT <i>Budget</i> 2019 3. Pengenalan Singkat tentang Organisasi TI kepada CEO	1. Presentation and progress of IT Initiatives 2019 Report 2. Discussion on IT Budget 2019 3. Brief Introfuction about IT Organization to the CEO
24 Juli 2019 / July 24, 2019	1. <i>Cognos Improvement Project</i> (persetujuan untuk proyek yang tertunda) 2. Relokasi <i>Data Center</i> 3. <i>Disaster Recovery Center Tender</i> 4. Sumber daya TI 5. <i>Update</i> progres IT Strategic Plan	1. Cognos Improvement Project (approval for the delayed projects) 2. Data Center relocation 3. Disaster Recovery Trade Center 4. IT resources 5. Update progrees of IT Strategic Plan
8 November 2019 / November 8, 2019	1. <i>Update</i> status ITSC terakhir (sejak Mei) 2. <i>Update</i> proyek Office 365 3. Diskusi rencana relokasi Data Center 4. Progres IT <i>Initiatives</i> tahun 2019 5. Progres IT Strategic Plan (ITSP) 2019 6. <i>Update</i> Portofolio dan <i>Landscape</i> TI 7. Diskusi IT <i>Initiative and Budget</i> 2020	1. Update of the last ITSC status (since May) 2. Update of Office 265 project 3. Discussion on Data Center relocation plan 4. Progress of IT Initiatives 2019 5. Progrees of IT Strategic Plan (ITSP) 2019 6. Update of IT Portfolio and Landscape 7. Discussion on IT Initiative and Budget 2020

Program Pengembangan Kompetensi ITSC

Pada tahun 2019, seluruh anggota ITSC mengikuti beberapa kegiatan dan program pengembangan kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi anggota ITSC dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

ITSC Competency Development Program

In 2019, all ITSC members participated in several competency development activities and programs. The Competency Development Programs for ITSC members are available in the Board of Directors' Profile section in the Corporate Profile Chapter of this Annual Report.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selain menjadi ujung tombak dalam urusan komunikasi dengan pihak luar, Sekretaris Perusahaan juga berperan penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan GCG di Perseroan, terutama yang berkenaan dengan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Sekretaris Perusahaan wajib memastikan ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan terbaru, serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan agar Perseroan dapat senantiasa memenuhi regulasi yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan



NASTANTIO W. HADI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 50 tahun dan berdomisili di Jakarta. Beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan oleh Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana termaktub dalam Surat No. S.2016.153/IV/IIF tanggal 7 April 2016.

Lulus dengan gelar Sarjana Hukum di bidang Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993) dan gelar Lex Legibus Master (LL.M.) di bidang International Business Law dari Washington College of Law – the American University, Washington DC, Amerika Serikat (1996).

Sebelum bergabung dengan IIF, beliau pernah bekerja pada firma hukum Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) dan Pradjoto & Associates (2000-2005). Setelah berkarier di firma hukum, beliau mengepalai divisi hukum dari suatu perusahaan penyedia jasa logistik.

Hingga saat ini, beliau tidak rangkap jabatan di perusahaan manapun.

CORPORATE SECRETARY

In addition to being the Company's main representative to external parties, the Corporate Secretary also plays an important role in ensuring the successful implementation of GCG within the Company, especially in the implementation of transparency and responsibility. The Corporate Secretary is tasked with ensuring the availability of accurate, clear and up-to-date information, and staying abreast of relevant laws and regulations so that the Company can always maintain regulatory compliance.

Profile of the Corporate Secretary

An Indonesian citizen, 50 years old and domiciles in Jakarta. He was appointed as the Corporate Secretary by the Board of Directors of the Company since December 29, 2011 based on Letter No. S.2016.153/IV/IIF dated April 7, 2016.

He graduated with a Bachelor's degree in Civil Law from the Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1993) and Lex Legibus Master (LL.M.) degree in International Business Law from Washington College of Law – the American University, Washington DC, USA (1996).

Prior to joining IIF, he worked at the legal firm Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) and Pradjoto & Associates (2000-2005). Afterwards, he headed the legal division of a logistics company.

Currently, he does not hold concurrent positions in other companies.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan IIF meliputi:

1. Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik;
2. Mengelola hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
3. Melakukan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perseroan;
4. Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas, sesuai dengan Pedoman Operasional Perusahaan, Kesepakatan Pemegang Saham, dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah memenuhi tugas dan kewajibannya secara umum, termasuk menjadi notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi, merilis informasi terkini mengenai kondisi Perseroan, merumuskan pesan yang akan disampaikan oleh Direksi kepada pihak internal maupun eksternal Perseroan, serta memastikan kelancaran komunikasi dengan pihak otoritas, pemegang saham, mitra kerja hingga masyarakat.

Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan Sekretaris Perusahaan di tahun 2019 meliputi:

1. *Signing ceremony* atas berbagai macam proyek infrastruktur, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun institusi pemerintahan;
2. Penyelenggaraan RUPS dan RUPSLB;
3. Kegiatan internal Perusahaan: rapat Dewan Komisaris yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, *townhall meeting*, *outing* tahunan, *employee gathering*, dan sebagainya;
4. Kegiatan promosi melalui sponsorship untuk konferensi atau event lainnya, seperti Euromoney;
5. Melakukan *update* informasi untuk Pemegang Saham melalui *website*, *company profile*, dan *marketing kits* lainnya;
6. Menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang baik dan bersifat filantropi maupun dukungan pada bidang infrastruktur berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dasar
7. Menyelenggarakan *Investor Gathering* atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary of IIF include:

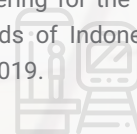
1. To ensure compliance with GCG principles;
2. To professionally manage the Company's relationship with Shareholders and Stakeholders;
3. To perform legal functions and act as a legal consultant, particularly on matters related to issues faced by the Company;
4. To ensure the availability of reports pertaining to Risk Management, Social & Environmental Performance and Due Diligence reports, pursuant to the Company's Operating Manual, Shareholders' Agreement, and/or prevailing laws and regulations.

Corporate Secretary Activities

During 2019, the Corporate Secretary has fulfilled his duties and responsibilities in general, including acting as notary at the meetings conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners, releasing new information on the state of the Company, formulating messages to be delivered by the Board of Directors to internal and external parties, and ensuring smooth communication with authorities, shareholders, work partners and the community.

Furthermore, the Corporate Secretary has also conducted the following activities during the financial year:

1. Officiated signing ceremonies for various infrastructure projects involving both private companies and government institutions;
2. Convened the Annual GMS and Extraordinary;
3. Organized Company's internal activities, such as meetings of Board of Commissioners, town hall meetings, yearly outings, employee gatherings, and so on.
4. Organized promotional events through sponsorships to different conferences and events, such as Euromoney;
5. Conducted information update on the Company's website, profile, and other marketing materials to be distributed to the Shareholders;
6. Organized Corporate Social Responsibility (CSR) activities, both philanthropic and support for technology-based infrastructure and science,
7. Held an Investor Gathering for the public Offering of Shelf-Registration Bonds of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019.



Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program of the Corporate Secretary

Nama / Name	Jabatan / Position	Judul Pelatihan / Title Training	Vendor	Tanggal / Date	Tempat / Venue
Nastantio W. Hadi	Head of Legal and Corsec	<i>Workload Analysis Workshop</i>	PwC	8 Mei 2019 / May 8, 2019	IIF Office
		<i>Operational Risk Socialization</i>	Ops Risk and S&E Team	27 Mei 2019 / May 27, 2019	IIF Office
		<i>SOP Socialization: HRGA and IT ops</i>	HRGA, IT OPS team	17 Juli 2019 / July 17, 2019	IIF Office
		<i>Coaching Skills Training</i>	SMBC	29 Agustus 2019 / August 29, 19	Jakarta
		<i>Team Building: Outing</i>	IIF Committee	22-23 Agustus 2019 / August 22-23, 2019	Bali
		<i>IIF SEMS Working Workshop</i>	World Bank	30 September 2019 / September 30, 2019	Hotel Dharmawangsa
		<i>SIAC Sharing Session</i>	SIAC	30 Oktober 2019 / October 30, 2019	IIF Office
		<i>KPBU Public Sector Advisory</i>	Advisory Team	15 November 2019 / November 15, 2019	IIF Office
		<i>S&E Awareness SEP 1</i>	S&E Team	27 November 2019 / November 27, 2019	IIF Office
		<i>S&E Awareness (Principal 3&4)</i>	S&E Team	6 Desember 2019 / December 6, 2019	IIF Office

AUDIT INTERNAL

Satuan Audit Internal adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Sebagai layanan kepada Manajemen, Audit Internal bertindak sebagai penilai independen yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan dan kualitas kinerja. Fungsi penjamin pengendalian ini secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan Manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola, yang memungkinkan Manajemen menjadi lebih efektif dalam mencapai target usaha dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Pemegang Saham Perseroan. Keberadaan Audit Internal di IIF mengacu pada ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Kriteria Auditor Internal

Auditor Internal harus memiliki kualifikasi di bawah ini:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Unit is an independent unit reporting directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. In attending to the needs of the Company's Management, the Internal Audit Unit acts as an independent evaluator of the adequacy and effectiveness of the Company's internal control systems and performance quality. This assurance function systematically evaluates and improves the effectiveness of risk management, control, and governance processes, thereby allowing management to better attain corporate objectives and fulfill their obligations to the Company's Shareholders. The establishment of IIF's Internal Audit Unit is pursuant to the provision of POJK No. 56/POJK.04/2015.

Criteria for Internal Auditors

An Internal Auditor must possess the following qualifications:

- Integrity along with professionalism, independence, honesty, and objectivity in carrying out their duties;
- Knowledgeable and experienced in the technical aspects of auditing and other relevant disciplines;



- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif;
 - Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
 - Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Manajemen risiko; dan
 - Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Excellent communication skills, both verbal and written;
 - Compliance with professional standards issued by the association of Internal Auditors;
 - Ability to maintain confidentiality of information and/or corporate data related to the implementation of the duties and responsibilities of an Internal Auditor, except when disclosure is legally required or requested through court order;
 - A solid understanding of good corporate governance principles and risk management; and
 - Objectivity in implementing their duties and the ability to provide objective evaluations based on actual conditions.

Struktur Kedudukan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan wajib menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.

Kepala Audit Internal juga bertanggung jawab untuk pengembangan, review, dan modifikasi kebijakan audit, prosedur untuk pelaksanaan audit. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus dilaporkan segera ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualifikasi dan Sertifikasi Audit Internal

Auditor Internal IIF memiliki latar belakang serta kualifikasi profesi yang relevan terkait dengan tugas-tugasnya di Perseroan. IIF juga senantiasa memfasilitasi Auditor Internal dalam meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan pada beragam sertifikasi profesi di bidang Audit Internal.

Per tanggal 31 Desember 2019, anggota Unit Audit Internal berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Audit Internal dan 2 (dua) Anggota Audit Internal. Berikut merupakan daftar Auditor Internal IIF beserta informasi mengenai kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:

Structural Position of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is chaired by a Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director with approval of the Board of Commissioners. The Head of Internal Audit reports directly to the President Director and is obliged to submit internal audit reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Head of the Audit Committee.

The Head of Internal Audit is also responsible for developing, reviewing, and modifying audit policies, procedures, and performance. Every appointment, replacement, and termination of the Head of Internal Audit Unit must be immediately reported to the Financial Services Authority.

Qualifications and Certifications of Internal Auditors

All of IIF's Internal Auditors possess the relevant professional backgrounds and qualifications as required by their duties in the Company. IIF continuously seeks to improve the capabilities of its Internal Auditors by facilitating their participation in various certification programs.

As of December 31, 2019, the Internal Audit Unit consists of 3 (three) people, including 1 (one) Head of Internal Audit and 2 (two) Members of Internal Audit. The following is a list of the Company's Internal Auditors and the qualifications and certifications of each:



Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti / Certifications and Trainings	Penyelenggara / Organizer	Keterangan / Description
Yudi Adrial	Kepala Audit Internal / Head of Internal Audit	<i>Certified Assessor</i>	Institute of Internal Auditor (IIA)	Sertifikasi / Certification
		<i>Certified Internal Auditor</i>	Institute of Internal Auditor (IIA)	
		<i>Sarbanes Oxley Act 404 Training</i>	Ernst & Young	
		<i>Governing Risk Through Uncertain Time Seminar</i>	Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia	
		<i>Forensic Auditing Training</i>	Zenith	
		<i>Know Your Customers & Anti Money Laundering Training</i>	IIF	
		<i>Leadership Greatness</i>	Dunamis	
		<i>Anticorruption Seminar for Private Sector</i>	Asian Development Bank (ADB)	
		<i>Results based Monitoring and Evaluation Workshop</i>	World Bank (WB)	
		<i>Structure Thinking and Business Communication Training</i>	Transformation Institute	
		<i>Workload Analysis Workshop</i>	PwC	
		<i>Operational Risk Socialization</i>	Ops Risk and S&E Team	
		<i>Sosialisasi PSAK 71 / PSAK 71 Dissemination</i>	Product Development Team	
		<i>Letter of Credit Training</i>	LPEI	
		<i>Trade Finance Training (Guarantees Product)</i>	LPEI	
		<i>IIF SEMS Working Workshop</i>	World Bank	
		<i>KPBU Public Sector Advisory</i>	IIF - Advisory Team	
		<i>S&E Awareness (Principal 5&6)</i>	IIF - S&E Team	
		<i>S&E Awareness (Principal 3&4)</i>	IIF - S&E Team	
		<i>Sosialisasi PSAK 71 / PSAK 71 Dissemination</i>	IIF - Product Development Team	
Rama Aditia	Staf Audit Internal / Staff of Internal Audit	<i>Insurance for Project Financing</i>	Jardine Lloyd Thompson	Training
		<i>Beginning Audit</i>	Lembaga Pengembangan Audit Internal	
		<i>Document Management and Workflow Collaboration</i>	PT OTI Transformasi Lintas International	
		<i>Procurement Management</i>	PT Surabaya Teknika Cipta Konsultan	
		<i>Know Your Customers & Anti Money Laundering Training</i>	IIF	
		<i>Effective Procurement Management</i>	Trimitra Consultant	
		<i>Insurance for Company Liabilities</i>	AON	
		<i>Cashflow and Treasury Management</i>	Johnson Indonesia	
		<i>Financial Modelling</i>	Essence Consultant	
		<i>Social and Environment</i>	ERM	
		<i>Effective Negotiation</i>	Dunamis	
		<i>Continuous Audit _ Improve IA Capability in Providing Assurance</i>	YPIA	
		<i>Credit Documentation Template</i>	Prima Integrasi Solusindo	
		<i>Pefindo Checking</i>	PEFINDO	
		<i>Fraud Risk Management</i>	ACFE	
		<i>Operational Risk Socialization</i>	IIF - Ops Risk and S&E Team	
		<i>Knowledge Sharing Product Development</i>	IIF - Product Development Team	
		<i>SOP Socialization : HRGA and IT ops</i>	IIF - HRGA, IT OPS team	
		<i>SOP Socialization : Credit Risk</i>	IIF - Credit Risk Team	
		<i>English Business Writing</i>	English for Business	
		<i>S&E Awareness SEP 1</i>	IIF - S&E Team	
		<i>S&E Awareness (Principal 5&6)</i>	IIF - S&E Team	

Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti / Certifications and Trainings	Penyelenggara / Organizer	Keterangan / Description
Rima Haryati	Staf Audit Internal / Staff of Internal Audit	Tax and PSAK Update	Grant Thornton Indonesia	Training
		International Standard on Auditing (ISA)	Grant Thornton Indonesia	
		Insurance for Project Financing	Jardine Lloyd Thompson	
		Accounting (Based on PSAK 70)	PT Equine Global	
		Credit Documentation Template	Prima Integrasi Solusindo	
		Website Training	Fuselab	
		Operational Risk Socialization	IIF - Ops Risk and S&E Team	
		SOP Socialization : HRGA and IT Ops	IIF - HRGA, IT OPS team	
		Teknik Komunikasi Audit	Johnson Indonesia	
		Sosialisasi PSAK 71	IIF - Product Development Team	
		SOP Socialization : Credit Risk	IIF - Credit Risk Team	
		Trade Finance Training (Guarantees Product)	LPEI	
		English Business Writing	English for Business	
		KPBU Public Sector Advisory	IIF - Advisory Team	
		Internal Audit Certificate	IIAI	
		S & E Awareness (Principle 7&8)	IIF - S&E Team	

Profil Kepala Audit Internal

Profile of the Head of Internal Audit



YUDI ADRIAL
Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 41 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal oleh Direksi berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan No. 001/IIF/BOC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

Berbekal gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, beliau telah berpengalaman selama 18 tahun di bidang Konsultan Manajemen dan Lembaga Keuangan. Pengalaman auditnya meliputi 6 tahun sebagai seorang konsultan di Ernst & Young dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT NISP Sekuritas selama 2 tahun. Beliau juga memegang sertifikat Certified Internal Auditor (CIA) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

An Indonesian citizen, 41 years old. He was appointed as the Head of Internal Audit by the Board of Directors of the Company based on Letter of Appointment No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated March 30, 2012 and approved by the Board of Commissioners of the Company based on Circular Resolution of the Board of Commissioners No. 001/IIF/BOC-RES/IV/2016 dated April 21, 2016.

He received his Bachelor's degree from the University of Indonesia and has 18 years of experience in Management and Financial Consulting. His audit experience includes 6 years as a consultant at Ernst & Young and 2 years as the Head of Compliance Unit at PT NISP Sekuritas. He is also a Certified Internal Auditor (CIA) accredited by the Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

Piagam Kerja Audit Internal

Internal Charter adalah sebuah dokumen formal tertulis yang menjabarkan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Audit Internal. Charter ini menetapkan posisi Audit Internal di dalam organisasi, memberi wewenang

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit Charter is an official written document that defines the purpose, authority, and responsibility of the Internal Audit Unit. The charter affirms the position of the Internal Audit Unit within the

untuk mendapatkan berbagai catatan, memasuki berbagai bangunan fisik yang relevan dengan kinerja, dan menguraikan lingkup kerja. *Audit Internal Charter* IIF telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur pada tanggal 28 November 2012.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, yaitu:

- Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel menggunakan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh Manajemen dan menyampaikan rencana itu kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbarui secara periodik;
- Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk di dalamnya tugas-tugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh Manajemen dan Komite Audit;
- Menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;
- Mengaudit dan menginformasikan secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktik terbaik yang biasa dilakukan dalam Audit Internal;
- Membantu penyelidikan kasus signifikan yang diduga merupakan kegiatan penipuan di dalam Perseroan dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen; dan
- Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator untuk menyediakan cakupan audit yang optimal kepada Perseroan dengan biaya keseluruhan yang wajar.

Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sepanjang tahun 2019, Unit Audit Internal telah melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi, sebagai berikut:

- a. Melakukan audit atas area-area sebagai berikut:
 - i. Treasury and Treasury Operation Management;
 - ii. Advisory Management; dan
 - iii. Procurement.
- b. Menunjuk external konsultan (RSM) untuk melaksanakan tinjauan fungsi Internal Audit Perseroan. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh RSM

organization, authorizes it to obtain various records, to enter premises relevant to its duties, and defines the unit's scope of work. The Company's Internal Audit Charter was signed by the President Commissioner and President Director on November 28, 2012.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

As stipulated in its Charter, the responsibilities of the Internal Audit Unit are as follows:

- To develop adaptable annual audit plans using appropriate risk-based methodologies, which cover any risk or control issues identified by the management, and to submit the plan to the Audit Committee for further review and approval as well as periodical renewal;
- To carry out approved annual audit plans, including specialized tasks or projects requested by the Management and Audit Committee;
- To evaluate the efficiency and effectiveness of activities in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and others;
- To perform audits on the Company's compliance with prevailing rules and regulations;
- To monitor, analyze, and report follow-up actions based on recommendations made;
- Perform audits on trends and best practices for Internal Audit work and keep the Audit Committee abreast of such information;
- To provide assistance in investigations when fraudulent activities are suspected to have occurred within the Company and submit the results of these investigations to the management and the Audit Committee; and
- To consider and determine the scope of audit work to be performed by external auditors and regulators in order to provide optimal auditing coverage at a reasonable cost.

Internal Audit Duty Implementation Report

In 2019, the Internal Audit Unit has performed audit duties and consultation activities as follows:

- a. Performing audit in the following areas:
 - i. Treasury and Treasury Operation Management;
 - ii. Advisory Management; and
 - iii. Procurement.
- b. Appointing external consultant (RSM) to conduct review of the Company's Internal Audit Function. Based on the review performed by RSM Indonesia

Indonesia (RSM), dapat disimpulkan bahwa aktivitas Departemen Audit Internal IIF secara umum telah Sesuai dengan Standar IPPF (Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal / ISPPIA). Namun, untuk meningkatkan praktik keseluruhan Departemen Audit Internal IIF serta untuk memenuhi Standar IPPF (ISPPIA) yang ditetapkan oleh IIA, RSM telah mengidentifikasi 8 inisiatif peningkatan yang dibagi menjadi 5 aspek yaitu struktur, strategi, orang, teknologi dan proses.

- c. Secara berkala dan dalam batas tertentu melakukan tinjauan atas laporan keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Melakukan review atas pembaharuan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perseroan untuk memastikan kesesuaian alur proses dan aktivitas kerja dimasing-masing unit kerja, serta menilai kecukupan atas desain pengendalian internal perusahaan.
- e. Melakukan pendampingan untuk pihak-pihak eksternal, yakni:
 - i. Pendampingan untuk Penugasan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - ii. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh tim World Bank;
 - iii. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh ADB; dan
 - iv. Pendampingan dalam pemenuhan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AUDIT EKSTERNAL

Auditor Eksternal ditunjuk melalui rekomendasi Komite Audit yang disampaikan ke Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui dalam forum RUPS. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 30 Juli 2019, Perusahaan menunjuk KAP Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Selain melakukan audit Laporan Keuangan tahun 2019, auditor eksternal juga memberikan jasa review atas Laporan Kinerja IIF. Biaya jasa auditor eksternal yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000.000.

Informasi mengenai Auditor Eksternal IIF dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun / Year	Auditor Eksternal / External Auditor
2015	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2016	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2017	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2018	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2019	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja

(RSM), it was concluded that the activities of IIF Internal Audit Department in general has complied with IPPF Standards (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing/ISPPIA). Nevertheless, to improve the general practice of IIF Internal Audit Department and to comply with IPPF Standards (ISPPIA) established by IIA, RSM identified 8 improvement initiatives classified into 5 aspects, namely structure, strategy, people, technology, and process.

- c. Periodically and within certain limits performing review on financial statements to ensure compliance with the prevailing regulations.
- d. Performing review on update of the Company's Standard Operating Procedures (SOP) to ensure compliance of workflow and activities in each work unit and to assess the adequacy of the Company's internal control design.
- e. Supervising external parties as follows:
 - i. Supervising Financial Statements Audit Assignment performed by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - ii. Supervising audit assignment performed by World Bank team;
 - iii. Supervising audit assignment performed by ADB; and
 - iv. Supervising compliance with recommendations of the Financial Services Authority (OJK).

EXTERNAL AUDIT

External Auditors are appointed based on recommendations from the Audit Committee and submitted directly to the Board of Commissioners to be approved in the GMS. Based on the resolution of the EGMS on July 30, 2019, the Company appointed KAP Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja to audit Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2019. In addition, the external auditor also reviews IIF's performance report. Fees spent by the Company for the external auditor service amounted to Rp1,000,000,000.

External Auditors employed by IIF in the last five years are:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif membantu Perseroan dalam menjaga aset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

IIF telah membangun proses, struktur, dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa:

- i. Operasional Perseroan telah dilakukan dengan efektif dan efisien;
- ii. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan
- iii. Sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Sistem pengendalian internal Perseroan dibangun dengan mengaplikasikan kerangka pengendalian internal, dimana elemen-elemen utamanya mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pengendalian internal di lingkungan Perseroan dan bersama dengan unit Audit Internal memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah berjalan dengan efektif dan memadai.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh IIF maupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang diterima oleh IIF maupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

IIF telah merumuskan Kode Etik Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap saling menghargai, kejujuran, dan integritas. Kode Etik ini mendorong pelaksanaan aktivitas usaha secara legal dan beretika, perlindungan dan pengawasan terhadap aset dan reputasi IIF, serta sikap hormat terhadap sesama dan

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of an Internal Control System has effectively helped the Company maintain its assets, ensure the availability of accurate information and reports, improve the Company's compliance with applicable laws and regulations, and mitigate loss risk, deviation, and violation of prudence principles.

IIF has built processes, structures, and internal control systems to properly assure that:

- i. The Company's Operations have been conducted effectively and efficiently;
- ii. The laws and regulations in force have been obeyed; and
- iii. The Financial reporting system is reliable.

The Company's internal control system is built by applying the internal control framework along with its key elements, namely controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communications, and monitoring activities.

The Board of Directors is responsible for developing and updating the internal control policy in the Company's environment and together with the Internal Audit unit, the Board of Directors monitors and oversees the implementation of said policies. Based on the results of these activities, the overall internal control system has been performed effectively and appropriately.

MATERIAL CASE

Throughout 2019, IIF and members of its Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any material cases.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

There are no administrative sanctions imposed on the Company or members of its Board of Commissioners and Board of Directors in 2019.

CODE OF ETHICS AND CORPORATE CULTURE

IIF has established a Code of Ethics to comply with prevailing laws and regulations and in adherence to humanitarian principles and values that comprise mutual respect, honesty, and integrity. This Code of Ethics encourages ethical and legal business conduct, protection of the assets and reputation of IIF, as well as respect for others, co-workers, clients, and society at large. The code



masyarakat luas pada umumnya. Kode Etik ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai, visi, norma, bahasa, dan sistem kerja IIF untuk diterapkan oleh segenap karyawan dan para pemangku kepentingan dalam berinteraksi satu sama lain.

Budaya kepatuhan dan integritas mengalir dari atas, yang secara implisit mengatakan bahwa Manajemen harus menekankan pentingnya perilaku beretika dan kepatuhan serta mendukung semua itu melalui kepemimpinan dan pelatihan. IIF wajib melakukan usahanya secara legal dan beretika di semua aspek operasinya.

Isi Kode Etik

Ruang lingkup kode etik yang dimiliki IIF mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal, serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan.

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**
Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF merupakan panduan bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, mencakup integritas, kewajaran, hormat, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.
- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**
Untuk melindungi sekaligus mengawal aset dan reputasi IIF, Perusahaan berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *inside trader*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan *auditing*.
- **Benturan Kepentingan**
Dalam melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, harus bebas dari benturan kepentingan mengingat hal ini dapat berpengaruh buruk pada keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perseroan.

of ethics summarizes the values, vision, norms, language and work systems forming IIF's corporate culture, and is to be upheld by all employees and stakeholders whenever they interact with one another.

Compliance and integrity are pursued from top to bottom, implicitly reinforcing the management's emphasis on the importance of ethical conduct and compliance. The Company also supports this implementation through leadership by example and training. IIF is obliged to conduct its business activities legally and ethically in all aspects.

Content of Code of Ethics

The Company's Code of Ethics governs several matters related to work procedures, internal and external relationships patterns, and commitment of the Company pertaining to environmental and health issues.

- **Conduct Business Legally and Ethically**
The policies stipulated in the IIF Business Ethics are guidelines for the Company in carrying out daily business operations. Within this policy, it is stated that all business activities must be guided by IIF's fundamental values, namely uncompromising integrity and honesty, including integrity, fairness, respect, concern, and personal accountability. In addition to being a guide to everyday ethical decision making, these values are also related to compliance with personal ethics, such as gratification, disclosure of personal wealth, political affiliation and donations, and compliance with Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.
- **Policies on Information, Internal Control, and Financial Reporting**
To protect and safeguard IIF's assets and reputation, the Company establishes policies regarding conflict of interest, electronic resources, data protection and security, securities trading, insider trader information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.
- **Conflict of Interest**
In conducting its business and performing its duties, all of the Company's employees as well as parties acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that may influence unfavorable judgment, objectivity, or loyalty to the Company.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segenap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFRS. Hal ini demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan Keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan Keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan Advisory dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- **Electronic Resources Policy**

This policy stipulates that the use of all electronic resources does not violate the law in the Business Conduct Policy of IIF. All the Company's employees must protect IIF electronic resources from unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Confidentiality**

All IIF employees and other parties acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information against unauthorized disclosure, whether internal or external, deliberate, or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information to which IIF has no rights. IIF has a policy to collect and use business and market information legally and ethically in order to better understand markets, customers, and competitors. Moreover, IIF shall refrain from collecting or using another party's confidential information without permission.

- **Internal Control, Financial Reporting, Document Retention, and Auditing Policy**

IIF's management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and the IFRS, and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws, and regulations.

IIF adheres to the policies of all parties responsible for the accuracy, thoroughness, and timeliness of the Company's actual and forecasted financial information, and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring mechanisms.

Information security shall also include protection of proprietary information received from various divisions. Possible conflict of interest exists between divisions providing Advisory services and those performing financing transactions.

- **Hormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan reward yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya ini dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- a. **Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

- b. **Kebijakan Mengenai Pelecehan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

- **Kebijakan Privasi**

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

- **Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga**

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan

- **Respect for Individuals and Communities**

Respect for others and the environment is a part of the Eight Principles adopted by the Company, which set IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain superior talent through a strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously bestow rewards for its employees and representatives. This is manifested in the following policies:

- a. **Environment, Health, and Safety**

IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; as such, employees are responsible for being knowledgeable of applicable laws and regulations related to Environmental, Health and Safety issues and adhere to those laws. The management addresses this issue by sending employees to the relevant trainings.

- b. **Policy on Harassment**

IIF is committed to creating a work environment that is free from any form of inappropriate behavior and harassment based on age, disabilities, marital status, race, color, national/regional origins, religion, sex, sexual orientation, or gender identity. Any form of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated.

- **Privacy Policy**

IIF adheres to the policy of full compliance with all applicable privacy and data protection laws. IIF assigns significant importance to earning and retaining the trust of stakeholders, employees, clients, business partners and other parties who share personal information with IIF.

- **Conduct with Business Partners and Third Parties**

IIF complies with all applicable anti-gratification laws and accurately and diligently records all transactions. Bribery/gratification refers to the action of offering, authorizing, or giving valuable items/goods to Government Officers, directly or indirectly, with the intention of obtaining and retaining business or gaining improper advantages, i.e. price increase approval, awarding of contracts, granting of operating permits, approval for product use/registration, favorable court decisions, and tax dispute settlements. IIF abides by all government contracts it has entered into and keeps

yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

Keberlakuan dan Penyebarluasan Kode Etik

Kode Etik Perusahaan ini berlaku penuh bagi seluruh Insan IIF, baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, hingga karyawan dan pejabat. Setiap karyawan yang baru bergabung dengan Perseroan diberikan sosialisasi terkait Kode Etik dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan bahwa karyawan tersebut telah membaca dan memahami isi Kode Etik IIF. IIF juga mengimbau kepada semua pihak yang berkepentingan di IIF untuk selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain tempat mereka beroperasi.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan telah menetapkan sanksi tegas untuk para pelaku pelanggaran Kode Etik IIF. Bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maupun tindakan kriminal, Perseroan akan memberikan tindakan disiplin internal, yang dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai pemutusan hubungan kerja.

Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Insan IIF.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

IIF memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wadah bagi para karyawan untuk melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan internal Perseroan. Sistem ini diharapkan dapat menjadi alat pendeteksi dini pelanggaran untuk mencegah dampak terburuk yang mungkin ditimbulkan. WBS juga mendorong karyawan untuk selalu mengedepankan prinsip keterbukaan, sehingga lingkungan kerja yang jujur, aman, dan bertanggung jawab dapat senantiasa dipertahankan.

Manajemen melalui Presiden Direktur telah menyetujui aturan WBS Perseroan. Aturan ini juga telah mendapat pengesahan dari pihak yang mewakili Pemerintah setempat dan tertuang dalam buku Pedoman Operasional Perseroan.

its subcontracts with business partners compliant with all applicable national, state, provincial, and district laws and regulations and all contract requirements.

Applicability and Dissemination of the Code of Ethics

IIF's Code of Ethics applies to all employees, officers, members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Each new employee will receive information regarding the Code of Ethics and is required to sign a statement declaring that they have read and understood the contents of the Code of Ethics of IIF. IIF also requests all concerned parties at IIF to always comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia and in other countries where they operate.

Enforcement and Sanctions for the Violation of the Code of Ethics

The company has set strict sanctions for violation of the Code of Ethics. Employees who are found guilty of violating the Code of Ethics or criminal acts will receive internal disciplinary action, which can range from verbal warning to written warnings and termination of employment.

Breach of the Code of Ethics

In 2019, there was no breach of the Code of Ethics committed by IIF personnel.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

IIF has a whistleblowing system (WBS) to facilitate employees in reporting suspected violations within the Company. This system is expected to act as an early detection tool for violations to prevent the worst-case scenarios. The WBS also encourages employees to prioritize openness, so that an honest, safe and responsible work environment can always be maintained.

Through the President Director, the management has approved the Company's WBS regulations. These regulations have also been approved by parties representing the local Government and contained in the Company's operational manual.



Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Pengaduan

Jika terdapat salah satu atau lebih dari satu dugaan aktivitas pelanggaran Kode Etik di atas, suatu Laporan Pengungkapan harus didokumentasikan. Laporan Pengungkapan dilaporkan secara tertulis untuk memastikan deskripsi dan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat dan Laporan tersebut harus dibuat dalam bentuk ketikan atau tulisan tangan yang dapat dibaca dalam Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia.

Laporan Pengungkapan harus dikirimkan bersama dengan surat pengantar yang menyebutkan identitas dari pelapor. Pengungkapan harus bersifat faktual dan tidak spekulatif serta tanpa tendensi tertentu dan berisi informasi yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya penilaian yang tepat serta tingkat atensi dan urgensi prosedur investigasi. Pelapor harus mencantumkan identitasnya dalam surat pengantar. Pengajuan laporan tanpa mencantumkan identitas tidak akan diproses lebih lanjut karena IIF tidak mungkin mewawancarai Pelapor dan sebagai bagian dari uji kelayakan dan penilaian.

Untuk membuat pengungkapan, karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan Formulir Laporan Pengungkapan yang disediakan di situs web IIF.

Perlindungan bagi Pelapor

IIF menerapkan kebijakan dimana tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap pelapor yang melaporkan kecurangan dan korupsi. IIF berkomitmen untuk mendukung dan melindungi pelapor yang melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik dari tindak kekerasan dan diskriminasi. IIF juga berkomitmen untuk melindungi karier karyawan yang melaporkan dugaan kecurangan, asalkan mereka tidak terlibat dalam tindakan curang dan/ atau kegiatan korupsi.

Sesuai dengan kebijakan, IIF memberikan perlindungan kepada pelapor yang membuat pengungkapan. IIF juga memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan balas dendam terhadap pelapor. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan tindakan balas dendam terhadap pelapor dapat berupa denda dan hukuman penjara.

Pihak Pengelola Pengaduan

Perseroan mengerahkan Direksi, Komite-Komite terkait, maupun Departemen SDM untuk mengelola pengaduan pelanggaran. Tim tersebut bersifat gugus tugas dan berlaku sementara sampai dengan penanganan diselesaikan.

Report Submission and Handling

If one or more of the suspected activities mentioned above occur, a Disclosure Report shall be filed. The Disclosure Report shall be submitted in writing to ensure a clear description and understanding of the issues being raised and should either be typed or written in a legible handwriting in English or Indonesian.

This report should be filed together with a cover letter containing the identity of the person making the report. Disclosures should be factual and not speculative with no malicious intent, and should contain as much detailed information as possible to ensure proper assessment and proper level of attention along with the urgency level of any investigative procedure caused by the report. The person making the report must affix his or her identity on the cover letter. Submissions without identity will not be followed up as it would prevent IIF from interviewing the whistleblower, which is part of the due diligence and assessment process.

To submit a Disclosure Report, employees and external parties shall use the Disclosure Reporting Form that is available on IIF's website.

Protection for Whistleblowers

IIF follows a policy of non-retaliation towards whistleblower reporting fraud and corruption. IIF is committed to supporting and protecting whistleblower who report breaches or alleged breaches of the Code of Ethics from victimization and discrimination. IIF is also committed to protecting the career of employees who report suspected fraud, provided they are not involved in the fraudulent or corrupt activity.

IIF provides protection to whistleblower submitting disclosures in accordance with the policy. IIF also provides protection by imposing penalties on person(s) taking retaliatory action against the whistleblower. Penalties against persons proven to have taken retaliatory action against a whistleblower include fines and imprisonment.

Parties Managing Report

The Company calls on the Board of Directors, related Committees, and HR Department to manage complaints of violations. The team will act as a temporary task force until the report is properly handled.

Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran.

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat empat aspek utama yang menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Keempat pedoman tersebut meliputi:

1. Prinsip pengadaan barang dan jasa
2. *High Level Process*
3. Metodologi
4. Sistem

Sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik staf perusahaan secara umum maupun pada bagian pengadaan, senantiasa mengikuti prinsip-prinsip yang meliputi:

- **Transparansi**
Transparansi menjadi prinsip utama dalam proses pengadaan. Prinsip ini meliputi penerapan proses pengadaan yang terperinci dan tersedianya sistem yang memastikan bahwa Perseroan mampu menyediakan beberapa pilihan operator/pemasok yang kompeten dengan harga yang bersaing dalam menawarkan jasa.
- **Efektivitas**
Proses pengadaan yang efektif harus dapat memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa yang dibutuhkan serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.
- **Efisiensi**
Efisiensi waktu dan biaya mencakup biaya produk dan jasa, pemasangan, pengiriman, biaya perawatan purna jual, dan lain sebagainya.
- **Memiliki Nilai Manfaat**
Barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan harus sesuai dengan kebutuhan operasional. Sepanjang barang atau jasa tersebut sepadan dengan harga dan kualitas, baik dilihat dari aspek kualitas maupun taksiran proyek, maka barang atau jasa tersebut layak disediakan.

Hal yang harus diperhatikan terkait kegiatan pengadaan di Perseroan adalah memastikan setiap pengajuan disetujui dan diketahui oleh pihak yang berwenang serta anggarannya telah disetujui oleh pihak pengguna anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi:

1. Kepala Operasional dan TI melakukan penelaahan pengajuan pembelian dari pihak *user* yang meliputi tipe pengadaan, metode pemilihan dan penyeleksian oleh

Reports and Follow-Ups

Throughout 2019, the Company received no reports about alleged violations.

Systems and Procedures for the Procurement of Goods and Services

In procuring goods and services, the Company refers to the following guidelines:

1. Principles of procurement of goods and services
2. High Level Process
3. Methodology
4. System

As a reference in procuring goods and services, the Company's employees in general as well as procurement staff, will adhere to the following principles:

- **Transparency**
Transparency is the main principle in any procurement process. This process consists of the implementation of a detailed procurement process and a system to ensure that the Company is able to provide lists of competent operators/suppliers with competitive prices in offering services.
- **Effectiveness**
An effective procurement process must be able to guarantee the quality of goods/services, as well as necessary requirements.
- **Efficiency**
Time and cost efficiency includes fees for products and services, installation, delivery, after-sales maintenance, and others.
- **Beneficial**
Goods or services required by the Company must be suitable with its operational needs. As long as the goods or services requested come at a worthwhile price and quality level, both in terms of quality or project estimate, then procurement of said goods or services is acceptable.

The Company should ensure that every proposal is approved and known by authorized parties and that the related budget items are approved by the budget user. The goods and service procurement process includes:

1. The Head of Operations and IT reviews the procurement proposal from users, which includes procurement type and selection methods employed by users. The Head



user, kemudian memastikan pengajuan telah disetujui Kepala Departemen dari user atau pihak yang berada pada level-C dari departemen yang bersangkutan.

2. Staf pengadaan akan memulai proses pengadaan berdasarkan metode yang disepakati.
3. Setelah merampungkan proses pemilihan vendor, staf pengadaan akan memilih tingkat kualitas yang paling tinggi dengan harga yang disetujui (delegasi kewenangan).
4. Petugas pengadaan akan mengumpulkan surat persetujuan dari DoA dan pemilik anggaran.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, petugas pengadaan akan melakukan finalisasi untuk mengeluarkan surat penunjukan atau penolakan kepada vendor.
6. Kepala Operasional dan TI akan menandatangani dan mengirimkan surat penunjukan maupun penolakan dan permintaan kerja.
7. Petugas pengadaan akan melakukan finalisasi surat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada vendor.

Proses pengadaan yang dilakukan oleh di Perseroan menggunakan metodologi:

1. Pengadaan langsung
2. Usulan harga
3. Tender terbatas
4. Kontrak langsung

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

IIF menyediakan akses yang seluas-luasnya mengenai informasi Perseroan bagi publik melalui beragam media informasi, yang meliputi:

1. Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan

Perseroan menyajikan informasi yang singkat dan padat mengenai kinerja keuangan, sekilas perusahaan, informasi produk dan jasa, acara perusahaan, komposisi Pemegang Saham, dan Manajemen Perusahaan dalam bentuk Profil Perusahaan. Sementara itu, informasi yang lebih mendalam terkait kinerja operasional dan finansial, implementasi GCG, dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan dapat disimak dalam Laporan Tahunan.

2. Situs Web

Publik juga dapat mengakses situs web resmi Perseroan di www.iif.co.id untuk memperoleh informasi Perseroan secara online dan mobile.

of Operations and IT then ensures that the proposal has been approved by the department head of the user or C-level parties of the concerned department.

2. Procurement staff will commence the procurement process based on the agreed on method.
3. After completing the vendor selection process, the procurement staff will select a vendor within the approved price range that is deemed to have the highest quality (authority delegation).
4. The procurement staff will collect approval letter from DoA and budget owner.
5. Upon approval, the procurement staff will finalize the process to issue appointment or rejection letters to the vendor(s).
6. The Head of Operations and IT will sign and send appointment or rejection letter and purchase order.
7. The procurement staff will finalize the process to issue the required letter to be delivered to the vendor(s).

The procurement process conducted in the Company applies the following methodologies:

1. Direct procurement
2. Price proposal
3. Limited tender
4. Direct contracting

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

IIF provides public access to information on the Company through several mediums, including:

1. Company Profile and Annual Report

The company presents brief and solid information on its financial performance, the Company at a glance, information on products and services, company events, shareholder composition, and company management in the form of a Company Profile. Meanwhile, more in-depth information regarding operational and financial performance, GCG implementation, and corporate social responsibility reports can be viewed in the Annual Report.

2. Websites

The public can also access the official website of the Company at www.iif.co.id to receive online information about the Company, including through mobile devices.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Dalam rangka meningkatkan penerapan GCG di lingkungan bisnisnya, IIF senantiasa berupaya untuk melakukan *compliance* terhadap Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Kelima aspek Tata Kelola Perusahaan Terbuka meliputi:

- Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham;
- Fungsi dan peran Dewan Komisaris;
- Fungsi dan peran Direksi;
- Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
- Keterbukaan Informasi.

Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang telah diterapkan IIF dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Relationship of Public Company with the Shareholders in ensuring the rights of the Shareholders			
Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1: To Improve the Value of GMS Implementation	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Company has methods or procedures to conduct both open and secret ballot voting, in order to uphold independency and interests of shareholders.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Each share has one vote. Shareholders may use their vote in decision-making, especially by voting during the process of decision-making. However, the mechanism of decision-making by voting has not been determined in a detailed manner whether it is in open or secret ballot. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i> . The public company should have a voting procedure in decision-making according to the agenda of the GMS. The procedure should also maintain the independency and freedom of the shareholders. For example, open ballot voting is done by raising hands according to the instruction of choice that has been offered by the chairman of the meeting. On the other hand, secret ballot voting is done by either voter cards or electronic voting. This is done to maintain the privacy or according to the request of the shareholders.	Perseroan mempunyai prosedur pengambilan suara untuk menentukan seluruh keputusan agenda RUPS. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan No.43 tanggal 24 Juli 2018 (Anggaran Dasar Perusahaan) tahun 2018 Pasal 21 Ayat 4, setiap Pemegang Saham diberikan hak untuk mengeluarkan satu suara (<i>one share one vote</i>). Selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat 5, pemungutan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan secara lisan sedangkan pemungutan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan dengan surat blanko sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. The Company has a voting procedure to determine all resolutions of the GMS agenda. In accordance with the Company's Articles of Association No. 43 dated July 24, 2018, Article 21 Paragraph 4, each Shareholder is entitled to cast one vote (one share one vote). Furthermore, in the Articles of Association Article 21 Paragraph 5, open voting is conducted verbally while closed voting is carried out through a blank vote paper in accordance with the instructions given by the chair of the GMS.

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES

To improve GCG implementation in its business environment, IIF strives to comply with OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of Governance Guidelines for Public Companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Governance Guidelines for Public Companies.

Governance Guidelines for Public Companies comprise 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) recommendations. The five aspects of Governance of Public Company include:

- Relationship of Public Company with the Shareholders in ensuring the rights of the Shareholders;
- Function and role of the Board of Commissioners;
- Function and role of the Board of Directors;
- Participation of the Stakeholders; and
- Information Disclosure.

Governance Recommendations for Public Company implemented by IIF are described in the following table:

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. The Board of Directors and Board of Commissioners of the public company are present in the AGMS.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public company is required so that the Board of Directors and Board of Commissioners are able to observe, explain, and answer directly the agenda related problems or questions that are given by the shareholders in the GMS.	Perseroan mewajibkan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS agar setiap anggota Direksi dan Komisaris dapat mengerti, menjelaskan, dan menjawab mengenai permasalahan yang dibicarakan atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait agenda dalam RUPS. The Company requires all members of Board of Directors and Board of Commissioners to be present at the GMS so that each member of Board of Directors and Board of Commissioners can understand, explain, and answer the issues discussed or questions raised by the shareholders regarding the GMS agenda.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of meeting minutes of the GMS is available on the public company website for at least 1 (one) year.	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. The public company is obligated to make summary of meeting minutes of the GMS in Indonesian language and in a foreign language (at least in English). It must be announced in 2 (two) working days after the meeting is executed for the public through the public company website. The availability of the summary of meeting minutes provides an opportunity to absent shareholders to get important information during the meeting quickly and easily. The provisions of how long the summary of meeting minutes may be available are to determine the adequate time for shareholders to retrieve the information.	Perseroan telah membuat ringkasan hasil RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS. Ketersediaan ringkasan hasil RUPS pada situs web Perusahaan telah dilaksanakan. The Company has made a summary of GMS resolutions in Bahasa Indonesia and English, which have been announced in 2 (two) working days after the GMS. The summary of GMS resolutions has also been available on the Company's website.
Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Increasing the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investors.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The public company has a communication with shareholders or investors policy.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. The communication between the public company and shareholders/investors aims for a clearer understanding of information that has been made public, such as newsletters, information disclosure, business prospects and performance, as well as the execution of public company's governance. In addition, shareholder/investors may also give suggestions and opinions to the management of the public company.	Kebijakan komunikasi Perseroan dilakukan secara transparan sebagai perwujudan komitmen Perseroan terhadap perlakuan adil kepada semua pemegang saham atau investor dalam komunikasi. Ketersediaan informasi laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tersedia pada situs web Perseroan. The Company's communication policy is carried out transparently as a manifestation of its commitment to fair treatment in communicating with all shareholders or investors. Information on periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as Corporate Governance Implementation are available on the Company's website.
		Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. The communication with shareholders/investors policy shows the commitment of the public company in implementing communication with shareholders/investors. The policy comprises strategies, programs, time of communication, and guidelines that support shareholders/investors in participating in the communication.	Kebijakan komunikasi Perseroan mencakup strategi, program dan waktu pelaksanaan komunikasi serta panduan yang mendukung. Pada situs web Perseroan, terdapat alamat surat elektronik Perseroan sehingga Pemegang Saham atau Investor dapat berpartisipasi dalam komunikasi interaktif dengan Perseroan. The Company's communication policy covers the strategy, program and timing of the communication, as well as the supporting guidelines. On its website, the Company puts its email address so that the Shareholders or Investors can participate and have interactive communication with the Company.



Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The public company discloses the communication policy of Public Company with shareholders/investors on the website.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. The disclosure of communication policy is a form of transparency done by the public company to actualize its commitment to give equal treatment to all shareholders/investors in terms of communication implementation. The disclosure also aims to increase participation and role of shareholders/investors in executing the public company's communication program.	Kebijakan komunikasi Perseroan dilakukan secara transparan sebagai perwujudan komitmen Perseroan terhadap perlakuan adil kepada semua pemegang saham atau investor dalam komunikasi. Ketersediaan informasi laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tersedia pada situs web Perseroan. The Company's communication policy is carried out transparently as a manifestation of its commitment to fair treatment in communicating with all shareholders or investors. Information on periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as Corporate Governance Implementation are available on the Company's website.
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Function and role of the Board of Commissioners			
Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The stipulation of number of commissioners will determine the condition of the public company.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. The number of commissioners may affect the effectiveness of how the Board of Commissioners executes their duties. The stipulation of number of the public company's commissioners must refer to the applicable legislation. At least 2 (two) individuals are chosen according to the regulations of OJK on Board of Commissioners. Additionally, the conditions of the public company, which ranges from characteristics, capacity, size, achievement of objectives, and fulfillment of business needs that differs within the company, must be taken into consideration. However, the large number of Board of Commissioners has a large potential to hinder the effectiveness to execute the functions of Board of Commissioners.	Efektif tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri selaku Presiden Komisaris & Komisaris Independen Perseroan mengakhiri masa jabatan. Berdasarkan Akta No.23 tanggal 10 Februari 2020, Perseroan mengangkat Bapak V. Sonny Loho sebagai Plt. Presiden Komisaris Perseroan. Sampai dengan Laporan Tahunan 2019 ini diterbitkan, Perseroan memiliki 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, dengan 2 (dua) anggota Komisaris Independen dan 6 (enam) anggota Komisaris Terafiliasi. On December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri effectively ended his term of office as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner. Based on Deed No. 23 dated February 10, 2020, the Company appointed Mr. V. Sonny Loho as the President Commissioner Interim. As of the publication of the 2019 Annual Report, the Company has 8 (eight) members of Board of Commissioners comprising 2 (two) Independent Commissioners and 6 (six) Affiliated Commissioners.
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition determination of the Board of Commissioners pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition of Board of Commissioners is a combination of characteristics as a whole or as individuals according to the needs of the public company. These characteristics may be reflected through the stipulation of required skills, knowledge, and experiences in executing the supervising and counseling duties by the Board of Commissioners. Composition that pays attention to the needs of the public company is a positive sign, especially in relation to the decision-making on the execution of supervising duties that considers a wider range of aspects.	Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan karakteristik Perseroan. Anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. The composition of Company's Board of Commissioners has taken into account the Company's characteristics. The members of Board of Commissioners of the Company have the expertise, knowledge, and experience required in carrying out the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners of a Public Company.
Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Increasing the Quality of Performance of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.	Perseroan memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) bagi anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif dimana penilaian tersebut berdasarkan maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
		The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability in collegially assessing the performance of the Board of Commissioners. The self-assessment is done individually by the commissioners to evaluate the performance of the Board of Commissioners, and not the individual performances of the commissioners. It is expected that each commissioner is able to contribute to continuous improvement of the Board of Commissioners' performance. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. The policy may comprise the activity of assessment, the purposes and objectives, the periods of execution, and the standard or assessment criteria used based on the recommendation given by Nomination and Remuneration Function for Public Companies. The required functions are according to the regulations of OJK on the Nomination and Remuneration Committee for Public Companies.	The Company has a Self-Assessment policy for the members of Board of Commissioners as a form of accountability on the joint assessment of Board of Commissioners' performance, in which the assessment is based on the aims and objectives, implementation period, and benchmarks or criteria for assessment used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function.
9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	The self-assessment policy that evaluates the performance of the Board of Commissioners is disclosed in this year's Annual Report of the public company.	Pengungkapan kebijakan Self Assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris. The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is executed not only to fulfill the transparency aspect as a form of responsibility, but also to convince the shareholders/investors of the acknowledgement of Board of Commissioners' efforts to increase their performance. By disclosing the policy, the shareholders/investors are able to know the check and balance mechanism for the Board of Commissioners' performance.	Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam Laporan Tahunan Perseroan. The disclosure of Self-Assessment policy on the performance of Board of Commissioners' members is carried out in the Company's Annual Report.
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlihat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Commissioners has a resignation policy if a commissioner is committed to a financial crime.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. The resignation policy for a commissioner who is involved in a financial crime is a policy that may increase the confidence of stakeholders in the public company to maintain integrity of the Company. This policy is necessary to help ease the legal proceedings and avoid any disruptions in the company's activity. In addition to the morality, this policy builds the ethical culture in the environment of the public company. The policy may comprise code of ethics that is applicable to the Board of Commissioners. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. An involvement in financial crime refers to the conviction of a commissioner by the authority. Financial crimes refer to manipulation and a variety of financial frauds in financial services. It also includes Money Laundering as stated in Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.	Perseroan memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris beserta aturan kepegawaian, dan mencakup perilaku dan etika Dewan Komisaris termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. The Company has a resignation policy for the members of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association concerning the Board of Commissioners, along with employment rules and the behavior and ethics of the Board of Commissioners, including issues related to financial crimes.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee that executes the nomination and remuneration function prepares the succession policy in the director nomination process.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. According to the regulations of OJK on the Nomination and Remuneration Committee for Public Companies, the committee that executes the nomination function is tasked with establishing the policy and criteria needed for the process of nominating a candidate director. One of the policies that may support the nomination process is the succession of a director. The succession policy aims for maintaining the continuity of the regeneration or the leadership cadre in the company to maintain business development and the long-term goal of the company.	Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang salah satu fungsinya merupakan menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. The Company has a Nomination and Remuneration Committee whose functions, among others, are to prepare policies and criteria required in the Nomination process for the prospective members of Board of Directors.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Aspect 3: Function and role of the Board of Directors

Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of Board of Directors.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of number of directors will consider the condition of the public company as well as the effectiveness in decision-making.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. As the organ of the company authorized in managing the company, the stipulation of number of directors will affect the performance of the public company. Therefore, the stipulation must be taken into serious consideration and must be according to the applicable regulations, where, according to the regulations of OJK on Board of Directors and Board of Commissioners for Public Companies, it must consist of 2 (two) individuals. In addition, the stipulation must be based on the needs to achieve the purposes, goals, and conditions of the public company. The conditions comprise characteristics, capacity, and size of the company as well as the effectiveness of decision-making made by the Board of Directors.	Efektif tanggal 31 Januari 2020, Bapak Harold Jonathan Tjiptadaja selaku Direktur Pelaksana & Direktur Investasi Perseroan mengakhiri masa jabatan. Berdasarkan Akta No.23 tanggal 10 Februari 2020, Perseroan mengangkat Ibu Hilda Savitri sebagai Plt. Direktur Investasi Perseroan. Sampai dengan Laporan Tahunan 2019 ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) anggota Direksi. On January 31, 2020, Mr. Harold Jonathan Tjiptadaja effectively ended his term of office as the Company's Managing Director and Chief Investment Officer. Based on Deed No. 23 dated February 10, 2020, the Company appointed Ms. Hilda Savitri as the Acting Chief Investment Officer of the Company. As of the publication of the 2019 Annual Report, the Company has 4 (four) members of Board of Directors.
	13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition determination of the Board of Directors pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif. Similar to the Board of Commissioners, the diversity of composition in the Board of directors is a combination of characteristics as a whole or as individuals, according to the needs of the public company. This combination is taken into consideration by paying attention to the required skills, knowledge, and experiences for the tasks and job functions of a director in order to achieve the goals of the public company. Therefore, the consideration of these characteristics will impact on nominating or choosing a director, collegially or individually.	Komposisi anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan karakteristik Perseroan. Anggota Direksi memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan. The composition of Company's Board of Directors has taken into account the Company's characteristics. The members of Board of Directors of the Company have the expertise, knowledge, and experience required in carrying out the duties and functions of Board of Commissioners in order to achieve the Company's objectives.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The director who oversees accounting or finance has the skills and/or knowledge in accounting.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. A financial statement is a report on management accountability of the resources owned by the public company, which must be prepared and presented according to the financial accounting standards generally accepted in Indonesia and relevant OJK regulation, including the Capital Markets Law that regulates the presentation and disclosure of financial statements of the public company. Based on the Capital Markets Law regulating the responsibilities of directors on financial statements, the Board of Directors are responsible for the financial statements, which are signed by the president director and the director that oversees accounting or finance. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. Therefore, the disclosure and organization of financial information that is presented in the financial statements highly depends on the skills and/or knowledge of the Board of Directors, mainly the Director who oversees accounting or finance. The skills or knowledge qualification that a director has in accounting may create assurance of the Company's financial statements, therefore the Financial Statements can be a reliable groundwork for stakeholders to make economic decision related to the public company. Those skills and knowledge may be validated based on education background, training certification, and relevant job experiences.	Bidang akuntansi dan keuangan Perseroan dikepalai oleh Direktur Keuangan yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi. The Company's accounting and finance division is led by the Chief Financial Officer with an expertise and knowledge in finance and accounting.
Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Increasing the Quality of Performance of Duties and Responsibilities of Board of Directors.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Similar to the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability in collectively assessing the performance of the Board of Directors. The self-assessment is done individually by the directors to evaluate the performance of Board of Directors, and not the individual performances of the directors. It is expected that each director is able to contribute to continuous improvement of the Board of Directors' performance.	Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja anggota Direksi dilakukan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Penilaian kinerja anggota Direksi disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham. The disclosure of <i>Self-Assessment</i> policy on the performance of Board of Directors' members is carried out in the Company's Annual Report. Performance assessment of the Board of Directors' members is submitted to the Nomination and Remuneration Committee to be subsequently submitted to the Shareholders.



Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
		Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. The policy may comprise the activity of assessment, the purposes and objectives, the periods of execution, and the standard or assessment criteria used based on the recommendation given by the nomination and remuneration function of Public Companies, where the establishment of the function is required by OJK Regulation regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	
16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi. The self-assessment policy that evaluates the performance of the Board of Directors is disclosed in this year's Annual Report of the public company.	The disclosure of the self-assessment policy on the performance of Board of Directors is executed not only to fulfill the transparency aspect as a form of responsibility, but also to deliver important information on the improvement efforts regarding the public company. This information is very useful to convince shareholders/ investors that the management of the company is constantly heading towards a better direction. By disclosing the policy, the shareholders/investors are able to know the check and balance mechanism for the Board of Directors' performance.	Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja anggota Direksi dilakukan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tersedia dalam situs web Perseroan. Disclosure of Self-Assessment policy on the performance of Board of Directors' members is carried out in the Company's Annual Report and is available on the Company's website.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Directors has a resignation policy if the member committed to financial crime.	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. The resignation policy for a Director who is committed to a financial crime is a policy that may increase the confidence of stakeholders in the public company to maintain the Company's integrity. This policy is necessary to help ease the legal proceedings and avoid any disruptions in the company's activity. In addition to the morality, this policy builds the ethical culture in the environment of the public company. The policy may comprise code of ethics that is applicable to the Board of Directors. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. An involvement in financial crime refers to the conviction of a director as declared by the competent authorities. Financial crimes refer to manipulation and a variety of financial frauds in financial services. It also includes Money Laundering as stated in Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.	Perseroan memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar mengenai Direksi beserta aturan kepegawaian, dan mencakup perilaku dan etika Direksi termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. The Company has a resignation policy for the members of Board of Directors as stipulated in the Articles of Association concerning the Board of Directors, along with employment rules and the behavior and ethics of the Board of Directors, including issues related to financial crimes.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Participation of the Stakeholders			
Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Increasing the Company's Governance Aspect By Means of Stakeholders Participation.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . The public company has the policy to prevent the occurrence of insider trading.	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. An individual who has inside information is prohibited from engaging in a securities transaction using the information as defined in the Capital Markets Law. The public company is able to minimize insider trading by means of prevention policy, such as strictly separating public data and/or information from confidential data and/or information, as well as dividing tasks and responsibilities related to information management proportionally and efficiently.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang tertuang dalam Kode Etik dan Peraturan Perseroan. Perseroan meminimalisir terjadinya insiden <i>insider trading</i> melalui kebijakan pencegahan, dengan memisahkan secara tegas dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang berkaitan secara proporsional dan efisien. The Company has a policy to prevent insider trading as stipulated in the Code of Conduct and Company's Regulations. The Company minimizes the occurrence of insider trading incidents through prevention policies by explicitly separating confidential information from the public and/or dividing duties and responsibilities for managing relevant information proportionally and efficiently.
	19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> . The public company has an anticorruption policy and anti-fraud policy.	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kick backs</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. The anti-corruption policy is useful to ensure the activities at the public company are executed legally, prudently, and according to the principles of good governance. The policy is its own form or a part of code of ethics. The policy comprises programs and procedures that are able to resolve the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification within the public company. The scope of the policy must depict the public company's prevention against all practices of corruption on both the giving and receiving from other parties.	Perseroan memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-penggelapan dengan aturan kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan etika untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), penggelapan (<i>fraud</i>), suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan. Kebijakan tersebut meliputi pencegahan terhadap segala praktik korupsi, baik menawarkan atau menerima dari pihak luar. Pengungkapan kebijakan anti-korupsi dan anti-penggelapan tersedia dalam situs web Perseroan. The Company has anti-corruption and anti-embezzlement policies as stipulated in the employment regulations, especially those related to behavior and ethics to overcome corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Company. The policy includes the prevention of all corruption practices, whether offering or receiving from outside parties. Disclosure of anti-corruption and anti-embezzlement policies is available on the Company's website.
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> . The public company has a policy on selecting and increasing the ability of suppliers or vendors.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. The policy on selecting suppliers or vendors is useful to ensure the public company has the goods and services with competitive prices and good qualities. Additionally, the policy on increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure the supply chain to operate efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors in providing or fulfilling the goods or services needed by the company will affect the company's output quality. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>. The execution of these policies may guarantee supply continuity from both quantity and quality needed by the public company. These policies comprise criteria in choosing suppliers or vendors, transparency mechanisms in procurement, the effort in increasing the ability of suppliers or vendors, and compliance in rights of suppliers or vendors.	Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> untuk memastikan agar Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Perseroan sedang mengembangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kebijakan ini meliputi kriteria dan pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, dan mekanisme pengadaan yang transparan. The Company has a policy regarding the selection of suppliers or vendors to ensure that the Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. The Company is currently developing a policy to improve the ability of suppliers or vendors to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. This policy covers the criteria and selection of suppliers or vendors as well as a transparent procurement mechanism.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The public company has a policy on fulfilling creditors' rights.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. The policy on fulfilling creditors' rights is used as a guide to obtain a loan for creditors. The goal of this policy is to fully preserve the rights and creditors' confidence in the public company. The policy comprises the consideration on entering into agreements and following up on the compliance of creditors' rights by the public company.	Perseroan memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur yang tertuang dalam perjanjian pinjaman. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi hak-hak kreditur juga kewajiban Perseroan terhadap kreditur. The Company has a policy to meet the rights of creditors as stipulated in the loan agreement. The policy is carried out to meet the rights of creditors as well as the Company's obligations to creditors.
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i>. The public company has a whistleblowing system policy.	Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan WBS mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. The whistleblowing policy that has been well organized will assure witnesses or whistleblower of their protection from an indication of violation done by an employee or management of the public company. The execution of this policy will impact on the establishment of good governance. This policy comprises types of violations that are able to be reported through the whistleblowing system, a guide on reporting complaints, protection and insurance of whistleblower's confidentiality, complaint handling, the party who handles the complaints, the outcome after handling the situation, and the actions taken after the complaint reporting.	Perseroan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang menjamin perlindungan saksi atau pelapor jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Informasi kebijakan ini tersedia dalam situs web Perseroan. The Company has a whistleblowing system (WBS) policy which ensures the protection of witnesses or whistleblowers in the event of indications of violations committed by employees or management. Information on this policy is available on the Company's website.
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The public company has a policy on giving long-term incentives to Directors and employees.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Long-term incentives are incentives given based on the achievement of long-term performance. The plan of long-term incentives has the basic premise that the company's long-term performance is reflected on the growth in value of the shares or long-term targets of other companies. Long-term incentives are useful in preserving loyalty and motivating directors and employees to perform better or become more productive, as these will impact on the long-term performance of the company. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. The policy on long-term incentives is the company's commitment to give incentives to directors and employees under the terms, procedures, and forms that are in accordance to the long-term goal of the public company. This policy comprises the purposes and objectives of giving long-term incentives, the terms and procedures of giving incentives, as well as the conditions and risks that must be highly considered by the public company when giving an incentive. This policy is also included in the remuneration policy of the public company.	Perseroan sedang dalam proses merumuskan kebijakan pemberian insentif jangka panjang (<i>Long Term Incentive Plan</i>) kepada Direksi dan karyawan yang didasarkan atas pencapaian kinerja tahun tertentu. Insentif jangka panjang dilakukan dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan. The Company is in the process of formulating a policy to provide long-term incentive plan to the Board of Directors and employees based on the achievement of a particular year's performance. Long-term incentives are carried out in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve performance or productivity which will have a positive impact on the Company's performance as well.



Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / OJK Recommendation	Penjelasan Penerapan di IIF / Description of IIF's Implementation
Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure			
Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Increasing the Implementation of Information Disclosure.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs resmi Perusahaan Terbuka sebagai media keterbukaan informasi. The public company utilizes information technology more openly as the media of information disclosure.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. The use of information technology may be useful as a media of information disclosure. In addition to the information mentioned in the regulations, useful information regarding the public company will also be disclosed to shareholders/investors. By using the information technology more openly, it is expected the company may increase their effectiveness in sharing the company's information. Nevertheless, the use of information technology also has to pay attention to how it will cost and benefit the company.	Perseroan menggunakan teknologi informasi selain situs web sebagai media keterbukaan informasi seperti penggunaan surat elektronik (e-mail) dalam melakukan <i>release</i> , media televisi (TV bursa) dan media cetak atau elektronik dengan mengukur manfaat yang diperoleh dan pertimbangan biaya yang timbul. Keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perseroan yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Other than the website, the Company uses information technology as a means of information disclosure, such as the use of electronic mail (e-mail) in conducting releases, television media (stock exchange TV), and print or electronic media by measuring the benefits obtained and consideration of costs incurred. The disclosure of information carried out is not only those regulated in the laws and regulations, but also other information related to the Company's business considered useful for shareholders or investors.
	25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The public company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner of shares in the ownership of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial ownership of the public company through the majority and controlling shareholders.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. The regulations on the capital markets sector which regulates the submission of the public company's annual report has also regulated the compliance of information disclosure on the shareholder who has 5% or more of the company's shares, as well as of direct or indirect information disclosure on the majority and controlling shareholders of the company up to the ultimate beneficial owner of the shares ownership. In the guideline of governance, it is advised to disclose the ultimate beneficial owner who owns at least 5% of the public company's shares in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of the shares ownership by the majority and controlling shareholders.	Perseroan tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait. Namun, Perseroan memiliki Pemegang Saham Utama yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan kepemilikan sebesar 30% dari modal disetor. Informasi terkait pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan (<i>ultimate beneficial ownership</i>) ini disampaikan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan. The Company does not have Controlling Shareholders as stipulated in a number of regulations of Financial Services Authority (POJK). However, the Company has a Major Shareholder, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), with 30% ownership of paid-in capital. Information regarding the ultimate beneficial ownership of the Company is conveyed in the Annual Report and the Company's website.





“



Dana Program CSR 2019

CSR Program Funds 2019

Rp 119,20 juta / million



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

IIF memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memenuhi standar keberlanjutan dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur, yaitu dengan cara menghadirkan aspek keseimbangan antara proyek infrastruktur dengan aspek lingkungan dan aspek sosial masyarakat.

IIF is strongly committed to always fulfilling the sustainability standards in carrying out infrastructure development process, namely by delivering balancing the aspect of infrastructure project with the aspect of environment and social community.

Kegiatan operasional bisnis yang dijalankan setiap perusahaan tidak terlepas dari aspek sosial dan lingkungan sehingga diperlukan adanya komitmen tinggi dan kontribusi nyata dari setiap perusahaan untuk menyelenggarakan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang terarah dan tepat sasaran.

Guna memastikan penerapan CSR dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Melalui pelaksanaan TJSL, Perseroan memberikan bukti nyata pelaksanaan tata kelola yang baik, khususnya dalam sektor penyediaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, aspek sosial dan lingkungan merupakan elemen vital yang tidak terlepas dari usaha Perseroan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya. Bercermin pada kaitan yang erat antara bidang infrastruktur dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup, Perseroan berusaha mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan semua pihak terkait, termasuk kebutuhan pemangku kepentingan Perseroan.

Business operational activities carried out by companies are affiliated with social and environmental aspects. Therefore, high commitment and concrete contributions from each company to implement focused and on-target Corporate Social Responsibility (CSR) activities are necessary.

To ensure that CSR activities are well implemented and able to generate positive effects, the Government of Indonesia has issued numerous regulations on Social and Environmental Responsibility (TJSL), among which, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation (PP) No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. Through the implementation of TJSL, the Company provides concrete evidence of good corporate governance implementation, especially in the infrastructure financing sector in Indonesia.

As an infrastructure financing company, social and environmental factors are considered vital and inseparable elements to ensure the sustainability of the Company's business. Reflecting on the close links between the infrastructure sectors, the community's welfare, and the environmental preservation, the Company strives to balance between the infrastructure development and the needs of all related parties, including the Company's stakeholders.





PEMENUHAN STANDAR KEBERLANJUTAN BAGI PROYEK INFRASTRUKTUR

Tolak ukur kemajuan sebuah negara dipandang dari berbagai aspek. Salah satunya adalah tersedianya infrastruktur yang memadai dan tersebar merata, yang mampu menunjang kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang terbangun secara tepat dapat memberikan dampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, khususnya daya saing negara di ranah global. Namun, selain dampak positif, pembangunan infrastruktur turut memicu dampak yang tidak diharapkan, antara lain relokasi pemukiman serta eksploitasi sumber daya alam.

Sebagai upaya untuk menangani dampak tersebut, komitmen kuat dari seluruh pihak terlibat untuk senantiasa memenuhi standar keberlanjutan dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur amat diperlukan. Perwujudan komitmen ini dilakukan melalui upaya untuk berpegang teguh pada upaya untuk senantiasa menghadirkan aspek keseimbangan antara proyek dengan aspek lingkungan serta sosial kemasyarakatan.

IIF sebagai salah satu pihak utama yang memiliki keterlibatan besar mewujudkan pembangunan infrastruktur, berkomitmen untuk turut mengimplementasikan konsep *triple bottom line* yang terdiri dari *people*, *planet*, dan *profit* ke dalam setiap proyek pembangunan. Melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan standar Sosial dan Lingkungan (Social & Environment – S&E), Perseroan mewujudkan komitmen yang dipegang teguh tersebut ke dalam setiap bisnis usaha yang dijalankan. Bagi Perseroan, S&E memiliki peran sebagai acuan untuk tetap mengedepankan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas perealisasi suatu proses investasi infrastruktur sekaligus dalam proses pemberian pendampingan kepada berbagai proyek yang dibiayai Perseroan, sehingga diharapkan setiap investasi infrastruktur tersebut dapat memenuhi standar S&E yang telah ditetapkan. Pihak eksternal pun turut dilibatkan kontribusinya dalam mendukung pemenuhan aspek S&E dalam berbagai proyek yang memiliki spesifikasi S&E khusus.

FULFILLMENT OF SUSTAINABILITY STANDARDS IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

A country's development is determined by various indicators; one of which is the availability of adequate and evenly distributed infrastructure capability to support people's lives. On-target infrastructure development can contribute to the improvement of economic growth in the region, particularly in the competitiveness of the country at a global level. Despite the positive impacts, infrastructure development also carries adverse effects, such as settlement relocation and natural resources exploitation.

In an effort to deal with these impacts, all parties should be involved in the development in order to give their highest commitment to always meet the sustainability standards in any infrastructure development processes. This can be achieved by upholding every endeavor constantly to create balance between the project and the environmental and social aspects.

As one of the main parties involved in infrastructure development, IIF adheres to the development principles that assert the triple bottom line concept, consisting people, planet, and profit, in every project development. The Company implements its commitment in every business activity through a financing mechanism integrated with Social & Environmental (S&E) standard. For the Company, S&E serves as the guiding principle in putting forward social and environmental aspects in every activity as a realization of infrastructure investment, which includes providing advice/consultancy on various projects financed by the Company. Every infrastructure investment can meet the established S&E standard as expected. The Company also partners with external parties to support the fulfillment of S&E aspects in projects requiring compliance with particular S&E specifications.



PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN YANG TERLIBAT

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan guna mensukseskan proyek bisnis yang diselenggarakan. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki andil pada terlaksananya proyek bisnis sesuai dengan yang direncanakan, sehingga keberadaannya turut menjadi elemen penentu agar proyek bisnis telah berjalan sesuai rencana.

Selain itu, para pemangku kepentingan serta Perseroan memiliki dampak secara langsung atau tidak langsung maupun berpengaruh terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pelibatan secara aktif dalam aktivitas operasional Perseroan sesuai dengan peran dan tujuannya masing-masing.

Perseroan telah mengidentifikasi pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam berbagai program TJSL Perseroan di sepanjang tahun 2019. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- Karyawan
- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Anggota Legislatif terkait
- Para pelaku usaha di bidang industri infrastruktur
- Kontraktor dan mitra kerja dalam proyek infrastruktur
- Masyarakat
- Media massa

TOPIK DAN ISU PENTING YANG BERKAITAN DENGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan pelibatan dan interaksi yang dilakukan Perseroan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat, IIF mengidentifikasi dan menetapkan isu dan topik penting yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya identifikasi tersebut, Perseroan berupaya untuk mengelola berbagai isu dan topik tersebut guna memberikan dampak positif kepada berbagai pihak.

Melalui 6 (enam) topik yang dijabarkan dalam isu-isu penting, IIF menerapkan prinsip keberlanjutan dalam berbagai program CSR. Topik dan isu penting yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan tersebut antara lain sebagai berikut:

RELATED STAKEHOLDERS

In conducting its business, the Company engages various stakeholders to support successful implementation of its business projects. These stakeholders have distinctive contribution to help the Company execute business projects according to the plan; hence, their existence is one of the success determinant factors.

Moreover, stakeholders and the Company have a direct or indirect impact or influence each other. Therefore, the Company strives to establish harmonious relationships with all of its stakeholders through active involvement in the Company's operational activities according to their respective roles and objectives.

The Company has identified stakeholders involved in various corporate TJSL programs throughout 2019 as stated below:

- Employees
- Central Government, Regional Government, and related Legislative Members
- Business actors in the infrastructure industry
- Contractors and partners in infrastructure projects
- Public
- Mass media

MATERIAL TOPIC AND ISSUES RELATING TO SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

Based on the engagement and interaction of the Company with the stakeholders involved, IIF identifies and determines material issues and topics related to social, economic, and environmental aspects. With this identification, the Company seeks to manage various issues and topics in order to deliver positive impact on various parties.

Sustainability principles that IIF implements in its CSR programs are applied to the 6 (six) topics identified as material issues. The following are material topics and issues related to social, economic, and environmental aspects:



TOPIK DAN ISU PENTING YANG BERKAITAN DENGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN
MATERIAL TOPIC AND ISSUES RELATING TO SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

Topik / Topics:
Hak Asasi Manusia (HAM)
Human Rights

Isu Penting / Material Issues
Komitmen untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain anti diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan HAM di wilayah kerja; perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap hak-hak para pemangku kepentingan; serta pematuhan prinsip-prinsip kemanusiaan. Commitment to uphold Human Rights (HAM), including anti-discrimination, equality, and protection of human rights in work area; protection and accountability of the rights of stakeholders; and compliance with human rights principles.



Topik / Topics:
Operasi yang Adil
Fair Operations

Isu Penting / Material Issues
Pemenuhan prinsip operasi yang adil serta prinsip korporasi yang sehat melalui penerapan kebijakan anti korupsi dan kebijakan benturan kepentingan. Compliance with fair operations and sound corporate principles through the implementation of anti-corruption and conflict of interest policies.



Topik / Topics:
Tata Kelola CSR
CSR Governance

Isu Penting / Material Issues
Penyelenggaraan program CSR dengan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*). Implementation of CSR programs that prioritize Good Corporate Governance principles.



Topik / Topics:
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Manpower, Occupational Health and Safety

Isu Penting / Material Issues
Pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab Perusahaan terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki Perseroan melalui kesetaraan gender dan kesempatan kerja; sarana dan keselamatan kerja; penyusunan program yang sesuai dan efektif untuk menekan *turnover*; remunerasi; pengembangan karyawan; dan sarana pengaduan masalah ketenagakerjaan. Implementation of the Company's obligations and responsibilities towards its Human Resources through gender equality and employment opportunities; work facilities and safety; preparation of appropriate and effective programs to reduce turnover; remuneration; employee development; and labor complaints reporting channel.



Topik / Topics:
Lingkungan dan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Environment and Social Community Development

Isu Penting / Material Issues
Pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan delapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang ada. The implementation of social responsibility practices on the environment and social community is in accordance with the eight existing Social and Environmental Principles.



Topik / Topics:
Produk dan Layanan
Products and Services

Isu Penting / Material Issues
Penyediaan informasi mengenai produk dan layanan. Provision of information on products and services.

ANGGARAN DANA CSR

Program CSR sepanjang tahun 2019 telah terealisasi dengan penggunaan dana sebesar Rp119.199.400. Anggaran dana tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran dana pada tahun 2018 sebesar Rp255.000.000.

CSR BUDGET

The Company incurred Rp119,199,400 for the realization of CSR programs in 2019. This budget decreased compared to that of 2018 which amounted to Rp255,000,000.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Perseroan berpegang teguh pada komitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aktivitas operasional Perseroan serta dalam menjalin interaksi dan hubungan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Perseroan. Hal tersebut menjadi bagian dari fokus utama Perseroan dalam menjalankan bisnis karena bagi Perusahaan, HAM adalah komponen penting yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Hak Asasi Manusia diwujudkan Perseroan melalui berbagai bidang, seperti anti diskriminasi, kesetaraan, serta perlindungan HAM di wilayah lingkungan kerja, baik di kantor pusat maupun di lapangan; melindungi dan bertanggung jawab terhadap hak-hak para pemangku kepentingan; serta mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Anti Diskriminasi, Kesetaraan, serta Perlindungan HAM di Wilayah Lingkungan Kerja

Perseroan menjunjung tinggi anti diskriminasi, kesetaraan, serta perlindungan HAM di wilayah lingkungan kerja Perseroan, baik di kantor pusat maupun di lapangan. Aspek tersebut diwujudkan melalui kesetaraan dalam mengelola SDM, termasuk proses rekrutmen yang tidak memandang latar belakang calon karyawan, serta tidak adanya diskriminasi dalam proses pengembangan karir. HAM para karyawan senantiasa dilindungi dan Perseroan memastikan bahwa para karyawan memperoleh haknya di ranah kerja dan tidak ada hak-hak mereka sebagai manusia yang dilanggar.

Perlindungan dan Pertanggung Jawaban terhadap Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan

Hak-hak para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, pihak pelaksana proyek, serta masyarakat senantiasa dilindungi serta menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan berkomitmen untuk terus berupaya memastikan hak-hak para pemangku kepentingan terlindungi selama aktivitas proyek, serta memastikan tidak adanya hak-hak yang dilanggar selama proses tersebut berjalan, dari awal hingga selesai.

SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

The Company holds fast to its commitment to always uphold Human Rights (HAM) in every operational activity of the Company and in building interaction and relationships with various parties related to the Company. This is part of the Company's main focus in conducting business, because for the Company, human rights is vital component inherently possessed by every individual as a human being that must be fulfilled and must not be violated.

The Company implements human rights by issuing several policies, such as anti-discrimination, equality, and protection of human rights in work environment, both at the head office and on site; protection and responsibility of stakeholders' rights; and compliance with humanitarian principles.

Anti-Discrimination, Equality and Human Rights Protection in Work Environment

The Company upholds anti-discrimination, equality and human rights protection in the Company's work environment, both at the head office and on site. These aspects are implemented through, among others, ensuring equality in HR management, including in recruitment process where candidates are employed regardless of their background, and no discrimination in career development. The employee's human rights are always protected and the Company ensures that employees obtain their rights at workplace and that none of their human rights are violated.

Protection and Responsibility for the Rights of Stakeholders

The rights of stakeholders, namely the Government, project implementers, and the community, are always protected and are part of the Company's responsibility in conducting its business. The company is committed to continuously ensuring that the rights of stakeholders are protected during project implementation, and that their rights will not be violated from the start to the end of the process.



Pematuhan Prinsip-Prinsip Kemanusiaan

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan selalu berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam merealisasikan setiap proyek yang ada, seperti tidak adanya pekerja di bawah umur, tidak adanya eksploitasi berlebihan dari tenaga manusia, serta memastikan adanya perlakuan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dalam setiap aktivitas operasional.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Sebagai perusahaan yang memiliki bisnis usaha di bidang infrastruktur, IIF senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip operasi yang adil dalam menjalankan berbagai proyek. Dengan bisnis usaha yang memiliki kaitan erat dengan uang, Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional bisnis tidak memiliki adanya *fraud*, korupsi, dan penyalahgunaan uang lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip korporasi yang sehat dan bersih sehingga proyek yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana serta tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk IIF sendiri. Hal tersebut menjadi perhatian penting dari Perseroan karena bisnis usaha yang dijalankan memiliki risiko besar dalam kecurangan dan pelanggaran aspek pendanaan, sehingga diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang besar dari seluruh insan Perseroan.

Kebijakan Anti Korupsi

Guna memastikan prinsip anti korupsi senantiasa diimplementasikan oleh seluruh insan Perseroan, IIF berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti korupsi di seluruh level jabatan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Perseroan menerapkan kebijakan anti korupsi dengan berpedoman pada *Anti-Corruptions Guidelines* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Perseroan merealisasikan komitmen untuk mencegah praktik korupsi melalui beberapa peraturan terkait anti korupsi yang disertakan dalam Kode Etik Perusahaan, yakni pada Pasal 30 dan 31 yang berbunyi:

- **Pasal 30 tentang Kode Etik dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi**
Setiap karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi yang merupakan bagian dari Peraturan Perusahaan ini sebagaimana terlampir.

Compliance with Humanitarian Principles

In running its business, the Company always interacts with people. Therefore, the Company continues to adhere to humanitarian principles in realizing every existing project. For example, ensuring that there is no underage workers, excessive exploitation of human labor, and ensuring treatment upholding humanity in each operational activity.

SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONS

As a company engaged in infrastructure business, IIF is always committed to implementing fair operation principles in executing various projects. As the business deals a lot with money, the Company is obliged to ensure that there is no fraud, corruption, and other misuse of money across its business operational processes.

The Company is committed to always prioritizing healthy and clean corporation principle so that the project can run well and according to plan that will not cause harm to many parties, including IIF itself. This becomes the Company's main concerns because its business is greatly exposed to fraud and fund misuse risks. To that end, it requires a large commitment and responsibility from all people of the Company.

Anti-Corruption Policy

To ensure that anti-corruption principle is always implemented by all members of the Company, IIF is committed to enforcing anti-corruption policy at all levels of position thoroughly without exception. The Company implements anti-corruption policy based on the *Anti-Corruptions Guidelines* issued by the World Bank.

The Company realizes its commitment of preventing corrupt practices by incorporating several anti-corruption related provisions in the Company's Code of Conduct, namely Articles 30 and 31, which read:

- **Article 30 concerning Code of Ethics and Guidelines for the Prevention of Fraud and Anti-Corruption**
Every employee must comply with and implement all the provisions in the Company's Code of Ethics and the Guidelines for the Prevention of Fraud and Anti-Corruption which are part of this Company Regulation as attached.

• **Pasal 31 tentang Pengawasan**

1. Manajemen atau Atasan Langsung berhak mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan ini.
2. Setiap Atasan Langsung bertanggung jawab dan wajib memberi teladan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan ini, serta memastikan terselenggaranya tata tertib dan disiplin Karyawan yang berada di bawah tanggung jawab pengawasannya.

Dengan adanya kebijakan ini, seluruh insan Perseroan turut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak korupsi yang dapat membawa dampak negatif yang besar, baik kerugian dalam segi finansial maupun rusaknya citra Perseroan di mata masyarakat.

Kebijakan Benturan Kepentingan

Sebagai perusahaan yang menjadi pihak penunjang terlaksananya pembangunan infrastruktur, Perseroan dalam menjalankan bisnisnya dapat memiliki kondisi di mana terdapat benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, mitra kerja proyek, hingga masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan memastikan tidak ada benturan kepentingan yang berpotensi terjadi dalam proses bisnis, yakni melalui peninjauan proyek, mulai dari dokumen terkait hingga proses berjalannya proyek dari awal sampai selesai, sehingga tidak terdapat kerugian yang menimbulkan dampak buruk bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dasar Kebijakan

Dalam Perseroan, pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan dilakukan di bawah pengawasan dan pengelolaan Unit S&E. Unit ini berperan dalam melaksanakan penilaian kepatutan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur berdasarkan 8 (delapan) Prinsip Sosial dan Lingkungan yang ada.

Delapan prinsip tersebut antara lain:

1. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS);
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
3. Pencegahan Polusi, Pengurangan, dan Perubahan Iklim;

• **Article 31 regarding Supervision**

1. Direct Management or Superior has the right to take action and impose sanctions on Employees who violate this Company Regulation.
2. Each Direct Supervisor is responsible and obliged to set a good example in accordance with the provisions of this Company Regulation, and ensure that the Employees under their supervision is disciplined and follow the rules.

With this policy in place, all of the Company's employees are expected to contribute to prevent corruption that could bring great negative impact on the Company, both financially and in the form of damaged reputation in the eyes of the public.

Conflict of Interest Policy

As a company that supports the implementation of infrastructure development, IIF faces conflict of interest risk in the course of its business activities. This conflict of interest may happen between related parties, such as the Government, project partners, and the public. Therefore, the Company ensures that there are no conflicts of interest that could potentially occur in business processes, which is by comprehensively reviewing project, starting from examining documents related to the project to the project implementation from start to finish. In doing so, the Company expects to prevent losses that could adversely affect all parties involved in the project.

SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT AND SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Basis of Policy

The practice of social responsibility towards the environment and social community at IIF is carried out by the S&E Unit, which is responsible for evaluating the appropriateness of providing financing facilities for infrastructure projects based on 8 (eight) Social and Environmental Principles.

The eight principles include:

1. Social and Environmental Management System (SEMS);
2. Labor and Working Conditions;
3. Pollution Prevention and Abatement and Climate Change;





4. Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Keamanan/ Keselamatan Bendungan;
5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela;
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
7. Masyarakat Adat; dan
8. Properti dan Warisan Budaya.

Selain delapan prinsip tersebut, terdapat kebijakan internal yang tercatat dalam Bab 3 *Operation Manual Batch 2* mengenai IIF: *Environmental and Social Safeguards Framework* (ESSF).

Bidang Lingkungan Hidup

Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Lingkungan dan Dapat Didaur Ulang

Perseroan memahami bahwa penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dapat memberi dampak positif, tidak hanya bagi kelestarian lingkungan secara langsung namun juga bagi keberlangsungan bisnis usaha di masa depan. Oleh karena itu, IIF mengembangkan berbagai proyek yang mendukung komitmen Perusahaan dalam menjaga lingkungan, antara lain proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan yang mampu mengurangi tingkat polusi udara dan mampu menghasilkan energi untuk pengganti energi fosil yang dapat menyebabkan kerusakan alam.

Sistem Pengolahan Limbah Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan proyek infrastruktur, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengupayakan adanya pencegahan timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah tidak berbahaya dari setiap setiap aktivitas proyek. Untuk limbah yang dapat digunakan kembali, oleh Perseroan akan didaur ulang dengan proses yang aman sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sementara untuk limbah yang tidak dapat digunakan kembali, oleh Perseroan akan dihancurkan atau dimusnahkan dengan proses sesuai prosedur pengolahan limbah ramah lingkungan.

Mekanisme Pengaduan

Perseroan menyertakan mekanisme pengaduan yang meliputi seluruh proses dalam proyek, mulai dari sejak proyek belum dimulai hingga proyek berakhir. Mekanisme diawali dengan sosialisasi rencana proyek kepada masyarakat terdampak. Kemudian, selama proyek berjalan, Perseroan akan memberikan laporan secara berkala terkait dengan kemajuan pelaksanaan

4. Community Health, Safety, and Security/Dam Safety;
5. Land Acquisition and Involuntary Resettlement;
6. Biodiversity Conservation and Natural Resources Management;
7. Indigenous People; and
8. Cultural Property and Heritage.

Apart from the above eight principle, the Company has established internal policies in the Operational Manual Batch 2, Chapter 3 on IIF: Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF).

Environmental Field

Use of Environmentally-Friendly and Recyclable Materials and Energy

The Company understands that the use of environmentally-friendly materials and energy can generate positive impact, not only for environmental preservation directly but also for business continuity in the long run. Therefore, IIF has developed various projects that support the Company's commitment to protecting the environment, including the construction of a Renewable Energy Power Plant project that is able to reduce the level of air pollution and produce energy to replace fossil energy that can cause damage to nature.

Company Waste Management System

As a company whose business sector is related to infrastructure projects, the Company is committed to always striving to prevent the emergence of hazardous and toxic waste and non-hazardous waste from every project activity. Waste that can be reused will be safely recycled by the Company so that it will cause no adverse effects for humans and the environment. Conversely, waste that cannot be reused will be destroyed or eliminated according to environmentally friendly waste treatment procedures.

Complaints Mechanism

The Company has establish complaint mechanism that covers all processes from the start to the conclusion of a project. The first step of the mechanism is dissemination of project plans to the affected communities. Furthermore, during period of project implementation, the Company will then provide periodic reports illustrating progress on the project, including reports on risks that may arise and

rencana proyek, termasuk di dalamnya mencakup laporan risiko yang mungkin muncul dan memiliki dampak terhadap masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan/keluhan melalui email yang tersedia di situs Perseroan.

Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Selain melaksanakan standar S&E di dalam seluruh proses bisnis yang dijalankan, IIF turut bergerak menyelenggarakan berbagai kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang sosial dan kemasyarakatan melalui kegiatan filantropi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, antara lain:

1. Melanjutkan program Pendanaan Penelitian (Research Grants) 2018 (Fase Akhir)
2. Donasi untuk Panti Asuhan
3. Donasi untuk korban bencana alam tsunami di Selat Sunda

Melihat rangkaian program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dan pengembangan sosial kemasyarakatan telah banyak memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, Perseroan berkomitmen untuk terus menjalankan program melalui berbagai inisiatif dan gagasan baru sehingga mampu meningkatkan dampak positif dan nilai tambah bagi berbagai pihak serta meningkatkan tanggung jawab Perusahaan di seluruh bidang terkait.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Dasar Kebijakan

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan positif, selain karena kualitas dan kompetensi dari karyawan, dibutuhkan pula kontribusi dari perusahaan untuk mendorong kinerja baik dari karyawan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berfokus pada kebutuhan karyawan akan sarana peningkatan kinerja, seperti pengembangan potensi dan kompetensi serta penyediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan harmonis. Selain untuk peningkatan kinerja, upaya tersebut menjadi perhatian dari Perseroan sebagai bagian dari kepedulian, kewajiban, serta tanggung jawab Perusahaan terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan No. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015, yang disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perusahaan melalui jajaran pengambil keputusan, menetapkan kebijakan yang

potentially affect the community. Community complaints can be directed to the Company via the e-mail address provided on the Company's website.

Social Community Development Field

In addition to implementing S&E standards across its business processes, IIF also performs various corporate responsibility activities in the social and community fields through philanthropic activities carried out in 2019, among others:

1. The continuation of the 2018 Research Grants (Final Phase)
2. Donation to the Orphanages
3. Donation for victims of Tsunami in Sunda Strait

Seeing that a series of social responsibility programs on the environment and social development provides many positive impacts on the environment and society, the Company is committed to continuing the program through various new initiatives and ideas so as to increase positive impact and added value for various parties and increase accountability of the Company in all related fields.

SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Basis of Policy

Aside from contribution from the employee's quality and competency, it requires contributions from the company to boost the employees' good performance in order to produce optimum and positive results. Therefore, the Company always focuses on fulfilling the employees' needs to obtain performance improvement facilities, such potential and competency development, as well as safe, comfortable, healthy, and harmonious work environment. In addition to its impact on improving performance, provision of these facilities is part of the Company's concerns, obligations and responsibilities towards the Company's Human Resources.

Based on Company Regulation No. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015, which was approved by the Head of the One-Stop Integrated Service Office of South Jakarta City Administration, the Company, through its decision maker management, has established policies governing matters



mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan demikian, dalam menjalankan tanggung jawab di bidang tersebut, Perseroan dapat mematuhi seluruh aturan terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja agar pelaksanaan tanggung jawab berjalan dengan efektif, efisien, tepat, serta sesuai dengan peraturan.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam seluruh proses perekrutan dan pemberian kesempatan kerja. Prinsip tersebut mencakup praktik tidak memandang latar belakang calon karyawan, seperti gender, suku, ras, agama, maupun status sosial. Perseroan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada kompetensi, keahlian, serta latar belakang profesional dari individu tersebut.

Selain pada calon karyawan, Perseroan juga memfokuskan pada karyawan yang telah menjadi bagian dari perusahaan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai basis hubungan pekerjaan yang harmonis antara Perseroan dengan karyawan. Hubungan pekerjaan tersebut secara keseluruhan meliputi proses perekrutan dan penandatanganan kontrak kerja, kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi kerja dan kontrak kerja, akses terhadap pelatihan, promosi, pemberhentian kerja atau pensiun, serta tindakan disiplin lainnya. Selain itu, Perseroan turut menitikberatkan pada pencegahan tindakan pelecehan, intimidasi, dan/atau eksploitasi dengan menetapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti.

Untuk mewujudkan komitmen terhadap praktik kesetaraan, Perseroan telah menerbitkan kebijakan terkait yang telah disetujui melalui Keputusan Manajemen No.SK.2017.004/I/IIIF-HR&GA. Dengan adanya kebijakan tersebut, Perseroan dapat memastikan praktik kesetaraan gender dan kesempatan kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Perseroan memandang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai faktor terpenting yang mampu menunjang tingkat kesuksesan operasional dan aktivitas usaha Perseroan, baik di lokasi proyek maupun di kantor pusat. Hal tersebut menjadi fokus utama Perseroan karena keselamatan dan kesehatan kerja berperan besar dalam memperhatikan eksistensi dan kinerja bisnis Perseroan.

relating to employment, occupational health and safety. Therefore, in carrying out its responsibilities in this field, the Company can comply with all regulations related to employment and occupational health and safety, so that the implementation of responsibilities runs effectively, efficiently, properly, and in accordance with regulations.

Gender Equality and Work Opportunities

The Company applies non-discrimination principles in the entire recruitment and provision of job opportunity process, where the candidates are hired regardless of their background, namely gender, ethnicity, race, religion, or social status. The company makes decisions based on the competency, expertise and professional background of the individual.

This equality and fairness principles are applied not only to employee candidates, but also to the existing employees in order to build the basis for harmonious work relationship between the Company and employees. The overall employment relationship covers recruitment and signing of employment contracts process, compensation (including wages and benefits), working conditions and employment contracts, access to training, promotion, termination of employment or retirement, and other disciplinary actions. In addition, the Company also focuses on the prevention of harassment, intimidation, and/or exploitation by enforcing strict sanctions for anyone proven guilty.

For continuous implementation of commitment to equality principle practice, the Company has issued related policies that have been approved through Management Decree No. SK.2017.004/I/IIIF-HR&GA. With this policy, the Company can ensure that the practice of gender equality and fair employment opportunities can run as expected.

Occupational Safety and Related Facilities

The Company views health and safety as the most important factor that is able to support success rate of the Company's operations and business activities, both at the project site and head office. This has become the Company's main focus because occupational health and safety plays a great role in maintaining the existence and performance of the Company's business.



Untuk prosedur keselamatan kerja di kantor pusat di mana mayoritas tenaga kerja Perseroan bekerja, Perseroan menyediakan sarana dan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki pihak pengelola gedung lokasi kantor pusat IIF. Sementara untuk saat-saat di mana karyawan melakukan kunjungan lapangan, sarana dan keselamatan kerja mengikuti prosedur dari operator proyek.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada kegiatan tanggap bencana yang diselenggarakan oleh pihak pengelola gedung dan internal manajemen risiko Perseroan secara berkala. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi dan simulasi dengan berdasarkan skenario yang berbeda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan terhadap kondisi bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi saat bekerja. Perseroan juga melengkapi area kantor dengan sarana penunjang berupa sejumlah fitur keselamatan, yakni alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau, alat pendeteksi asap, serta tangga darurat untuk jalur evakuasi darurat.

Tingkat Perpindahan Karyawan (Turnover)

Kinerja karyawan memiliki dampak besar terhadap aktivitas operasional Perseroan di ranah bisnis usaha, sehingga adanya tingkat *turnover* yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara keseluruhan. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat *turnover* karyawan di sebuah perusahaan, antara lain beban kerja yang cukup tinggi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang andal dan berpengalaman, terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar di tempat lain, interaksi sosial yang buruk di tempat kerja, dan lain sebagainya.

Melihat berbagai hal tersebut, dengan dukungan dari departemen SDM, Perseroan berupaya menekan angka *turnover* karyawan melalui penyusunan program-program yang sesuai dan efektif. Sejumlah inisiatif program tersebut ke depannya akan terus dijalankan dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan.

Remunerasi

Perseroan memahami bahwa selain berbagai faktor yang disebutkan di atas, remunerasi menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat *turnover* di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa mengkaji besaran remunerasi secara berkala untuk memastikan besaran remunerasi

In terms of work safety procedures at the head office where the majority of the Company's employees works, the Company provides occupational safety facilities in accordance with the established safety procedures of the building where IIF's head office is located. Meanwhile, the employees performing site visits will follow the work safety procedures established by the project operator.

Throughout 2019, all employees of the Company have participated in disaster response drills carried out regularly by the building management and internal risk management trainings by the Company, including dissemination and simulations under different scenarios. These activities are meant to increase employee awareness of possible dangers that may happen any time in their work environment. In terms of supporting facilities, the Company's office area is equipped with a number of safety features, including fire extinguishers placed in strategic and accessible locations, smoke detectors, and emergency stairs for emergency evacuation.

Turnover rate

Employee performance has a large impact on the Company's operational activities. Thus, high turnover rate can affect the overall performance of the Company. There are several factors underlying the high turnover rate in a company, including demanding workloads that require a reliable and experienced workforce, greater job opportunities in other establishments, poor social interaction in the workplace, and so on.

Observing this, the Company, supported by its HR division, seeks to reduce the employee turnover through appropriate and effective programs. A number of such program initiatives will be maintained and developed further in the coming years.

Remuneration

The Company realizes that aside from the foregoing, remuneration is another deciding factor in a company's turnover rate. Therefore, the Company reviews remuneration rates on a regular basis to ensure that the remuneration amount is aligned with the Company's conditions, employee performance level, and the applicable





telah sesuai dengan kondisi Perseroan, tingkat kinerja karyawan, serta peraturan yang berlaku. Terkait dengan peraturan, Perseroan senantiasa berpedoman pada peraturan tentang pemberian upah yang ditetapkan oleh otoritas berwenang serta melakukan penyesuaian nominal yang berlaku pada bidang usaha sejenis.

Hal tersebut perlu dilakukan agar Perseroan dapat memastikan bahwa remunerasi karyawan lebih kompetitif dengan besaran yang proporsional. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menunjang kesejahteraan segenap karyawan dan mendukung peningkatan kualitas hidup karyawan yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya kinerja yang diberikan karyawan.

Perseroan memberikan remunerasi berupa gaji pokok, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, beserta fasilitas dan berbagai tunjangan lainnya, antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan;
2. BPJS Kesehatan;
3. Tunjangan Hari Raya (THR);
4. Penggantian biaya rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
5. Tunjangan keanggotaan keluarga.

Pengembangan Karyawan

Perseroan memandang bahwa karir karyawan yang berkelanjutan perlu dilakukan melalui pengembangan kompetensi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi karyawan dan Perseroan. Bagi karyawan, hal tersebut dapat mendukung jenjang karir ke depan, sementara bagi Perseroan, dapat menjadi nilai tambah berupa adanya karyawan yang sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya pengembangan kompetensi yang berdampak pada kelanjutan karir, hierarki organisasi kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat menghadirkan sistem regenerasi tenaga kerja di Perseroan. Ke depan, Perseroan akan terus mendukung upaya pengembangan karir dan potensi karyawan demi keberlanjutan bisnis Perseroan dan pengembangan karyawan itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan praktik pengembangan karir karyawan, Perseroan senantiasa mengambil landasan pada syarat dasar dan hasil evaluasi atas *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah dicapai. Berdasarkan hasil tersebut, Perseroan selanjutnya akan melakukan serangkaian proses lanjutan sampai ke tahap final, hingga pada akhirnya karyawan tersebut dapat menduduki jabatan yang diinginkan.

regulation. The Company is also guided by regulations concerning wages issued by relevant authorities and nominal adjustments that apply to similar businesses.

This is done so that the Company can ensure that its remuneration packages remain competitive and reasonable. Through these efforts, it is hoped that the welfare of all employees can be well supported, which ultimately impact on the increasing performance for the Company.

The Company provides remuneration in the form of basic salaries, communication and transportation allowances, facilities, and benefits as follows:

1. Social Security Program;
2. Healthcare Security Program;
3. Annual Religious Holiday Allowance (THR);
4. Reimbursement for outpatient and inpatient treatment for employees and relatives; and
5. Sport facility membership allowance.

Employee Development

The Company is of the opinion that competency development is required to ensure continued career growth in order to provide added value for employees and the Company. For the employees, this can support future career paths, while for the Company, having people with the right competency needed by the company is another added value. With competency development that affects career progression, the Company's organizational hierarchy can operate in a more effective and efficient manner, and the regeneration system of the Company's workforce can run well. Going forward, the Company will continue to support career development and employee potential development programs for the sustainability of the Company's business and the development of its employees.

In progressing the career paths of its employees, the Company is guided by the basic requirements and valuation results of Key Performance Indicators (KPI). Based on these results, the Company will carry out a series of follow-up processes until the final stage, namely until each employee can reach their ideal/desired positions.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan yang dihadapi para karyawan, Perseroan menyediakan sarana pengaduan melalui mekanisme yang meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal*, di mana di dalamnya termasuk *direct coaching* dan mekanisme *whistleblower* yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Selain itu, setiap empat bulan sekali, manajemen juga mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah yang ada secara *top-down*.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PRODUK DAN LAYANAN

Perseroan senantiasa memegang teguh prinsip keterbukaan informasi dalam menjalankan bisnis usahanya, terutama mengenai produk dan layanan yang berkaitan dengan pembangunan proyek infrastruktur kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap informasi melalui situs Perseroan, yakni www.iif.co.id. Secara berkala, Perseroan memperbarui informasi yang ada di dalam situs resmi tersebut untuk memastikan agar situs tetap *user-friendly* untuk memudahkan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Selain itu, Perseroan senantiasa mengkaji dan menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan penerapan sistem baru bersama pelanggan internal. Perseroan juga telah melakukan sosialisasi proaktif mengenai prosedur operasional dalam rangka memperbaiki proses, meningkatkan manajemen risiko operasional, serta menerapkan efisiensi biaya operasional.

Complaint Mechanism for Manpower Issues

In respect of employment issues faced by employees, the Company provides complaint reporting channel through a mechanism that covers Performance Appraisal assessment system that includes direct coaching and a whistleblower mechanism regulated by Company Regulations. In addition, the Company management also holds regular meetings every four months with employees to discuss strategies or solutions to existing problems in a top-down manner.

SOCIAL RESPONSIBILITIES ON PRODUCTS AND SERVICES

The Company always adheres to information disclosure principles in running its business, especially regarding products and services related to infrastructure project development to stakeholders. This information disclosure is realized by providing access to information through the Company's website, namely www.iif.co.id. The Company regularly updates the information contained in its official website and ensures that the website remains user-friendly to facilitate the needs and interest of all stakeholders.

In addition, the Company consistently reviews and establishes its Service Level Agreement (SLA) by implementing new systems in collaboration with internal customers. The Company also proactively disseminates operational procedures in order to improve relevant processes, enhance operational risk management, and streamline operational costs.



Halaman ini sengaja di kosongkan
This page intentionally left blank

Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Indonesia Infrastructure Finance

Statement of the Board of Commissioners on the Responsibility for the 2019
Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2019 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety and we are fully responsible for the contents of this Annual Report. This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Maret 2020

Jakarta, March 2020

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



V. SONNY LOHO

Plt. Presiden Komisaris/ Independen Komisaris*

Interim President Commissioner/ Independent Commissioner*



RINALDI FIRMANSYAH
Komisaris Independen

Independent Commissioner



MUHAMAD AL-ARIF
Komisaris

Commissioner



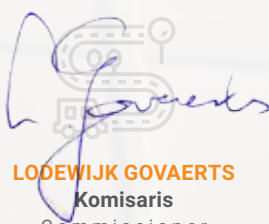
BHIMANTARA WIDYAJALA
Komisaris

Commissioner



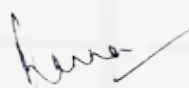
ANDREAS ZEISLER
Komisaris

Commissioner



LODEWIJK GOVAERTS
Komisaris

Commissioner



RAJEEV VEERAVALLI KANNAN
Komisaris

Commissioner



RICHARD LYON RANKEN
Komisaris

Commissioner

* Mulai Menjabat sejak 9 Desember 2019 / Begin Serving as of December 9, 2019



Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019

PT Indonesia Infrastructure Finance

Statement of the Board of Directors on the Responsibility for the 2019 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

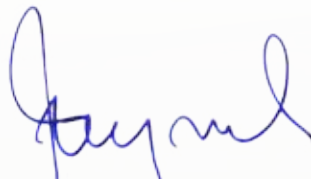
We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2019 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety and we are fully responsible for the contents of this Annual Report. This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Maret 2020

Jakarta, March 2020

Direksi

Board of Directors



REYNALDI HERMANSJAH

Presiden Direktur & Chief Executive Officer

President Director & Chief Executive Officer



I MADE WIRACITA TANTRA

Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer

Managing Director & Chief Risk Officer



DEVI PRADNYA PARAMITA

Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer

Managing Director & Chief Financial Officer



HILDA SAVITRI

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer



PT Indonesia Infrastructure Finance

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements

***As of December 31, 2019 and for the year then ended
with independent auditors' report***

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	2-3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5-6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-121	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND FOR THE YEAR ENDED**

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Kami yang bertandatangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/ <i>Name</i>	: Reynaldi Hermansjah
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Prosperity Building Lantai 53-55 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Alamat rumah/ <i>Domicile address</i>	: Jl. Mertilang I Blok JE.6/27, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan
Nomor telepon/ <i>Phone numbers</i>	: +62 21 5082 6600
Jabatan/ <i>Title</i>	: Presiden Direktur/ <i>President Director</i>
2. Nama/ <i>Name</i>	: Devi Pradnya Paramita
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Prosperity Building Lantai 53-55 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Alamat rumah/ <i>Domicile address</i>	: Apt. Taman Rasuna U.06-08-H
Nomor telepon/ <i>Phone numbers</i>	: +62 21 5082 6600
Jabatan/ <i>Title</i>	: Direktur Keuangan/ <i>Chief Financial Officer</i>

menyatakan bahwa/*declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i>
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan benar;	3. <i>a. All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	<i>b. The financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.	4. <i>We are responsible for the internal control systems of the Company.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 14 Februari 2020/*February 14, 2020*


Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur/*President Director*


Devi Pradnya Paramita
Direktur Keuangan/*Chief Financial Officer*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53rd-55th Floor
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
P +62 21 5082 6600
F +62 21 5082 6601
E info@iif.co.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00081/2.1032/AU.1/09/0701-1/1/II/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Infrastructure Finance**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00081/2.1032/AU.1/09/0701-1/1/II/2020

**The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Indonesia Infrastructure Finance**

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00081/2.1032/AU.1/09/0701-1/1/II/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00081/2.1032/AU.1/09/0701-1/1/II/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2019 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Sinarta

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701/Public Accountant Registration No. AP.0701

14 Februari 2020/February 14, 2020

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2.429.067	3e,3i,5,30	582.361	Cash and cash equivalents
Efek-efek	2.732.936	3e,6,30	3.302.399	Securities
Investasi saham	389.636	3e,8	364.841	Equity investments
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp173.549 tahun 2019 dan Rp167.560 tahun 2018	6.232.662	3e,9,30	5.721.389	Loans - net of allowance for impairment losses of Rp173,549 in 2019 and Rp167,560 in 2018
Tagihan derivatif	44.290	3e,3s,7	76.350	Derivative receivables
Piutang bunga	62.905	10,30	41.246	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	8.593	3j,11	6.969	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	449	3q,27	11.367	Prepaid taxes
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp37.414 tahun 2019 dan Rp16.877 tahun 2018	293.507	3k,12	314.113	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp37,414 in 2019 and Rp16,877 in 2018
Aset pajak tangguhan	86.735	3q,27	79.159	Deferred tax assets
Beban tangguhan	3.658	3l,13,30	39.356	Deferred charges
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp13.056 tahun 2019 dan Rp17.092 tahun 2018	26.622	3m,14,30	33.685	Other assets - net of allowance for impairment loss of Rp13,056 in 2019 and Rp17,092 in 2018
TOTAL ASET	12.311.060		10.573.235	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas derivatif	39.670	3e,3s,7	18.150	Derivative liabilities
Utang lain-lain	8.728	3f,15,30	8.373	Other payables
Utang pajak	1.676	3q,27	4.751	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	37.985	3f,16,30	30.352	Accrued expenses and other liabilities
Pendapatan diterima dimuka	4.388	18	2.904	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	26.327	3r,28	18.734	Employee benefits obligation
Pinjaman diterima	4.713.745	3f,19,30	3.591.557	Fund borrowings
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	3f,17,30	1.725.765	Debt securities issued
Pinjaman subordinasi	3.142.918	3f,20,30	3.037.409	Subordinated loans
Total Liabilitas	10.158.501		8.437.995	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar 2.000.000 saham				Authorized 2,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham	2.000.000	21	2.000.000	Subscribed and paid up 2,000,000 shares
Tambahan modal disetor	29.800	22	29.800	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak	5.336	3e,6	(27.860)	Other comprehensive income - net of tax
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(29.752)	3f,7	-	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	26.465	22	26.465	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	120.710		106.835	Unappropriated
Total Ekuitas	2.152.559		2.135.240	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.311.060		10.573.235	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an
integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga	786.371	3e,3p,23,30	730.519	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	37.490	3p,24,30	30.849	Provision and commission income
Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek	4.067	3e,3p,6,30	(881)	Realized gain/(loss) on sale of securities
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	8.059	3p,30	12.409	Advisory income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham	1.010	8	-	Realized gain from sale of equity investment
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	5.781	3e,3s,30	45.534	Realized gain from derivative transactions
Kerugian selisih kurs	(16.589)	3c	(48.912)	Loss from foreign exchange
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham	24.795	3e,3h,8	(65.552)	Unrealized gain/(loss) from changes in fair value of equity investments
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar opsi saham	(22.655)	3e,3s,8	66.946	Unrealized (loss)/gain from changes in the fair value of shares option
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	8.745	3e,3s	(8.745)	Unrealized gain/(loss) from changes in fair value of derivative transactions
Pendapatan lainnya	728	3p	2.764	Other income
Total Pendapatan	837.802		764.931	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban bunga	(626.153)	3p,26,30	(632.844)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(174.200)	3o,3p,25	(151.442)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(5.045)	3e,9,14	(27.342)	Provision for impairment losses
Total Beban	(805.398)		(811.628)	Total Expenses
LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	32.404		(46.697)	INCOME/(LOSS) BEFORE TAX EXPENSE
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK	(16.428)	3q,27	3.749	TAX (EXPENSE)/BENEFIT
LABA/(RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	15.976		(42.948)	NET INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	33.767	3e,3h,6	(50.236)	Increase/(decrease) in fair value of available-for-sale securities
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	(39.670)	3s,7	-	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	9.347	3q,27	1.093	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	(2.801)	3r,28	2.986	Actuarial (loss)/gain

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: (lanjutan)				OTHER COMPREHENSIVE INCOME: (continued)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	700	3q,27	(746)	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Total penghasilan/(rugi) komprehensif lain	1.343	3q	(46.903)	Total other/(loss) comprehensive income
TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF	17.319		(89.851)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
LABA/(RUGI) PER SAHAM				INCOME/(LOSS) PER SHARE
Dasar (dalam ribuan Rupiah)	8	3u,36	(21)	Basic (in thousands of Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an
integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings*) Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto/Cumulative loss on derivative for cash flow hedges-net	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2018		2.000.000	29.800	26.465	147.543	21.283	-	2.225.091	Balance as of January 1, 2018
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	(42.948)	-	-	(42.948)	Net loss for the year
Keuntungan aktuarial	3r,28	-	-	-	2.240	-	-	2.240	Actuarial gain
Penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	3e,3h,6	-	-	-	-	(49.143)	-	(49.143)	Decrease in fair value of available- for-sale securities
Saldo 31 Desember 2018		2.000.000	29.800	26.465	106.835	(27.860)	-	2.135.240	Balance as of December 31, 2018
Saldo 1 Januari 2019		2.000.000	29.800	26.465	106.835	(27.860)	-	2.135.240	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	15.976	-	-	15.976	Net income for the year
Kerugian aktuarial	3r,28	-	-	-	(2.101)	-	-	(2.101)	Actuarial loss
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	3e,3h,6	-	-	-	-	33.196	-	33.196	Increase in fair value of available- for-sale securities
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	3e,3h,6	-	-	-	-	-	(29.752)	(29.752)	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge
Saldo 31 Desember 2019		2.000.000	29.800	26.465	120.710	5.336	(29.752)	2.152.559	Balance as of December 31, 2019

*) Saldo laba termasuk keuntungan/(kerugian) aktuarial - neto setelah pajak

*) Retained earnings include actuarial gain/(loss) - net of tax

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
2019	Catatan/ Notes	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga	857.275	782.605
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi	40.696	39.949
Pembayaran kepada pemasok	(54.404)	(37.622)
Pembayaran kepada karyawan	(91.502)	(91.472)
Penerimaan pendapatan <i>advisory</i>	7.901	16.316
Pembayaran biaya pinjaman diterima dan surat utang diterbitkan	(6.453)	(16.674)
Pembayaran pajak final dan pajak penghasilan badan	(13.957)	(13.750)
Penerimaan pengembalian pajak	9.345	-
Pembayaran beban bunga	(612.442)	(536.024)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	136.459	143.328
Pinjaman diberikan kepada nasabah	(1.422.689)	(3.528.366)
Investasi saham	-	(430.393)
Penerimaan pembayaran pinjaman diberikan	832.155	3.424.687
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(454.075)	(390.744)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek	(586.920)	(1.229.700)
Penjualan efek-efek	1.024.457	1.003.913
Perolehan aset tetap	(173)	(40.533)
Perolehan perangkat lunak	(889)	(7.544)
Penjualan aset tetap	-	600
Arus kas netto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	436.475	(273.264)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman diterima	1.802.250	3.400.000
Penerimaan pinjaman subordinasi	300.000	300.000
Penerimaan surat utang yang diterbitkan	1.500.000	200.000
Pembayaran pinjaman diterima	(625.000)	(6.615.150)
Pembayaran surat utang yang diterbitkan	(1.025.000)	-
Pembayaran pinjaman subordinasi	(100.497)	(66.799)
Arus kas netto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.851.753	(2.781.949)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1.834.153	(3.445.957)
		NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	12.553	3c	62.354	Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	582.361	3i	3.965.964	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.429.067	3i	582.361	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan atas pasal 4 ayat (3), pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 11 ayat (3), pasal 13, pasal 19, pasal 22 dan pasal 23. Laporan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0227487 tanggal 31 Juli 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/ *mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar swap yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pembangunan proyek; dan
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Indonesia Infrastructure Finance (the "Company") was established under the laws of the Republic of Indonesia through Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-21503.AH.01.01.Year 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 43 dated July 24, 2018, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, regarding the change in article 4 par. (3), article 4 par. (4), article 10, article 11 par. (3), article 13, article 19, article 22 dan article 23. Report of such changes had been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the letter No. AHU-AH.01.03-0227487 dated July 31, 2018.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in financing infrastructure projects in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. provide loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/mezzanine financing, bridge financing, take-out financing and/or refinancing;
- b. provide guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, *credit enhancement*, and/or *performance bonds*;
- c. equity investment;
- d. provide services involving search for swap market related to infrastructure financing companies;
- e. provide consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and
- f. Other financing activities related to infrastructure projects as permitted by the Minister of Finance Regulation No.100/PMK.010/2009 regarding Infrastructure Finance Company.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, Perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan perluasan sektor infrastruktur termasuk diantaranya infrastruktur sosial.

Sejak tanggal 5 Juli 2018, kantor Perusahaan berlokasi di Prosperity Tower lantai 53-55, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**31 Desember/
December 31,
2019**

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris Independen

M. Chatib Basri^{a)}
Rinaldi Firmansyah
Vincentius Sonny Loho

Komisaris

Richard Lyon Ranken
Lodewijk Govaerts^{b)}
Andreas Manfred Zeisler^{c)}
Bhimantara Widyajala
Rajeev Kannan
Muhamad Al Arif

Direksi

Presiden Direktur
Direktur

Reynaldi Hermansjah^{d)}
Harold J.D. Tjiptadaja^{e)}
Hilda Savitri
Devi Pradnya Paramita^{f)}
I Made Wiracita Tantra

- a) Pada tanggal 10 Desember 2019, Bapak Harold J.D. Tjiptadaja mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Perusahaan.
- b) Pada tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.
- c) Efektif sejak 1 Desember 2019, Ibu Devi Pradnya Paramita menjabat sebagai Direktur menggantikan Ibu Indrawati Darmawan.
- d) Efektif sejak 26 Juli 2019, Bapak Lodewijk Govaerts menjabat sebagai Komisaris menggantikan Bapak Robert Olivier Dolk.
- e) Efektif sejak 20 April 2019, Bapak Reynaldi Hermansjah menjabat sebagai Presiden Direktur.

1. GENERAL (continued)

The Company has obtained its business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

Through Financial Service Authority Letter ("OJK") No. S-2/D.05/2018 dated January 2, 2018, the Company also obtained an approval of the expansion of infrastructure sectors including among others social infrastructure.

Since July 5, 2018, the Company's office is located at the Prosperity Tower 53th-55th floor, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Key management personnel consists of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

**31 Desember/
December 31,
2018**

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioners

M. Chatib Basri
Rinaldi Firmansyah^{a)}
Vincentius Sonny Loho^{b)}

Commissioners

Richard Lyon Ranken
Robert Oliver Dolk
Hans Juergen Hertel
Bhimantara Widyajala
Rajeev Kannan
Muhamad Al Arif^{c)}

Board of Directors
President Director
Directors

I Made Wiracita Tantra^{d)}
Harold J.D. Tjiptadaja
Hilda Savitri
Indrawati Darmawan

- a) On December 10, 2019, Mr. Harold J.D. Tjiptadaja submitted resignation letter as Director of the Company.
- b) On December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri submitted resignation letter as President Commissioner of the Company.
- c) Effective December 1, 2019, Ms. Devi Pradnya Paramita has served as Director replacing Ms. Indrawati Darmawan.
- d) Effective July 26, 2019, Mr. Lodewijk Govaerts has served as Commissioner replacing Mr. Robert Olivier Dolk.
- e) Effective April 20, 2019, Mr. Reynaldi Hermansjah has served as President Director.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

- f) Efektif sejak 21 Maret 2019, Bapak Andreas Manfred Zeisler menjabat sebagai Komisaris menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel.
- g) Efektif sejak 30 Oktober 2018, Bapak I Made Wiracita Tantra menjabat sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur menggantikan Bapak Arisudono Soerono.
- h) Efektif sejak 4 Juni 2018, Bapak Vincentius Sonny Loho menjabat sebagai Komisaris Independen menggantikan Bapak Edwin Gerungan.
- i) Efektif sejak 13 Februari 2018, Bapak Muhamad Al Arif menjabat sebagai Komisaris menggantikan Bapak Robert Pakpahan.
- j) Efektif sejak 25 Januari 2018, Bapak Rinaldi Firmansyah menjabat sebagai Komisaris Independen menggantikan Bapak Zulkifli Zaini.

Pada tanggal 10 November 2017, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Januari 2018.

Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan yang berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Utiok R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak I Made Wiracita Tantra ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Bapak Wito Krisnahadi efektif sejak tanggal 5 Maret 2018. Pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0036419 tanggal 25 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat oleh Utiok R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Rinaldi Firmansyah diangkat sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan menggantikan Bapak Zulkifli Zaini efektif sejak tanggal 25 Januari 2018. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0064230 tanggal 12 Februari 2018.

1. GENERAL (continued)

- f) Effective March 21, 2019, Mr. Andreas Manfred Zeisler has served as Commissioner replacing Mr. Hans Juergen Hertel.
- g) Effective October 30, 2018, Mr. I Made Wiracita Tantra has served as Interim President Director replacing Mr. Arisudono Soerono.
- h) Effective June 4, 2018, Mr. Vincentius Sonny Loho has served as Commissioner replacing Mr. Edwin Gerungan.
- i) Effective February 13, 2018, Mr. Muhamad Al Arif has served as Commissioner replacing Mr. Robert Pakpahan.
- j) Effective January 25, 2018, Mr. Rinaldi Firmansyah has served as Independent Commissioner replacing Mr. Zulkifli Zaini.

On November 10, 2017, the Company received a resignation letter from Mr. Zulkifli Zaini as the Commissioner/Independent Commissioner of the Company in accordance with Article 13 paragraph (8) of the Company's Articles of Associations which became effective on January 10, 2018.

On January 18, 2018, the Company received a resignation letter from Mr. Edwin Gerungan as Commissioner/Independent Commissioner of the Company which became effective on March 18, 2018.

Based on Decree No. 15 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 24, 2018, of Utiok R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. I Made Wiracita Tantra was appointed as the Director of the Company replacing Mr. Wito Krisnahadi, effective since March 5, 2018. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0036419 dated January 25, 2018.

Based on Decree No. 7 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 9, 2018, of Utiok R. Abdurrachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Rinaldi Firmansyah was appointed as Commissioner/Independent Commissioner of the Company replacing Mr. Zulkifli Zaini effective since January 25, 2018. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0064230 dated February 12, 2018.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat oleh Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Muhammad Al Arif diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Robert Pakpahan efektif sejak tanggal 13 Februari 2018. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0095750 tanggal 6 Maret 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Vincentius Sonny Loho diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Edwin Gerungan efektif sejak tanggal 4 Juni 2018. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0217128 tanggal 29 Juni 2018.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari Bapak Arisudono Soerono sebagai Presiden Direktur Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak I Made Wiracita Tantra diangkat sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perusahaan menggantikan Bapak Arisudono Soerono efektif sejak tanggal 30 Oktober 2018. Pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0258759 tanggal 30 Oktober 2018.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 8 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 5, 2018, of Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Muhammad Al Arif was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Robert Pakpahan effective since February 13, 2018. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0095750 dated March 6, 2018.

Based on Decree No. 16 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 26, 2018, of Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Vincentius Sonny Loho was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Edwin Gerungan effective since June 4, 2018. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0217128 dated June 29, 2018.

On July 31, 2018, the Company received a resignation letter from Mr. Arisudono Soerono as the President Director of the Company in accordance with Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Associations which became effective on October 31, 2018.

Based on Decree No. 59 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 30, 2018, of Utiyek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. I Made Wiracita Tantra was appointed as the Interim President Director of the Company replacing Mr. Arisudono Soerono effective since October 30, 2018. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0258759 dated October 30, 2018.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Bapak Andreas Manfred Zeisler diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel efektif sejak tanggal 21 Maret 2019. Pemberitahuan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0185742 tanggal 4 April 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Reynaldi Hermansjah diangkat sebagai Presiden Direktur Perusahaan menggantikan Bapak I Made Wiracita Tantra yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 20 April 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Melalui surat No. AHU-AH 01.03-0132065 tanggal 5 Maret 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Lodewijk Govaerts diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Robert Olivier Dolk efektif sejak tanggal 26 Juli 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0313710 tanggal 14 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan kembali Ibu Hilda Savitri sebagai Direktur Perusahaan dan menyetujui pengunduran diri Ibu Indrawati Darmawan sebagai Direktur Perusahaan. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0313722 tanggal 14 Agustus 2019.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 31 of Annual General Meeting of Shareholders dated March 21, 2019, of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, Mr. Andreas Manfred Zeisler was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Hans Juergen Hertel effective since March 21, 2019. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0185742 dated April 4, 2019.

Based on Decree No. 01 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 1, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Reynaldi Hermansjah was appointed as the President Director of the Company replacing Mr. I Made Wiracita Tantra as the interim President Director of the Company effective since April 20, 2019. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH 01.03-0132065 dated March 5, 2019.

Based on Decree No. 10 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 14, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Lodewijk Govaerts was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Robert Olivier Dolk effective since July 26, 2019. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0313710 dated August 14, 2019.

Based on Decree No. 11 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 14, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the reappointment of Ms. Hilda Savitri as Director of the Company and approved the resignation of Ms. Indrawati Darmawan as Director of the Company. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0313722 dated August 14, 2019.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Ibu Devi Pradnya Paramita sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai pelaksana tugas direktur keuangan Perusahaan sejak 1 Desember 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0369616 tanggal 6 Desember 2019.

Susunan anggota Komite Investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berasal dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 21 Maret 2018, Bapak Asep Hikmat diangkat sebagai anggota independen Komite Audit menggantikan Bapak Agus Kretarto.

Komite Audit Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
Ketua Anggota	Vincentius Sonny Loho M. Chatib Basri ^{b)} Rinaldi Firmansyah
Anggota Independen	Asep Hikmat
a)	Pada tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan.
b)	Efektif sejak 7 Agustus 2018, Bapak Vincentius Sonny Loho menggantikan Bapak Rinaldi Firmansyah sebagai Ketua Komite Audit.

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
Komite Pemantau Risiko	
Ketua Anggota	Rinaldi Firmansyah Muhamad Al Arif Lodewijk Govaerts ^{b)} Andreas Manfred Zeisler ^{c)} M. Chatib Basri ^{d)}

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 1 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 6, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Ms. Devi Pradnya Paramita as Director replacing Mr. Reynaldi Hermansjah as the Interim Financial Director of the Company effective since December 1, 2019. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH 01.03-0369616 dated December 6, 2019.

The members of the Company's Investment Committee as of December 31, 2019 and 2018 comprised of all members of the Boards of Commissioners and Directors.

On March 21, 2018, Mr. Asep Hikmat was appointed as independent member of Audit Committee replacing Mr. Agus Kretarto.

The members of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
Vincentius Sonny Loho ^{b)} M. Chatib Basri Rinaldi Firmansyah Asep Hikmat		Chairman Members Independent Member
a)	On December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri resigned as Member of the Company's Audit Committee.	
b)	Effective August 7, 2018, Mr. Vincentius Sonny Loho has replaced Mr. Rinaldi Firmansyah as a Chairman of Audit Committee.	

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
Rinaldi Firmansyah Muhamad Al Arif ^{b)} Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel M. Chatib Basri ^{d)}		Risk Oversight Committee Chairman Members

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/ December 31, 2019
Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	M. Chatib Basri ^{a)}
Anggota	Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala Rajeev Kannan
a)	Efektif sejak 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
b)	Efektif sejak 26 Juli 2019, Bapak Lodewijk Govaerts menggantikan Bapak Robert Olivier Dolk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
c)	Efektif sejak 21 Maret 2019, Bapak Andreas Manfred Zeisler menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
d)	Efektif sejak 21 Maret 2018, Bapak Muhamad Al Arif menggantikan Bapak Bhimantara Widyajala sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
e)	Efektif sejak 21 Maret 2018, Bapak Bhimantara Widyajala menggantikan bapak Robert Pakpahan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
f)	Efektif sejak 8 Maret 2018, Bapak M. Chatib Basri diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Sekretaris perusahaan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Bapak Nastantio W. Hadi.

Berdasarkan surat Perusahaan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepala divisi audit internal Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Bapak Yudi Adrial.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 98 orang dan 91 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2018
Nomination and Remuneration Committee	
Chairman	M. Chatib Basri
Members	Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala ^{a)} Rajeev Kannan
a)	<i>Effective December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri resigned from his position as member of Risk Oversight Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee.</i>
b)	<i>Effective July 26, 2019, Mr. Lodewijk Govaerts has replaced Mr. Robert Olivier Dolk as a member of Risk Oversight Committee.</i>
c)	<i>Effective March 21, 2019, Mr. Andreas Manfred Zeisler has replaced Mr. Hans Juergen Hertel as a member of Risk Oversight Committee.</i>
d)	<i>Effective March 21, 2018, Mr. Muhamad Al Arif has replaced Mr. Bhimantara Widyajala as a member of Risk Oversight Committee.</i>
e)	<i>Effective March 21, 2018, Mr. Bhimantara Widyajala has replaced Mr. Robert Pakpahan as a member of Nomination and Remuneration Committee.</i>
f)	<i>Effective March 8, 2018, Mr. M Chatib Basri was appointed as a member of Risk Oversight Committee.</i>

The corporate secretary of the Company as of December 31, 2019 and 2018 is Mr. Nastantio W. Hadi.

Based on the Company's letter No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated March 30, 2012, the head of internal audit division of the Company as of December 31, 2019 and 2018 is Mr. Yudi Adrial.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company had 98 and 91 employees, respectively (unaudited).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Penawaran umum obligasi

Obligasi I Tahun 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Juli 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Desember 2019, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran medium term notes

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Perusahaan melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes* I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

a. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Efektif 1 Januari 2019, Perusahaan telah menerapkan beberapa standar revisi dan interpretasi yang relevan untuk Perusahaan, sebagai berikut:

- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka;
- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;
- Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program;
- Penyesuaian 2018 PSAK No. 26: Biaya Pinjaman;
- Amendemen 2018 PSAK No. 46: Pajak Penghasilan.

1. GENERAL (continued)

Bonds public offering

Bond I Year 2016

On June 29, 2016, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct a Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On July 19, 2016, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Shelf Registration Bond I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct a Shelf Registration Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On Desember 19, 2019, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Medium term notes offering

On October 24, 2018, the Company conducted a limited offering on Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes I Year 2018 with a nominal amount of Rp200,000.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

a. Changes in accounting policies and disclosure

Effective on January 1, 2019, the Company has applied revised standard and interpretations which are relevant to the Company, as follows:

- Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) No. 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration;
- IFAS No. 34: Uncertainty over Income Tax Treatments;
- Amendments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 24: Employee Benefits regarding Amendments, Curtailment, or Settlement Plan;
- Annual Improvement 2018 of SFAS No. 26: Borrowing Costs;
- Amendments to SFAS No. 46: Income Taxes.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Perubahan kebijakan akuntansi dan
pengungkapan (lanjutan)

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan standar revisi dan interpretasi tersebut.

b. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2020:

- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9;
- Amandemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran dimuka dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15;
- PSAK No. 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16;
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2021:

- PSAK No. 22 (Amandemen 2019): Kombinasi Bisnis, yang diadopsi dari IFRS 3.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)

a. Changes in accounting policies and
disclosure (continued)

There was no significant impact on the adoption of these revised standards and interpretations.

b. Accounting standards issued but not yet
effective

The standards and interpretations that are issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective on or after January 1, 2020:

- SFAS No. 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9;
- Amendment to SFAS No. 71: Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;
- SFAS No. 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15;
- SFAS No. 73: Leases, adopted from IFRS 16;
- SFAS No. 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures;
- Amendment to SFAS No. 1 and SFAS No. 25: Definition of Material.

Effective on or after January 1, 2021:

- SFAS No. 22 (Amendment 2019): Business Combinations, adopted from IFRS 3.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia ("BI") yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing yang dijabarkan kembali dengan nilai tukar pada saat tanggal awal transaksi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp13.901 dan Rp14.481.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", which function has been transferred to Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared using the direct method which classifies cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Company operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia ("BI") at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year profit or loss statement. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transaction.

The conversion rate per 1 United States Dollar used by the Company as of December 31, 2019 and 2018 are Rp13,901 and Rp14,481, respectively.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - v. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vi. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

d. Transactions with Related Parties
(continued)

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan pada laporan keuangan.

All transactions with related parties, are disclosed in the financial statements.

e. Aset Keuangan

e. Financial Assets

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)

Financial assets (other than investment in sukuk)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh konvensi pasar yang berlaku. Aset keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market convention. All financial assets are initially measured at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets classified as at fair value through profit or loss.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

The Company's financial assets are classified into the following:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual

- *Fair value through profit or loss (FVTPL)*
- *Loans and receivables*
- *Held-to-maturity*
- *Available-for-sale*

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The management determines the classification of the financial assets at the time of the initial recognition.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Fair value through profit or loss (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held-for-trading or it is designated as at FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

A financial asset is classified as held-for-trading if:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

- *it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika (lanjutan):

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang bukan merupakan kontrak jaminan keuangan atau ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- Perusahaan merupakan organisasi yang bidang usahanya bergerak dalam investasi aset keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menyeluruh dalam bentuk bunga atau dividen atau perubahan dalam nilai wajarnya. Dengan kondisi ini, perusahaan dapat menetapkan investasi tersebut dalam kategori FVTPL, dengan syarat tidak memiliki hak pengendali di investasi tersebut; atau
- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"), misalnya direksi; atau
- jika merupakan kontrak *hybrid* yang terdapat satu atau lebih derivatif melekat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Fair value through profit or loss (FVTPL)
(continued)

A financial asset is classified as held-for-trading if (continued):

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

A financial asset, other than a financial asset held-for-trading, may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- The company is an entity whose business is investing in financial assets with a view to profiting from the total return in the form of interest or dividends and changes in fair value. In this condition, such company may designate such investment at FVTPL, provided it does not hold a controlling interest; or
- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in SFAS No. 7, "Related Party Disclosures"), for example the entity's board of directors; or
- if it is a hybrid contract containing one or more embedded derivative.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dan penjualan dari aset keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan masing-masing dilaporkan sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar", "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan efek-efek", "Keuntungan direalisasi dari penjualan investasi saham", dan "Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari transaksi derivatif". Pendapatan bunga yang berasal dari instrumen keuangan yang diklasifikasi dalam FVTPL diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang dari nasabah dan piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang".

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan dikurangi dengan *upfront fee* dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Fair value through profit or loss (FVTPL)
(continued)

Financial assets included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are included directly in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "Unrealized gains/(losses) from changes in fair value", "Gain/(loss) from sale of securities", "Realized gain from sale of equity investment", and "Realized gain/(loss) from derivative transaction", respectively. Interest income on financial instruments classified at FVTPL is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Loans and receivables

Loans and receivables from customers and receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "Loans and receivables".

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs (if any) minus upfront fee and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Held-to-maturity (continued)

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

- those that the group of financial assets upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss;
- those that the group of financial assets are designated as available-for-sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Held-to-maturity financial assets are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less impairment. Interest income on held-to-maturity financial assets is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tersedia untuk dijual

Available-for-sale

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang tidak ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Available-for-sale are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to the needs for liquidity or changes in interest rates or, exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dimana nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang yang diakui pada laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain, diakui pada laba rugi.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with changes in fair value recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses for debt instrument which are recognized in profit or loss. For equity instrument, foreign exchange gain or loss is recognized as part of equity, until the financial asset is derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative unrealized gain or loss arising from the changes in fair value previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit and loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga". Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Available-for-sale (continued)

Interest income is calculated using the effective interest method and recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in profit or loss.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired at each reporting date. Financial assets are impaired and impairment losses are incurred only where if there is objective evidence, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

For financial assets, the objective evidence of impairment may include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut (lanjutan):

- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat penundaan dalam pelaksanaan konstruksi proyek yang dapat membuat penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga pada saat debitur beroperasi secara komersial; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai di masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For financial assets, the objective evidence of impairment may include (continued):

- default or delinquency in principal or interest payments; or
- delays in the project construction which could further delay the principal and/or interest payments when the debtor has commercially operated the project; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial restructuring.

Individual impairment calculation

The amount of the loss is measured as the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future impairment losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the allowance for impairment losses account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

If the Company assesses that there is no objective evidence of impairment for financial asset assessed individually, both for significant and insignificant amount, the financial asset is included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and is collectively assessed for impairment.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Perhitungan penurunan nilai secara individu
(lanjutan)

Individual impairment calculation (continued)

Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as available-for-sale (AFS), a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Collective impairment calculation

Untuk kelompok aset keuangan tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau pihak ketiga untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

For certain categories of financial assets which have similar characteristics, the assets are assessed for impairment on a collective basis. The financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimated future cash flows for such group of assets which indicate the debtor or counterparty ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
(lanjutan)

Collective impairment calculation (continued)

Perusahaan mengelompokkan produk pembiayaan berdasarkan karakteristik risiko kredit yaitu (i) *Corporate Finance* dan (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dimana pembayaran atas pembiayaan tersebut bersumber dari operasi perusahaan secara keseluruhan maupun dari sumber lain. Sedangkan *Project Finance* adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan spesifik kepada proyek tertentu dimana pembayaran hanya tergantung pada pendapatan yang berasal dari proyek tersebut jika sudah beroperasi.

The Company classifies its financing product based on the credit risk characteristic i.e. (i) *Corporate Finance* and (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* is a financing provided to a debtor whose source of payment will be from the operation of the company or other sources. *Project Finance* is a financing provided to a debtor for a specific project wherein the source of payment will solely depend on the revenue generated from the project when it commences its commercial operation.

Pada posisi 31 Desember 2019 dalam menghitung penurunan nilai untuk pinjaman diberikan, Perusahaan menggunakan data *Probability of Default (PD)* berdasarkan studi yang dilakukan oleh Moody's dan Standard & Poor's (S&P) dan data *Loss Given Default (LGD)* berdasarkan Basel III dan Standard & Poor's (S&P).

As of December 31, 2019 in calculating impairment of loans, the Company uses the *Probability of Default (PD)* as provided from a study by Moody's and Standard & Poor's (S&P) and *Loss Given Default (LGD)* based on Basel III and Standard & Poor's (S&P).

Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk pinjaman diberikan yang diklasifikasi sebagai *Project Finance*, Perusahaan menetapkan tingkat penyisihan penurunan nilai sebesar (a) 2% dari nilai kredit jika debitur masih dalam penyelesaian konstruksi proyek dan belum beroperasi secara komersial dan menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi dan (b) 1% dari nilai kredit jika konstruksi proyek telah selesai dan proyek sudah beroperasi serta menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi.

While for prior years, for *Project Finance* loans, the Company uses an impairment rate of (a) 2% from total outstanding loan if the project construction is still in progress and the debtor has not yet commercially operated and generated cash flows from operation and (b) 1% from total outstanding loan if the construction has been completed, the project has entered into operational phase and has generated cash flows from operation.

Restrukturisasi pinjaman diberikan

Loan restructuring

Restrukturisasi pinjaman diberikan dapat meliputi penurunan suku bunga, penyesuaian waktu pembayaran, atau perpanjangan tenor.

Loan restructuring may involve decrease in interest rate, modification of term of payment, or tenor extension.

Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk pinjaman diberikan direstrukturisasi, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas pinjaman diberikan. Kerugian dari restrukturisasi pinjaman diberikan dengan cara konversi sebagian pinjaman diberikan menjadi instrumen lain, diakui hanya apabila nilai wajar instrumen keuangan yang diterima adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

The restructured loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans. Loss on loan restructuring, which involves a conversion of loan in partial into other financial instrument, is recognized only if the fair value of the financial instrument received is less than the carrying amount of the loan.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

e. Financial Assets (continued)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Reklasifikasi aset keuangan

Reclassification of financial instruments

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika dilakukan dalam situasi yang langka dan jika memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan untuk masa yang akan datang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.

The Company shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss classification while it is held or issued. Financial assets at fair value through profit or loss could be reclassified as loans and receivables if it occurs in a rare circumstance and if they could fulfill the requirements as loans and receivables and there is intention and ability to hold until the foreseeable future or maturity date.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo yang tidak memenuhi kriteria tertentu, maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Perusahaan tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya.

If there is a sale or reclassification of held-to-maturity financial asset for more than an insignificant amount before maturity that does not fulfill certain criteria, the entire held-to-maturity financial assets will have to be reclassified as available-for-sale financial assets. Subsequently, the Company shall not classify financial asset as held-to-maturity during the following two years.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas (penghasilan komprehensif lain) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dihentikan pengakuannya dan diakui pada laba rugi.

Reclassification of held-to-maturity financial asset to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity (other comprehensive income) until the financial assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity are derecognized and reclassified to profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo aset tersebut.

Reclassification of available-for-sale financial asset to held-to-maturity is recorded at carrying amount. Unrealized gain or loss should be amortized using the effective interest rate method up to maturity date of such asset.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang beragunan sebesar pinjaman yang diterima.

Aset keuangan (investasi pada sukuk)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". PSAK No. 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Diukur pada biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)**

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial assets (investment in sukuk)

The Company has applied SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk". SFAS No. 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and measurement

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari (lanjutan):

- Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- Nilai wajar melalui laba rugi

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Recognition and measurement (continued)

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of (continued):

- Acquisition cost (continued)

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument.

- Fair value through profit or loss

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

- Fair value through other comprehensive income

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Aset Keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hirarki sebagai berikut:

- i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i)

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Perusahaan. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah* atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara netto dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial Assets (continued)

**Financial assets (investment in sukuk)
(continued)**

Recognition and measurement (continued)

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

- i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or
- ii. other input other than quoted price included in (i)

For investment in sukuk classified as at acquisition cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Company recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Reclassification

The Company cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Company. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk *mudharabah* or benefit cash flow (*ujrah*) from sukuk *ijarah*. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Company, then the Company reconsiders the consistency of the investment purpose.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan neto setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL, jika liabilitas keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar".

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities is either held-for-trading or it is designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value of these financial liabilities are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "Unrealized gains/(losses) from changes in fair value".

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged or cancelled or expired.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan neto dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek, ditentukan berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan dari sumber-sumber yang terpercaya seperti kuotasi harga pasar dari Bloomberg, Reuters atau dari broker. Investasi pada unit reksadana dicatat pada nilai pasar, sesuai dengan nilai bersih dari aset reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap menggunakan nilai kuotasi pasar aktif jika harga kuotasi tersedia dan secara regular tersedia di bursa, dealer, broker dan harga tersebut mencerminkan harga aktual dan terbentuk melalui transaksi pasar secara regular berdasarkan "arm's length basis". Jika kriteria di atas tidak tercapai, pasar dianggap tidak aktif. Indikasi dari pasar tidak aktif adalah ketika terdapat selisih penawaran dan permintaan yang besar atau terjadi kenaikan signifikan dari selisih penawaran dan permintaan atau hanya terdapat sejumlah kecil transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right of offset must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

h. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets, such as securities, is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such as quoted market prices from Bloomberg, Reuters or broker's quoted price. Investments in mutual fund units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the statement of financial position date.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market, if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga pasar, estimasi yang rasional dari nilai wajar ditentukan dengan menggunakan referensi harga pasar sekarang dari instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama secara substansial atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas dari aset bersih yang mendasari instrumen keuangan tersebut. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam mengestimasi nilai wajar dari investasi efek-efek saham dimana harga pasar tidak tersedia. Penilaian berkala oleh jasa penilai independen dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Perusahaan menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Determination of Fair Value (continued)

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments. The Company uses an independent valuer in the estimation of fair value of its investment in equity securities when the market price is not available. A regular valuation by the independent valuer is done at least once a year.

For more complex instruments, the Company uses internally developed model, which is generally based on valuation method and technique generally recognized as industry standard. Valuation model is used primarily to value derivative contracts.

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement which are not pledged as collateral and unrestricted.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Property and Equipment - Direct Acquisition

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years	Tarif penyusutan per tahun/ Annual depreciation rate	
Bangunan	30	3%	Building
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Komputer	4	25%	Computer
Peralatan kantor	4	25%	Office equipment
Perabotan dan peralatan kantor	4	25%	Office furniture and fixtures

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Property and Equipment - Direct Acquisition
(continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to property and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the year.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

l. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian persetujuan kredit kepada debitur atau perolehan pinjaman yang diterima Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan secara neto dalam akun "Pinjaman diberikan" jika telah dicairkan kepada debitur atau akun "Pinjaman diterima" jika telah dicairkan oleh Perusahaan.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk aset tidak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tersebut yaitu antara 4 - 5 tahun.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Deferred Charges

Deferred charges represent transaction costs incurred in relation to the process of loan approval to the debtors or borrowing obtained by the Company. The transaction costs will be presented net in "Loans" account when the loan is disbursed to the debtors or in "Fund borrowing" account when the borrowing is drawn by the Company.

m. Other Assets

Other assets include intangible assets that are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Amortization of intangible assets is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which range between 4 - 5 years.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

n. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting date, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara *substantial* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan metode garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan basis akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dengan metode suku bunga efektif memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya transaksi yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic method is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line method, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

p. Recognition of Revenues and Expenses

Interest income and interest expense are recognized on accrual basis using the effective interest rate method. The calculation using the effective interest rate method takes into account all contractual terms of the financial instruments and includes any transaction costs that are directly attributable to the instruments and are an integral part of the effective interest rate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti pendapatan jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, perencanaan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

Jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Keuntungan/(kerugian) dari portofolio efek-efek dan investasi saham meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penjualan efek-efek dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan investasi saham.

Keuntungan/(kerugian) dari transaksi derivatif meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penyelesaian transaksi derivatif dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Recognition of Revenues and Expenses
(continued)

Provision and commission income related to the loan disbursement is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as income from mandatory lead arranger services, syndication, structuring of financing scheme fees, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

Advisory service is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Gains/(losses) on securities and equity investment consist of gains/(losses) on securities sold and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of securities and equity investment.

Gains/(losses) on derivative transactions consist of gains/(losses) on settlement of derivative transactions and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of derivative transactions.

Expenses are recognized when incurred.

q. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

q. Income Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan/atau banding diterima.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position.

r. Liabilitas Imbalan Kerja

r. Employment Benefits Obligation

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Short-term employment benefits

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employee benefits are recognized when they become due to the employees.

Liabilitas pensiun

Pension obligation

Perusahaan membukukan imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasar - kan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *projected unit credit*.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the projected unit credit method.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

- i. *Actuarial gain and losses;*
- ii. *Return on program asset, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest;*
- iii. *Every changes in asset ceiling, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

r. Employment Benefits Obligation
(continued)

Liabilitas pensiun (lanjutan)

Pension obligation (continued)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

- The date of the plan amendment or curtailment; and
- The date that the Company recognizes related restructuring costs.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *projected unit credit* dengan metode yang disederhanakan dimana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the projected unit credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss for the year.

s. Instrumen Keuangan Derivatif

s. Derivative Financial Instruments

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

The Company uses derivative instruments, interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to interest rate on the Company's borrowing. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap *item* yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

Perusahaan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada item yang sama dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

The Company designates derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

t. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk *item* yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

u. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

t. Operating Segment

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Laba per Saham (lanjutan)

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi instrumen berpotensi saham yang bersifat dilutif.

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Utama dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan utama, selain dari estimasi, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Earnings per Share (continued)

Diluted earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES**

In the application of the Company's accounting policies, which is described in Note 3, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period where the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and believes that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management was not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo
dan FVTPL

Manajemen telah menelaah aset keuangan Perusahaan yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah mengkonfirmasi intensi positif Perusahaan dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo.

Manajemen juga telah mereviu klasifikasi investasi FVTPL Perusahaan dan mengkonfirmasi bahwa klasifikasi telah konsisten dengan PSAK.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban.

Manajemen telah mereviu dan mengkonfirmasi bahwa mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan di bawah ini:

Pajak tangguhan

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut, manajemen membuat pertimbangan sebagai asumsi yang diperlukan untuk mengestimasi laba kena pajak masa depan yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 27.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Held-to-maturity and FVTPL financial assets

Management has reviewed the Company's held-to-maturity financial assets in the light of its future reserve and liquidity requirements and has confirmed the Company's positive intention and ability to hold those assets to maturity.

Management has also reviewed the classification of the Company's FVTPL investment and confirmed that the classification is consistent with SFAS.

Determination of functional currency

The functional currency of the entity is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and cost.

Management has reviewed and confirmed that the Company's functional currency is Rupiah.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

Deferred taxes

The Company recognizes deferred tax assets on its accumulated fiscal losses and deductible temporary differences. Management estimates the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 27.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Nilai wajar investasi saham dicatat sebagai
FVTPL

Dalam menentukan nilai wajar atas investasi saham yang dicatat sebagai FVTPL dimana tidak terdapat harga pasar yang bisa diobservasi, Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam perhitungan nilai wajar tersebut. Nilai wajar yang dihasilkan mungkin memiliki tingkat obyektivitas yang lebih rendah dan membutuhkan tingkat pertimbangan yang bervariasi tergantung pada akurasi dari laporan keuangan, ketidakpastian faktor pasar, asumsi harga dan risiko-risiko lainnya yang dapat mempengaruhi nilai investasi tersebut.

Investasi saham yang dicatat sebagai FVTPL dan nilai wajarnya disajikan pada Catatan 8.

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti objektif bahwa sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut terjadi peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan membayar piutang.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan dan mungkin akan berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan. Nilai tercatat aset keuangan Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 14.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Fair value of equity investments designated as
FVTPL

In determining the fair value for equity investments designated as FVTPL when there is no observable market price, the Company uses an independent valuer to calculate its fair value. The fair value may be less objective and requires varying degrees of judgement depending on accuracy of financial statements, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific investment.

The equity investments designated as FVTPL and its fair value are disclosed in Note 8.

Impairment loss on financial assets

The Company assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is objective evidence that a loss event has occurred. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the default in payment of receivables.

The Company performs assessment of the impairment amounts based on the best estimation at the reporting date. Estimating the amount and timing of future recovery requires a lot of considerations and the actual amount may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements. The carrying amount of the Company's financial assets are disclosed in Notes 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 14.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- i. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama,
- ii. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
- iii. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat ekonomis setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah dan periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 28).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Derivative financial instruments

Embedded derivatives are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

- i. The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract,*
- ii. A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and*
- iii. The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 12.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, future salary increase rate, mortality rate, resignation rates and others (Note 28).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Kas	5	18	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	400.112	6	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.918	49.192	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.177	481	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	494	484	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	230	229	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32	32	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14.382	25.365	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	1.027	13.556	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank DBS Indonesia	977	939	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	419	418	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	339	338	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	192	193	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia	189	195	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Indonesia Branch
PT Bank ANZ Indonesia	188	189	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	129	130	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	42	6	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Permata Tbk	33	20.295	PT Bank Permata Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.374	2.328	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.746	911	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk (sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)	1.014	1.052	PT Bank BTPN Tbk (previously PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	432	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.806	20.342	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12.403	12.860	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	3.790	3.948	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.388	2.484	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.141	290	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank DBS Indonesia	656	685	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	433	452	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	365	91.521	PT Bank Permata Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	256	28.174	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank UOB Indonesia	238	248	PT Bank UOB Indonesia
	538.922	277.343	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	509.060	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	300.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160.000	300.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	5.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	490.149	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	208.515	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	222.416	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
	1.890.140	305.000	
	2.429.067	582.361	
Tingkat bunga giro per tahun:			Interest rate per annum of current accounts:
Rupiah	4,00 - 7,50%	4,00 - 7,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,60 - 1,00%	0,60 - 3,00%	United States Dollar
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			Interest rate per annum of time deposits:
Rupiah	5,50 - 7,75%	6,00 - 6,80%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,85 - 2,90%	0,90 - 2,55%	United States Dollar

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi
penggunaannya atau dijaminkan.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no cash
and cash equivalents that are restricted for use or
pledged as collateral.

6. EFEK-EFEK

6. SECURITIES

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Tersedia untuk dijual*):			Available-for-sale*):
Rupiah			Rupiah
Obligasi - Pihak ketiga	220.220	210.220	Bonds - Third party
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi - Pihak berelasi	57.690	609.700	Bonds - Related parties
Dimiliki hingga jatuh tempo*):			Held-to-maturity*):
Rupiah			Rupiah
Obligasi - Pihak berelasi	605.596	538.457	Bonds - Related parties
Obligasi - Pihak ketiga	250.000	250.000	Bonds - Third party

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Dimiliki hingga jatuh Tempo*) (lanjutan):		
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi - Pihak berelasi	700.278	732.075
Obligasi - Pihak ketiga	639.446	711.741
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Rupiah		
Reksadana - Pihak ketiga**)	259.706	250.206
	2.732.936	3.302.399

6. SECURITIES (continued)

Held-to-maturity) (continued):*
United States Dollar
Bonds - Related parties
Bonds - Third parties

Loans and receivables:
Rupiah
*Mutual funds - Third parties**)*

*) Termasuk obligasi sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015).

*) Including sukuk bonds classified as fair value through other comprehensive income and at acquisition cost based on SFAS No. 110 (Revised 2015).

**) Reksadana Penyertaan Terbatas dan Dana Investasi Infrastruktur yang memiliki jadwal pelunasan secara sekaligus atau bertahap pada tanggal pelunasan atau tanggal-tanggal pelunasan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak Investasi Kolektif pada nilai yang telah ditentukan dalam surat komitmen pembelian unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan.

**) Limited Participation Mutual Fund and Infrastructure Investment Fund with repayment schedules in lump sum or on stages on repayment date or repayment dates in accordance with the agreed terms in Collective Investment Contract at the specified value in the purchase of participation unit commitment letter to the unit holders.

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of securities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019					
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						
XL Axiata Tahap I		28 Des./	28 Des./			
Tahun 2015 Seri D	idAAA**)	Dec. 28, 2017	Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	226.362	220.220
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk		11 Des./	11 Des./	PT Jasa Marga		
Senior Unsecured notes	Baa2*)	Dec. 11, 2017	Dec. 11, 2020	(Persero) Tbk	250.000	250.661
PT Marga Lingkar Jakarta		8 Nov./	8 Nov./	PT Marga Lingkar		
Senior Unsecured notes	idAAA***)	Nov. 8, 2017	Nov. 8, 2029	Jakarta	250.000	251.970
PT Bank Mandiri		21 Sep./	21 Sep./	PT Bank Mandiri		
(Persero) Tbk	idAAA***)	Sep. 21, 2018	Sep. 21, 2023	(Persero) Tbk	35.000	35.000
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia		4 Jul./	4 Jul./	PT Medco		
MPI I Bonds	idA***)	Jul. 4, 2018	Jul. 4, 2025	Power Indonesia	250.000	250.000
		2 Okt./	31 Jan./	PT Wijaya Karya		
PT Wijaya Karya (persero) Tbk	Ba2*)	Oct. 2, 2019	Jan. 31, 2021	(Persero) Tbk	70.000	67.965
Reksadana/Mutual fund						
RDPT Mandiri Infrastruktur		5 Okt./	5 Jul./	PT Jasa Marga		
Ekuitas Transjawa		Oct. 5, 2018	Jul. 5, 2023	(Persero) Tbk	219.500	219.706
KIK Diinfra Toll Road		27 Jun./	27 Jun./	PT Jasa Marga		
Mandiri-001		Jun. 27, 2019	Jun. 27, 2024	(Persero) Tbk	40.000	40.000

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut
(lanjutan):

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2019
and 2018 are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2019						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321	Baa2*)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/ May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	55.604	57.690
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	20.852	20.929
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	20 Jul./ Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	257.169	260.434
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	8 Des./ Dec. 8, 2016	8 Jan./ Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	34.753	35.166
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	20.852	20.884
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	13.901	13.925
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	Baa2*)	11 Des./ Dec.11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	194.614	192.219
Pertamina Bond022	Baa2*)	15 Jul./Jul. 15, 2016	3 Mei/May 3, 2022	PT Pertamina (Persero)	27.802	28.723
Pertamina Bond023	Baa2*)	30 Jul./Jul. 30, 2016	20 Mei/ May 20, 2023	PT Pertamina (Persero)	125.109	127.998
Pihak ketiga/Third parties Star Energy Bond	Ba3*)	24 Apr/Apr 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	693.446	639.446
					2.784.964	2.732.936

31 Desember/December 31, 2018						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						
XL Axiata Tahap I		28 Des./	28 Des./			
Tahun 2015 Seri D	idAAA**)	Dec. 28, 2017	Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	226.362	210.220
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk		11 Des./	11 Des./	PT Jasa Marga		
Senior Unsecured notes	Baa2*)	Dec. 11, 2017	Dec. 11, 2020	(Persero) Tbk	250.000	251.358
PT Marga Lingkar Jakarta		8 Nov./	8 Nov./	PT Marga Lingkar		
Senior Unsecured notes	idAAA***)	Nov. 8, 2017	Nov. 8, 2029	Jakarta	250.000	252.099
PT Bank Mandiri		21 Sep./	21 Sep./	PT Bank Mandiri		
(Persero) Tbk	idAAA***)	Sep. 21, 2018	Sep. 21, 2023	(Persero) Tbk	35.000	35.000
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia		4 Jul./	4 Jul./	PT Medco		
MPI I Bonds	idA***)	Jul. 4, 2018	Jul. 4, 2025	Power Indonesia	250.000	250.000
Reksadana/Mutual fund						
RDPT Mandiri Infrastruktur		5 Okt./	5 Jul./	PT Jasa Marga		
Ekuitas Transjawa		Oct. 5, 2018	Jul. 5, 2023	(Persero) Tbk	250.000	250.206

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2019
and 2018 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2018						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar Obligasi/Bonds Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321	Baa2*)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/ May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	318.582	325.746
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI21	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2016	29 Mar./ Mar. 29, 2021	Perusahaan Penerbit SBSN	152.051	150.526
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.722	21.833
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	20 Jul./Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	267.899	272.700
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	8 Des./Dec. 8, 2016	8 Jan./Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	36.203	36.836
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	26 Jul./Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	21.722	21.767
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	Baa2*)	26 Jul./Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	14.481	14.512
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	Baa2*)	11 Des./Dec.11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	202.734	199.958
Pertamina Bond022	Baa2*)	15 Jul./Jul. 15, 2016	3 Mei/May 3, 2022	PT Pertamina (Persero)	28.962	30.307
Pertamina Bond021	Baa2*)	15 Jul./Jul. 15, 2016	23 Mei/ May 23, 2021	PT Pertamina (Persero)	130.329	133.428
Pertamina Bond023	Baa2*)	30 Jul./Jul. 30, 2016	20 Mei/ May 20, 2023	PT Pertamina (Persero)	130.329	134.162
Pihak ketiga/Third parties Star Energy Bond	Ba3*)	24 Apr./Apr. 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	711.741	711.741
					3.298.117	3.302.399

*) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat internasional yang dikeluarkan Moody's untuk Pemerintah Indonesia, obligasi global Wijaya Karya, Jasa Marga, Pertamina dan Star Energy.

**) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D merupakan *underlying* dari reksa dana dimana Perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki unit reksa dana tersebut.

***) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat yang dikeluarkan Pefindo.

*) Ratings for securities are based on international rating issued by Moody's for the Government of the Republic of Indonesia, global bonds of Wijaya Karya, Jasa Marga, Pertamina, and Star Energy.

**) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D is the underlying security of mutual fund, whereas the Company is the only party who holds the mutual fund unit.

***) Ratings for securities are based on rating issued by Pefindo.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019
Tingkat bunga per tahun	
Rupiah	7,50 - 10,75%
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 6,75%

Selama tahun 2019 dan 2018, Perusahaan melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan/(kerugian) neto masing-masing sebesar Rp4.067 dan (Rp881) yang dicatat pada laporan laba rugi.

Lain-lain

Mutasi keuntungan/(kerugian) belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Saldo awal	(27.860)	21.283
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar	33.767	(50.236)
Efek pajak	(571)	1.093
Saldo akhir	5.336	(27.860)

Pada bulan Oktober 2019, April 2019 dan Oktober 2018, terdapat pembelian kembali Star Energy Bond masing-masing sebesar USD1.900.000, USD1.250.000 dan USD850.000 oleh penerbit sesuai dengan ketentuan penerbitan obligasi.

Pada bulan Maret 2018, terdapat pembelian kembali *Unsecured Notes Pratama Agung Senior* oleh penerbit sejumlah USD10.000.000 sesuai dengan ketentuan penerbitan obligasi.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa efek-efek tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo dengan jumlah nominal sebesar USD50.000.000 dan Rp500.000.

Nilai tercatat dan nilai wajar untuk efek-efek yang telah direklasifikasi masing-masing sebesar Rp1.237.909 dan Rp1.190.461 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp1.235.532 dan Rp1.157.171 pada tanggal 31 Desember 2018 dan kerugian nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp1.118 dan Rp1.492 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

6. SECURITIES (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	
Tingkat bunga per tahun		Interest rate per annum
Rupiah	7,50 - 10,75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 6,75%	United States Dollar

In 2019 and 2018, the Company sold some of its securities and booked net gain/(loss) of Rp4,067 and (Rp881) respectively, which was recorded in the statement of profit or loss.

Others

Movements of unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal	21.283	Beginning balance
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar	(50.236)	Increase/(decrease) in fair value
Efek pajak	1.093	Tax effect
Saldo akhir	(27.860)	Ending balance

In October 2019, April 2019 and October 2018, the issuer repurchased Star Energy Bond of USD1,900,000, USD1,250,000 and USD850,000, respectively, in accordance with the bond issuance terms.

In March 2018, the issuer repurchased *Unsecured Notes Pratama Agung Senior* amounting to USD10,000,000 in accordance with the bond issuance terms.

In 2018, the Company reclassified some of available-for-sale securities into held-to-maturity securities with total nominal amounting to USD50,000,000 and Rp500,000.

The carrying value and fair value of reclassified securities amounting to Rp1,237,909 and Rp1,190,461 as of December 31, 2019 and Rp1,235,532 and Rp1,157,171 as of December 31, 2018, respectively, and losses from fair value recognized in other comprehensive income amounted to Rp1,118 and Rp1,492 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

There were no impaired securities as of December 31, 2019 and 2018.

7. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

The details of outstanding derivative transactions are as follows:

*) Early termination on May 31, 2019

As of December 31, 2019 and 2018, derivative transactions are not determined as hedging for accounting purposes, except for interest rate swap derivative transactions with Standard Chartered Bank as of December 31, 2019 amounting to USD100,000,000 that meets the criteria for hedge accounting to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from interest rates on its fund borrowing from International Finance Corporation as follows:

Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal berakhir/ Maturity date
USD50.000.000	8 Mei/May 8, 2019	8 Mei/May 8, 2024
USD50.000.000	21 Juni/June 21, 2019	8 Mei/May 8, 2026

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Perusahaan menyetujui untuk membayar pokok masing-masing sebesar USD50.000.000 dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga mengambang masing-masing LIBOR + 1,75% dan LIBOR + 1,20%. Perusahaan akan menerima pokok sebesar USD 100.000.000 dan bunga setiap 3 (tiga) bulanan dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar LIBOR.

Kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif - setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.752 disajikan sebagai "Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat realisasinya.

7. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

The Company agrees to pay principal each amounting to USD50,000,000, respectively, and quarterly interest with a floating rate at LIBOR + 1.75% and LIBOR + 1.20%, respectively. The Company will receive principal amounting to USD100,000,000 and quarterly interest with a floating rate at LIBOR.

The cumulative losses arising from the changes in fair values of the derivative instruments - net of tax as of December 31, 2019 amounting to Rp29,752 were presented as "Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges-net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will be recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income upon its realization.

8. INVESTASI SAHAM

	31 Desember/ December 31, 2019
PT Nusantara Infrastructure Tbk	389.636
Maxpower Group Pte Ltd.	~*)
	389.636

*) Nilai wajar investasi saham ditetapkan RpNihil

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk pembelian sebanyak 1.523.567.500 lembar saham atau setara 10% kepemilikan saham di PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") dengan harga sebesar Rp250 (nilai penuh) per lembar. Perusahaan membeli dengan total harga sebesar Rp380.892.

Sebelumnya pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 1.523.567.500 lembar saham.

8. EQUITY INVESTMENTS

	31 Desember/ December 31, 2018	
	364.841	PT Nusantara Infrastructure Tbk
	~*)	Maxpower Group Pte Ltd.
	364.841	

*) The fair value of equity investment is determined at RpNil

PT Nusantara Infrastructure Tbk

On October 8, 2018, the Company entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Metro Pacific Tollways Indonesia for the purchase of 1,523,567,500 shares or equivalent to 10% ownership of PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") at Rp250 (full amount) per share. Total purchase price is amounting to Rp380,892.

On October 5, 2018, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's shares owned by the Company totaling 1,523,567,500 shares.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (lanjutan)

Opsi beli

Perusahaan memberi opsi kepada MKI untuk mensyaratkan Perusahaan untuk, selama periode Opsi (antara 8 April 2023 - 8 Oktober 2023), menjual saham PTNI yang dimiliki oleh Perusahaan baik secara bertahap maupun sekaligus pada harga pembelian per lembar saham sebesar Rp250 (nilai penuh) ditambah premi yang memberikan tingkat pengembalian kepada Perusahaan sebesar 15% per tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian saham hingga tanggal penutupan opsi beli.

Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 2018, PTNI melakukan penawaran umum terbatas saham sebesar Rp495.007. Untuk mempertahankan kepemilikannya di PTNI, Perusahaan kembali melakukan pembelian 10% saham dari penawaran umum saham dengan harga Rp200 (nilai penuh) per lembar. Total pembelian saham tersebut sebesar Rp49.500.

Pada tanggal 7 Agustus 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan tambahan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 247.503.631 lembar saham. Dengan demikian, opsi beli MKI dan opsi jual Perusahaan atas kepemilikan saham Perusahaan di PTNI menjadi sebesar 1.771.071.131 lembar saham.

Perusahaan menetapkan investasi saham ini sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menghitung nilai wajar dari investasi saham di PTNI berdasarkan harga saham terakhir yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp220 (nilai penuh) (2018: Rp206 (nilai penuh)), dan menetapkan nilai wajar dari investasi saham tersebut sebesar Rp389.636 (2018: Rp364.841) sehingga Perusahaan membukukan keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham sebesar Rp24.795 dan kerugian yang belum direalisasi dari investasi saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp65.552 di dalam laporan laba rugi Perusahaan.

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (continued)

Buy option

The Company gives MKI an option to require the Company, during the option period (between April 8, 2023 to October 8, 2023), to sell PTNI's shares owned by the Company on stages or lumpsum at a purchase price of Rp250 (full amount) per share plus premium which reflects an internal rate of return of 15% per annum to the Company which is calculated since the purchase date of the shares until the option closing date.

On December 17 until 21, 2018, PTNI conducted limited public right issuance with total amount of Rp495,007. To maintain its ownership in PTNI, the Company purchased additional 10% shares of the right issuance at Rp200 (full amount) per share. The Company's total purchase amount was Rp49,500.

On August 7, 2019, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's additional shares owned by the Company in PTNI amounting to 247,503,631 shares. Therefore, MKI's buy option and the Company's sell option to the Company's share ownership in PTNI totaling to 1,771,071,131 shares.

The Company designated this equity investment as financial assets that measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

As of December 31, 2019, the Company calculated the fair value of the equity investment in PTNI based on the latest stock price recorded in Indonesia Stock Exchange amounting to Rp220 (full amount) (2018: Rp206 (full amount)), and designated the fair value of those equity investment of Rp389,636 (2018: Rp364,841) which resulted the Company booked an unrealized gain from changes in fair value of equity investments of Rp24,795 and unrealized loss from changes in fair value of equity investments of Rp65,552 for the years ended December 31, 2019 and 2018 in statement of profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (lanjutan)

Opsi beli (lanjutan)

Perusahaan juga menghitung nilai wajar dari opsi sebesar Rp44.290 yang dicatat sebagai tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 (2018: Rp66.946) (Catatan 7) sehingga membukukan kerugian belum direalisasi dari nilai wajar opsi saham sebesar Rp22.655 dan keuntungan belum di realisasi dari nilai wajar opsi saham sebesar Rp66.946 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 di laporan laba rugi Perusahaan.

Maxpower Group Pte Ltd

Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dengan PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan membeli 1.525 lembar saham kelas B dengan nilai nominal USD52 per lembar atau sebesar 5,747% dari jumlah saham PTMI yang ditempatkan dan disetor. Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan membayar sebesar USD12.500.000 atas pembelian saham tersebut.

Perusahaan menetapkan investasi saham ini sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan juga menandatangani Akta Pertukaran Saham (*Share Exchange Deed*) ("Akta") dengan Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") dan PTMI dimana Perusahaan mendapatkan hak tukar atas kepemilikan saham di PTMI menjadi saham MGPL. MGPL merupakan induk perusahaan dari PTMI. Hak tukar tersebut dapat dieksekusi kapan saja setelah penandatanganan Akta ini.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan mengeksekusi hak tukar atas kepemilikan saham Perusahaan di PTMI, menjadi saham MGPL. Berdasarkan hak tukar tersebut, Perusahaan mendapatkan kepemilikan saham pada MGPL sebesar 5,7844%, dengan melepaskan kepemilikan pada saham PTMI sebesar 5,747%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menetapkan nilai wajar investasi saham MGPL sebesar RpNihil dengan mempertimbangkan kinerja keuangan MGPL terkini.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (continued)

Buy option (continued)

The Company also calculates the fair value of the option of Rp44,290 which are recorded as derivative receivables as of December 31, 2019 (2018: Rp66,946) (Note 7) which resulted the Company booked and unrealized loss from the fair value of share option of Rp22,655 and unrealized gain from the fair value of share option of Rp66,946 for the years ended December 31, 2019 and 2018 in the statement of profit or loss.

Maxpower Group Pte Ltd

On May 30, 2014, the Company signed a Shares Subscription Agreement with PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Based on the agreement, the Company subscribed 1,525 Series B shares with nominal value of USD52 per share or equivalent to 5.747% of PTMI's total subscribed and paid-up capital. On July 4, 2014, the Company paid USD12,500,000 for the shares subscription.

The Company designated this equity investment as financial assets that measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

On July 4, 2014, the Company also signed a Share Exchange Deed ("Deed") with Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") and PTMI where the Company receives an option to exchange its share ownership from PTMI to become MGPL shares. MGPL is a parent of PTMI. The option can be executed at any time after the signing of the Deed.

On June 30, 2016, the Company executed the option to exchange its shares in PTMI to become shares in MGPL. Based on the shares exchange, the Company obtains the share ownership of 5.7844% in MGPL and releases shares ownership of 5.747% in PTMI.

As of December 31, 2018, the Company determined the fair value of equity investment in MGPL at RpNil, considering the latest financial condition of MGPL.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Maxpower Group Pte Ltd (lanjutan)

Pada tanggal 6 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Infra Daya Energi dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham Perusahaan di MGPL sebesar 5,7844% kepada PT Infra Daya Energi dengan harga USD72.000 yang dananya telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018. Proses pemindahan kepemilikan saham kepada PT Infra Daya Energi berlaku efektif pada tanggal 8 Januari 2019. Sejak tanggal efektif tersebut, Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp1.010 di laporan laba rugi tahun berjalan dan bukan lagi menjadi pemegang saham di MGPL.

Komitmen investasi saham

Rincian komitmen investasi saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2019		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Rupiah - Pihak ketiga			
Lainnya	430.393	-	430.393
	430.393	-	430.393
	31 Desember/December 31, 2018		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			
Energi	181.013	-	181.013
Rupiah - Pihak ketiga			
Lainnya	430.393	-	430.393
	611.406	-	611.406

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

Maxpower Group Pte Ltd (continued)

On December 6, 2018, the Company signed a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Infra Daya Energi whereby the Company sold all its share ownership of 5.7844% in MGPL to PT Infra Daya Energi with a selling price of USD72,000 which funds was received by the Company on December 31, 2018. The transfer of share ownership to PT Infra Daya Energi effective on January 8, 2019. Since the effective date, the Company recognized gain on sale of shares amounting to Rp1,010 in the current year statement of profit or loss and no longer became the shareholder of MGPL.

Equity investment commitment

Details of equity investment commitment are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Rupiah - Third party			
Others	430.393	-	430.393
	430.393	-	430.393
	31 Desember/December 31, 2018		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
United States Dollar - Third party			
Energy	181.013	-	181.013
Rupiah - Third party			
Others	430.393	-	430.393
	611.406	-	611.406

9. PINJAMAN DIBERIKAN

Pinjaman diberikan berdasarkan mata uang dan jenis kredit:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Rupiah - Pihak berelasi		
Investasi	1.889.417	1.710.815
Rupiah - Pihak ketiga		
Investasi	2.939.960	2.355.858
Modal kerja	-	200.000
	4.829.377	4.266.673

9. LOANS

Loans based on currency and type of loans:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Rupiah - Related parties		
Investment	1.889.417	1.710.815
Rupiah - Third parties		
Investment	2.939.960	2.355.858
Working capital	-	200.000
	4.829.377	4.266.673

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

9. LOANS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi Investasi	478.174	645.479	United States Dollar - Related parties Investment
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga Investasi	1.120.358	987.348	United States Dollar - Third parties Investment
	<u>1.598.532</u>	<u>1.632.827</u>	
	6.427.909	5.899.500	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Piutang bunga	15.306	22.245	Accrued interest income
Biaya transaksi belum diamortisasi	(37.004)	(32.796)	Unamortized transaction costs
Cadangan kerugian penurunan nilai	(173.549)	(167.560)	Allowance for impairment losses
	<u>6.232.662</u>	<u>5.721.389</u>	

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman
diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan
mengalami penurunan nilai:

The table below summarizes the loans that are not
impaired and impaired:

31 Desember/December 31, 2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah - Pihak berelasi			
Pelabuhan udara	874.916	-	874.916
Telekomunikasi	448.083	-	448.083
Jalan tol	413.293	-	413.293
Energi	153.125	-	153.125
	<u>1.889.417</u>	<u>-</u>	<u>1.889.417</u>
Rupiah - Pihak ketiga			
Air minum	1.267.062	-	1.267.062
Jalan tol	612.734	-	612.734
Energi	278.674	432.709	711.383
Telekomunikasi	200.000	-	200.000
Penunjang pelabuhan laut	148.781	-	148.781
	<u>2.507.251</u>	<u>432.709</u>	<u>2.939.960</u>
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			
Pemeliharaan pesawat	461.710	-	461.710
Energi	16.464	-	16.464
	<u>478.174</u>	<u>-</u>	<u>478.174</u>
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			
Energi	611.712	79.835	691.547
Telekomunikasi	233.537	-	233.537
Penunjang pelabuhan laut	195.274	-	195.274
	<u>1.040.523</u>	<u>79.835</u>	<u>1.120.358</u>
	<u>5.915.365</u>	<u>512.544</u>	<u>6.427.909</u>
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Piutang bunga	14.895	411	15.306
Biaya transaksi belum diamortisasi	(37.004)	-	(37.004)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.284)	(156.265)	(173.549)
	<u>5.875.972</u>	<u>356.690</u>	<u>6.232.662</u>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai (lanjutan):

9. LOANS (continued)

The table below summarizes the loans that are not impaired and impaired (continued):

31 Desember/December 31, 2018				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	895.716	-	895.716	Airport
Jalan tol	161.198	-	161.198	Toll road
Telekomunikasi	492.507	-	492.507	Telecommunication
Energi	161.394	-	161.394	Energy
	1.710.815	-	1.710.815	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Air minum	1.011.580	-	1.011.580	Drinking water
Jalan tol	791.897	-	791.897	Toll road
Telekomunikasi	200.000	-	200.000	Telecommunication
Energi	181.225	196.500	377.725	Energy
Penunjang pelabuhan laut	174.656	-	174.656	Seaport support
	2.359.358	196.500	2.555.858	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi				United States Dollar - Related parties
Pemeliharaan pesawat	624.059	-	624.059	Aircraft maintenance
Energi	21.420	-	21.420	Energy
	645.479	-	645.479	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga				United States Dollar - Third parties
Energi	365.572	329.117	694.689	Energy
Telekomunikasi	216.870	-	216.870	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	75.789	-	75.789	Seaport support
	658.231	329.117	987.348	
	5.373.883	525.617	5.899.500	
Ditambah/(dikurangi):				Add/(less):
Piutang bunga	19.639	2.606	22.245	Accrued interest income
Biaya transaksi belum diamortisasi	(31.863)	(933)	(32.796)	Unamortized transaction costs
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.829)	(128.731)	(167.560)	Allowance for impairment losses
	5.322.830	398.559	5.721.389	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, umur pinjaman diberikan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the aging of impaired loans is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
0 - 3 bulan	512.544	485.660	0 - 3 months
>3 - 6 bulan	-	10.540	>3 - 6 months
>6 - 9 bulan	-	10.540	>6 - 9 months
>9 - 12 bulan	-	5.034	>9 - 12 months
>12 bulan	-	13.843	>12 months
	512.544	525.617	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu pinjaman:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Rupiah - Pihak berelasi		
Kurang dari 1 tahun	98.429	57.037
5 - 10 tahun	1.448.513	1.451.679
Lebih dari 10 tahun	342.475	202.099
Rupiah - Pihak ketiga		
1 - 2 tahun	245.844	343.171
2 - 5 tahun	1.081.603	893.963
5 - 10 tahun	711.914	647.266
Lebih dari 10 tahun	900.599	671.458
	4.829.377	4.266.673
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi		
5 - 10 tahun	478.174	645.479
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga		
1 - 2 tahun	84.757	189.124
2 - 5 tahun	458.272	546.947
5 - 10 tahun	500.190	208.200
Lebih dari 10 tahun	77.139	43.077
	1.598.532	1.632.827
	6.427.909	5.899.500
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	15.306	22.245
Biaya transaksi		
yang belum diamortisasi	(37.004)	(32.796)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(173.549)	(167.560)
	6.232.662	5.721.389

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat kenaikan atas pinjaman diberikan yang berasal dari bunga dalam masa konstruksi ("IDC") sebesar Rp203.901 (2018: Rp75.741).

As of December 31, 2019, there is an increase in loans from interest during construction ("IDC") amounting to Rp203,901 (2018: Rp75,741).

Mutasi total pinjaman diberikan:

Movement of total loan outstanding:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal	5.899.500	5.698.692	Beginning balance
Pencairan pinjaman selama tahun berjalan	1.422.689	3.528.366	Loan disbursement during the year
Penerimaan pembayaran pinjaman selama tahun berjalan	(832.155)	(3.424.687)	Loan repayment during the year
Efek selisih kurs	(62.125)	97.129	Foreign exchange effect
Saldo akhir	6.427.909	5.899.500	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	167.560
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	8.903
Efek selisih kurs	(2.914)
Saldo akhir	173.549

Perusahaan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pinjaman diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai.

Saldo pinjaman diberikan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak ketiga	
Investasi	512.544
Ditambah/(dikurangi):	
Piutang bunga	411
Biaya transaksi belum diamortisasi	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(156.265)
Saldo akhir	356.690

Termasuk di dalam pinjaman diberikan merupakan pinjaman dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan entitas lain. Keikutsertaan Perusahaan sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 6% sampai dengan 50% (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dari total pinjaman sindikasi. Risiko atas pinjaman sindikasi ditanggung secara proporsional oleh peserta kreditur.

9. LOANS (continued)

Movement of allowance for impairment losses:

	31 Desember/ December 31, 2018	
	144.887	<i>Beginning balance</i>
	16.841	<i>Additional provision for the year</i>
	5.832	<i>Foreign exchange effect</i>
Saldo akhir	167.560	<i>Ending balance</i>

The Company provides allowance for impairment losses based on individual and collective assessments.

As of December 31, 2019 dan 2018 there are no past due but not impaired loans.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate.

Restructured loans balance are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
	279.742	<i>Third parties</i>
		<i>Investment</i>
		<i>Add/(less):</i>
	281	<i>Accrued interest income</i>
	(131)	<i>Unamortized transaction costs</i>
	(50.745)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Saldo akhir	229.147	<i>Ending balance</i>

Included in the loans are loans with syndication agreements with other entities. The Company's participation as a member of syndicated loans were ranging from 6% to 50% (unaudited) as of December 31, 2019 and 2018, respectively, of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating creditors.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah
sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

Loan commitment

Details of loan commitment are as follows:

31 Desember/December 31, 2019				
	Komitmen yang sudah dicairkan/ <i>Commitment - drawdown</i>	Komitmen yang belum dicairkan/ <i>Commitment - undrawdown</i>	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	874.916	-	874.916	Airport
Telekomunikasi	448.083	-	448.083	Telecommunication
Jalan tol	413.293	936.207	1.349.500	Toll road
Energi	153.125	-	153.125	Energy
	1.889.417	936.207	2.825.624	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Air minum	1.267.062	5.086	1.272.148	Drinking water
Energi	711.383	609.226	1.320.609	Energy
Jalan tol	612.734	839.017	1.451.751	Toll road
Telekomunikasi	200.000	-	200.000	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	148.781	-	148.781	Seaport support
Infrastruktur sosial	-	250.000	250.000	Social Infrastructure
	2.939.960	1.703.329	4.643.289	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak berelasi				Related parties
Pemeliharaan pesawat	461.710	-	461.710	Aircraft maintenance
Energi	16.464	-	16.464	Energy
	478.174	-	478.174	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak ketiga				Third parties
Energi	691.547	191.600	883.147	Energy
Telekomunikasi	233.537	-	233.537	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	195.274	362.045	557.319	Seaport support
	1.120.358	553.645	1.674.003	
	6.427.909	3.193.181	9.621.090	
31 Desember/December 31, 2018				
	Komitmen yang sudah dicairkan/ <i>Commitment - drawdown</i>	Komitmen yang belum dicairkan/ <i>Commitment - undrawdown</i>	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	895.716	124	895.840	Airport
Telekomunikasi	492.507	7.493	500.000	Telecommunication
Jalan tol	161.198	165.049	326.247	Toll road
Energi	161.394	-	161.394	Energy
	1.710.815	172.666	1.883.481	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Air minum	1.011.580	685.884	1.697.464	Drinking water
Jalan tol	791.897	83.320	875.217	Toll road
Energi	377.725	160.115	537.840	Energy
Telekomunikasi	200.000	-	200.000	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	174.656	-	174.656	Seaport support
	2.555.858	929.319	3.485.177	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak berelasi				Related parties
Pemeliharaan pesawat	624.059	-	624.059	Aircraft maintenance
Energi	21.420	-	21.420	Energy
	645.479	-	645.479	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2018		
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total
Dolar Amerika Serikat -			
Pihak ketiga			
Energi	694.689	774.261	1.468.950
Telekomunikasi	216.870	72.750	289.620
Penunjang pelabuhan laut	75.789	525.544	601.333
	987.348	1.372.555	2.359.903
	5.899.500	2.474.540	8.374.040

United States Dollar -
Third parties
Energi
Telecommunication
Seaport support

Termasuk dalam total komitmen di atas adalah bunga dalam masa konstruksi ("IDC") sebesar Rp376.605 di tahun 2019 dan Rp279.941 di tahun 2018.

The total commitment above includes interest during construction ("IDC") amounting to Rp376,605 in 2019 and Rp279,941 in 2018.

Mutasi total komitmen pinjaman diberikan:

Movement of total loan commitment:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal	8.374.040	8.493.145	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	2.860.484	4.043.757	Addition during the during the year
Penerimaan pembayaran pinjaman			Loan repayment
selama tahun berjalan	(832.155)	(3.424.687)	during the year
Pembatalan fasilitas			Facility cancellation
selama tahun berjalan	(841.859)	(673.242)	during the year
Efek selisih kurs	60.580	(64.933)	Foreign exchange effect
Saldo akhir	9.621.090	8.374.040	Ending balance

Pinjaman diberikan oleh Perusahaan memiliki tingkat bunga rata-rata di tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 10,07% dan 10,25% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah dan masing-masing 5,71% dan 6,42% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

The Company disbursed the loans at average interest rates in 2019 and 2018 of 10.07% and 10.25% per annum, respectively for Rupiah loans and of 5.71% and 6.42% per annum, respectively for United States Dollar loans.

Pinjaman diberikan dapat dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia. Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau *club deal* dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara *pari passu* sesuai proporsi nilai fasilitas yang diberikan.

Loans may be secured by collateral in the form of one or a combination of fixed assets, shares, machinery or equipment, accounts receivable, bank accounts, personal and corporate guarantees, or other relevant guarantees as well as a binding mortgage, lien or fiduciary. For some debtors, the loans are syndicated loans or club deal involving at least two creditors. In this case, the collateral received is binded in accordance with the portion of facility amount on *pari passu* basis.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PIUTANG BUNGA

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Efek-efek	59.362	38.097
Deposito berjangka	2.322	190
Transaksi derivatif	1.221	2.959
	62.905	41.246

Securities
Time deposits
Derivative transactions

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Lisensi	2.743	2.020
Program kepemilikan mobil	2.231	1.675
Bonus	757	226
Asuransi	707	789
Biaya rekrutmen	1.285	747
Sewa dan pemeliharaan	-	362
Lain-lain	870	1.150
	8.593	6.969

License
Car ownership program
Sign on bonus
Insurance
Recruitment fee
Rent and service charge
Others

12. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2019
Harga perolehan					
Bangunan	281.835	8	-	-	281.843
Kendaraan	2.704	-	-	-	2.704
Komputer	4.279	5	(88)	-	4.196
Peralatan kantor	3.151	31	(31)	-	3.151
Perabotan dan peralatan kantor	39.000	33	(6)	-	39.027
Aset tetap dalam penyelesaian	21	-	(21)	-	-
	330.990	77	(146)	-	330.921
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	4.697	9.395	-	-	14.092
Kendaraan	2.533	136	-	-	2.669
Komputer	3.056	563	-	-	3.619
Peralatan kantor	1.501	762	-	-	2.263
Perabotan dan peralatan kantor	5.090	9.681	-	-	14.771
	16.877	20.537	-	-	37.414
Nilai tercatat neto	314.113				293.507

Cost
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures
Property and equipment
in progress

Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures

Net carrying value

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2018
Harga perolehan					
Bangunan	-	15	-	281.820	281.835
Kendaraan	2.704	-	-	-	2.704
Komputer	3.485	514	-	280	4.279
Peralatan kantor	2.247	904	-	-	3.151
Perabotan dan peralatan kantor	9.469	38.720	(9.189)	-	39.000
Aset tetap dalam penyelesaian	282.100	21	-	(282.100)	21
	300.005	40.174	(9.189)	-	330.990
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	-	4.697	-	-	4.697
Kendaraan	2.396	137	-	-	2.533
Komputer	2.289	767	-	-	3.056
Peralatan kantor	806	695	-	-	1.501
Perabotan dan peralatan kantor	7.527	6.174	(8.611)	-	5.090
	13.018	12.470	(8.611)	-	16.877
Nilai tercatat neto	286.987				314.113

Cost
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures
Property and equipment
in progress

Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures

Net carrying value

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian dari laba atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
Harga jual	-
Nilai buku	-
Laba penjualan aset tetap	-

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

The details of gain on sale of fixed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
	600	Selling price
	(578)	Book value
	22	Gain on sale of fixed assets

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp5.822 (2018: Rp4.128).

As of December 31, 2019, the gross amount of property and equipment which have been fully depreciated and still being used amounting to Rp5,822 (2018: Rp4,128).

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Sinar Mas, yang merupakan pihak ketiga, terhadap risiko kerugian dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp333.527 (2018: Rp329.714). Manajemen berpendapat bahwa perlindungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

As of December 31, 2019, property and equipment were insured with PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Sinar Mas, which are third parties, against damage and loss risks with sum insured of Rp333,527 (2018: Rp329,714). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2019 and 2018.

13. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada nasabah dan proses pinjaman diterima oleh Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman diberikan atau pinjaman diterima dan kemudian diamortisasi ketika pinjaman diberikan tersebut telah disalurkan kepada debitur atau pinjaman diterima telah ditarik oleh Perusahaan.

13. DEFERRED CHARGES

Deferred charges represent transaction costs paid to third parties in relation to the processing of the loan to the customers and the processing of the fund borrowings. The transaction cost will be presented as part of the loan or fund borrowings and amortized when the loan is disbursed to the debtors or the fund borrowings have been drawn by the Company.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa beban tangguhan dapat direalisasi pada kegiatan bisnis normal.

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that the deferred charges are realizable in the ordinary course of business.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Perangkat lunak komputer	13.885	20.004	Computer software
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp13.056 dan Rp17.092 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	12.470	10.622	Other receivables - net of allowance for impairment loss of Rp13,056 and Rp17,092 respectively, as of December 31, 2019 and 2018
Uang jaminan	-	2.954	Security deposit
Uang muka	267	105	Advances
	26.622	33.685	

Termasuk di dalam piutang lain-lain adalah piutang
atas pendapatan komitmen terkait pinjaman yang
diberikan yang belum ditarik dan piutang
pendapatan *advisory*.

Included in other receivables are commitment income
receivables related to undrawn loan facilities and
advisory income receivables.

Perangkat lunak komputer

Computer softwares

31 Desember/December 31, 2019			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan	41.857	617	42.474
Akumulasi amortisasi	21.853	6.736	28.589
Nilai buku neto	20.004		13.885
31 Desember/December 31, 2018			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan	34.270	7.587	41.857
Akumulasi amortisasi	16.093	5.760	21.853
Nilai buku neto	18.177		20.004

Cost
Accumulated amortization
Net book value

Cost
Accumulated amortization
Net book value

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset lain-lain telah memadai.

Management believes that the allowance for
impairment losses on other assets is adequate.

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Pihak berelasi			Related parties
Remunerasi	81	-	Remuneration
Pihak ketiga			Third parties
Jasa profesional	4.141	2.442	Professional services
Utang bunga atas transaksi derivatif	1.396	3.350	Interest payable from derivative transaction
Dana pengembalian pinjaman diterima dimuka	-	1.790	Loan repayment fund received in advance
Lain-lain	3.110	791	Others
	8.728	8.373	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN
LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak berelasi		
Cadangan tunjangan	1.803	1.752
Beban komitmen	1.741	2.982
Bonus	13.477	-
	17.021	4.734
Pihak ketiga		
Biaya jasa profesional	12.361	14.990
Pengembangan sistem	832	597
Biaya renovasi gedung	-	3.257
Lain-lain	7.771	6.774
	20.964	25.618
	37.985	30.352

Beban komitmen kepada pihak berelasi merupakan beban komitmen atas pinjaman yang belum dicairkan oleh Perusahaan, yang diberikan oleh World Bank, melalui mekanisme Pinjaman Subordinasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Catatan 20 dan 30).

16. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

Related parties
Benefits provision
Commitment fees
Bonus

Third parties
Professional fee expense
System development
Building renovation expenses
Others

Commitment expenses to related parties represent commitment fees in relation to the undrawn borrowings by the Company, which provided by the World Bank, in form of Subordinated Loan through PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Notes 20 and 30).

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016:		
Seri A		
Pihak ketiga	-	735.000
Pihak berelasi	-	90.000
Seri B		
Pihak ketiga	172.000	172.000
Pihak berelasi	78.000	78.000
Seri C		
Pihak ketiga	275.000	275.000
Pihak berelasi	150.000	150.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019:		
Seri A		
Pihak ketiga	911.000	-
Pihak berelasi	54.000	-
Seri B		
Pihak ketiga	342.000	-
Pihak berelasi	30.000	-
Seri C		
Pihak ketiga	163.000	-
Surat Utang Jangka Menengah:		
Pihak ketiga	-	185.000
Pihak berelasi	-	15.000
	2.175.000	1.700.000

Indonesia Infrastructure Finance Bond I
Year 2016:
A Series
Third parties
Related parties
B Series
Third parties
Related party
C Series
Third parties
Related parties

Indonesia Infrastructure Finance
Shelf Registration Bond I Phase I
Year 2019:
A Series
Third parties
Related parties
B Series
Third parties
Related party
C Series
Third parties

Medium Term Notes:
Third parties
Related parties

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Biaya penerbitan belum diamortisasi	(7.794)	(2.724)	Unamortized issuance costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	15.858	28.489	Accrued interest expenses
	2.183.064	1.725.765	

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016.

On June 29, 2016, the Company obtained effectivity statement from Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016.

Pada tanggal 19 Juli 2016, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

On July 19, 2016, the Company received the funds from the bonds issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Seri A sebesar Rp825.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun untuk tenor 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap 8,70% per tahun untuk tenor 5 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp425.000 dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun untuk tenor 7 tahun.

- Series A amounting to Rp825,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum and tenor of 3 years;
- Series B amounting to Rp250,000 with a fixed interest rate of 8.70% per annum and tenor of 5 years; and
- Series C amounting to Rp425,000 with a fixed interest rate of 9.00% per annum and tenor of 7 years.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2019.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on July 19, 2019.

Obligasi Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 dan 19 Juli 2023. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

The Series B and Series C Bond shall be fully repaid on July 19, 2021 and July 19, 2023, respectively. Interest is paid quarterly.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 peringkat Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 menurut Pefindo dan Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

As of December 31, 2019 and 2018, the Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 is rated idAAA by Pefindo and Fitch Rating Indonesia.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019.

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp965.000 dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun untuk tenor 370 hari;
- Seri B sebesar Rp372.000 dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun untuk tenor 3 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp163.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, 18 Desember 2022 dan 18 Desember 2024. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 (continued)

For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019.

On December 18, 2019, the Company received the funds from the bonds issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp965,000 with a fixed interest rate of 6.75% per annum and tenor of 370 days;
- Series B amounting to Rp372,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum and tenor of 3 years; and
- Series C amounting to Rp163,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum and tenor of 5 years.

The Series A, Series B and Series C Bonds shall be fully repaid on December 28, 2020, December 18, 2022 and December 18, 2024, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2019, the Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 is rated idAAA by Pefindo.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 sebesar Rp200.000 dengan tenor 370 hari. MTN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 8,35% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 menurut Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

Dalam perjanjian MTN, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan. Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan rasio Utang terhadap Modal sebesar maksimum 10 kali, dan rasio Aset lancar terhadap Kewajiban lancar tidak kurang dari 100%.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Perusahaan telah melakukan pelunasan MTN sesuai jatuh temponya pada tanggal 10 November 2019.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan yang dananya belum ditarik oleh debitur. Pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan diterima dimuka adalah sebesar Rp4.388 (2018: Rp2.904).

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 (continued)

For the year ended December 31, 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Medium Term Notes

On October 24, 2018, the Company issued an Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes ("MTN") Year 2018 amounting to Rp200,000 with tenor of 370 days. The MTN has a fixed interest rate of 8.35% per annum.

As of December 31, 2018, the Indonesia Infrastructure Finance MTN Year 2018 is rated idAAA by Fitch Rating Indonesia.

Under the MTN agreement, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants. The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum debt to equity ratio of 10 times and the minimum current ratio of 100%.

The Company has fulfilled all covenants and obligations according to the agreement.

The Company has fully repaid MTN on its maturity date on November 10, 2019.

18. UNEARNED REVENUE

Deferred income represents provision received related to loan receivables which have not been drawdown yet by the debtors. As of December 31, 2019 total unearned revenue amounted to Rp4,388 (2018: Rp2,904).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.350.000
Dolar Amerika Serikat	
International Finance Corporation (USD100.000.000 pada 2019)	1.390.101
	4.740.101
Ditambah/(dikurangi):	
Beban bunga masih harus dibayar	7.874
Biaya transaksi belum diamortisasi	(34.230)
	4.713.745

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.000.000 (Catatan 30 dan 32) yang telah dicairkan seluruhnya.

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,29% per tahun dengan tenor 3 tahun.

Pada tanggal 1 November 2018, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 (Catatan 30 dan 32).

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,44% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 30 Mei 2020. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri dari pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000, kredit jangka pendek Rp500.000 dan *treasury line* sebesar USD100.000.000 (Catatan 30 dan 32).

19. FUND BORROWINGS

	31 Desember/ December 31, 2018	
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.600.000	
Dolar Amerika Serikat		
International Finance Corporation (USD100,000,000 in 2019)	-	
	3.600.000	
Add/(less):		
Accrued interest expenses	8.960	
Unamortized transaction costs	(17.403)	
	3.591.557	

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,000,000 (Notes 30 and 32) which has been fully drawn.

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.29% per annum with tenor of 3 years.

On November 1, 2018, the Company early repaid the whole principal of the loan amounting to Rp1,000,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,500,000 (Notes 30 and 32).

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.44% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on May 30, 2020. Interest is payable monthly.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company had drawdown the loan facility amounting to Rp1,500,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consists of special transaction loans amounting to Rp2,500,000, short term credit amounting to Rp500,000 and *treasury lines* amounting to USD100,000,000 (Notes 30 and 32).

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (lanjutan)

Pinjaman transaksi khusus memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,59% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 26 Oktober 2021. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman transaksi khusus masing-masing sebesar Rp1.850.000 dan Rp1.600.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp500.000, yang kemudian telah dilunasi pada tanggal 11 April 2019.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman Bank Mandiri I, II dan III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan dan persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan rasio *leverage* sebesar maksimum 5 kali.

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan transaksi tertentu diluar kegiatan usaha normal Perusahaan dan pembatasan tertentu untuk melakukan transaksi tertentu jika Perusahaan melanggar persyaratan keuangan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

International Finance Corporation

International Finance Corporation I

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD250.000.000 yang terdiri dari pinjaman A + MCPP (*Managed Co-lending Portfolio Program*) sebesar USD52.500.000 dan pinjaman B sebesar USD197.500.000 (Catatan 30 dan 32). Pinjaman ini telah ditarik semua oleh Perusahaan.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (continued)

Special transaction loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.59% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on October 26, 2021. Interest is payable monthly.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company had drawdown the special transaction loan facility amounting to Rp1,850,000 and Rp1,600,000, respectively.

As of December 31, 2018, the Company had drawdown the short term credit facility amounting to Rp500,000, and the Company had fully repaid the short term credit facility on April 11, 2019.

The fund borrowings are unsecured.

Under Bank Mandiri I, II and III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum leverage ratio of 5 times.

The negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to conduct certain transaction outside of the ordinary business activity of the Company and certain restriction to conduct certain transaction when the Company is in breach of financial covenant.

During the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

International Finance Corporation

International Finance Corporation I

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD250,000,000 which consists of A + MCPP (Managed Co-lending Portfolio Program) loans amounting to USD52,500,000 and B loans amounting to USD197,500,000 (Notes 30 and 32). The Company had fully drawn the loan facilities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation I (lanjutan)

Pinjaman A + MCPP memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,51% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 19 Juni 2021. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,21% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 19 Juni 2019. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember. Pinjaman ini telah ditarik semua oleh Perusahaan.

Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman sebesar USD250.000.000.

International Finance Corporation II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari pinjaman A sebesar USD15.000.000 dan pinjaman B sebesar USD135.000.000 (Catatan 30 dan 32) yang sudah ditarik semua oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD150.000.000.

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 22 Februari 2021. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh pada tanggal 22 Februari 2019. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pada tanggal 15 Desember 2018, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman sebesar USD150.000.000.

19. FUND BORROWINGS (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation I (continued)

A + MCPP loans have an interest rate of 3-month LIBOR + 2.51% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment on June 19, 2021. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B Loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 2.21% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment on June 19, 2019. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15. The facility has been fully drawdown by the Company.

On March 15, 2018, the Company early repaid the whole principal of the loan amounting to USD250,000,000.

International Finance Corporation II

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD15,000,000 and B Loans amounting to USD135,000,000 (Notes 30 and 32) which had been fully drawn by the Company.

As of December 31, 2017, principal loan drawdown from loan facilities amounted to USD150,000,000.

A Loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.55% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment on February 22, 2021. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B Loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.15% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on February 22, 2019. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

On December 15, 2018, the Company early repaid the whole principal of the loan amounting to USD150,000,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari Pinjaman A sebesar USD50.000.000, Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000 dan Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000 (Catatan 30 dan 32).

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh 7 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B1 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,00% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh 3 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B2 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,20% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh 5 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari Internasional Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menarik seluruh pokok pinjaman dari Fasilitas A dan B2 masing-masing sebesar USD50.000.000.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman IFC I, II dan III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan afirmatif, persyaratan keuangan serta persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi/Description	Limit
a.	Risk weighted capital adequacy ratio	12%
b.	Debt to total capitalization ratio	<=3:1
c.	Current ratio	>1.2:1

19. FUND BORROWING (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD50,000,000, B1 Loans amounting to USD50,000,000 and B2 Loans amounting to USD50,000,000 (Notes 30 and 32).

A loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.75% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment 7 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B1 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.00% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment 3 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B2 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.20% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment 5 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from Internasional Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

On December 31, 2019, the Company has fully drawdown all principal from the loan facilities A and B2 amounting to USD50,000,000, respectively.

The fund borrowings are unsecured.

Under IFC I, II and III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain affirmative, financial and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others, are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari International Finance Corporation untuk melakukan transaksi tertentu seperti pembagian dividen, menyediakan program insentif jangka panjang untuk karyawan, memperoleh utang keuangan berdasarkan kondisi tertentu, dan lain-lain.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

19. FUND BORROWING (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

The negative covenants include requirement to obtain consent from International Finance Corporation for certain transactions such as distribution of dividend, providing long term incentive plan to employees, incur financial debts under certain conditions, etc.

During the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

20. PINJAMAN SUBORDINASI

	31 Desember/ December 31, 2019
Asian Development Bank (USD87.818.113 pada 2019 USD90.438.183 pada 2018)	1.220.760
World Bank (USD93.218.004 dan Rp600.000 pada 2019 dan USD97.712.604 dan Rp300.000 pada 2018)	1.895.824
	3.116.584
Ditambah/(dikurangi):	
Beban bunga masih harus dibayar	40.523
Biaya transaksi belum diamortisasi	(14.189)
	3.142.918

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") yang merupakan fasilitas pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD100.000.000 dari Asian Development Bank ("ADB") dan USD300.000.000 dari World Bank ("WB") (Catatan 30 dan 32).

Perusahaan menggunakan fasilitas ini untuk memperkuat struktur modal Perusahaan, serta untuk memberikan pendanaan jangka panjang bagi Perusahaan agar dapat memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang tanpa mengakibatkan ketidaksesuaian tenor antara aset dan liabilitas.

20. SUBORDINATED LOANS

	31 Desember/ December 31, 2018
Asian Development Bank (USD87,818,113 in 2019 (USD90,438,183 in 2018)	1.309.635
World Bank (USD93,218,004 and Rp600,000 in 2019 and USD97,712,604 and Rp300,000 in 2018)	1.714.976
	3.024.611
Add/(less):	
Accrued interest expenses	28.489
Unamortized transaction costs	(15.691)
	3.037.409

The Company obtained subordinated loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") which represents channeling facilities amounting to USD100,000,000 from Asian Development Bank ("ADB") and USD300,000,000 from World Bank ("WB") (Notes 30 and 32).

The Company used this facility to strengthen its capital structure and to provide long-term funding to enable long-term financing without creating mismatch between asset and liability tenors.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari ADB adalah sebagai berikut:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1	13 Desember/December 13, 2012	71.134.021	1 st drawdown
Penarikan 2	13 November/November 13, 2013	16.732.954	2 nd drawdown
Penarikan 3	19 November/November 19, 2013	337.886	3 rd drawdown
Penarikan 4	6 Desember/December 6, 2013	6.400.000	4 th drawdown
Penarikan 5	25 November/November 25, 2014	4.877.000	5 th drawdown
		99.481.861	

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari WB adalah sebagai berikut:

Details of drawdown of subordinated loan facilities from WB are as follows:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1 - WB I	21 Desember/December 21, 2012	10.000.000	WB I - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB I	12 Juli/July 12, 2013	40.000.000	WB I - 2 nd drawdown
Penarikan 3 - WB I	3 Desember/December 3, 2013	22.000.000	WB I - 3 rd drawdown
Penarikan 4 - WB I	23 April/April 23, 2014	20.000.000	WB I - 4 th drawdown
Penarikan 5 - WB I	25 September/September 25, 2014	5.180.000	WB I - 5 th drawdown
Penarikan 6 - WB I	23 Juli/July 23, 2015	2.700.000	WB I - 6 th drawdown
		99.880.000	

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		IDR	
Penarikan 1 - WB II	26 Desember/December 26, 2018	300.000	WB II - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB II	17 Mei/May 17, 2019	300.000	WB II - 2 nd drawdown
		600.000	

Periode penarikan fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah diperpanjang dari sebelumnya tanggal 31 Desember 2013 menjadi masing-masing 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2014. Oleh karena fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah berakhir, Perusahaan tidak akan melakukan penarikan sisa fasilitas pinjaman yang belum ditarik masing-masing sebesar USD120.000 dan USD518.139.

The availability period of the subordinated loans from WB I and ADB has been extended to March 31, 2017 and December 31, 2014, respectively, from the original expiry date of December 31, 2013. As the availability period of the subordinated loan from WB I and ADB expired, the Company did not utilize the undrawn facilities amounting to USD120,000 and USD518,139, respectively.

SMI - Asian Development Bank

SMI - Asian Development Bank

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from ADB, bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.45% per annum payable semiannually on March 1 and September 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

SMI - World Bank I

SMI - World Bank I

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI sebesar USD100.000.000 merupakan pinjaman penerusan dari WB yang memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

The subordinated loan facility from SMI of USD100,000,000 represents the channeling loan from WB which bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.52% per annum payable semiannually on May 1 and November 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

SMI - World Bank II

SMI - World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi yang merupakan pinjaman penerusan II dari WB dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a Subordinated Loan Agreement which represents the channeling loan II from WB of USD200,000,000. The loan will be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

Pinjaman subordinasi ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

The purpose of the subordinated loan is to finance infrastructure projects in Indonesia.

Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, diantaranya:

Unless prior written consent of SMI is obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, among others:

- i. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontingen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan.
- ii. Mengubah tahun fiskal.
- iii. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi.
- iv. Membayar kembali atau membayar dimuka. Membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
- v. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan *money laundering* (pencucian uang) dan *financing of terrorism* (pembiayaan terorisme), penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya.
- vi. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 5 berbanding 1.

- i. Guarantee or become liable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements.
- ii. Change its financial year.
- iii. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization.
- iv. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement.
- v. Commit to any act that will cause money laundering, financing of terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices.
- vi. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 5 to 1.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman subordinasi ini.

The subordinated loans are unsecured.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

SMI - World Bank II (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

SMI - World Bank II (continued)

During the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

Nama pemegang saham	31 Desember 2019 dan 2018/ December 31, 2019 and 2018		Total	Name of shareholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	30.00%	600.000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Asian Development Bank	399.800	19.99%	399.800	Asian Development Bank
International Finance Corporation	399.800	19.99%	399.800	International Finance Corporation
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	302.400	15.12%	302.400	DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	298.000	14.90%	298.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	2.000.000	100.00%	2.000.000	

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN CADANGAN UMUM

Tambahan modal disetor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp29.800 merupakan agio saham yang dibayarkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perusahaan tertanggal 21 Maret 2019 dan 22 Maret 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk tidak mengalokasikan cadangan umum, dividen dan tujuan lainnya untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp15.269.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND GENERAL RESERVES

Additional paid-in capital as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp29,800 represents premium of shares paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Based on Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated March 21, 2019 and March 22, 2018, the Company's shareholder approved to not allocate any amount for reserve funds, dividend and other purposes for the financial year as at and for the years ended December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has provided a general reserve of Rp15,269.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN BUNGA

23. INTEREST INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan bunga pinjaman diberikan	527.378	491.797	Interest income from loans
Pendapatan bunga efek-efek	196.485	173.065	Interest income from securities
Pendapatan bunga deposito berjangka	34.007	47.411	Interest income from time deposits
Pendapatan bunga transaksi derivatif	23.982	7.510	Interest income from derivative transaction
Pendapatan bunga giro	3.724	10.736	Interest income from current accounts
Pendapatan bunga atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	795	-	Interest income from securities purchase under resale agreement
	786.371	730.519	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pendapatan bunga dari konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga Perusahaan.

For the years ended December 31, 2019 and 2018, there are no interest income from external customers amounting to 10% or more of the Company's total interest income.

24. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

24. PROVISION AND COMMISSION INCOME

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan yang berkaitan dengan pinjaman diberikan, diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, jasa perancangan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

Provision and commission income represents income related to the loans, recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as *mandatory lead arranger services*, syndication, structuring of financing scheme services, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Gaji dan tunjangan	96.958	83.376	Salaries and benefits
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12 dan 14)	27.273	18.230	Depreciation and amortization (Notes 12 and 14)
Jasa profesional	18.182	16.026	Professional fee
Imbalan kerja (Catatan 28)	6.012	4.414	Employee benefit (Note 28)
Sewa	4.681	9.613	Rent
Biaya bank dan kustodian	4.667	4.427	Bank and custodian charges
Akomodasi dan transportasi	3.839	3.497	Accommodation and transportation
Asuransi	2.461	2.930	Insurance
Promosi dan komunikasi	1.849	2.176	Promotion and communication
Listrik, telepon, air dan internet	1.825	2.436	Electricity, telephone, water and internet
Pelatihan dan seminar	1.159	971	Training and seminars
Perlengkapan kantor	646	781	Office supplies
Representasi	319	271	Representation
Beban pajak lain	296	309	Other tax expense
Lain-lain	4.033	1.985	Others
	174.200	151.442	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN BUNGA

26. INTEREST EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi			Fund borrowings subordinated loans
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	282.274	177.980	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
SMI-World Bank	107.424	61.944	SMI-World Bank
SMI-Asian Development Bank	50.186	48.466	SMI-Asian Development Bank
International Finance Corporation	42.724	188.203	International Finance Corporation
Pihak ketiga			Third party
PT Bank Permata Tbk	1.006	-	PT Bank Permata Tbk
Derivatif			Derivative
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	24.679	14.148	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank ANZ Indonesia	758	9.148	PT Bank ANZ Indonesia
Surat utang yang diterbitkan			Debt securities issued
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.005	7.273	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Taspen (Persero)	4.420	11.731	PT Taspen (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.160	7.039	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	589	-	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia	295	-	PT Asuransi Jasa Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.209	7.821	PT Bank OCBC NISP Tbk
DJS Ketenagakerjaan program IP	2.946	7.821	DJS Ketenagakerjaan IP program
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 50	4.392	7.743	Secured Mutual Fund Mandiri Seri 50
Lain-lain	84.086	83.527	Others
	626.153	632.844	

27. PERPAJAKAN

27. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Lebih bayar pajak penghasilan badan			Overpayment of corporate income tax
Tahun 2017	-	9.351	for 2017
Tahun 2018	296	310	for 2018
Pajak Penghasilan Pasal 23	153	-	Income Tax Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.706	Value Added Tax
	449	11.367	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 21	1.118	2.788	<i>Article 21</i>
Pasal 23	76	77	<i>Article 23</i>
Pasal 26	209	67	<i>Article 26</i>
Pasal 4(2)	3	1	<i>Article 4(2)</i>
	1.406	2.933	
Pajak lainnya	270	1.818	<i>Other tax</i>
	1.676	4.751	

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

Pajak kini

Current tax

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari beban pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan beban pajak final sebagai berikut:

The Company's estimated income tax for the years ended December 31, 2019 and 2018 represents current income tax expense, deferred tax benefit and final tax expense as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	32.404	(46.697)	<i>Income/(loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Penghasilan tidak kena pajak - reksa dana	(4.019)	(4.211)	<i>Non-taxable income - mutual fund</i>
	28.385	(50.908)	
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Penyisihan program insentif jangka panjang	-	(5.108)	<i>Provision for long term incentives plan</i>
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan menurut fiskal dan komersial	4.426	4.708	<i>Difference of provision for impairment losses on loan between fiscal and commercial</i>
Akrua bonus dan tunjangan	13.984	1.344	<i>Accrued bonus and allowances</i>
Penyisihan imbalan kerja karyawan (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar transaksi derivatif	4.792	3.260	<i>Provision for employee benefits</i>
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain menurut fiskal dan komersial	(8.745)	4.272	<i>Unrealized (loss)/gain from fair value of derivative transaction</i>
Kerugian yang direalisasi dari penjualan investasi saham	(4.036)	10.376	<i>Difference of provision for impairment losses on other receivable between fiscal and commercial</i>
Perbedaan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain menurut fiskal dan komersial	(134.639)	-	<i>Realized loss from sales of equity investment</i>
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	(6.200)	(2.824)	<i>Difference of depreciation of property and equipment and amortization of other assets between fiscal and commercial</i>
	(2.140)	(1.392)	<i>Changes in fair value of equity investments and shares option</i>
	(132.558)	14.636	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	(151.121)	(158.584)	Interest income subject to final tax
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	120.945	127.520	Expense related to income subject to final tax
Keuntungan dari penjualan efek-efek	(3.342)	6.267	Gain on sale of securities
Lain-lain	1.341	5.709	Others
	(32.177)	(19.088)	
Estimasi rugi fiskal tahun berjalan	(136.350)	(55.360)	Current years' estimated fiscal loss
Penyesuaian atas rugi fiskal	620	-	Adjustment for fiscal loss
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(185.800)	(130.440)	Prior year fiscal loss carryforward
Akumulasi rugi fiskal	(321.530)	(185.800)	Accumulated fiscal loss
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beban pajak final	(13.957)	(13.750)	Final tax expense
Pajak penghasilan: (Beban)/manfaat pajak tangguhan	(2.471)	17.499	Income tax: Deferred tax (expense)/benefit
	(16.428)	3.749	

Estimasi rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 akan/telah menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2019 dan 2018.

The Company's estimated fiscal losses for the years ended December 31, 2019 and 2018 will be/were the basis for preparing annual tax returns for 2019 and 2018.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

Pajak penghasilan yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain:

Income tax recognized in other comprehensive
income:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
(Beban)/manfaat yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain: (Kenaikan)/penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(571)	1.093	(Expenses)/benefit recognized in other comprehensive income: (Increase)/decrease in fair value of available-for-sale securities
Bagian efektif atas perubahan instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	700	(746)	Actuarial loss/(gain) Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge
	9.918	-	
Total pajak yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	10.047	347	Total tax recognized in other comprehensive income

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Deferred tax assets/(liabilities)

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

Deferred tax assets as of December 31, 2019
and 2018 consists of the following:

	31 Desember/December 31, 2019				
	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2019	
Akrua bonus dan tunjangan	1.235	3.496	-	4.731	Accrued bonus and allowance
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	466	-	(571)	(105)	Increase in fair value of available- for-sale securities
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	-	-	9.918	9.918	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	(677)	(1.550)	-	(2.227)	Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	(12.769)	1.107	-	(11.662)	Difference of allowance for impairment losses for loan between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain antara fiskal dan komersial	4.273	(4.273)	-	-	Difference of allowance for impairment losses for other receivable between fiscal and commercial
Kenaikan nilai wajar tagihan derivatif	2.186	(2.186)	-	-	Increase in fair value of derivative receivables

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

Deferred tax assets as of December 31, 2019
and 2018 consists of the following (continued):

31 Desember/December 31, 2019					
	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2019	
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	(348)	(535)	-	(883)	Changes in fair value of equity investment and shares option
Penurunan nilai wajar investasi saham	33.660	(33.660)	-	-	Decrease in fair value of equity investments
Liabilitas imbalan kerja	4.683	1.198	700	6.581	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	46.450	33.932	-	80.382	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	79.159	(2.471)	10.047	86.735	Deferred tax assets - net
31 Desember/December 31, 2018					
	31 Desember/ December 31, 2017	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2018	
Akrual bonus dan tunjangan	899	336	-	1.235	Accrued bonus and allowance
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	(627)	-	1.093	466	Increase in fair value of available- for-sale securities
Selisih penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain antara fiskal dan komersial	29	(706)	-	(677)	Difference of property and equipment depreciation and other assets amortization between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan antara fiskal dan komersial	(13.946)	1.177	-	(12.769)	Difference of allowance for impairment losses for loan between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain antara fiskal dan komersial	1.679	2.594	-	4.273	Difference of allowance for impairment losses for other receivable between fiscal and commercial
Kenaikan nilai wajar tagihan derivatif	1.118	1.068	-	2.186	Increase in fair value of derivative receivables
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	-	(348)	-	(348)	Changes in fair value of equity investment and shares option
Penurunan nilai wajar investasi saham	33.660	-	-	33.660	Decrease in fair value of equity investments
Program insentif jangka panjang	1.277	(1.277)	-	-	Long term incentive plan
Liabilitas imbalan kerja	4.614	815	(746)	4.683	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	32.610	13.840	-	46.450	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	61.313	17.499	347	79.159	Deferred tax assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

c. Income tax (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
2019	2018	
Laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	32.404	(46.697)
Penghasilan tidak kena pajak - reksa dana	(4.019)	(4.211)
	28.385	(50.908)
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(7.096)	12.727
		Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap: Pendapatan bunga dikenakan pajak final	37.780	39.646
		Tax effect of permanent differences:
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	(30.236)	(31.880)
		Interest income subject to final tax
Lain-lain	(2.764)	(2.994)
		Expense related to income subject to final tax
	4.780	4.772
		Others
Koreksi rugi fiskal menurut pemeriksaan pajak 2017	(155)	-
		Correction of fiscal loss due to tax assessment 2017
Jumlah (beban)/manfaat pajak penghasilan	(2.471)	17.499
		Total benefit (expense)/income tax

d. Surat Ketetapan Pajak

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 16 April 2019, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan ("PPH") lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2017. Hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") dengan total lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp9.351 dan kurang bayar Pajak Penghasilan 23 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7. Selain itu, berdasarkan SKPLB terdapat juga koreksi rugi fiskal badan sebesar Rp620 dari sebelumnya Rp130.440 menjadi sebesar Rp129.820. Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak, melakukan penyesuaian atas kompensasi kerugian yang diakui di tahun 2017 dan menerima lebih bayar jumlah tersebut pada tanggal 17 Mei 2019.

d. Tax Assessment Letter

Fiscal years 2017

On April 16, 2019, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the Corporate Income Taxes, Other Income Taxes and Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2017. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB"), Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB"), Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") and Tax Collection Letters ("STP") with total Corporate Income Taxes overpayment of Rp9,351 and total Income Tax Article 23 and Value Added Tax underpayment of Rp7. In addition, based on the SKPLB there was also a correction of corporate fiscal loss amounting to Rp620 from Rp130,440 to Rp129,820. The Company agreed all the tax assessment results, made an adjustment for its recognized tax losses in 2017 and receipt the tax overpayment amount on May 17, 2019.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 26 September 2019, Direktorat Jenderal Pajak mengirim surat No. 00277/WPJ.30/KP.0105/RIK.SIS/2019 kepada Perusahaan, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Pemeriksaan ini masih dilakukan dan belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan per 31 Desember 2019.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pajak dibayar dimuka dapat diterima kembali setelah hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

27. TAXATION (continued)

e. Tax Examination Letter

On September 26, 2019, Directorate General of Tax sent letter No. 00277/WPJ.30/KP.0105/RIK.SIS/2019 to the Company, stated that the Directorate General of Tax will examine the Company's tax for the year ended December 31, 2018. The examination is still being conducted and has not been completed until the date of the financial statements as of December 31, 2019.

f. Administrative

Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which is applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The prepaid taxes is refundable subject to tax audit result by the Tax Office.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2019
Imbalan pasca-kerja	24.767
Imbalan jangka panjang lainnya	1.560
	26.327

Perusahaan memiliki dua imbalan kerja karyawan yaitu imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya.

Pengungkapan di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 oleh aktuaria independen (PT Padma Radya Aktuarial) dalam laporannya masing-masing tertanggal 27 Januari 2020 dan 25 Januari 2019.

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

	31 Desember/ December 31, 2018	
	17.849	Post-employment benefits
	885	Other long-term benefits
	18.734	

The Company has two employee benefit plans which include post-employment benefits and other long-term benefits.

The disclosure below summarizes the components of the estimated net liabilities for employee benefits and other long-term benefit recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the statement of financial position in relation to the calculation of the estimated liability for employee benefits as of December 31, 2019 and 2018 by independent actuary (PT Padma Radya Aktuarial) in its reports dated January 27, 2020 and January 25, 2019, respectively.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2019	2018
Beban jasa kini	4.439	4.879
Beban jasa lalu	(872)	(1.653)
Beban bunga	1.535	1.095
	5.102	4.321

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	24.767	17.849

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Saldo awal	17.849	16.785
Beban jasa kini	4.439	4.879
Beban jasa lalu	(872)	(1.653)
Beban bunga	1.535	1.095
Pembayaran manfaat	(985)	(271)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	2.801	(2.986)
Saldo akhir	24.767	17.849

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Post-employment benefits

The Company recognizes post-employment benefits obligation based on Labor Law No. 13/2003.

Amounts recognized in the profit or loss in respect of the post-employment benefits are as follows:

Current service cost
Past service cost
Interest cost

The amounts included in the statement of financial position arising from post-employment benefits obligation are as follows:

Present value of unfunded obligation

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

Beginning balance
Current service cost
Past service cost
Interest cost
Benefits payment
Actuarial loss/(gain)
Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Mutasi akumulasi keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui di saldo laba adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	1.722
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	(2.801)
Saldo akhir	(1.079)

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan cuti besar sebanyak 30 hari kerja kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Cuti besar ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Perusahaan juga memberikan imbalan jangka panjang berupa emas 5 gram kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Imbalan ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2019	2018
Beban jasa kini	597	504
Beban bunga	79	73
Beban jasa lalu	-	(84)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	234	(400)
Saldo akhir	910	93

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Saldo awal	885	1.674
Beban jasa kini	597	504
Beban bunga	79	73
Beban jasa lalu	-	(84)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	234	(400)
Pembayaran manfaat	(235)	(882)
Saldo akhir	1.560	885

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Post-employment benefits (continued)

Movements of accumulated actuarial gain/(loss) recognized in the retained earnings are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	
	(1.264)	Beginning balance
	2.986	Actuarial (loss)/gain
	1.722	Ending balance

Other long-term benefits

The Company provides long service leave for 30 working days to employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This long service leave can be taken on the sixth year.

The Company also provides long-term benefit in the form of 5 gram of gold for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This benefit can be taken on the sixth year.

Amounts recognized in profit or loss in respect of the other long-term benefits are as follows:

	2019	2018	
	597	504	Current service cost
	79	73	Interest cost
	-	(84)	Past service cost
	234	(400)	Actuarial loss/(gain)
	910	93	Ending balance

Movements in the present value of other long-term benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
	885	1.674	Beginning balance
	597	504	Current service cost
	79	73	Interest cost
	-	(84)	Past service cost
	234	(400)	Actuarial loss/(gain)
	(235)	(882)	Benefits payment
	1.560	885	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position in respect of other long-term benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	1.560	885	Present value of unfunded obligation

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya di atas dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefit and other long-term benefits obligation is calculated using the following key assumptions:

	2019	2018	
Tingkat diskonto			Discount rate
Per 30 September 2019	8,00%	-	as of September 30, 2019
Per 31 Desember 2019	7,25%	8,25%	as of December 31, 2019
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat kematian	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI3	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 56/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at a 56 years old	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at 55 years old	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Normal retirement rate
Umur pensiun normal	56 tahun/years old	55 tahun/years old	Normal retirement age

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan imbalan jangka panjang lainnya (tidak diaudit):

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the present value of benefits obligation and other long-term benefits (unaudited):

	Kenaikan tingkat diskonto/ Increase in discount rate	Penurunan tingkat diskonto/ Decrease in discount rate	Kenaikan tingkat kenaikan gaji/ Increase in salary increase rate	Penurunan tingkat kenaikan gaji/ Decrease in salary increase rate	
2019	(1.536)	1.590	1.596	(1.529)	2019
2018	(863)	907	911	(859)	2018

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Berikut adalah ekspektasi pembayaran manfaat liabilitas imbalan kerja di tahun-tahun mendatang (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2019
Kurang dari satu tahun	1.316
2 - 5 tahun	13.573
6 - 10 tahun	42.205
> 10 tahun	176.988

Rata-rata tertimbang durasi dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 9,81 tahun (2018:8,93).

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Other long-term benefits (continued)

The following are expected payment periods of the benefits obligation in the future years (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2018	
	821	Less than one year
	11.145	2 - 5 years
	36.932	6 - 10 years
	148.321	> 10 years

The weighted average duration of the employment benefits obligation as of December 31, 2019 is 9.81 years (2018:8.93).

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun-akun di bawah ini merupakan akun yang dicatat di laporan posisi keuangan ekstrakomtabel (*off-balance sheet*):

a. KOMITMEN

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Piutang komitmen		
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum digunakan	4.353.933	6.717.271
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan (Catatan 9)	(3.193.181)	(2.474.540)
Komitmen - neto	1.160.752	4.242.731

b. KONTINJENSI

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Liabilitas kontinjensi		
Garansi kredit diberikan (Catatan 32)	(269.236)	(289.591)

29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The following accounts represent accounts which are recorded as off-balance sheet:

a. COMMITMENTS

Commitment receivable
Unused borrowing
facilities granted
Commitment payable
Unused loan
facilities granted
(Note 9)
Commitment - net

b. CONTINGENCIES

Contingent payables
Credit guarantees issued
(Note 32)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Asian Development Bank ("ADB")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
International Finance Corporation ("IFC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
DEG - Deutsche Investition - Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG").	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham akhir/Ultimate shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank BTPN Tbk (sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk/previously PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)	Dikendalikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/Controlled by Sumitomo Mitsui Banking Corporation

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Penempatan modal/Equity, Beban Tanggahan/Deferred Charges, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Pendapatan jasa advisory/Advisory income, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
Penempatan modal/Equity, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
Penempatan modal/Equity, Pinjaman diterima/Fund borrowing, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense
Penempatan modal/Equity, Utang lain-lain/Other payable.
Penempatan modal/Equity
Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/Realized gain/(loss) from sale of securities, Kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual/Increase/(decrease) in fair value of available for sale securities
Pinjaman diterima/Fund borrowing, Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Efek-efek/Securities, Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan pemegang saham Perusahaan/ <i>Owned and controlled by the shareholder of the Company</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Shareholder of the Company</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Brantas Adya Surya Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Utama Karya (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i>
PT Taspen (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
PT PP Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i>
PT Pertamina (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Keuntungan/(Kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/ <i>Realized gain/(loss) from sale of securities</i> .
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pinjaman diberikan/ <i>Loan</i> .
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i>
PT Waskita Sangir Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i>
PT Pemalang Batang Toll Road	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> , Beban tangguhan/ <i>Deffered charges</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Jasamarga Jalan layang Cikampek	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban tangguhan/ <i>Deferred charges</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>interest income</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Boards of Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen/ <i>management personnel</i>	kunci/ <i>Key</i> Gaji dan tunjangan/ <i>Salaries and benefits</i>

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
Kas di bank (Catatan 5)	473.529	54.715	Cash in banks (Note 5)
Deposito berjangka (Catatan 5)	1.667.724	300.000	Time deposits (Note 5)
Efek-efek (Catatan 6)	1.363.564	1.880.232	Securities (Note 6)
Pinjaman diberikan - neto (Catatan 9)	2.368.847	2.336.657	Loans - net (Note 9)
Piutang bunga (Catatan 10)	15.871	21.206	Accrued interest income (Note 10)
Beban tangguhan (Catatan 13)	999	32.011	Deferred charges (Note 13)
Aset lain-lain - neto (Catatan 14)	2.847	1.337	Other assets - net (Note 14)
Persentase terhadap total aset			Percentage to total assets
Kas dan setara kas	17,39%	3,35%	Cash and cash equivalents
Efek-efek	11,08%	17,78%	Securities
Pinjaman diberikan - neto	19,24%	22,10%	Loans - net
Piutang bunga	0,13%	0,20%	Accrued interest income
Beban tangguhan	0,01%	0,30%	Deferred charges
Aset lain-lain - neto	0,02%	0,01%	Other assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

The Company entered into certain transactions with related parties as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang lain-lain (Catatan 15)	81	-	Other payables (Note 15)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 16)	17.021	4.734	Accrued expenses and other liabilities (Note 16)
Surat utang yang diterbitkan (Catatan 17)	313.488	327.953	Debt securities issued (Note 17)
Pinjaman diterima (Catatan 19)	4.713.745	3.591.557	Fund borrowings (Note 19)
Pinjaman subordinasi (Catatan 20)	3.142.918	3.037.409	Subordinated loans (Note 20)
Persentase terhadap total liabilitas			Percentage to total liabilities
Utang lain-lain	0,00%	-	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	0,17%	0,06%	Accrued expenses and other liabilities
Surat utang yang diterbitkan	3,09%	3,89%	Debt securities issued
Pinjaman diterima	46,40%	42,56%	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	30,94%	36,00%	Subordinated loans
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan bunga (Catatan 23)	318.483	308.697	Interest income (Note 23)
Pendapatan provisi dan komisi (Catatan 24)	10.209	2.173	Provision and commission income (Note 24)
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	7.659	2.960	Advisory income
Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek (Catatan 6)	4.068	(6.529)	Realized gain/(loss) from sale of securities (Note 6)
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	826	Realized gain from derivative transaction
Persentase terhadap total pendapatan			Percentage to total revenues
Pendapatan bunga	38,01%	40,36%	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	1,22%	0,28%	Provision and commission income
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	0,91%	0,39%	Advisory income
Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek	0,49%	(0,85%)	Realized gain/(loss) from sale of securities
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	0,11%	Realized gain from derivative transaction
BEBAN			EXPENSES
Beban bunga (Catatan 26)	497.077	502.636	Interest expenses (Note 26)
Persentase terhadap total beban			Percentage to total expenses
Beban bunga	61,72%	61,93%	Interest expenses

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,**

	2019	2018	
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	
Direksi/ Board of Directors		Direksi/ Board of Directors	
Gaji dan tunjangan (imbalan jangka pendek)	9.700	16.565	9.354
			19.020

Salaries and benefits
(short-term benefits)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2019	
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Kas dan setara kas	72.953.137	1.014.122
Efek-efek	100.526.131	1.397.414
Pinjaman diberikan	116.410.853	1.618.228
Piutang bunga	1.259.184	17.504
Aset lain-lain	333.343	4.634
Total aset moneter	291.482.648	4.051.902
Liabilitas moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Utang lain-lain	443.488	6.166
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	21.718	302
Liabilitas derivatif	2.853.748	39.670
Pinjaman diterima	98.472.542	1.368.867
Pinjaman subordinasi	182.193.701	2.532.676
Total liabilitas moneter	283.985.197	3.947.681
Liabilitas moneter neto		104.221

Monetary assets
United States Dollar
Cash and cash equivalents
Securities
Loans
Accrued interest income
Other assets
Total monetary assets
Monetary liabilities
United States Dollar
Other payables
Accrued expenses and other liabilities
Derivative liabilities
Fund borrowings
Subordinated loans
Total monetary liabilities
Net monetary liabilities

	31 Desember/December 31, 2018	
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Kas dan setara kas	11.414.674	165.295
Efek-efek	141.807.628	2.053.516
Pinjaman diberikan	105.187.204	1.523.216
Piutang bunga	1.618.561	23.438
Tagihan derivatif	649.422	9.404
Aset lain-lain	691.187	10.009
Total aset moneter	261.368.676	3.784.878
Liabilitas moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Utang lain-lain	304.284	4.406
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	495.162	7.170
Liabilitas derivatif	1.253.345	18.150
Pinjaman subordinasi	189.571.632	2.745.187
Total liabilitas moneter	191.624.423	2.774.913
Aset moneter neto		1.009.965

Monetary assets
United States Dollar
Cash and cash equivalents
Securities
Loans
Accrued interest income
Derivative receivable
Other assets
Total monetary assets
Monetary liabilities
United States Dollar
Other payables
Accrued expenses and other liabilities
Derivative liabilities
Subordinated loans
Total monetary liabilities
Net monetary assets

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

On December 17, 2015, the Company had signed a Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of Rp1,000,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I (lanjutan)

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Pada tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000
- Kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.
- *Treasury line* sebesar USD100.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani *addendum* I Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri terkait dengan perpanjangan *availability period* sampai 25 April 2020 atas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000.

Perjanjian Pinjaman Komersial - International
Finance Corporation

International Finance Corporation I

Pada tanggal 19 Juni 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation ("IFC"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD250.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD30.000.000.
- Pinjaman MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) sebesar USD22.500.000.
- Pinjaman B sebesar USD197.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I (continued)

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

On May 30, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of Rp1,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

On October 26, 2018, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consist of:

- Special transaction loan amounting to Rp2,500,000.
- Short term credit amounting to Rp500,000.
- Treasury line amounting to USD100,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

On October 23, 2019, the Company had signed *addendum* Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement related to extension of *availability period* until April 25, 2020 for special transaction loan amounting to Rp2,500,000.

Commercial Loan Agreement - The International
Finance Corporation

International Finance Corporation I

On June 19, 2014, the Company had signed a Loan Agreement with International Finance Corporation ("IFC"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD250,000,000 which consist of:

- A loan amounting to USD30,000,000.
- MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) amounting to USD22,500,000.
- B loan amounting to USD197,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation II

Pada tanggal 22 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD15.000.000.
- Pinjaman B sebesar USD135.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation III

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari Internasional Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Japan International Cooperation Agency

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar JPY8.000.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan JPY8.000.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Commercial Loan Agreement - The International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation II

On February 22, 2016, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD15,000,000.
- B Loans amounting to USD135,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation III

On June 22, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD50,000,000.
- B1 Loans amounting to USD50,000,000.
- B2 Loans amounting to USD50,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from Internasional Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

Subordinated Loan Agreement - Japan International Cooperation Agency

On December 11, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities of JPY8,000,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to JPY8,000,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Permata Tbk

Commercial Loan Agreement - PT Bank Permata Tbk

Perjanjian Transaksi Valuta Asing

Foreign Exchange Transaction Agreement

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebesar USD1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

On October 10, 2019, the Company and Bank Permata had signed Foreign Exchange Transaction Agreement amounted to USD1,000,000 with availability period 1 year since agreement signed.

Perjanjian Money Market

Money Market Agreement

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian Money Market sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

On October 10, 2019, the Company and Bank Permata had signed Money Market Agreement amounted to Rp500,000 with availability period 1 year since agreement signed.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank

Subordinated Loan Agreement - The World Bank

World Bank I

The World Bank I

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi World Bank dan selanjutnya, pada 25 April 2011 World Bank telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank ("WB") sebesar USD100.000.000. Selain itu, World Bank menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif sejak 25 April 2011.

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to the effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Government of Republic of Indonesia and the World Bank ("WB") in the amount of USD100,000,000. Furthermore, World Bank declared the Loan Agreement to become effective as of April 25, 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

On December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank (lanjutan)

World Bank I (lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI. Menurut perjanjian proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaannya serta perusahaan yang dibiayai mematuhi Manual Operasi.

Berdasarkan surat No. S-760/PU/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari WB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tertanggal 27 November 2015 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB diperpanjang kembali dari semula tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016.

World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi kedua dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Risiko nilai tukar pinjaman ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subordinated Loan Agreement - The World Bank (continued)

The World Bank I (continued)

In relation to this agreement, the Company had entered into a Project Agreement with the International Bank For Reconstruction And Development (WB Group) and SMI. According to the project agreement, the Company is obliged to ensure that its own financing activities as well as the operations of the companies to which it provides funding are in compliance with the Operation Manual.

Based on letter No. S-760/PU/2013 dated October 30, 2013 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from WB regarding the extension of closing date of WB subordinated loan from December 31, 2013 to November 30, 2015.

Based on letter No. S-848/PR.2/2015 dated November 27, 2015 from Directorate General Financing Management and Risk of Ministry of Finance, the closing date of WB subordinated loan was extended again from November 30, 2015 to November 30, 2016.

The World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a second Subordinated Loan Agreement for the amount of USD200,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The exchange rate risk for this loan is borne by the Government of the Republic of Indonesia. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB

Subordinated Loan Agreement - ADB

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB - Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective on April 25, 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, dan metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and enviromental practices.
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB (lanjutan)

Subordinated Loan Agreement - ADB (continued)

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 November 2012.

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

Berdasarkan surat No. S-13/PU/2014 tertanggal 7 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari ADB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman ADB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2014.

Based on letter No. S-13/PU/2014 dated January 7, 2014 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company had obtained approval from ADB regarding the extension of closing date of ADB subordinated loan from December 31, 2013 to December 31, 2014.

Perjanjian Para Pendiri

The Founders Agreement

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

On June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

- Para pemegang saham pendiri bermaksud untuk menjadikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- Para pemegang saham pendiri bermaksud supaya Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp400.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp100.000 dengan para pemegang saham yang disebut penyertaan awal.

- The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.
- It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital of Rp400,000, and an initial issued share capital of Rp100,000 with the shareholders, known as initial subscription.

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

The Original Shareholders Agreement

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

The Founding Shareholders' intention is that:

- SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp600.000 (jumlah mana termasuk penyertaan bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi ("CSL") kepada Perusahaan dalam jumlah Rp559.700.

- SMI made an investment in the Company of Rp600,000 (such amount include SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of Rp559,700 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan Agreement ("CSL").

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal (lanjutan)

The Original Shareholders Agreement (continued)

- b. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan USD40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan USD40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan USD20.000.000.

- b. Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the *Founders' Agreement* and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to USD40,000,000 and in the case of ADB, to up to USD40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the *Founders Agreement* and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to USD20,000,000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana. Para Pemegang Saham mengetahui bahwa pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp100.000 dan (ii) perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp2.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat ijin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut.

It is the founding shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering. The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp100,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least Rp2,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license.

Untuk memperjelas pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

- i. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar lebih dari harga pengambilan bagian awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua); dan
- ii. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran efek baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran efek baru tersebut.

- i. *DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement); and*
- ii. *Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

Perubahan dan pernyataan kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp559.700 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

The amendment and restatement resulted in the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp559,700 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

Perubahan dan pernyataan kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap *Put Option*. Perubahan dan pernyataan kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu (1) tahun setelah tanggal efektif amandemen pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan *Put Option* berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk *Put* dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one (1) year after the first amendment effective date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Second Amendment of The Shareholders Agreement

Pada tanggal 16 November 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan modal awal yang disetor menjadi sebesar Rp200.000.

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Second Amended Shareholders Agreement. The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, would amount to Rp200,000.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 November 2011. Perjanjian Perubahan Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011. The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga (lanjutan)

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal.
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp192.500 termasuk agio saham sebesar Rp17.500. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

Akta Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akta Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai *trustee* untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* termasuk Gempa Bumi dan *Directors and Officers Liability* yang mencakup periode sampai 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang kembali.

Perjanjian Garansi Kredit - UPC Sidrap

Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan bersama dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") menandatangani perjanjian garansi kredit dimana Perusahaan akan menjamin kredit yang diberikan oleh Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") kepada Sidrap dengan nilai sampai dengan USD20.000.000. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 15 Juli 2033. Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan telah memberikan garansi kredit sebesar USD19.368.063 dan USD19.998.000.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement (continued)

- amended and restated the Original Shareholders Agreement.
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") signed a Share Subscription Agreement wherein SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp192,500 which included an additional paid-up capital premium of Rp17,500. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* including Earthquake and Director and Officer Liability covering the period until May 31, 2020 which can be extended.

Credit Guarantee Agreement - UPC Sidrap

On March 15, 2018, the Company together with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia and PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") signed credit guarantee agreement where the Company will guarantee the credit provided by Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") to Sidrap with total amount of up to USD20,000,000. This agreement has guarantee period until July 15, 2033. As of December 31, 2019 and December 31, 2018, the Company provides credit guarantee amounting to USD19,368,063 and USD19,998,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Garansi Obligasi yang Diterbitkan - Bali Towerindo Sentra

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perusahaan bersama PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") menandatangani perjanjian garansi obligasi yang diterbitkan dimana Perusahaan akan menjamin 50% dari jumlah pokok obligasi yang diterbitkan atau maksimum Rp800.000 dari pokok obligasi yang diterbitkan senilai Rp1.600.000. Pada saat penerbitan garansi, Perusahaan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada BTS untuk pembayaran kewajiban obligasi sampai dengan jumlah maksimum garansi. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 25 Januari 2025. Per tanggal 31 Desember 2019, obligasi belum efektif terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Bonds Issuance Guarantee Agreement - Bali Towerindo Sentra

On October 25, 2019, the Company together with PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") signed bond issuance guarantee of 50% from total outstanding of bonds issued or maximum Rp800,000 from outstanding bonds issued amounting to Rp1,600,000. On the issuance of guarantee, the Company agrees to provide loan facility to BTS for payment of bond obligations up to the maximum amount of the guarantee. This agreement has guarantee period until January 25, 2025. As of December 31, 2019, the bonds have not effectively been registered in Indonesia Stock Exchange.

33. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

33. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below show the categories and classes of financial instruments as of December 31, 2019 and 2018:

31 Desember/December 31, 2019							
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/ Assets held-to-maturity	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available-for-sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/ Liabilities at fair value	Total
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	2.429.067	-	-	-	-	-	2.429.067
Efek-efek	259.706	2.195.320	-	277.910	-	-	2.732.936
Investasi saham	-	-	389.636	-	-	-	389.636
Pinjaman diberikan - neto	6.232.662	-	-	-	-	-	6.232.662
Piutang bunga	62.905	-	-	-	-	-	62.905
Tagihan derivatif	-	-	44.290	-	-	-	44.290
Aset lain-lain - neto*)	12.737	-	-	-	-	-	12.737
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	(8.728)	-	(8.728)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	(37.985)	-	(37.985)
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	(39.670)	(39.670)
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	(2.183.064)	-	(2.183.064)
Pinjaman diterima	-	-	-	-	(4.713.745)	-	(4.713.745)
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	(3.142.918)	-	(3.142.918)
	8.997.077	2.195.320	433.926	277.910	(10.086.440)	(39.670)	1.778.123
							Other payables
							Accrued expenses and other liabilities
							Derivative liabilities
							Debt securities issued
							Fund borrowings
							Subordinated loans

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

33. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The table below show the categories and classes of financial instruments as of December 31, 2019 and 2018 (continued):

31 Desember/December 31, 2018							
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/ Assets held-to-maturity	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available-for-sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/ Liabilities at fair value	Total
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	582.361	-	-	-	-	-	582.361
Efek-efek	250.206	2.232.273	-	819.920	-	-	3.302.399
Investasi saham	-	-	364.841	-	-	-	364.841
Pinjaman diberikan - neto	5.721.389	-	-	-	-	-	5.721.389
Piutang bunga	41.246	-	-	-	-	-	41.246
Tagihan derivatif	-	-	76.350	-	-	-	76.350
Aset lain-lain - neto*)	13.681	-	-	-	-	-	13.681
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	(8.373)	-	(8.373)
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	(30.352)	-	(30.352)
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	(18.150)	(18.150)
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	(1.725.765)	-	(1.725.765)
Pinjaman diterima	-	-	-	-	(3.591.557)	-	(3.591.557)
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	(3.037.409)	-	(3.037.409)
	6.608.883	2.232.273	441.191	819.920	(8.393.456)	(18.150)	1.690.661

*) Aset lain-lain selain perangkat lunak komputer/Other assets except of computer softwares

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari aktivitas usahanya. Perusahaan juga mengadopsi suatu konsep manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh dengan parameter risiko yang terintegrasi yang meliputi antara lain manajemen risiko keuangan dan modal.

Pengawasan aktif atas aktivitas manajemen risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa Komite, dimana Komite Eksekutif di bawah pengawasan Direksi terdiri atas Komite Manajemen Risiko ("RMC"), Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") dan Dewan Direksi - Komite Investasi ("BoD-IC").

RMC adalah komite yang secara langsung berkaitan dengan manajemen atas risiko-risiko, yang membahas dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur termasuk pemantauan profil risiko dan mengawasi risiko Perusahaan secara keseluruhan. ALCO merupakan komite yang terkait dengan manajemen risiko dalam penentuan keputusan strategi manajemen atas aset dan liabilitas, penentuan suku bunga dan likuiditas, serta aspek lainnya dalam rangka manajemen atas aset dan liabilitas Perusahaan. BoD-IC merupakan komite yang memantau, menganalisis dan menghitung risiko kredit terkait dengan kegiatan investasi Perusahaan.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Company takes proactive measures to manage various risks that arise from its business activities. The Company also adopts an enterprise risk management concept with integrated risk parameters involving among others financial risk and capital risk management.

Active supervision on the Company's risk management activities are implemented through Committees of which the Executive Committee under the supervision of the Board of Directors consists of Risk Management Committee ("RMC"), Asset & Liabilities Committee ("ALCO") and Board of Directors - Investment Committee ("BoD-IC").

RMC is the committee directly related to the management of risks, which discusses and recommends policies and procedures as well as monitoring risk profile and managing the entire risks of the Company. ALCO is the risk management committee that is related with the decision making of asset and liabilities management strategy, designation of interest rate and liquidity, along with other aspects related to the management of the Company's assets and liabilities. BoD-IC is the committee that oversees, analyze and quantify credit risk exposure arising from the Company's investment activities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

a. Manajemen risiko modal

a. Capital risk management

Perusahaan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan operasi. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 21), agio saham (Catatan 22), penghasilan komprehensif lain dan saldo laba. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5), efek-efek (Catatan 6), investasi saham (Catatan 8) dan pinjaman diberikan (Catatan 9).

The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 21), additional paid-in capital (Note 22), other comprehensive income and retained earnings. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5), securities (Note 6), equity investments (Note 8) and loans (Note 9).

Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi persyaratan modal minimum.

Paid-up capital for the establishment of infrastructure financing company is set at least in the amount of Rp100,000. Infrastructure financing company shall increase its paid-up capital to at least Rp2,000,000 within 5 (five) years since the issuance of the business license. As of December 31, 2019 and 2018, the Company has fulfilled the minimum capital requirement.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

b. Financial risk management objectives and policies

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman tertentu yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Pengawasan Risiko ("ROC") untuk pedoman yang khusus terkait dengan risiko.

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, as well as for managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioners and Risk Oversight Committee ("ROC") for risk specific guidance.

i. Manajemen risiko mata uang asing

i. Foreign currency risk management

Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan sumber dana Perusahaan yang berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman komersil, dan juga dalam lingkup lebih kecil terkait dengan beberapa transaksi atas pendapatan dan beban usahanya yang didenominasi dalam mata uang asing.

The Company is exposed to foreign currency exchange rate fluctuation mainly due to the Company's funds which are denominated in United States Dollar from subordinated loan and commercial loan, and to a smaller extent from some of its foreign currency denominated transactions on its revenues and operating expenses.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, sebisa mungkin, keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Posisi mata uang asing bersih dikelola pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan struktur permodalan Perusahaan. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 31.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perusahaan melakukan analisis sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 10% dalam Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan, dimana 10% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan dalam pelaporan internal mengenai risiko mata uang asing dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing.

Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 10% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas terutama meliputi pinjaman diberikan yang diberikan Perusahaan kepada nasabah dan pinjaman eksternal yang didapatkan oleh Perusahaan dimana denominasi investasi adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional dari pemberi pinjaman atau peminjam.

Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba atau ekuitas dimana Rupiah menguat 10% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 10% dari Rupiah terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak berbanding terbalik pada laba atau ekuitas, sehingga saldo di bawah ini akan menjadi negatif (tidak diaudit).

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Foreign currency risk management (continued)

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balanced composition between financial assets and liabilities in foreign currency. The net open foreign currency position is managed at a low level compared to the Company's capital. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 31.

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the United States Dollar currency.

The Company conducted an analysis of the Company's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies, of which the 10% is the sensitivity rate used for internal reporting on foreign currency risk and represents management's assessment of the plausible change in foreign exchange rates.

The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis mainly includes loans disbursed by the Company to customers and external borrowings obtained by the Company where the denomination of the Company's investment is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

A positive number below indicates an increase in profit or equity where the Rupiah strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the Rupiah against the relevant currency, there would be an inverse impact on the profit or equity, thus the balances below would be negative (unaudited).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing
(lanjutan)

Analisis sensitivitas mata uang asing
(lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019
Laba rugi	+/(10.422)
Ekuitas	+/(10.422)

Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur terhadap saldo aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada akhir periode pelaporan.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas bukan sepenuhnya representasi dari risiko valuta asing yang melekat, karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

ii. Risiko harga lain

Perusahaan terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar efek-efek dan investasi saham yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") dan tersedia untuk dijual ("AFS").

Analisis sensitivitas harga efek-efek dan
investasi saham

Analisis sensitivitas berikut ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko nilai wajar efek-efek dan investasi saham pada akhir periode pelaporan.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika nilai wajar efek-efek dan investasi saham naik/turun 2%, maka (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Investasi saham	+/-7.793	+/-7.297
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	+/-5.558	+/-16.398

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Foreign currency risk management
(continued)

Foreign currency sensitivity analysis
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	
+/(100.997)		Profit or loss
+/(100.997)		Equity

This is mainly attributable to the exposure outstanding on United States Dollar denominated assets and liabilities in the Company at the end of the reporting period.

In management's opinion, the sensitivity analysis is not a full representation of the inherent foreign exchange risk, because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

ii. Other price risks

The Company is exposed to risk of fluctuation in quoted price of securities and equity investment classified at fair value through profit or loss ("FVTPL") and available-for-sale ("AFS").

Sensitivity analysis of securities and equity
investments prices

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to securities and equity investments fair value risks at the end of the reporting period.

The table below summarizes if securities and equity investments fair value had been 2% higher/lower, hence (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2018	
+/-7.297		Equity investments
+/-16.398		Gains/losses from changes in fair value of available-for-sale securities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang, serta pinjaman yang diberikan maupun aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*) akibat perubahan bunga di pasar.

Sedapat mungkin Perusahaan menyesuaikan bunga yang diberikan untuk pinjaman (baik tetap ataupun mengambang) dengan bunga sumber pembiayaannya. Sedangkan untuk investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), risiko tingkat bunga dikelola melalui pemantauan terhadap limit durasi secara portofolio yang dilakukan berkala.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga:

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

- b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Interest rate risk management

The Company is exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate, and loans as well as investment activity of idle funds, as a result of changes in market interest rate.

As much as practicable, the Company matches the interest rate for loans it extended (whether floating or fixed) with that of the funding source. Whereas for investment in idle funds, the interest rate risk is managed through periodical monitoring against the duration limit on portfolio basis.

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk:

31 Desember/December 31, 2019

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate					
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	2.429.062	-	-	-	5	2.429.067
Efek-efek	-	-	-	2.732.936	-	2.732.936
Investasi saham	-	-	-	-	389.636	389.636
Pinjaman diberikan - neto	114.645	536.444	3.731.479	1.850.094	-	6.232.662
Piutang bunga	-	-	-	-	62.905	62.905
Tagihan derivatif	-	-	-	-	44.290	44.290
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	12.737	12.737
Total aset keuangan	2.543.707	536.444	3.731.479	4.583.030	509.573	11.904.233
						Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	8.728	8.728
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	37.985	37.985
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	39.670	39.670
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	2.183.064	-	2.183.064
Pinjaman diterima	7.874	1.489.168	3.216.703	-	-	4.713.745
Pinjaman subordinasi	52.469	93.538	2.996.911	-	-	3.142.918
Total liabilitas keuangan	60.343	1.582.706	6.213.614	2.183.064	86.383	10.126.110
						Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	2.483.364	(1.046.262)	(2.482.135)	2.399.966	423.190	1.778.123
						Net interest repricing gap

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

iii. Interest rate risk management (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga:

The table below summarizes the Company's exposures to interest rate risk:

31 Desember/December 31, 2018

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	582.343	-	-	-	18	582.361	Cash and cash equivalents
Efek-efek	-	-	-	3.302.399	-	3.302.399	Securities
Investasi saham	-	-	-	-	364.841	364.841	Equity investment
Pinjaman diberikan - neto	145.670	327.797	3.558.482	1.689.440	-	5.721.389	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	41.246	41.246	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	-	-	76.350	76.350	Derivative receivable
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	13.681	13.681	Other assets - net
Total aset keuangan	728.013	327.797	3.558.482	4.991.839	496.136	10.102.267	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	8.373	8.373	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	30.352	30.352	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	18.150	18.150	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	1.725.765	-	1.725.765	Debt securities issued
Pinjaman diterima	8.960	-	3.082.597	500.000	-	3.591.557	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	46.946	84.288	2.906.175	-	-	3.037.409	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	55.906	84.288	5.988.772	2.225.765	56.875	8.411.606	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	672.107	243.509	(2.430.290)	2.766.074	439.261	1.690.661	Net interest repricing gap

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, maka (tidak diaudit):

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared using assumption that the balance of the liability at the end of the reporting period as the amount that was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to management and represents management's assessment of the plausible change in interest rates.

The table below summarizes if interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, hence (unaudited):

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)

Analisis sensitivitas suku bunga (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019
Pendapatan dan beban bunga	+/-6.775
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	+/-4.399

iv. Manajemen risiko kredit

Eksposur risiko kredit utama Perusahaan melekat pada dana tunai di rekening bank, penempatan pada efek-efek, serta pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Risiko kredit mengacu pada risiko kegagalan pihak rekanan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit atas pinjaman yang diberikan, keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur/perusahaan proyek dilakukan melalui proses kredit yang ekstensif yang membutuhkan penilaian, evaluasi dan persetujuan dari Komite Investasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada efek-efek dengan *underlying investment* yang mendapatkan peringkat kredit eksternal yang layak.

Berkaitan dengan penempatan dana tunai di rekening bank, Perusahaan hanya menempatkan dananya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat kredit eksternal yang layak. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

- b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Interest rate risk management
(continued)

Interest rate sensitivity analysis
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	
	+/-6.257	Interest income and expense
	+/-29.418	Gains/losses from changes in fair value of available-for-sale securities

iv. Credit risk management

The Company's main credit risk exposure is attributed to its cash in banks, placement in securities, and loans to debtors.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. In order to manage and minimize credit risk of loans, a decision to provide loans to debtors/project companies is made after going through extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation and approval process from Investment Committees of Boards of Directors and Commissioners.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on assets with underlying investment that has acceptable external credit rating.

In relation to funds placement at bank accounts, the Company only places its funds with credit worthy financial institutions that have acceptable external credit rating. The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses best represents the Company's exposure to credit risk.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018
Kas dan setara kas	2.429.067	582.361
Efek-efek	2.732.936	3.302.399
Investasi saham	389.636	364.841
Pinjaman diberikan - neto	6.232.662	5.721.389
Piutang bunga	62.905	41.246
Tagihan derivatif	44.290	76.350
Aset lain-lain - neto	12.737	13.681
	11.904.233	10.102.267

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, eksposur maksimal risiko kredit sebelum agunan yang diterima atau perangkat kredit lain adalah ekuivalen dengan jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan. Agunan yang diterima dan peningkatan kredit lain dijelaskan di Catatan 9.

Tidak terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat saling hapus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama berasal dari potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset keuangan Perusahaan dengan liabilitas keuangannya. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana simpanan, memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor arus kas perkiraan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit.

Untuk mengelola risiko likuiditas jangka pendek, Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Credit risk management (continued)

Cash and cash equivalents
Securities
Equity investments
Loans - net
Accrued interest income
Derivative receivable
Other assets - net

As of December 31, 2019 and 2018, the maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements is equivalent to the carrying amounts of the Company's financial assets. The collateral and other credit enhancements are described in Note 9.

There are no financial asset and financial liability subject to offsetting as of December 31, 2019 and 2018.

v. Liquidity risk management

Liquidity risk mainly arises from the potential maturity mismatch between the Company's financial assets and liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve funds, obtaining additional borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against limit.

In managing short-term liquidity risk, the Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

v. Liquidity risk management (continued)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember/December 31, 2019

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	2.429.067	-	-	-	-	-	-	2.429.067
Efek-efek/Securities	-	-	250.661	712.013	436.628	694.188	639.446	2.732.936
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	-	389.636	-	-	389.636
Pinjaman diberikan/Loans	145.632	150.635	433.496	1.409.767	1.060.484	1.893.585	1.312.612	6.406.211
Piutang bunga/Accrued interest income	62.905	-	-	-	-	-	-	62.905
Tagihan derivatif/ Derivative receivable	-	-	-	-	44.290	-	-	44.290
Aset lain-lain/ Other assets	25.793	-	-	-	-	-	-	25.793
	<u>2.663.397</u>	<u>150.635</u>	<u>684.157</u>	<u>2.121.780</u>	<u>1.931.038</u>	<u>2.587.773</u>	<u>1.952.058</u>	<u>12.090.838</u>
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	8.728	-	-	-	-	-	-	8.728
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	37.985	-	-	-	-	-	-	37.985
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	-	-	-	-	17.585	22.085	-	39.670
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	15.858	-	960.914	620.050	586.242	-	-	2.183.064
Pinjaman diterima/ Fund borrowings	7.874	-	1.489.168	1.836.640	690.031	690.032	-	4.713.745
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	52.469	39.894	53.644	233.631	268.249	1.018.061	1.476.970	3.142.918
	<u>122.914</u>	<u>39.894</u>	<u>2.503.726</u>	<u>2.690.321</u>	<u>1.562.107</u>	<u>1.730.178</u>	<u>1.476.970</u>	<u>10.126.110</u>
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	2.540.483	110.741	(1.819.569)	(568.541)	368.931	857.595	475.088	1.964.728

31 Desember/December 31, 2018

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	582.361	-	-	-	-	-	-	582.361
Efek-efek/Securities	-	-	-	861.058	1.027.543	449.958	963.840	3.302.399
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	-	364.841	-	-	364.841
Pinjaman diberikan/Loans	372.175	144.510	242.245	1.473.594	996.369	1.743.422	916.634	5.888.949
Piutang bunga/Accrued interest income	41.246	-	-	-	-	-	-	41.246
Tagihan derivatif/ Derivative receivable	76.350	-	-	-	-	-	-	76.350
Aset lain-lain/Other assets	30.776	-	-	-	-	-	-	30.776
	<u>1.102.908</u>	<u>144.510</u>	<u>242.245</u>	<u>2.334.652</u>	<u>2.388.753</u>	<u>2.193.380</u>	<u>1.880.474</u>	<u>10.286.922</u>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

v. Liquidity risk management (continued)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2018								
	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	8.373	-	-	-	-	-	-	8.373
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	30.352	-	-	-	-	-	-	30.352
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	18.150	-	-	-	-	-	-	18.150
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	28.489	-	1.023.235	249.645	424.396	-	-	1.725.765
Pinjaman diterima/ Fund borrowing	508.960	-	-	3.082.597	-	-	-	3.591.557
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	46.946	32.021	52.267	227.909	261.090	914.140	1.503.036	3.037.409
	641.270	32.021	1.075.502	3.560.151	685.486	914.140	1.503.036	8.411.606
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	461.638	112.489	(833.257)	(1.225.499)	1.703.267	1.279.240	377.438	1.875.316

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flow* per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The remaining contractual maturities of the liabilities based on *undiscounted cashflows* as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember/December 31, 2019						
	0 - 3 bulan/ months	>3 - 6 bulan/ months	>6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	8.373	-	-	-	8.373	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	30.352	-	-	-	30.352	Accrued expense and other liabilities
Liabilitas derivatif	18.150	-	-	-	18.150	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	41.711	41.711	1.048.422	1.440.669	2.572.513	Debt securities issued
Pinjaman diterima	32.539	45.903	39.012	4.544.961	4.662.415	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	59.292	43.585	104.735	4.003.565	4.211.177	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	190.417	131.199	1.192.169	9.989.195	11.502.980	Total financial liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan, mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dicatat berdasarkan tingkat bunga pasar.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya berasal dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements is a close estimation of their fair values, both for those that have short term maturities as well as those that carry at market rates of interest.

The significant assumptions used in determining the fair value of financial assets and liabilities are set out below.

Fair value measurements recognized in the statement of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments as of December 31, 2019 and 2018 that grouped into Level 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

31 Desember/December 31, 2019						
Nilai wajar/Fair value						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual						Financial asset at available-for-sale
Efek-efek	277.910	277.910	-	-	277.910	Securities
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						Financial asset at FVTPL
Investasi saham	389.636	389.636	-	-	389.636	Equity investments
Tagihan derivatif	44.290	-	44.290	-	44.290	Derivative receivable
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturity
Efek-efek	2.195.320	2.224.005	-	-	2.224.005	Securities
	2.907.156	2.891.551	44.290	-	2.935.841	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar						Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	39.670	-	39.670	-	39.670	Derivative liabilities
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	2.216.880	-	-	2.216.880	Debt securities issued
	2.222.734	2.216.880	39.670	-	2.256.550	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

31 Desember/December 31, 2018						
Nilai wajar/Fair value						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual						Financial asset at available-for-sale
Efek-efek	819.920	819.920	-	-	819.920	Securities
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						Financial asset at FVTPL
Investasi saham	364.841	364.841	-	-	364.841	Equity investments
Tagihan derivatif	76.350	-	76.350	-	76.350	Derivative receivable
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturity
Efek-efek	2.232.273	2.089.643	-	-	2.089.643	Securities
	3.493.384	3.274.404	76.350	-	3.350.754	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar						Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	18.150	-	18.150	-	18.150	Derivative liabilities
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Surat utang yang diterbitkan	1.725.765	1.711.921	-	-	1.711.921	Debt securities issued
	1.743.915	1.711.921	18.150	-	1.730.071	

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (termasuk sukuk yang diukur biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Fair values of certain financial assets and liabilities other than held-to-maturity (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Nilai wajar dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (termasuk sukuk yang diukur biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Fair value of financial instruments (continued)

The fair value of held-to-maturity (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

35. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

35. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments information concerning the main segments as set out as follows:

	31 Desember/December 31, 2019				
	Produk Investasi/ Investment products	Produk Tresuri/ Treasury products	Jasa Advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	643.994	142.377	-	786.371	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	37.490	-	-	37.490	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	4.067	-	4.067	Realized gain from sale of securities
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham	1.010	-	-	1.010	Realized gain from sale of equity investment
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	5.781	-	5.781	Realized gain from derivative transaction
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	8.745	-	8.745	Unrealized gain from changes in fair value of derivative transaction
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar investasi saham	24.795	-	-	24.795	Unrealized gain from the fair value of equity investment
Kerugian belum direalisasi dari nilai wajar opsi saham	(22.655)	-	-	(22.655)	Unrealized loss from the fair value of shares option
Pendapatan jasa advisory	-	-	8.059	8.059	Advisory income
Pendapatan lainnya	728	-	-	728	Other income
Beban bunga	(505.208)	(120.945)	-	(626.153)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(31.945)	(35.647)	(9.176)	(76.768)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(5.403)	-	358	(5.045)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(114.021)	Unallocated expenses - net
Rugi sebelum manfaat pajak	142.806	4.378	(759)	32.404	Loss before tax benefit

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut (lanjutan):

35. OPERATING SEGMENT (continued)

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments information concerning the main segments as set out as follows (continued):

	31 Desember/December 31, 2018				
	Produk Investasi/ Investment products	Produk Tresuri/ Treasury products	Jasa Advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	586.223	144.296	-	730.519	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	30.849	-	-	30.849	Provision and commission income
Kerugian yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	(881)	-	(881)	Realized loss from sale of securities
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	45.534	-	45.534	Realized gain from derivative transaction
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	(8.745)	-	(8.745)	Unrealized loss from changes in fair value of derivative transaction
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar investasi saham	(65.552)	-	-	(65.552)	Unrealized loss from the fair value of equity investment
Keuntungan belum direalisasi dari nilai wajar opsi saham	66.946	-	-	66.946	Unrealized gain from the fair value of shares option
Pendapatan jasa advisory	-	-	12.409	12.409	Advisory income
Pendapatan lainnya	2.764	-	-	2.764	Other income
Beban bunga	(473.303)	(159.541)	-	(632.844)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(35.825)	(34.522)	(10.265)	(80.612)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(22.841)	-	(4.501)	(27.342)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(119.742)	Unallocated expenses - net
Rugi sebelum manfaat pajak	89.261	(13.859)	(2.357)	(46.697)	Loss before tax benefit

36. LABA/(RUGI) PER SAHAM

Berikut adalah perhitungan laba/(rugi) bersih per saham dasar:

36. GAIN/(LOSS) PER SHARE

The following presents the computations of basic income/(loss) per share:

	31 Desember/December 31,			
	Rugi bersih tahun berjalan/ Net loss for the year	Rata-rata Tertimbang jumlah saham dasar/ Weighted average number of ordinary shares outstanding	Rugi per saham/ Loss per share (Dalam ribuan Rupiah/ thousands of Rupiah)	Years
Tahun				
2019	15.976	2.000.000	8	2019
2018	(42.948)	2.000.000	(21)	2018

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Kenaikan/(penurunan) efek-efek tersedia untuk dijual dari perubahan nilai wajar	33.196	(49.143)	Increase/(decrease) in available-for-sale securities from changes in fair value
Kenaikan aset lain-lain dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	617	889	Increase in other assets through accrued expense and other liabilities
Kenaikan aset tetap dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	96	Increase in fixed assets through accrued expense and other liabilities
Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:			Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2019	
Surat utang yang diterbitkan	1.725.765	475.000	-	(17.701)	2.183.064	Debt securities issued
Pinjaman diterima	3.591.557	1.177.250	(37.150)	(17.912)	4.713.745	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	3.037.409	199.502	(107.530)	13.537	3.142.918	Subordinated loans
	8.354.731	1.851.752	(144.680)	(22.076)	10.039.727	
	1 Januari/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2018	
Surat utang yang diterbitkan	1.521.722	200.000	-	4.043	1.725.765	Debt securities issued
Pinjaman diterima	6.544.571	(3.215.150)	195.950	66.186	3.591.557	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi	2.622.652	233.201	180.783	773	3.037.409	Subordinated loans
	10.688.945	(2.781.949)	376.733	71.002	8.354.731	

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 per tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Bapak Harold J.D. Tjiptadjaja sebagai Direktur Investasi Perusahaan dan Bapak M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on Decree No. 23 of Circulation Resolution of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 10, 2020 of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, the Shareholders approved the resignation of Mr. Harold J. D. Tjiptadjaja as Investment Director of the Company and Mr. M. Chatib Basri as President Commissioner of the Company.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

39. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements are the responsibilities of the management and were approved and authorized for issue by the Directors on February 14, 2020.

2019

Laporan Tahunan
Annual Report



Prosperity Tower 53rd – 55th Floor, District 8
Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia

Phone : (+62) 21 5082 6600
Fax : (+62) 21 5082 6601
Email : info@iif.co.id

www.iif.co.id